



# **QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2018**

## **TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2018**



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA LANGSA TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
18. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032

(Lembaran ...

(Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan  
Lembaran Kota Langsa Nomor 429);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA LANGSA TAHUN  
2017-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 yang selanjutnya disingkat RPJP Kota Langsa adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2027.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disingkat RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Langsa untuk periode 5 (lima) tahunan

yang ...



yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Langsa dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta memerhatikan RPJM Aceh.

11. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Langsa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan.
16. Sasaran adalah target capaian pembangunan untuk merumuskan kebijakan.

## BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

### Pasal 2

- (1) RPJM Kota Langsa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kota Langsa dengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Langsa untuk melaksanakan Program Pembangunan yang meliputi strategi, arah kebijakan Pembangunan serta kebijakan keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Langsa dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- (3) Rincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### Pasal 3

- (1) RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	: PENUTUP
- (2) Perincian RPJM Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 4

- (1) RPJM Kota Langsa menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota Langsa, Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa, dan Rencana Kerja Perangkat Kota Langsa serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa.
- (2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBK setiap tahun.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Langsa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota Langsa.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota Langsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP



#### Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 7 Maret 2018 M  
19 Rabiul Akhir 1439 H

 WALIKOTA LANGSA, 

  
 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 7 Maret 2018 M  
19 Rabiul Akhir 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (7/23/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA LANGSA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan tuntutan dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan politik dan aspiratif.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan dan penawaran rencana pembangunan, dan rakyat memilih serta menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Langsa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kota Langsa 2017-2022.

Sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/walikota dan wakil bupati/walikota dilantik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Kota Langsa juga memperhatikan hasil evaluasi RPJM Daerah Kota Langsa sebelumnya, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Langsa serta memperhatikan RPJM Aceh. RPJM Daerah Kota Langsa juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Langsa dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan diacu untuk menyusun Rencana Kinerja Perangkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif,



politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

DAFTAR SINGKATAN

ADHB	:	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	:	Atas Dasar Harga Konstan
AFP	:	<i>Acute Flaccid Paralysis</i>
AIDS	:	<i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKHB	:	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
AL	:	Angka Kelulusan
AMH	:	Angka Melek Huruf
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBK	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
ASFR	:	<i>Age Spesific Fertility Rates</i>
ASI	:	Air Susu Ibu
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
Balita	:	Bawah Lima Tahun
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BCG	:	<i>Bacillus Calmette Guerin</i>
BKB	:	Bina Keluarga Balita
BKL	:	Bina Keluarga Lansia
BKR	:	Bina Keluarga Remaja
BPJS	:	Badan Pengelola Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	:	Bank Pembiayaan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BTA	:	Bakteri Tahan Asam
BTS	:	<i>Base Transceiver Station</i>
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMG	:	Badan Usaha Milik Gampong
Bumil	:	Ibu Hamil
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUMS	:	Badan Usaha Milik Swasta
BUP	:	Batas Usia Pensiun
C	:	<i>Celcius</i>
CABOR	:	Cabang Olah Raga
CBD	:	<i>Central Business District</i>
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Curanmor	:	Pencurian Kendaraan Bermotor
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DBD	:	Demam Berdarah <i>Dengue</i>

Dekranasda	:	Dewan Kerajinan Nasional Daerah
DI	:	Daerah Irigasi
Diklat	:	Pendidikan dan Pelatihan
Diklatpim	:	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
DII	:	Dan lain-lain
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kota
DPT	:	Difteri, Pertusis, Tetanus
DUK	:	Daftar Urut Kepegawaian
D-IV	:	Diploma IV
Ha	:	Hektar
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
HIV	:	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hak Pakai
HP	:	<i>Handphone</i>
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
IB	:	Indeks Bayar
IDG	:	Indeks Pemberdayaan Gender
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKK	:	Indikator Kinerja Kunci
IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	:	Industri Kecil Menengah
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPG	:	Indeks Pembangunan Gender
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IT	:	Indeks Terima
K3	:	Ketertiban, Ketentraman, Keindahan
K4	:	Kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke empat
KAI	:	Kereta Api Indonesia
Kanrantibmas	:	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Karis	:	Kartu Istri
Karpeg	:	Kartu Pegawai
Karsu	:	Kartu Suami
KASIBA	:	Kawasan Siap Bangun
KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
KB	:	Keluarga Berencana
KBKR	:	Kelompok Bimbingan Konseling Remaja
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEK	:	Kurang Energi Kronis
Kg	:	Kilogram

KIA	:	Kesehatan Ibu dan Anak
KIE	:	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KIP	:	Komisi Independen Pemilihan
KK	:	Kepala Keluarga
KKN	:	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Km	:	Kilometer
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
Kopalmas	:	Koperasi Palma Aceh Sejahtera
KOTAKU	:	Kota Tanpa Kumuh
KRP	:	Kebijakan, Rencana dan Program
KtA	:	Kekerasan terhadap Anak
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KtP	:	Kekerasan terhadap Perempuan
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
KUBE	:	Kelompok Usaha Bersama
Lansia	:	Lanjut Usia
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LLAJ	:	Lalu Lintas Angkutan Jalan
LPP	:	Laju Pertumbuhan Penduduk
LPPD	:	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
M	:	Meter
MA	:	Madrasah Aliyah
MAA	:	Majelis Adat Aceh
MICE	:	<i>Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition</i>
Migas	:	Minyak dan Gas
Miras	:	Minuman Keras
MKJP	:	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
mm	:	Millimeter
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
MP3EI	:	Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MPD	:	Majelis Pendidikan Daerah
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
Musrenbang	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
M <sup>2</sup>	:	Meter Persegi
M <sup>3</sup>	:	Meter Kubik
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
Noreg	:	Nomor Registrasi
NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
N/A	:	<i>Not Available</i>



OKP	:	Organisasi Kepemudaan
Ormas	:	Organisasi Masyarakat
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAPS	:	Pensiun Atas Permintaan Sendiri
PATEN	:	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDRN	:	Produk Domestik Regional Netto
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Pemilukada	:	Pemilihan Umum Kepala Daerah
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkada	:	Peraturan Kepala Daerah
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PHBI	:	Peringatan Hari Besar Islam
PHBS	:	Pola Hidup Bersih dan Sehat
PHBN	:	Peringatan Hari Besar Nasional
PKB	:	Penyuluh Keluarga Berencana
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKJP	:	Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang
PKK	:	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKT	:	Pusat Krisis Terpadu
PLKB	:	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polindes	:	Poliklinik Desa
Polri	:	Polisi Republik Indonesia
Poskesdes	:	Pos Kesehatan Desa
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPKBD	:	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
PPKS	:	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
Prov	:	Provinsi
PSK	:	Pekerja Seks Komersial
PT	:	Perseroan Terbatas
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTP	:	Perseroan Terbatas Perkebunan
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
Pungli	:	Pungutan Liar
PUS	:	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu

RA	:	<i>Raudhatul Athfal</i>
RAPBD	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Raskin	:	Beras Untuk Rumah tangga Miskin
RAT	:	Rapat Anggota Tahunan
Renstra	:	Rencana Strategi
Renstra-Perangkat Daerah	:	Rencana Strategis Perangkat Daerah
RI	:	Republik Indonesia
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKPK	:	Rencana Kerja Pemerintah Kota
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMK	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPDesa	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPLH	:	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPTRA	:	Ruang Publik Terbuka Ramah Anak
RSB	:	Rumah Sakit Bersalin
RSIA	:	Rumah Sakit Ibu dan Anak
RSU	:	Rumah Sakit Umum
RT	:	Rumah Tangga
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWK	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Satpol PP dan WH	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
SD	:	Sekolah Dasar
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Setwan	:	Sekretariat Dewan
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMDA	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIPD	:	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SIUP	:	Surat Izin Usaha Perdagangan
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMS	:	<i>Short Message Service</i>
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPA	:	Stasiun Peralihan Sampah
Siskamling	:	Sistem Keamanan Lingkungan
SWT	:	<i>Subhanahu wa Ta'ala</i>
S1	:	Strata Satu

S2	:	Strata Dua
S3	:	Strata Tiga
Taspen	:	Tabungan dan Asuransi Pensiun
TBC	:	<i>Tuberculosis</i>
TDUP	:	Tanda Daftar Usaha Perdagangan
TFR	:	<i>Total Fertility Rate</i>
TK	:	Taman Kanak-kanak
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TPA	:	Tempat Pengajian Alquran
TPA	:	Tempat Penitipan Anak
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPS	:	Tempat Pembuangan Sampah
TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPT	:	Tingkat Pendidikan Terakhir
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPU	:	Tempat Pemakaman Umum
UCI	:	<i>Universal Child Immunization</i>
UKBM	:	Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNSAM	:	Universitas Samudera
UPPKS	:	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UU	:	Undang-Undang
UUPA	:	Undang-Undang Pemerintahan Aceh
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WMK	:	Wilayah Manajemen Kebakaran
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR SINGKATAN .....	i
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I     PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-12
1.5. Maksud dan Tujuan .....	I-13
BAB II    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-18
2.3. Aspek Layanan Umum.....	II-29
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-70
BAB III   GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-20
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III-28
BAB IV   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2. Isu Strategis .....	IV-7
BAB V    VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	V-1
5.1. Visi.....	V-1
5.2. Misi.....	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-4
BAB VI   STRATEGI,   ARAH   KEBIJAKAN   DAN   PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI-1
BAB VII   KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....	VII-1
BAB VIII  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	VIII-1
BAB IX    PENUTUP .....	IX-1



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kota Langsa ..... I-4
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah..... I-8
Gambar 1.3	Hubungan antara RPJMD Kota Langsa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... I-11
Gambar 2.1	Peta Kota Langsa ..... II-1
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Kota Langsa ..... II-4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Kota Langsa ..... II-5
Gambar 2.4	Peta Daerah Irigasi..... II-7
Gambar 2.5	Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim ..... II-8
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa ..... II-9
Gambar 2.7	Peta Rawan Bencana Kota Langsa..... II-18
Gambar 5.1	Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025 ..... V-22

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1	Persentase Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Langsa ..... II-2
Grafik 2.2	Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Jiwa) ..... II-12
Grafik 2.3	Jumlah Rumah Tangga Kota Langsa Tahun 2012-2016 ..... II-13
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Langsa Tahun 2012-2016 (Persen)..... II-19
Grafik 2.5	Laju Implisit (Inflasi) Kota Langsa Tahun 2012-2015 (Persen)..... II-21
Grafik 2.6	PDRB per Kapita ADHB Kota Langsa Tahun 2012-2015 (juta rupiah) ..... II-22
Grafik 2.7	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Langsa Tahun 2012-2016 ..... II-23
Grafik 2.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Langsa Tahun 2012-215 ..... II-24
Grafik 2.9	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen)..... II-25
Grafik 2.10	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Tahun)..... II-25
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Tahun)..... II-26
Grafik 2.12	Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Bayi) ..... II-27
Grafik 2.13	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/SLTP/SLTA Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen) ..... II-31
Grafik 2.14	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/ SLTP/SLTA Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Persen)..... II-32
Grafik 2.15	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2016 Kota Langsa ..... II-46
Grafik 2.16	Indeks Pembangunan Gender Kota Langsa Tahun 2012-2015 ..... II-52

Grafik 2.17	Jumlah Kasus Kekerasan Rumah Tangga Tahun 2013-2016 Kota Langsa .....	II-53
Grafik 2.18	Kontribusi Sektor Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen).....	II-63
Grafik 2.19	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa, Perikanan Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen).....	II-64
Grafik 2.20	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen).....	II-65
Grafik 2.21	Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik Terhadap PDRB Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen).....	II-66
Grafik 2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen).....	II-67
Grafik 2.23	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen) .....	II-68
Grafik 2.24	Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012-2015 Kota Langsa .....	II-81
Grafik 3.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-3
Grafik 3.2	Proporsi Realisasi Rata-Rata Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-3
Grafik 3.3	Realisasi Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-4
Grafik 3.4	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-4
Grafik 3.5	Proporsi Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-5
Grafik 3.6	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-6
Grafik 3.7	Perkembangan Realisasi Aset Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-11
Grafik 3.8	Perkembangan Realisasi Kewajiban Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-12

Grafik 3.9	Perkembangan Realisasi Ekuitas Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-12
Grafik 3.10	Perkembangan <i>Current Ratio</i> Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-18
Grafik 3.11	Perkembangan <i>Quick Ratio</i> Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-19
Grafik 3.12	Perkembangan <i>Debt to Asset Ratio</i> Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-19
Grafik 3.13	Perkembangan <i>Debt to Equity Ratio</i> Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-20
Grafik 3.14	Perkembangan Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-21
Grafik 3.15	Perkembangan Realisasi Surplus/Defisit Rill Anggaran Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-22
Grafik 3.16	Realisasi Penggunaan SiLPA Kota Langsa Tahun Anggaran 2015 .....	III-24
Grafik 3.17	Target Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-28
Grafik 3.18	Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-29
Grafik 3.19	Target Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-29
Grafik 3.20	Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-30
Grafik 3.21	Perkembangan Target Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-30
Grafik 3.22	Perkembangan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-36



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Administrasi Kota Langsa Dirinci per Kecamatan dan Gampong .....	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2016.....	II-12
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa Tahun 2012-2016 (Persen) .....	II-20
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2016 di Kota Langsa.....	II-27
Tabel 2.5	Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-28
Tabel 2.6	Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-28
Tabel 2.7	Jumlah Pesantren, Ustadz dan Santri Tahun 2012-2015 Kota Langsa.....	II-29
Tabel 2.8	Jumlah Indikator Pelaksanaan Syariat Islam Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-30
Tabel 2.9	Rasio Posyandu Per Satuan Bayi Tahun 2012-2016 Kota Langsa .....	II-33
Tabel 2.10	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Langsa Tahun 2012-2016.....	II-34
Tabel 2.11	Jumlah Rumah Sakit di Kota Langsa Tahun 2012-2016 .....	II-35
Tabel 2.12	Rasio Dokter Tahun 2012-2016 Kota Langsa .....	II-35
Tabel 2.13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016 Kota Langsa .....	II-36
Tabel 2.14	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2014-2016 di Kota Langsa .....	II-36
Tabel 2.15	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2014-2016 di Kota Langsa .....	II-37
Tabel 2.16	Cakupan Desa UCI ( <i>Universal Child Immunization</i> ) Tahun 2014-2016 di Kota Langsa.....	II-37

Tabel 2.17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2014-2016 di Kota Langsa .....	II-38
Tabel 2.18	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2014-2016 di Kota Langsa .....	II-38
Tabel 2.19	Cakupan Puskesmas dan Pustu Tahun 2014-2016 di Kota Langsa.....	II-39
Tabel 2.20	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-39
Tabel 2.21	Perkembangan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Tahun 2013-2016 Kota Langsa .....	II-40
Tabel 2.22	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-40
Tabel 2.23	Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-41
Tabel 2.24	Pola Ruang Eksisting Kota Langsa Tahun 2016 .....	II-42
Tabel 2.25	Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-43
Tabel 2.26	Luas Jaringan Irigasi Tahun 2013-2016 Kota Langsa .....	II-43
Tabel 2.27	Perkembangan Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-44
Tabel 2.28	Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2012-2016 Kota Langsa .....	II-45
Tabel 2.29	Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2012-2016 Kota Langsa .....	II-45
Tabel 2.30	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-45
Tabel 2.31	Perkembangan Tempat Ibadah Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-46
Tabel 2.32	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-47
Tabel 2.33	Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Petugas Linmas Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-48

Tabel 2.34	Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban Tahun 2013-2015 Kota Langsa.....	II-48
Tabel 2.35	Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Dibiayai Tahun 2013-2015 Kota Langsa.....	II-49
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2012-2015 Kota Langsa.....	II-50
Tabel 2.37	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2015 Kota Langsa.....	II-51
Tabel 2.38	Jumlah Produksi Daging Ternak Tahun 2012-2015 Kota Langsa .....	II-51
Tabel 2.39	Perkembangan Partisipasi Perempuan Tahun 2013-2016 Kota Langsa .....	II-53
Tabel 2.40	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Tahun 2012-2016 di Kota Langsa .....	II-54
Tabel 2.41	Banyaknya Kegiatan Pelayanan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Langsa Tahun 2015.....	II-55
Tabel 2.42	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2012-2016 Kota Langsa.....	II-55
Tabel 2.43	Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-56
Tabel 2.44	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-57
Tabel 2.45	Perkembangan Rasio Akseptor KB Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-57
Tabel 2.46	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-58
Tabel 2.47	Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-59
Tabel 2.48	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-60
Tabel 2.49	Perkembangan Indikator Perpustakaan Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-61
Tabel 2.50	Perkembangan Indikator Kepegawaian Tahun 2013-2016 Kota Langsa.....	II-70

Tabel 2.51	Pengeluaran Rata-Rata Makanan dan Non Makanan Per Kapita Tahun 2013-2015 Kota Langsa .....	II-71
Tabel 2.52	Rincian Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Barang Selama 1 (satu) Bulan Tahun 2013-2015 Kota Langsa (Rupiah) .....	II-71
Tabel 2.53	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2016 Provinsi Aceh (Persen) .....	II-72
Tabel 2.54	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen) .....	II-73
Tabel 2.55	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2012-2016 Kota Langsa .....	II-74
Tabel 2.56	Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2012-2016 Kota Langsa .....	II-74
Tabel 2.57	Angka Kriminalitas Kota Langsa Tahun 2015 .....	II-75
Tabel 2.58	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Langsa Tahun 2012-2015 .....	II-76
Tabel 2.59	Perkembangan Indikator Pelayanan Perizinan Tahun 2013-2016 Kota Langsa .....	II-76
Tabel 2.60	Jumlah Bank dan Kantor Bank Tahun 2016 Kota Langsa .....	II-77
Tabel 2.61	Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Pada Akomodasi Tahun 2016 Kota Langsa .....	II-78
Tabel 2.62	Ketaatan Terhadap RTRW, Wilayah Produktif, Wilayah Industri, Wilayah Kebanjiran, Wilayah Kekeringan dan Wilayah Perkotaan Tahun 2012-2016 Kota Langsa .....	II-79
Tabel 2.63	Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan Tahun 2012-2015 Kota Langsa .....	II-80
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-7
Tabel 3.2	Rata-Rata Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-13
Tabel 3.3	Perkembangan <i>Balance Sheet Ratio</i> Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2016 .....	III-20
Tabel 3.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-21

Tabel 3.5	Surplus/Defisit Rill Anggaran Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-23
Tabel 3.6	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-25
Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Langsa Tahun 2013-2017 .....	III-27
Tabel 3.8	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-31
Tabel 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-37
Tabel 3.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	III-39
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 Berdasarkan Misi.....	V-4
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Langsa Tahun 2017-2022 .....	VI-2
Tabel 6.2	Tema Pembangunan Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	VI-25
Tabel 6.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2018 .....	VI-26
Tabel 6.4	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2019.....	VI-34
Tabel 6.5	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2020.....	VI-42
Tabel 6.6	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2021 .....	VI-51
Tabel 6.7	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2022 .....	VI-61
Tabel 6.8	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	VI-70
Tabel 6.9	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018-2022.....	VI-71
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Kota Langsa .....	VII-2

Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	VII-3
Tabel 7.3	Rencana Program Prioritas Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022.....	VII-17
Tabel 7.4	Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kota Langsa yang dibiayai melalui sumber pendanaan OTSUS/APBA/APBN.....	VII-39
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Langsa.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Langsa Tahun 2018-2022 .....	VIII-6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan diperlukan untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilukada, pada tanggal 4 Juli 2017 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa telah menetapkan pasangan calon Tgk. Usman Abdullah, SE dan Drs. Marzuki Hamid, MM, sebagai calon terpilih dan dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Langsa periode 2017-2022 pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh Gubernur Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri melalui sidang paripurna istimewa DPRK Langsa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan dan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat dan dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah wajib dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan berpedoman kepada RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sehingga RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan lainnya di Kota Langsa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2017–2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang serta disinergikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai rekomendasi rumusan mitigasi/adaptasi dan atau alternatif terhadap kebijakan, rencana dan program guna meminimalkan potensi terhadap dampak lingkungan yang diperkirakan muncul. Dalam penyusunan RPJM Kota Langsa Tahun 2017–2022, Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan



suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program dengan menghasilkan dan memastikan segala pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program pemerintah minim dampak lingkungan, menjamin keberlanjutan, dan dapat mendorong peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

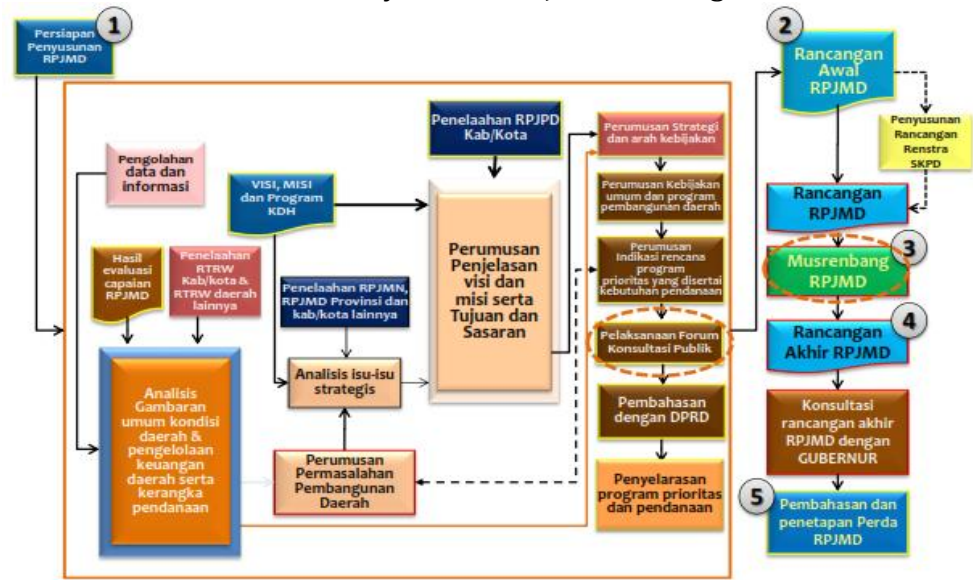
Penyusunan RPJM Kota Langsa Tahun 2017–2022, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
3. Pendekatan politis, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJM;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-Up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Sedangkan pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRK Langsa, yang mengacu pada ketentuan pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan RPJM Kota Langsa



Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis yaitu:

1. RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan media untuk mengimplementasikan janji pasangan Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan pedoman pembangunan daerah dan penyelarasan dengan pembangunan nasional, Aceh, dan daerah perbatasan selama 5 (lima) tahun ke depan.
3. RPJM Kota Langsa tahun 2017-2022 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), keberadaannya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi satuan evaluasi dan pengawas.

5. RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun.
6. RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, dialog yang melibatkan *stakeholder* dan pemangku kepentingan, analisis gambaran umum daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan indikatif, perumusan permasalahan pembangunan daerah, hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kota Langsa untuk mewujudkan arah dan tindakan dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

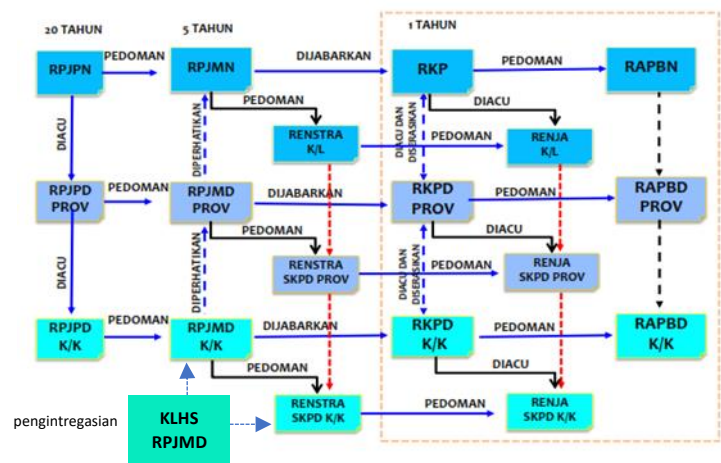
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
19. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032;
20. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Aceh. Penyusunan RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Aceh 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa Tahun 2007-2027 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa Tahun 2012-2032. Agar RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJM daerah lain dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya, RPJM Kota Langsa menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah).

Gambar 1.2  
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya adalah sebagai berikut:

1. *RPJM Kota Langsa dengan RPJPD Kota Langsa*

RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJP Tahun 2007-2027. Oleh sebab itu, penyusun RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Langsa periode 2017-2022, juga berpedoman kepada RPJP Kota Langsa Tahun 2007-2027 dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

2. *RPJM Kota Langsa dengan Renstra Perangkat Daerah*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 109 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersama dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD dengan tujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan.

### *3. RPJM Kota Langsa dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*

Pelaksanaan RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Langsa yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Langsa yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJM Kota Langsa, RPJMD Provinsi Aceh, serta RPJM Nasional. RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

### *4. Hubungan RPJMD Dengan KLHS Kota Langsa*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS yang disusun Pemerintah Kota Langsa adalah suatu dokumen telaah (*assessment document*) yang disertai dengan rekomendasi terhadap isu-isu lingkungan hidup dari kebijakan, rencana atau program yang telah tersusun/terlaksana salah satunya adalah RPJM Kota Langsa. Rekomendasi tersebut umumnya berupa kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Kota Langsa untuk meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan proposional di seluruh wilayah atau difokuskan pada lokasi yang relatif tertinggal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan, material dan alat/teknologi yang ramah

lingkungan dan penyediaan jalur hijau maupun ruang terbuka hijau lainnya, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien dasar hijau minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh serta menghindari pembangunan pada lahan produktif kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

2. Pelayanan kesehatan dapat menggunakan material yang ramah lingkungan serta menyediakan IPAL dan pengelolaan lingkungan dengan baik.
3. Pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat disekitar objek wilayah melalui pembentukan komunitas sadar wisata dengan memperdayakan masyarakat lokal, meningkatkan investasi masyarakat melalui pelatihan dan edukasi kepada masyarakat terkait keahlian bidang pariwisata.

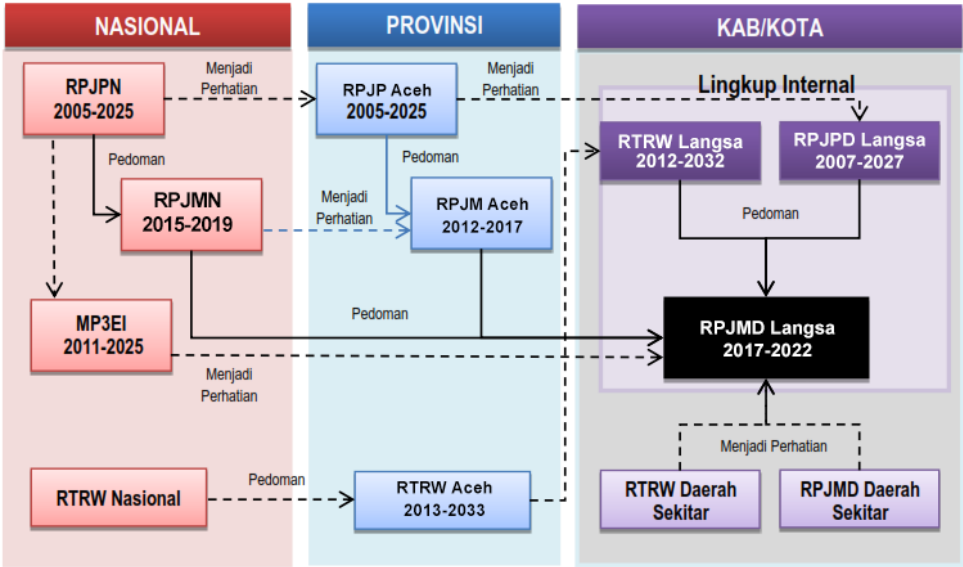
#### 5. *RPJM Kota Langsa dengan Perencanaan Lainnya*

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level Nasional, Provinsi Aceh, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Langsa, yaitu:

1. Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar kota Langsa seperti Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan kabupaten Gayo lues;
6. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).



Gambar 1.3  
Hubungan antara RPJM Kota Langsa  
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJM Kota Langsa berpedoman pada RTRW Kota Langsa yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD berpedoman dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 1.4 . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika penulisan RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

## BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

## BAB IX PENUTUP

Memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, dan kaidah pelaksanaannya serta menguraikan beberapa hal penting sebagai penutup dan saran-saran untuk kesempurnaan pelaksanaan RPJMD.

### 1.5. Maksud dan Tujuan

#### 1.5.1. Maksud

RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 dimaksudkan, sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Langsa. Termasuk juga rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif

dan indikatif selama lima tahun ke depan. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

#### 1.5.2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD ini antara lain:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2017-2022;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2017-2022, termasuk dalam menentukan program-program prioritas pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, KUA- PPAS, dan RAPBD tahun 2017-2022;
4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa antara tahun 2017-2022;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Langsa dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

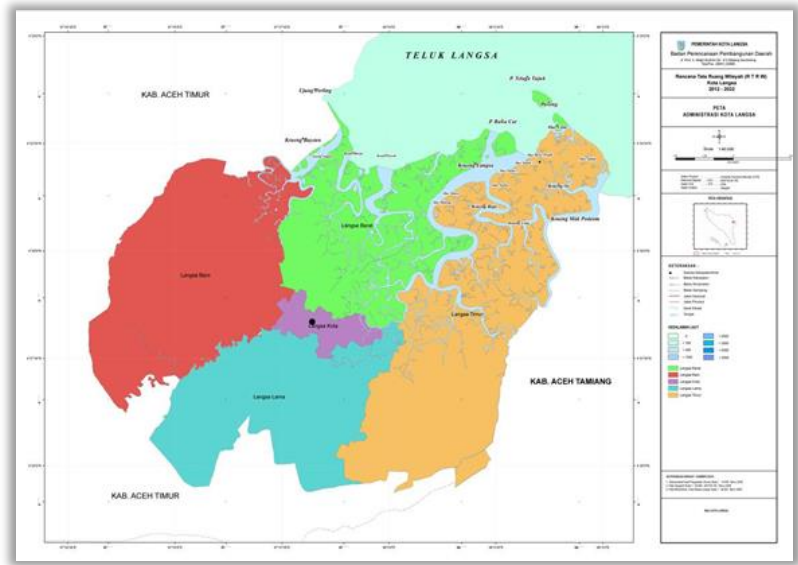
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara Astronomis Kota Langsa terletak antara 04°24'35.68" - 04°33'47.03" Lintang Utara dan 97°53'14,59" - 98°04'42,16" Bujur Timur. Kota Langsa memiliki 5 Kecamatan dengan 66 Gampong. Berdasarkan peta Provinsi Aceh/BRR, luas Kota Langsa adalah 23.982,93 Ha, dengan panjang garis pantai 26 Km.

Secara administratif Kota Langsa berbatas dengan:

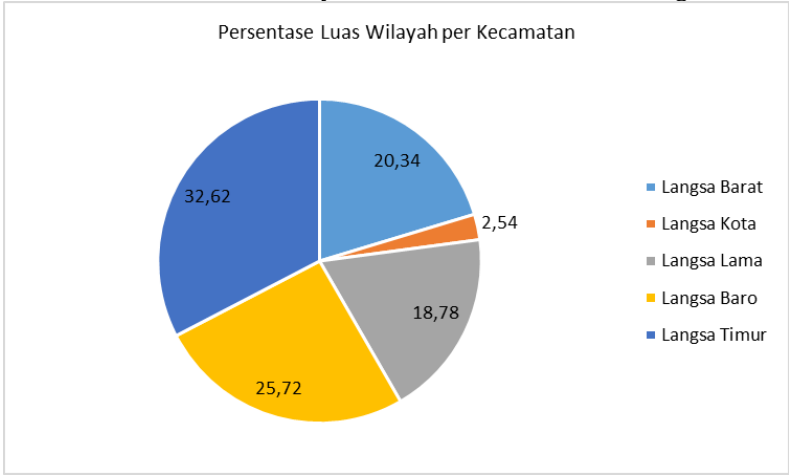
- Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka pada sebelah Utara;
- Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang pada sebelah Selatan;
- Kabupaten Aceh Timur pada sebelah Barat;
- Kabupaten Aceh Tamiang pada sebelah Timur.

Gambar 2.1  
Peta Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Grafik 2.1  
Persentase Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Langsa



Sumber: BPS Kota Langsa, Tahun 2017

Tabel 2.1  
Administrasi Kota Langsa Dirinci Per Kecamatan dan Gampong

No	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	NAMA-NAMA GAMPONG
1.	Langsa Timur	Gampong Seunebok Antara	1. Buket Medang Ara 2. Matang Seutui 3. Buket Pulo 4. Matang Panyang 5. Simpang Wie 6. Buket Rata 7. Buket Meutuah 8. Alue Merbau 9. Matang Ceungai 10. Seuneubok Antara 11. Alue Pineung 12. Sukarejo 13. Cinta Raja 14. Sungai Lueng 15. Alue Pineung Timue 16. Kapa
2.	Langsa Lama	Gampong Meurandeh	1. Pondok Kemuning 2. Seulalah 3. Pondok Pabrik 4. Sidodadi 5. Sidorejo 6. Baro 7. Meurandeh 8. Asam Peutik 9. Baroh Langsa Lama 10. Seulalah Baru 11. Suka Jadi Kebun Ireng 12. Meurandeh Tengah 13. Meurandeh Dayah 14. Meurandeh Aceh 15. Bate Puteh
3.	Langsa Barat	Gampong Matang Seulimeng	1. Lhok Banie 2. Paya Bujok Teungoh 3. Paya Bujok Beuramo 4. Simpang Lhee 5. Seuriget 6. Matang Seulimeng

No	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	NAMA-NAMA GAMPONG
			7. Sungai Pauh 8. Kuala Langsa 9. Telaga Tujuh 10. Serambi Indah 11. Sungai Pauh Pusaka 12. Sungai Pauh Tanjong 13. Sungai Pauh Firdaus
4.	Langsa Baro	Gampong Geudubang Aceh	1. Timbang Langsa 2. Alue Dua 3. Birem Puntong 4. Paya Bujok Seulemak 5. Pondok Kelapa 6. Karang Anyar 7. Paya Bujok Tunong 8. Geudubang Jawa 9. Geudubang Aceh 10. Alue Dua Bakaran Batee 11. Lengkong 12. Sukajadi Makmur
5.	Langsa Kota	Gampong Teungoh	1. Blang Seunibong 2. Blang 3. Alue Beurawe 4. Teungoh 5. Tualang Teungoh 6. Mutia 7. Daulat 8. Jawa 9. Paya Bujok Blang Pase 10. Peukan Langsa

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

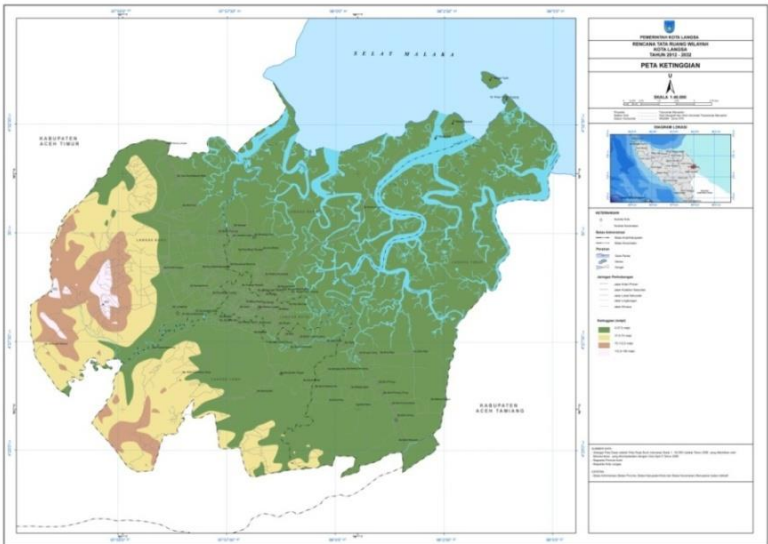
Letak Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur Aceh, juga merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah *hinterland* di sekitarnya.

Selain itu, posisi Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata. Karena itu, sebagai wujud upaya menjadikan Kota Langsa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kota transit di wilayah pantai timur Aceh, akan diupayakan penyediaan infrastruktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Dengan demikian, fungsi keberadaan Kota Langsa sebagai kota transit diharapkan memberikan manfaat ganda (*multiplier effect*) dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Posisi geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka tepatnya pada bagian utara, merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera, dan pulau-pulau lain di Indonesia.

Peluang lainnya adalah menjalin aktivitas bisnis dan kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) dengan berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk diwujudkan, mengingat saat ini Kota Langsa telah memiliki fasilitas pelabuhan laut Kuala Langsa berikut dengan sejumlah infrastruktur penunjang yang relatif cukup memadai.

Gambar 2.2  
Peta Ketinggian Kota Langsa



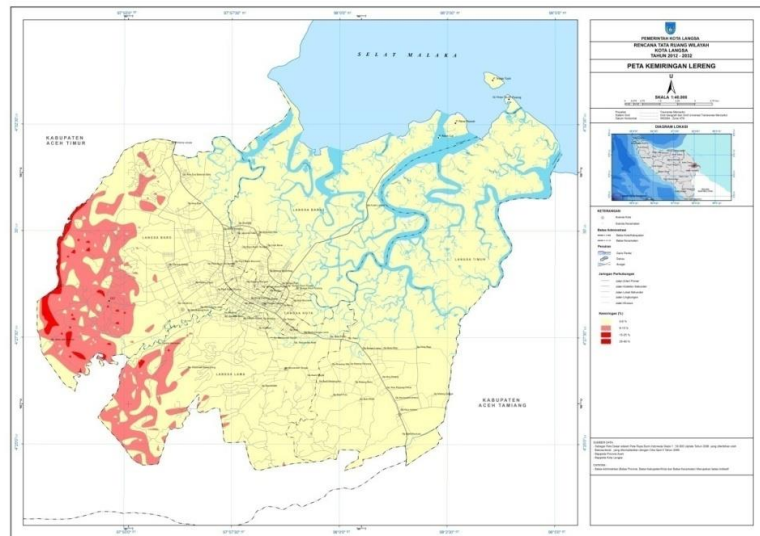
Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.2. Topografi

Secara topografi Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 meter dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 meter, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara Kecamatan Langsa Barat atau pesisir pantai.



Gambar 2.3  
Peta Kemiringan Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

#### 2.1.1.3. Geologi

Bentuk lahan adalah konfigurasi permukaan lahan yang dihasilkan akibat proses alam yang memiliki bentuk topografis khas dan struktur geologis pada material batuan dalam ruang dan waktu kronologis tertentu. Bentuk lahan terdiri dari sistem pegunungan, perbukitan, vulkanik, karst, alluvial, dataran dan marine terbentuk oleh pengaruh batuan penyusunnya yang ada di bawah lapisan permukaan bumi.

Bentang lahan di Kota Langsa terbagi atas tiga jenis yaitu dataran alluvial, dataran *fluvio-marine* dan perbukitan struktural lipatan. Sekitar 20 persen atau 4.811,14 Ha dari luas wilayah Kota Langsa yang berada pada Kecamatan Langsa Kota dan sebagian kecil Kecamatan Langsa Barat adalah dataran alluvial yang merupakan jenis tanah yang dapat terbentuk karena adanya endapan.

Luas wilayah Kota Langsa yang didominasi jenis dataran *fluvio marine* sekitar 45 persen atau sekitar 10.894,99 Ha berada pada Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur serta sebagian kecil Kecamatan Langsa Baro. Dataran *fluvio marine* dihasilkan oleh aktivitas gerakan air laut, baik pada tebing curam, pantai berpasir, pantai berkarang maupun pantai berlumpur serta diakibatkan oleh aktivitas sungai seperti dataran banjir, tanggul alam, teras sungai, yang sebagian besar bermuara ke laut dan

membentuk lahan dengan kombinasi *fluvial* dan *marine* dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pesisir Teluk Langsa.

Sekitar 35 persen bentuk lahan Kota Langsa terdiri dari perbukitan struktural lipatan yang ditandai dengan adanya lipatan yang membentuk permukaan bumi menjadi cekung (sinklinal) seperti lembah dan lipatan yang membentuk permukaan bumi menjadi cembung (antiklinal) seperti pegunungan atau perbukitan dengan luas sebesar 8.276,81 Ha yang sebagian besar berada di Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Lama.

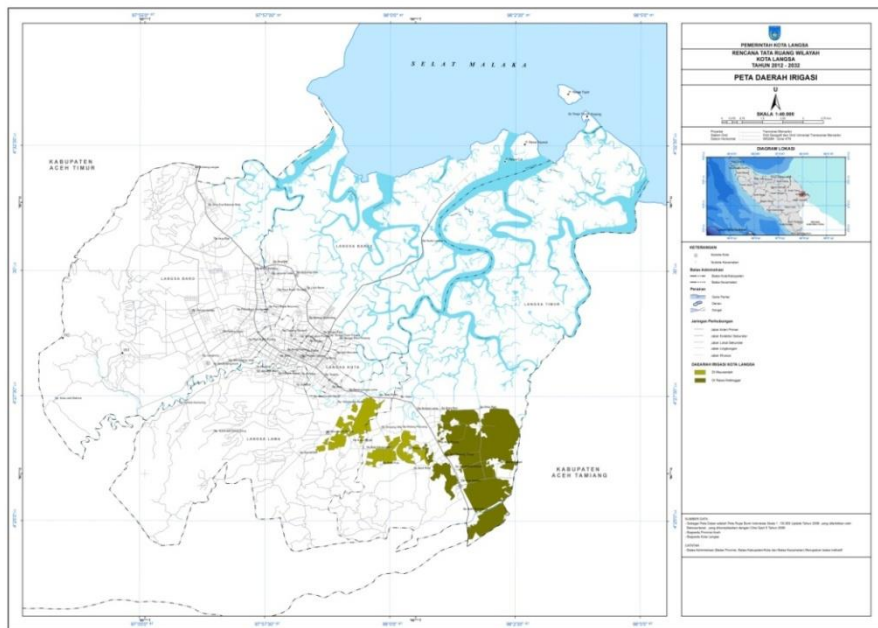
#### 2.1.1.4. Hidrologi

Sistem hidrologi di Kota Langsa terdiri dari dua jenis, yaitu sistem hidrologi alami dan sistem hidrologi buatan. Sistem hidrologi alami terdiri dari sungai, sumur dan air tanah. Sedangkan sistem hidrologi buatan yaitu drainase. Kota Langsa memiliki satu sungai yaitu Krueng Langsa. Volume air sungai tersebut cukup besar namun kondisi warna airnya kekuning-kuningan. Pemanfaatan Sungai Langsa oleh penduduk sebagai tempat mencuci, mandi, dan perikanan.

Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007, Kota Langsa memiliki Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Lintas Kabupaten yaitu D.I. Paya Ketenggar/Alue Merbau. Sedangkan untuk daerah irigasi Kewenangan Pemerintah Kota, yaitu:

1. Daerah Irigasi Alue Jreng
2. Daerah Irigasi Asam Peutik
3. Daerah Irigasi Bukit Meutuah
4. Daerah Irigasi Matang Setui
5. Daerah Irigasi Medang Ara
6. Daerah Irigasi Meurandeh
7. Daerah Irigasi Simpang Wie
8. Daerah Irigasi Suka Makmur.

Gambar 2.4  
Peta Daerah Irigasi



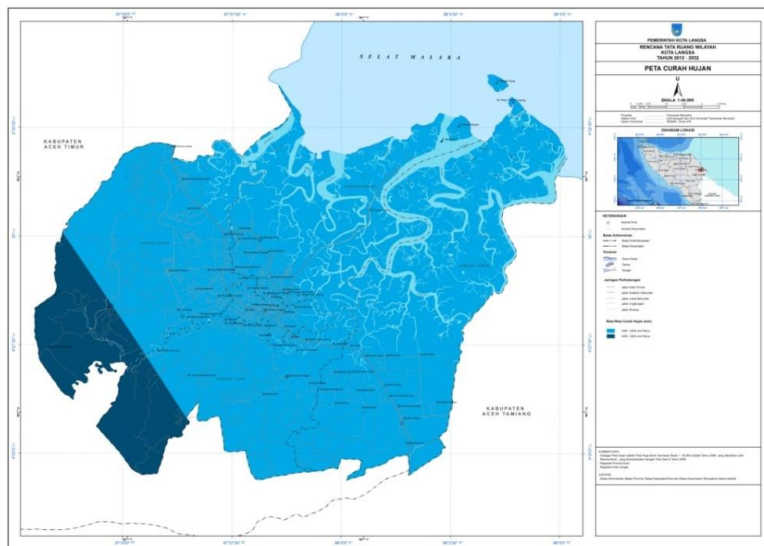
Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

#### 2.1.1.5. Klimatologi

Kondisi iklim Kota Langsa umumnya sangat dipengaruhi oleh iklim Muson yang menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Pergantian musim terjadi yaitu: musim hujan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, dan tingkat curah hujan tertinggi pada bulan September dan Oktober; musim kemarau jatuh pada bulan Januari sampai dengan bulan April, dengan tingkat kemarau tertinggi pada bulan Maret sampai dengan bulan April. Curah hujan rata-rata di Kota Langsa berkisar antara 2.000-2.500 mm per tahun, dengan temperatur rata-rata 28°C sampai dengan 32°C dan tingkat kelembaban rata-rata sebesar 80 persen.

Berdasarkan kondisi iklim ini, maka perbedaan iklim yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada pola pembangunan fasilitas. Curah hujan yang terjadi terutama pada bulan-bulan dengan tingkat curah hujan yang tinggi, dapat mengakibatkan terjadinya genangan terutama di daerah yang rendah.

Gambar 2.5  
Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim



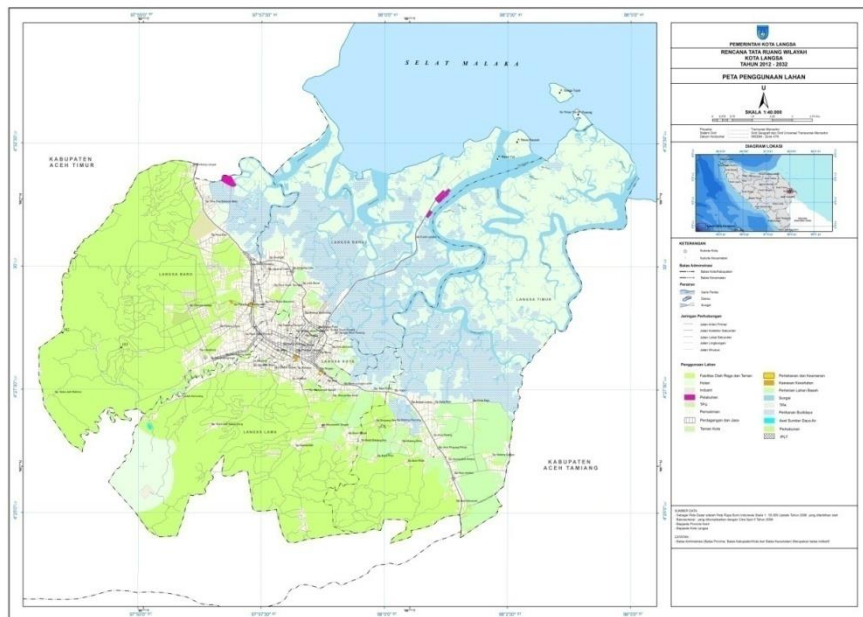
Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

#### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan (*land use*) Kota Langsa berbentuk konsentrik, hal ini disebabkan oleh aktivitas perkotaan yang berkembang dan terdistribusi oleh sistem jaringan jalan dan aktivitas perkotaan, seperti kegiatan perdagangan, pemerintahan, perindustrian dan kegiatan perkotaan lainnya, seperti:

1. Sebelah utara, dibentuk oleh kegiatan industri dan jaringan jalan utama menuju ke kawasan pelabuhan;
2. Sebelah selatan, dibentuk oleh sistem jaringan jalan utama dan beberapa fasilitas perkotaan lainnya, seperti pendidikan, pemerintahan, tempat pembuangan akhir sampah dan perkebunan;
3. Pusat kota, dibentuk oleh kegiatan *Central Business District* (CBD), pemerintahan dan kesehatan;
4. Sebelah barat, dibentuk oleh jaringan jalan alternatif dan kegiatan pemerintahan di sekitarnya, industri ringan, sedang dan perdagangan;
5. Sebelah timur, dibentuk oleh kegiatan pertanian.

Gambar 2.6  
Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Lanskap atau bentang darat Kota Langsa dicirikan oleh kondisi topografi yang tergantung mulai dari daerah pantai pada bagian utara serta sampai pada perbukitan pada bagian barat dan selatan kota. Di samping itu, lanskap kota dicirikan juga oleh alur sungai (Krueng Langsa) yang mengalir pada bagian selatan kota serta kombinasi vegetasi berupa tananaman perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman pekarangan. Kondisi topografi dan keragaman vegetasi merupakan unsur fisik alam yang paling potensial bagi pengembangan estetika lingkungan kota. Secara sederhana lanskap Kota Langsa dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe spesifik, yaitu :

a. Lanskap Pedesaan

Kondisi lanskap pedesaan sebagian besar terdapat pada daerah-daerah pinggiran kota terutama sepanjang jalan utama Medan-Banda Aceh serta pada bagian barat kota. Lanskap tipe ini ditandai oleh dominannya lahan persawahan dan daerah perkebunan kelapa sawit dan karet. Perumahan sepanjang jalan masih bergaya sederhana dengan pagar tanaman khas pedesaan.

b. Lanskap Pantai Pesisir

Kondisi lanskap pantai/pesisir terdapat pada kawasan sepanjang jalan menuju pelabuhan Kuala Langsa. Pada kawasan ini dicirikan oleh sederetan kawasan permukiman nelayan dengan kondisi kumuh, dengan latar belakang

daerah rawa-rawa dan daerah tambak udang yang dilengkapi dengan komunitas literal hutan bakau yang mulai terancam punah akibat berkembangnya kawasan permukiman dan tambak udang. Vegetasi hutan bakau tersebut merupakan tanaman asli dan hasil usaha penghijauan/rehabilitasi kawasan mangrove.

#### c. Lanskap Pusat Kota

Kondisi lanskap pada kawasan pusat kota ditandai oleh dua unsur utama fisik buatan yaitu jalan dan bangunan. Jalan Ahmad Yani merupakan koridor pergerakan utama yang paling penting, sehingga menjadi "*landmark*" Kota Langsa. Penataan pola hijau di sepanjang jalan terus dilakukan hingga saat ini.

Alun-alun dan taman kota di depan Pendopo Walikota merupakan "*open space*" yang paling menonjol di kawasan pusat kota. Letaknya yang strategis, membuat "*open space*" ini banyak diminati oleh masyarakat untuk mengunjunginya. Bahkan untuk membuat suatu even atau kegiatan sering menggunakan kawasan ini.

Salah satu bangunan yang cukup potensial menjadi "*landmark*" kota, seperti misalnya "*Gedung Balee Joeang*" yang mempunyai nilai sejarah dan arsitektur yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan mulai maraknya penggunaan latar Gedung Balee Joeang ini oleh masyarakat untuk diabadikan sebagai momen penting, contohnya pemotretan menjelang pernikahan. Di Kota Langsa juga terdapat sejumlah monumen/relief dan bangunan artistik adat Aceh, yang umumnya diletakkan pada perapatan jalan sebagai monumen peringatan atau ornamen jalan.

Selain itu Mesjid Raya Darul Falah atau yang lebih dikenal dengan nama Mesjid Raya Kota Langsa merupakan salah satu *landmark* lainnya di Kota Langsa. Hal ini disebabkan karena bangunan tersebut memiliki ketinggian yang sangat menonjol dibandingkan dengan bangunan lainnya. Mesjid ini berlokasi di jantung kota dengan fasilitas yang besar yang dapat menampung jamaah untuk melakukan ibadah. Mesjid ini juga sangat sesuai dengan kultur masyarakat Kota Langsa yang mayoritas menganut agama Islam.

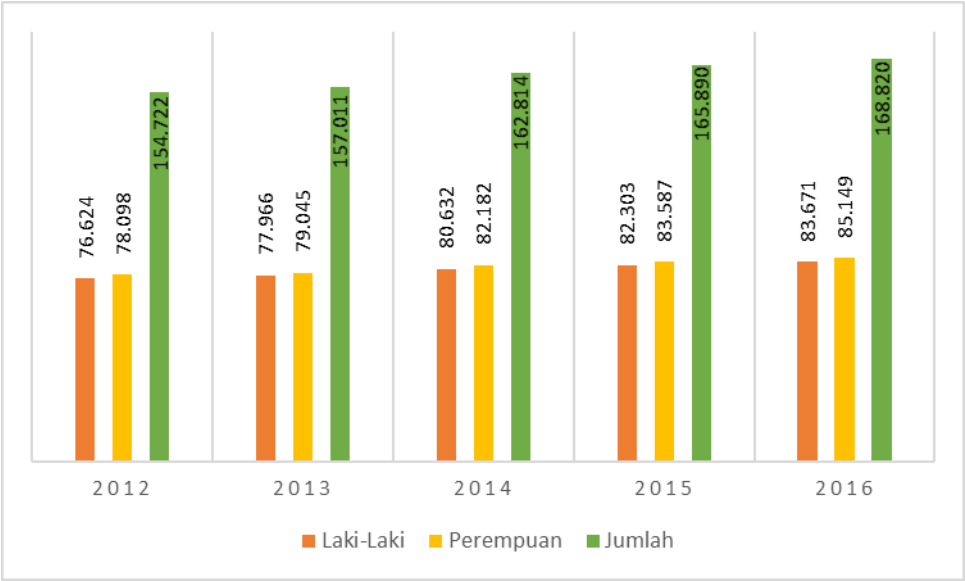
Adapun tutupan lahan (*land cover*) Kota Langsa, adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Langsa Barat : mayoritas tutupan lahan yang berada di kecamatan Langsa Barat adalah rawa/tambak dan berada hampir di seluruh wilayah kecamatan. Hutan mangrove terletak di sebelah utara kecamatan, dan permukiman berada di sebelah selatan kecamatan berbatasan dengan sebelah utara Kota Langsa, dan terkonsentrasi di sepanjang jalan utama (jalan lintas Medan-Banda Aceh);
- b. Kecamatan Langsa Kota : mayoritas tutupan lahan yang berada di kecamatan Langsa Kota adalah permukiman serta kawasan untuk perdagangan dan jasa. Kecamatan Langsa Kota merupakan pusat Kota Langsa.
- c. Kecamatan Langsa Timur : tutupan lahan yang berada di sini berupa lahan rawa, sawah dan perkebunan. Di sebelah selatan berupa sawah dan perkebunan, sedangkan permukiman dan kegiatan perdagangan dan jasa terkonsentrasi di sepanjang arteri primer (jalan Langsa-Medan). Untuk kawasan permukiman tersebar juga di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong sentra produksi pertanian dan perkebunan;
- d. Kecamatan Langsa Lama : dominasi tutupan lahannya adalah perkebunan sawit dan karet. Hampir seluruh lahan yang ada dimanfaatkan untuk tanaman karet dan sawit utamanya oleh BUMN PTP Nusantara I. Di sebelah selatan kecamatan terdapat hutan lindung darat, tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di sebelah barat Gampong Pondok Pabrik sampai ke sebelah timur Gampong Pondok Keumuning. Di sebelah barat daya kecamatan tepatnya di Gampong Pondok Keumuning terdapat hutan produksi. Lokasi permukiman berada di sebelah utara kecamatan tepatnya di sepanjang jalan Ahmad Yani;
- e. Kecamatan Langsa Baro : dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan sawit dan karet, serta diantara perkebunan sawit dan karet terdapat hutan produksi, yang berada di Gampong Geudubang Aceh. Lokasi permukiman sebelah timur kecamatan yaitu di sepanjang jalan Ahmad Yani.

2.1.2. Demografi

Sebagai kota yang berada di wilayah lintas utama Sumatera, Kota Langsa memiliki karakteristik penduduk yang heterogen. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Langsa adalah sebanyak 154.722 jiwa, jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan hingga mencapai 168.820 jiwa pada tahun 2016.

Grafik 2.2  
Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Jiwa)



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

Dengan luas wilayah yang mencapai 239,83 km<sup>2</sup> dan didiami oleh 168.820 jiwa, rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kota Langsa tahun 2016 mencapai 704 orang/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Kota sebanyak 6.744 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya dihuni oleh sekitar 194 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.2  
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk  
Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2016

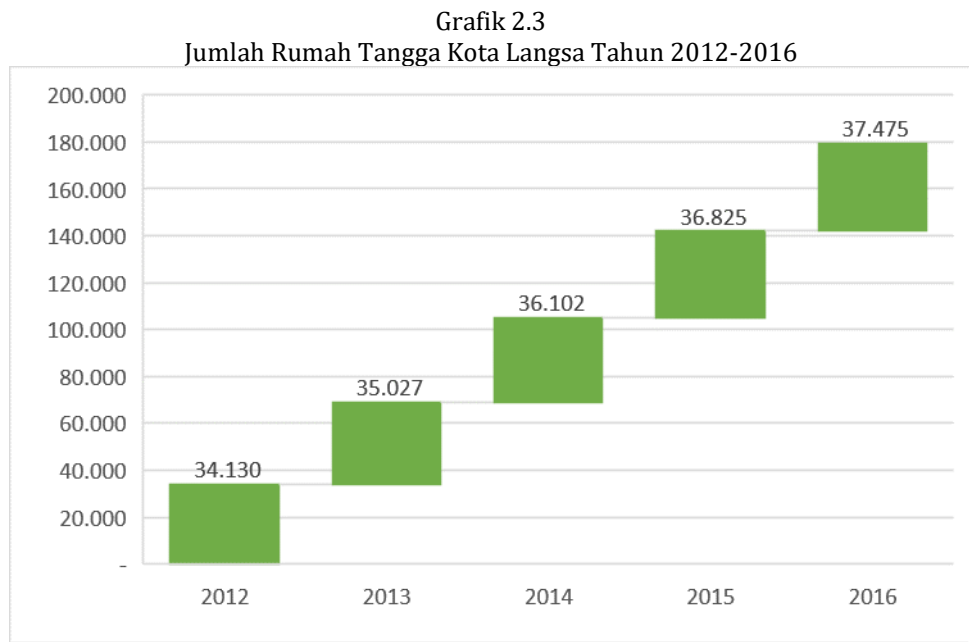
Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )
Langsa Timur	78,23	15.215	194
Langsa Lama	45,05	30.116	668
Langsa Barat	48,78	34.849	714
Langsa Baro	61,68	47.570	771
Langsa Kota	6,09	41.070	6.744
Jumlah	239,83	168.820	704

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah rumah tangga di Kota Langsa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 juga ikut mengalami



peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah rumah tangga di Kota Langsa sebanyak 33.130 RT, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 37.475 RT.



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

### 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Langsa merupakan kota yang berada di sepanjang garis pantai Selat Malaka, bila dilihat dari kondisi daerah memiliki daya tarik sendiri untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan serta berbagai sektor lainnya. Daya tarik ini menjadi potensi daerah yang utama dalam meningkatkan perekonomian daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggali dan mengembangkan potensi alam yang dimiliki tersebut antara lain:

- a. Pengembangan kawasan pantai sebagai wisata alam. Kawasan ini dibatasi pengembangannya untuk kegiatan fisik perkotaan atau untuk pengembangan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai *buffer zone*. Kawasan ini dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata pantai, wisata air atau bahari, pemancingan, kuliner dan tempat penelitian. Lokasi pengembangan pariwisata ini adalah di daerah Kecamatan Langsa Barat yaitu Pulau Telaga Tujoh/Pusong dan Pelabuhan Kuala Langsa;
- b. Pengembangan potensi perikanan berupa perikanan laut maupun perikanan darat/tambak. Salah satu bentuk pengembangan potensi perikanan ini adalah rehabilitasi dan intensifikasi lahan untuk pengembangan industri perikanan yang diarahkan lokasinya di

Gampong Kuala Langsa. Kegiatan industri perikanan ini berupa pengumpulan dan pengolahan ikan hasil tangkapan secara terpadu dari nelayan Kota Langsa dan daerah sekitarnya yang siap untuk kebutuhan sendiri maupun ekspor ke daerah lain dan luar negeri;

- c. Pengembangan bahan galian memiliki potensi dengan produktivitas yang sangat baik. Adapun jenis bahan galian ini berupa pasir, tanah urug, kerikil dan batu.

Pengembangan wilayah berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan dan jasa (*central bussines distric*), pendidikan, perumahan, kesehatan, dan pemerintahan. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Kota yang meliputi Gampong Blang Seunibong, Gampong Blang, Gampong Alue Beurawe, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Mutia, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Paya Bujok Blang Pase, dan Gampong Peukan Langsa.
- b. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan, pendidikan, perumahan, kesehatan, perkantoran dan perkebunan. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Lama yang meliputi Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Baro, Gampong Meurandeh, Gampong Asam Peutik, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Seulalah Baru, Gampong Suka Jadi Kebun Ireng, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Bate Puteh.
- c. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, pertanian, perikanan/pertambakan. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Timur yang meliputi Gampong Buket Medang Ara, Gampong Matang Seutui, Gampong Buket Pulo, Gampong Matang Panyang, Gampong Simpang Wie, Gampong Buket Rata, Gampong Buket Meutuah, Gampong Alue Merbau, Gampong Matang Ceungai, Gampong Seuneubok Antara, Gampong Alue Pineung, Gampong Sukarejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Sungai Lueng, Gampong Alue Pineung Timue, Gampong Kapa.
- d. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan, industri rumah tangga, pendidikan, kesehatan, perkantoran, perikanan/pertambakan,

terminal tipe A, terminal bongkar muat. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Barat yang meliputi Gampong Lhok Banie, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Simpang Lhee, Gampong Seuriget, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Kuala Langsa, Gampong Telaga Tujuh, Gampong Serambi Indah, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Sungai Pauh Firdaus.

- e. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan, industri rumah tangga, pendidikan, kesehatan, perkantoran dan perkebunan. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Baro yang meliputi Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong Paya Bujok Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Karang Anyar, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Lengkong, Gampong Sukajadi Makmur.

#### Kawasan Industri

Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Kawasan industri di Kota Langsa, meliputi :

- 1) Kawasan peruntukan industri besar

Kawasan peruntukan industri besar memiliki luas 1.016,35 Ha meliputi kawasan industri Alue Raya terdapat di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur dengan luas 600,83 Ha; kawasan industri Buket Rata di Gampong Bukit Rata Kecamatan Langsa Timur dengan luas 300,00 Ha; dan kawasan industri Eks Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat dengan luas 115,52 Ha.

- 2) Kawasan peruntukan industri menengah

Kawasan peruntukan industri menengah memiliki luas 208,92 Ha meliputi kawasan industri menengah di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro dengan luas 102 Ha; kawasan industri di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha; dan kawasan industri di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha.

3) Kawasan industri rumah tangga

Industri rumah tangga tersebar diseluruh Gampong dalam wilayah Kota Langsa.

Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kota Langsa adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.

Kawasan Strategis Kota Langsa meliputi :

- 1) Kawasan Strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :
  - a. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa (CBD) seluas 253,91 Ha;
  - b. Kawasan Industri Alue Raya di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 600,83 Ha;
  - c. Kawasan Industri Buket Rata di Gampong Buket Rata Kecamatan Langsa Timur seluas 300 Ha;
  - d. Kawasan Industri Timbang Langsa di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha;
  - e. Kawasan Industri Eks. Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 Ha;
  - f. Kawasan Industri sedang Alue Dua di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro seluas 102,00 Ha; dan
  - g. Kawasan Industri Penyangga di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha;
  - h. Pelabuhan Kuala Langsa di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 13,00 Ha.
- 2) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, meliputi :
  - a. Kawasan Pendidikan di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama seluas 223,41 Ha; dan
  - b. Kawasan Kesehatan di Gampong Pondok Kelapa kecamatan Langsa Baro seluas 15,32 Ha.

Selain itu, Kawasan Strategis Provinsi yang berada di Kota Langsa meliputi :

- 1) Kawasan Strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh; dan

- 2) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan ekowisata mangrove seluas 888,81 Ha.

#### 2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

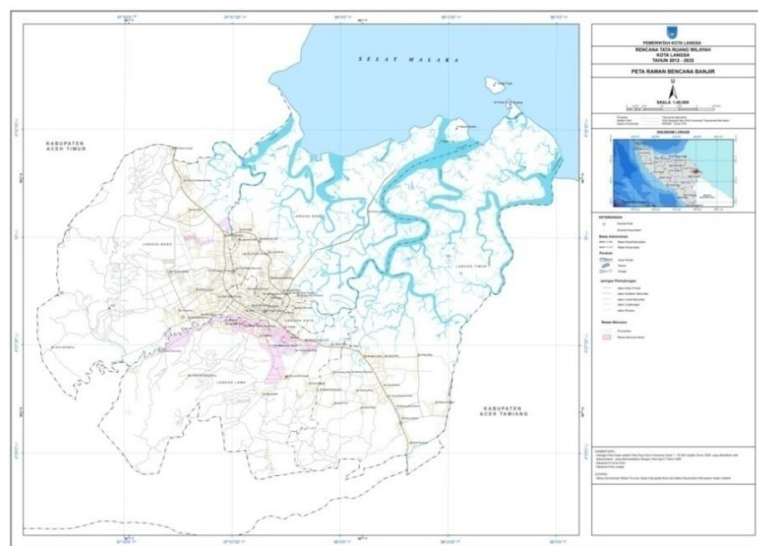
Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan bencana alam banjir. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada umumnya, bencana banjir di perkotaan kerap terjadi ketika intensitas curah hujan tinggi, sementara drainase tidak berfungsi secara optimal akibat terbatasnya daya tampung debit air. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membuang sampah sembarangan turut pula menjadi penyebab tersumbatnya saluran drainase sehingga air meluap ke jalan dan menggenangi kawasan permukiman warga kota. Bencana banjir harus ditanggulangi secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk terhadap aktivitas sosial-ekonomi, di samping juga rusaknya infrastruktur kota.

Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Langsa terdiri atas:

- a. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi:
  1. Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh, seluas 151,96 ha dan Kuala Langsa seluas 707,53 ha di Kecamatan Langsa Barat;
  2. Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 96,53 ha di Kecamatan Langsa Barat, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,60 ha di Kecamatan Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng seluas 12,95 ha di Kecamatan Langsa Timur; dan
  3. Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 ha di Kecamatan Langsa Barat.
- b. Kawasan rawan banjir dengan luas 378,54 ha, meliputi:
  1. Gampong Paya Bujok Seulemak, seluas 12,14 ha dan Gampong Birem Puntong seluas 17,86 ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro;

2. Gampong Teungoh, seluas 37,48 ha dan Gampong Jawa seluas 18,09 ha yang berada di Kecamatan Langsa Kota; dan
3. Gampong Pondok Keumuning, seluas 74,19 ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,50 ha, Gampong Sidodadi seluas 7,18 ha, Gampong Sidorejo seluas 20,41 ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 ha, Gampong Baro seluas 16,51 ha dan Gampong Meurandeh 101,90 ha yang berada di Kecamatan Langsa Lama.

Gambar 2.7  
Peta Rawan Bencana Kota Langsa

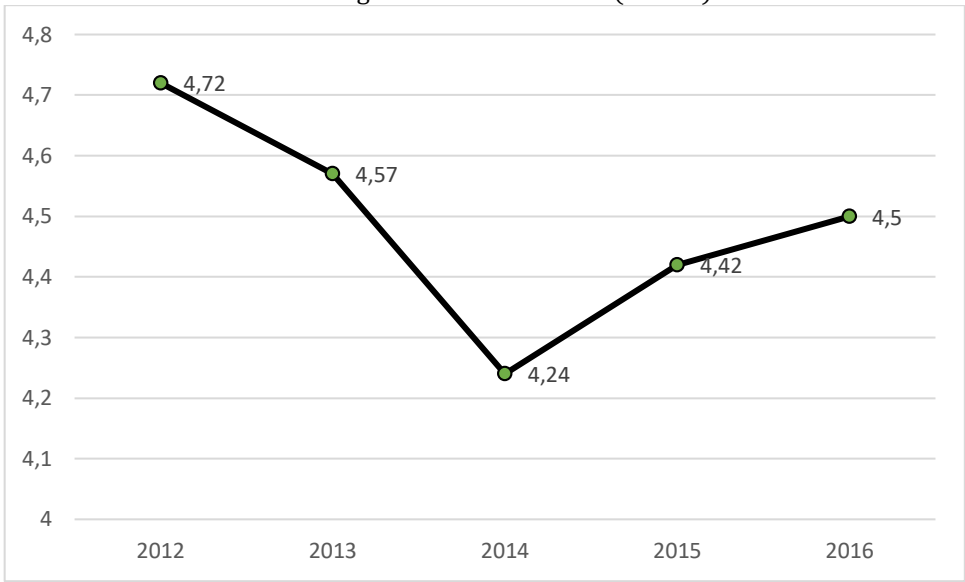


Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
    - 2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kota Langsa pada tahun 2012 dengan menggunakan penghitungan metode baru tahun dasar 2010 mencapai 4,72 persen. Pada tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Langsa di tahun 2013 melambat dengan persentase 4,57 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Langsa semakin melambat dengan persentase 4,24 persen. Namun di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Langsa kembali naik dengan persentase sebesar 4,50 persen.

Grafik 2.4  
 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010  
 Kota Langsa Tahun 2012-2016 (Persen)



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2012-2016

Kota Langsa sebagai daerah perkotaan memiliki karakteristik perekonomian yang terkonsentrasi pada sektor tersier, bukan pada sektor primer. Dalam pengelompokan kategori lapangan usaha, sektor primer mengacu pada sektor yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung dalam aktivitas perekonomian seperti kategori pertanian, kehutanan dan pertanian serta kategori pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan laju pertumbuhan kategori ini berfluktuatif selama periode 2012-2016. Kondisi terendah dalam laju pertumbuhan dan penggalian juga berfluktuasi. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan turun drastis hingga level negatif mencapai -3,56 persen.

Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, merupakan kategori dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat akan konsumsi makanan dan minuman menjadi pendorong utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kategori ini. Pada tahun 2014, sejumlah usaha kuliner baru mulai ramai bermunculan seperti *cafe*, restoran, dan rumah makan di Kota Langsa. Hal ini merupakan sesuatu yang positif untuk dikembangkan karena mampu menggerakkan aktivitas perekonomian di Kota Langsa. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan kategori ini meningkat hingga ke level 11,12 persen dan diikuti laju pertumbuhan kategori konstruksi yang berkembang cukup signifikan mencapai 8,02 persen di tahun 2016.

Tabel 2.3  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Kota Langsa Tahun 2012-2016 (Persen)

No	Sektor Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	3,19	0,40	1,93	2,03
2	Pertambangan dan Penggalian	2,89	2,26	2,27	-3,56	0,81
3	Industri Pengolahan	3,90	2,83	2,34	2,08	1,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,35	1,08	-5,30	-2,33	-1,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,47	4,47	6,19	4,43	7,17
6	Konstruksi	3,89	3,95	4,17	5,56	8,02
7	Pedagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,45	5,44	5,26	4,38	5,45
8	Transportasi dan Pergudangan	5,73	5,93	4,60	3,98	2,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,66	6,24	9,39	10,73	11,12
10	Informasi dan Komunikasi	7,86	7,37	7,51	5,53	2,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,34	2,21	0,43	0,85	5,49
12	Real Estate	3,94	4,12	4,46	4,54	4,64
13	Jasa Perusahaan	3,87	4,35	5,79	2,81	6,39
14	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,87	2,35	2,83	3,48	6,24
15	Jasa Pendidikan	2,51	4,31	6,32	6,35	7,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,89	5,93	6,80	6,87	6,94
17	Jasa Lainnya	5,69	4,68	0,70	4,90	7,15
	PDRB	4,72	4,57	4,24	4,42	4,50

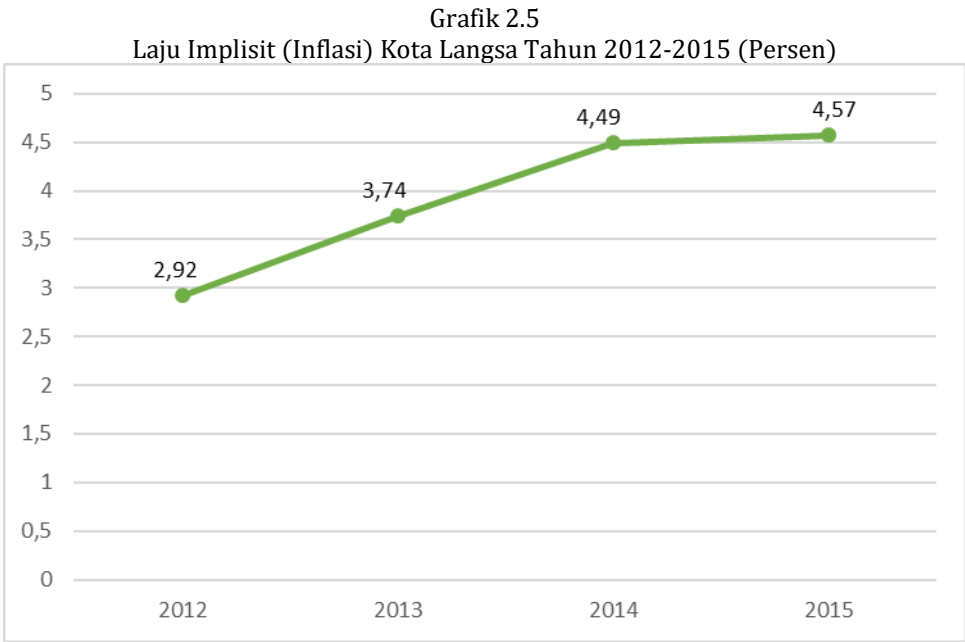
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2012-2016

Sementara itu, kategori yang perlu menjadi sorotan pada tahun 2016 adalah kategori pengadaan listrik dan gas. Pertumbuhan kategori pengadaan listrik dan gas bernilai negatif yang disebabkan oleh tingginya kebutuhan masyarakat yang harus terus terpenuhi dengan tidak diimbangi dengan pengadaan tenaga listrik tambahan, gas alam atau gas buatan.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Tren laju implisit di Kota Langsa selalu meningkat pada kurun waktu 2012-2015. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa harga-harga barang dan jasa secara umum yang ada di Kota Langsa selalu naik pada kurun waktu tersebut.





Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2011-2015

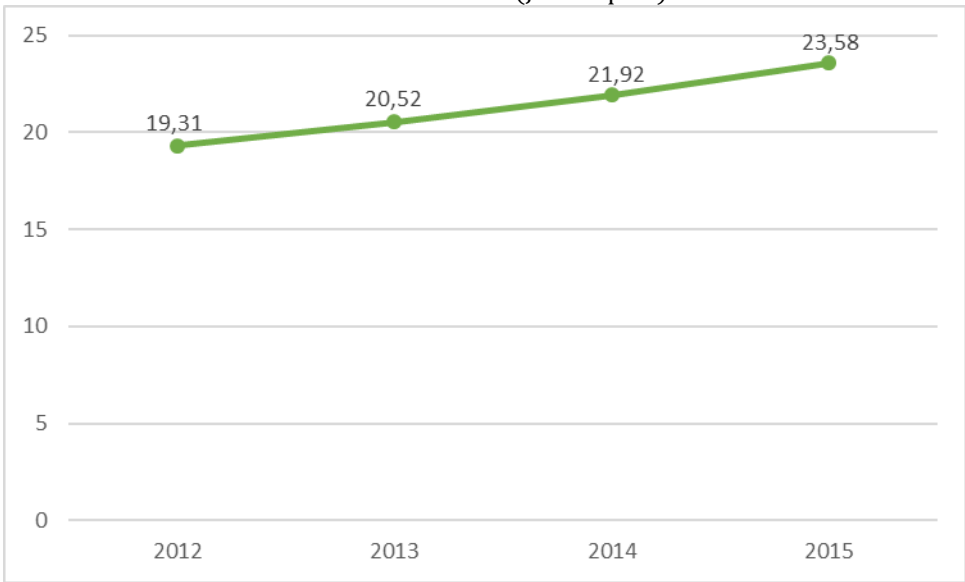
Inflasi paling tinggi terjadi di tahun 2015 yang mencapai 4,57 persen. Angka tersebut meningkat cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 2,92 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan harga terhadap barang dan jasa di Kota Langsa selama kurun waktu tersebut. Salah satu pemicu adanya kenaikan harga barang dan jasa yaitu naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, serta tarif air PDAM yang memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya secara umum.

2.2.1.3. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas biaya faktor produksi (PDRB yang telah dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung) dengan penduduk pertengahan tahun.

Peningkatan jumlah penduduk dan besarnya PDRB suatu daerah sangat menentukan besar PDRB per kapita tersebut. Atau dengan kata lain, dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional per kapita.

Grafik 2.6  
PDRB Per Kapita ADHB Kota Langsa  
Tahun 2012-2015 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2011-2015

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa PDRB per kapita ADHB Kota Langsa sepanjang tahun 2012 sampai 2015 cenderung meningkat. PDRB per kapita ADHB Kota Langsa pada tahun 2012 sebesar 19,31 juta rupiah dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2015 PDRB per kapita Kota Langsa naik menjadi 23,58 juta rupiah.

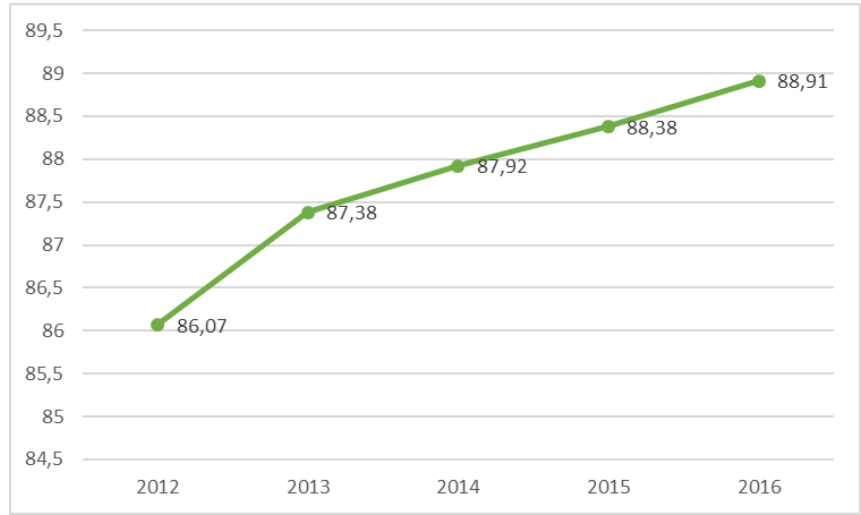
Peningkatan PDRB per kapita yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun tersebut merupakan cerminan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Langsa. Perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berakibat kepada meningkatnya tambahan permintaan terhadap barang atau jasa yang selanjutnya akan meningkatkan siklus distribusi barang atau jasa. Kondisi akhir yang diharapkan dari dampak kenaikan pendapatan per kapita adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

2.2.1.4. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Langsa setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2012 yaitu 86,07 persen meningkat menjadi 88,91 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Langsa mengalami pengurangan jumlah penduduk miskin.

Grafik 2.7  
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Langsa  
Tahun 2012-2016

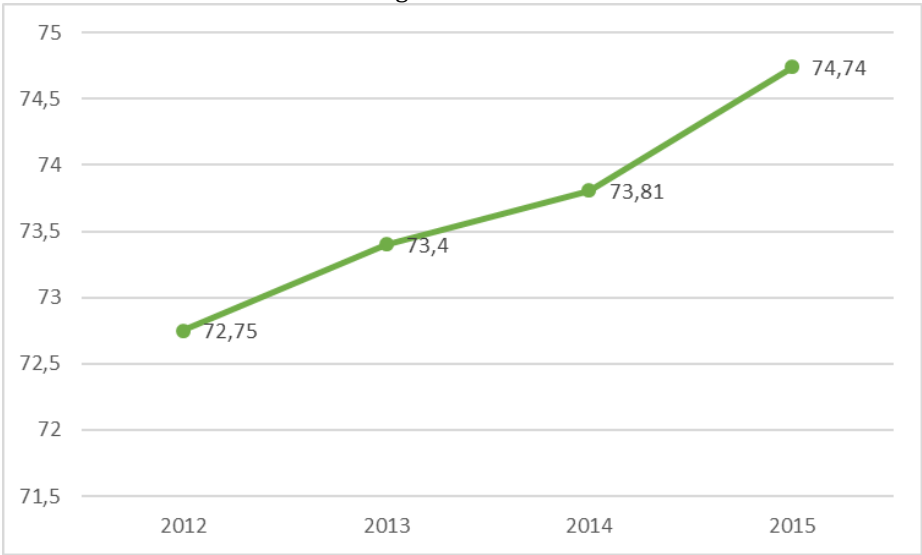


Sumber : Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2017, (diolah)

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pencapaian IPM Kota Langsa selama periode 2012-2015 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, angka IPM Kota Langsa sebesar 74,74. Capaian kondisi ini merupakan cerminan perkembangan indikator pembangunan manusia di Kota Langsa di seluruh aspek, bidang kesehatan yang dicerminkan oleh angka harapan hidup, bidang pendidikan yang dicerminkan oleh rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, serta bidang ekonomi yang dicerminkan oleh daya beli masyarakat. Angka IPM Kota Langsa yang sebesar 74,74 ini juga menandakan besarnya angka yang harus dicapai menuju titik ideal sebesar 25,26.

Grafik 2.8  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kota Langsa Tahun 2012-2015



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1. Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Kriterianya adalah semakin tinggi nilai melek huruf berarti semakin baik mutu penduduk di suatu daerah. Kegunaan dari angka melek huruf itu sendiri adalah untuk mengetahui banyaknya penduduk yang melek huruf di suatu daerah.

Perkembangan Angka Melek Huruf periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebesar 99,31 dan di tahun 2014 mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 99,91 persen. Namun di tahun 2016 mengalami penurunan angka yaitu 99,29 persen. Angka ini tidak menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk yang melek huruf. Penurunan ini dikarenakan adanya metode baru dalam penghitungan persentase angka melek huruf.

Grafik 2.9  
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen)



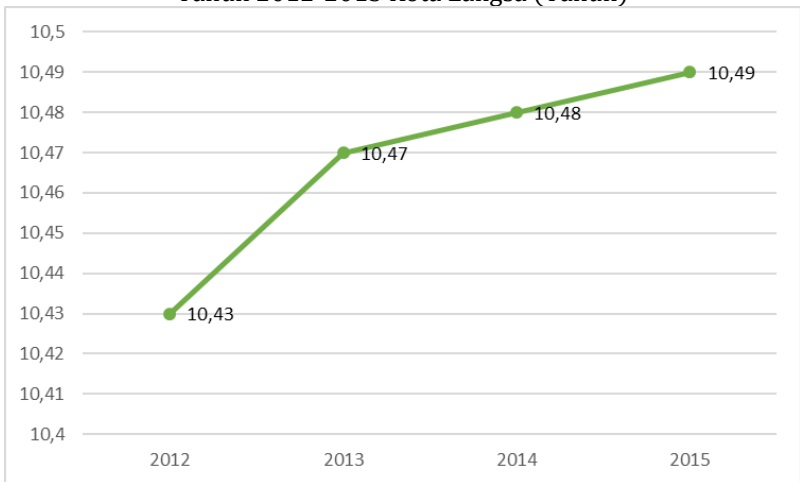
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas). Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk, berarti semakin baik tingkat pendidikan tersebut.

Di Kota Langsa, selama 2012-2015 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 10,43 tahun di tahun 2012 menjadi 10,49 tahun di tahun 2015 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Langsa ini, dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Langsa semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Grafik 2.10  
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah  
Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Tahun)



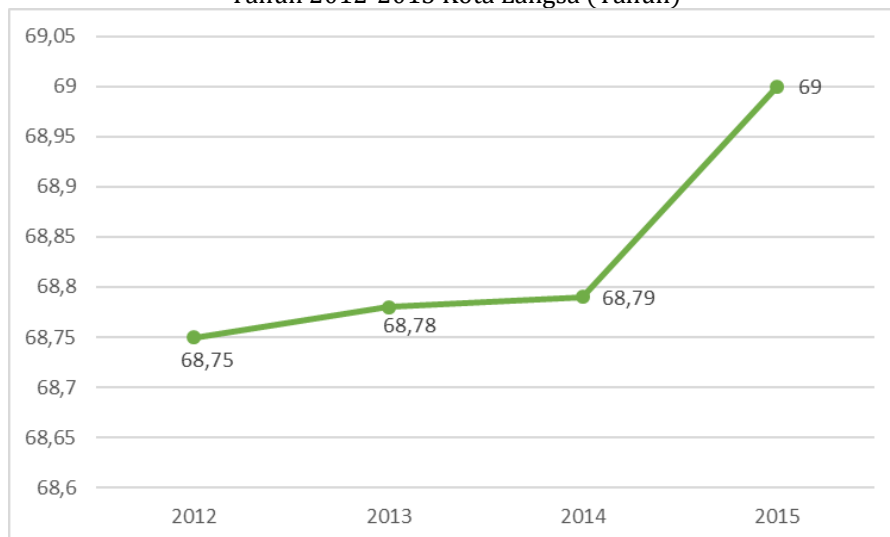
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

#### 2.2.2.2. Kesehatan

##### A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup dapat didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Secara umum, selama kurun waktu 2012 hingga 2015, angka harapan hidup masyarakat Kota Langsa terus meningkat. Artinya, harapan hidup seseorang untuk bertahan hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Saat ini, angka harapan hidup di Kota Langsa telah mencapai 69 tahun.

Grafik 2.11  
Perkembangan Angka Harapan Hidup  
Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Tahun)



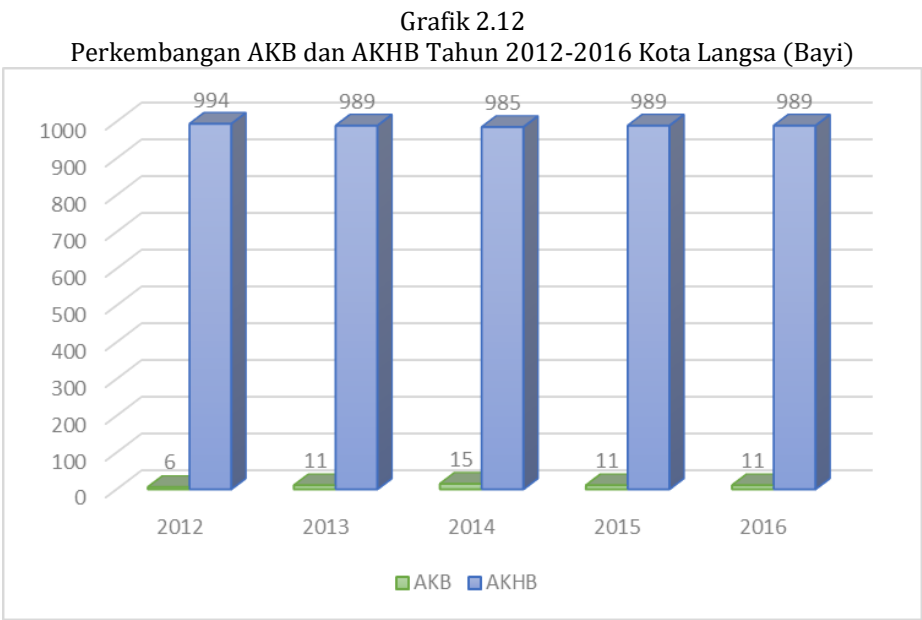
Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

##### B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain.

Perkembangan AKB di Kota Langsa cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, yaitu 15 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2014, dan turun

menjadi 11 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2015. Serta di tahun 2016 angka kematian bayi tidak mengalami perubahan yaitu 11 per 1.000 kelahiran. Untuk lebih jelasnya perkembangan AKB dan AKHB Kota Langsa dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2017

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah Balita. Keadaan tubuh anak atau bayi, dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi Balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Sedangkan di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Pada tahun 2016, di Kota Langsa terdapat tiga Balita penderita gizi buruk

Tabel 2.4  
Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk  
Tahun 2012-2016 di Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Balita Gizi Buruk	Orang	6	30	3	1	3
Jumlah Balita	Orang	18.879	16.562	15.590	17.894	17.945
Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,03	0,18	0,02	0,01	0,02
Persentase Balita Gizi Buruk yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2017

2.2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembelajaran seni sejak dini bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan dan melestarikan produk dari karya seni itu sendiri, melainkan menanamkan nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membangun kebersamaan, saling menghargai, tanggung jawab, disiplin dan selalu patuh kepada aturan baik yang dibuat oleh masyarakat setempat, agama yang dianut, maupun aturan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan data yang ada, jumlah grup kesenian di Kota Langsa hingga tahun 2016 adalah sebanyak 90 grup dengan jumlah gedung kesenian sebanyak tiga gedung.

Tabel 2.5  
Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Grup Kesenian	Grup	71	84	84	85	90
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa dan SIPD Kota Langsa, Tahun 2017

Begitupun dalam bidang olahraga, terutama dalam hal pembelajaran olahraga. Pembelajaran olahraga sejak kecil tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan, mengharapkan kemenangan dari setiap kompetisi yang diikutinya, maupun hanya untuk arena menuangkan hobi. Tetapi efek lebih dalam dari pembelajaran olahraga adalah penanaman sikap sportif dan tanggung jawab dari setiap pemain.

Perkembangan bidang pemuda dan olahraga di Kota Langsa selama kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, jumlah klub dan cabang olahraga. Jumlah klub olahraga di Kota Langsa hingga tahun 2016 adalah sebanyak 114 klub dengan satu gedung olahraga.

Tabel 2.6  
Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Klub Olah Raga	Klub	32	32	32	32	114
Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa dan SIPD Kota Langsa, Tahun 2017

Terdapat berbagai permasalahan yang harus diatasi dalam upaya pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang, antara lain terbatasnya



sarana dan prasarana olahraga masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, pembinaan dan upaya pembibitan atlet olahraga yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, dan rendahnya penghargaan bagi olahragawan berprestasi.

2.3. Aspek Layanan Umum  
2.3.1. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

A. Pendidikan Islami

Lembaga pendidikan tertua dalam sejarah pendidikan di Aceh adalah Dayah. Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik (*aneuk dayah* atau santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami, yang sanggup menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Diharapkan dari Dayah lahir insan-insan yang menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.

Di Kota Langsa, jumlah pesantren atau dayah meningkat dari 12 pesantren menjadi 14 pesantren, baik tradisional maupun modern. Jumlah guru pesantren di Kota Langsa cenderung mengalami penurunan bila dilihat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, namun pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 175 ustadz/guru dan di tahun 2015 kembali meningkat menjadi 281 ustad/guru. Berbanding terbalik dengan jumlah ustadz/guru, jumlah santri/murid di seluruh pesantren justru terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 3.244 orang santri, naik menjadi 3.994 santri/murid di tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2.7  
Jumlah Pesantren, Ustadz dan Santri  
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015
Pesantren	Unit	12	14	14	14
Ustadz/Guru	Orang	359	122	175	281
Santri/Murid	Orang	3.244	3.777	3.994	3.994

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

B. Syariat Islam

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an

maupun Hadist dengan tujuan terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh termasuk di Kota Langsa meliputi bidang aqidah, syari’ah, dan akhlak. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam, dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Selain itu, Pemerintah Aceh termasuk Pemerintah Kota Langsa juga menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Tabel 2.8  
Jumlah Indikator Pelaksanaan Syariat Islam  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam	Kasus	617	596	1.439	880
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Qanun Syariat Islam	Kasus	617	596	1.439	880
Jumlah Penegakan Qanun Syariat Islam	Persen	100	100	100	100
Jumlah Ulama	Orang	30	30	30	50
Jumlah Imam (Gampong, Masjid dan Meunasah)	Orang	328	352	352	432
Jumlah Jama’ah Haji	Orang	132	159	122	135

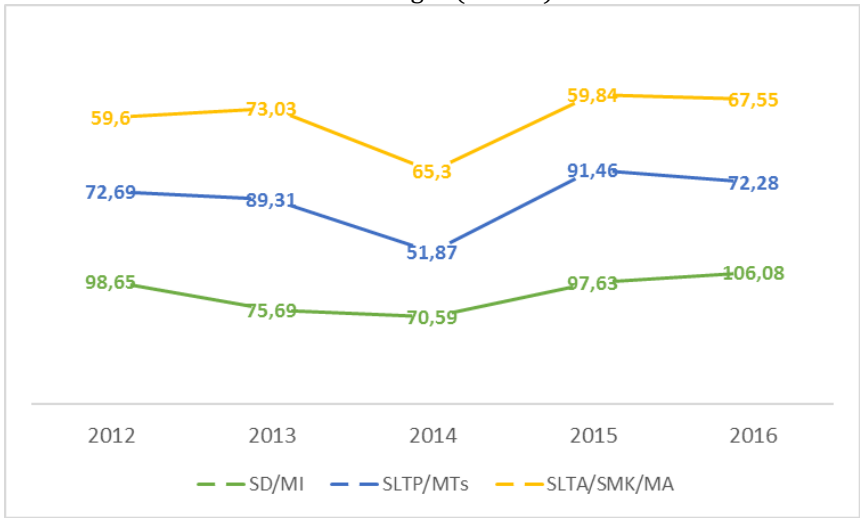
Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Tahun 2017

2.3.2. Layanan Urusan Wajib  
2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar  
2.3.2.1.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Grafik 2.13  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Berdasarkan  
Jenjang Pendidikan SD/SLTP/SLTA Tahun 2012-2016  
Kota Langsa (Persen)



Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)  
Kota Langsa, Tahun 2016

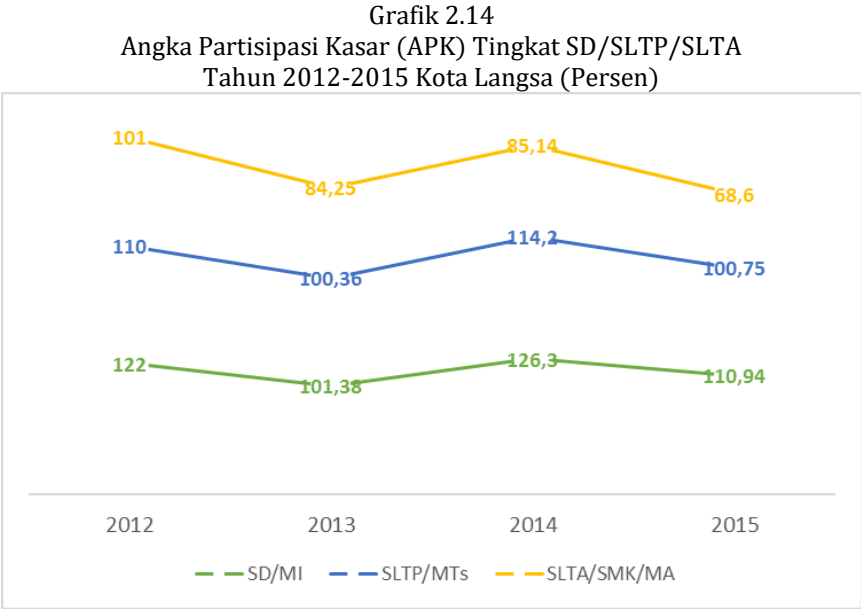
Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh, seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Perkembangan APM pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2016 adalah sebesar 106,08 persen, pada jenjang SLTP/MTs 72,28 persen dan pada jenjang SLTA/SMK/MA adalah 67,55 persen.

### B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.



*Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)  
Kota Langsa, Tahun 2016*

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2015 untuk tingkat SD mencapai 110,94 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 100,75 persen dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 68,60 persen.

C. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru memegang peranan penting strategis terutama terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Peran dan posisi guru tidak dapat digantikan sekalipun oleh teknologi yang amat canggih. Begitu penting arti guru, sehingga sudah selayaknya apabila kita menaruh perhatian besar terhadap keberadaan guru agar dapat berkiprah secara profesional sesuai harapan semua pihak.

Kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi merupakan prasyarat menciptakan guru yang profesional. Guru profesional menjadi jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa jumlah guru SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA tahun 2017 adalah 3.729 orang dengan tingkat pendidikan berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 92,52 persen (pendidikan dan non pendidikan).

2.3.2.1.2. Kesehatan

A. Rasio Posyandu Terhadap Satuan Balita

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat dapat sekaligus memperoleh pelayanan KB dan kesehatan. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat dapat sekaligus mendapatkan pelayanan profesional melalui petugas sektor, serta non-profesional (oleh kader) dan diselenggarakan atas usaha masyarakat sendiri.

Tabel 2.9  
Rasio Posyandu Per Satuan Bayi  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Posyandu	Unit	108	118	120	120	120
Jumlah Balita	Orang	18.879	16.562	15.590	17.894	17.945
Rasio Posyandu per Satuan Balita	Rasio	6	7	8	7	7

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

Jumlah Posyandu di Kota Langsa tidak mengalami penambahan di tiga tahun terakhir. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah Posyandu masih berada pada angka 120 unit yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah Balita di Kota Langsa pada tahun 2012 sebanyak 18.879 orang, pada tahun 2013 mengalami penurunan 16.562 orang, pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 15.590 orang, namun di tahun 2015 naik kembali menjadi 17.894 orang dan pada tahun 2016 terus naik menjadi 17.945 orang.

Perkembangan rasio Posyandu terhadap Balita di Kota Langsa mengalami penurunan yang tidak terlalu besar. Hal ini terlihat dari tahun 2014 rasio posyandu terhadap Balita sebanyak delapan, pada tahun 2015 dan 2016 rasio Posyandu terhadap Balita menurun menjadi tujuh. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio

ketersediaan posyandu per Balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah Posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

B. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Terhadap Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Rasio Puskesmas per satuan penduduk tahun 2012 adalah 0,03 dan konstan hingga tahun 2016. Untuk rasio Poliklinik per satuan penduduk cenderung menurun, pada tahun 2012 tercatat 0,12 dan pada tahun 2013 turun menjadi 0,11 dan hingga tahun 2016 rasio Poliklinik per satuan penduduk konstan pada angka 0,11. Untuk rasio Puskesmas Pembantu di Kota Langsa menunjukkan tren yang cenderung menurun, pada tahun 2012 hingga 2014 tercatat rasionya 0,05 dan pada tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 0,04.

Tabel 2.10  
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Langsa Tahun 2012-2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Puskesmas	Unit	5	5	5	5	5
Jumlah Poliklinik	Unit	18	18	18	18	18
Jumlah Pustu	Unit	7	8	8	7	7
Jumlah Penduduk	Orang	154.722	157.011	162.814	165.890	168.820
Rasio Puskesmas Per satuan Penduduk	Rasio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Rasio Poliklinik Per satuan Penduduk	Rasio	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Rasio Pustu per satuan Penduduk	Rasio	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

C. Rasio Rumah Sakit Terhadap Satuan Penduduk

Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Tabel 2.11  
Jumlah Rumah Sakit di Kota Langsa Tahun 2012-2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta	Unit	3	3	3	3	3
Jumlah Seluruh Rumah sakit	Unit	4	4	4	4	4
Jumlah Penduduk	Orang	154.722	157.011	162.814	165.890	168.820
Rasio Jumlah Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Rasio	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

Jumlah seluruh Rumah Sakit di Kota Langsa pada tahun 2016 adalah sebanyak empat unit yang terdiri dari satu unit milik pemerintah daerah dan tiga unit milik swasta. Rasio Rumah Sakit terhadap satuan penduduk sebanyak 0,024, artinya setiap 1.000 penduduk di Kota Langsa dapat memanfaatkan pelayanan Rumah Sakit sebanyak 0,024.

D. Rasio Dokter Terhadap Satuan Penduduk

Rasio Tenaga dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter berbanding dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, distribusi dokter tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.12  
Rasio Dokter Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Dokter	Orang	31	30	24	21	17
Jumlah Penduduk	Orang	154.722	157.011	162.814	165.890	168.820
Rasio Dokter per satuan penduduk	Rasio	0,20	0,19	0,15	0,13	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

Jumlah dokter di Kota Langsa dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 jumlah dokter sebanyak 31 orang, turun hingga pada tahun 2016 menjadi 17 orang dokter dengan rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk mencapai 0,10 atau dengan kata lain di tahun 2016, untuk setiap 1.000 penduduk dapat dilayani oleh 0,10 jasa dokter. Penurunan rasio ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk serta berkurangnya jumlah dokter. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dokter di Kota Langsa masih sangat besar demi terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat.

E. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Tabel 2.13  
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah tenaga medis	Orang	396	472	391	433	367
Jumlah penduduk	Orang	154.722	157.011	162.814	165.890	168.820
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2,56	3,01	2,40	2,61	2,17

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

Untuk rasio tenaga medis di Kota Langsa mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebanyak 2,56 persen menurun menjadi 2,17 persen pada tahun 2016, hal ini berarti 2,17 orang tenaga medis dapat melayani 1.000 penduduk di Kota Langsa. Penurunan ini diakibatkan berkurangnya jumlah tenaga medis serta meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2016.

F. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSUD).

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Langsa pada periode tahun 2014 hingga 2016 mengalami perubahan, dari tahun 2014 cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani mencapai 58,88 persen, naik pada tahun 2015 dan 2016 mencapai 100 persen. hal ini berarti bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani seluruhnya dan bahkan termasuk melayani ibu hamil yang berasal dari luar wilayah kerjanya.

Tabel 2.14  
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani  
Tahun 2014-2016 di Kota Langsa

Uraian	Satuan	2014	2015	2016
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan	Orang	461	450	647
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	783	450	647
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	58,88	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017



G. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak 2014 sampai dengan 2016 cenderung mengalami perubahan. Pada tahun 2014 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 84,85 persen, turun pada tahun 2015 menjadi 65,33 persen, tetapi di tahun 2016 mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai 83,74 persen. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

Tabel 2.15  
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2014-2016 di Kota Langsa

Uraian	Satuan	2014	2015	2016
Jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan	Orang	3.171	2.378	3.389
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang	3.737	3.640	4.047
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	84,85	65,33	83,74

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

H. Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Indikator yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* (UCI). UCI telah dimasukkan sebagai indikator kinerja pelayanan kesehatan primer pada anak sehingga dapat berguna dalam pengelolaan program dan pengambilan keputusan. UCI adalah gambaran suatu desa dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap meliputi : satu dosis BCG, tiga dosis DPT, empat dosis Polio, empat dosis Hepatitis B, satu dosis Campak.

Tabel 2.16  
Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunization*) Tahun 2014-2016 di Kota Langsa

Uraian	Satuan	2014	2015	2016
Jumlah desa UCI	Unit	57	45	62
Jumlah seluruh desa	Unit	66	66	66
Cakupan Desa UCI	Persen	86,36	68,18	93,94

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

I. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2016 masih fluktuatif. Masih rendahnya

cakupan karena masih adanya sebagian masyarakat yang *dropout* dalam berobat.

Tabel 2.17  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA  
Tahun 2014-2016 di Kota Langsa

Uraian	Satuan	2014	2015	2016
Jumlah penderita baru yang ditemukan dan diobati	Orang	105	65	103
Jumlah perkiraan penderita baru	Orang	703	527	818
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	14,94	12,33	12,59

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

J. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD  
Penyakit-penyakit yang ditularkan vektor dan menjadi masalah kesehatan di indonesia adalah malaria, filariasis dan demam berdarah. Penularannya dari orang ke orang dengan perantaraan nyamuk, demam berdarah sendiri ditularkan oleh nyamuk *aedes aegypti* dan *aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah sub tropik dan tropik dan mengenai sekitar 500–100 juta jiwa per tahun. Dengan demikian, sekitar dua per lima penduduk dunia bertempat tinggal di daerah berisiko tinggi termasuk Indonesia.

Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini, kasus DBD cenderung menurun dari tahun 2014 yaitu sebanyak 224 kasus menjadi 67 kasus di Tahun 2016. Seluruh kasus yang terjadi baik melalui penularan setempat maupun import dari wilayah luar Kota Langsa telah mendapatkan penanganan seluruhnya 100 persen.

Tabel 2.18  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD  
Tahun 2014-2016 di Kota Langsa

Uraian	Satuan	2014	2015	2016
Jumlah penderita DBD yang ditangani	Kasus	224	46	67
Jumlah penerita DBD yang ditemukan	Kasus	224	46	67
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

K. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)  
Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, di antaranya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas dan jaringannya sebagai institusi yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan di jenjang pertama yang terlibat langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja masing-masing agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan kinerja Puskesmas.

Tabel 2.19  
 Cakupan Puskesmas dan Pustu  
 Tahun 2014-2016 di Kota Langsa

Uraian	Satuan	2014	2015	2016
Jumlah Puskesmas	Unit	5	5	5
Jumlah Seluruh Kecamatan	Kecamatan	5	5	5
Cakupan Puskesmas	Persen	100	100	100
Jumlah Pustu	Unit	26	25	25
Jumlah Seluruh Desa	Desa	66	66	66
Cakupan Pustu	Persen	39,39	37,88	37,88

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2017

### 2.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### A. Jalan

##### A.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Langsa pada tahun 2012 mencapai 0,38 atau 38 persen dari total panjang jalan kota. Angka ini terus meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,47 atau 47 persen dari total panjang jalan keseluruhan.

Tabel 2.20  
 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik  
 Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Kondisi Jalan	Satuan	Panjang Jalan				
		2012	2013	2014	2015	2016
Kondisi baik	Km	234,14	246,67	251,37	260,49	290,84
Panjang Jalan Keseluruhan	Km	623,27	623,27	623,27	623,37	623,27
Proporsi	Persen	38	40	40	42	47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa 2017

A.2. Perkembangan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Turap atau dinding penahan tanah adalah konstruksi yang dapat menahan tekanan tanah di sekelilingnya, mencegah terjadinya kelongsoran dan biasanya terdiri dari dinding turap dan penyangganya. Konstruksi dinding turap terdiri dari beberapa lembaran turap yang dipancangkan ke dalam tanah, serta membentuk formasi dinding vertikal yang berguna untuk menahan timbunan tanah atau tanah yang berlereng.

Pembangunan turap di aliran sungai selama periode 2013-2016 mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,21 km atau sekitar 1,74 persen dari jumlah seluruh wilayah longsor yang mencapai 12,04 km meningkat menjadi menjadi 0,24 km atau sekitar 1,99 persen.

Tabel 2.21  
Perkembangan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Km	0,21	0,21	0,24	0,24
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	Km	12,04	12,04	12,04	12,04
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	Persen	1,74	1,74	1,99	1,99

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa, Tahun 2017

A.3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah sehat salah satunya haruslah memiliki sistem sanitasi yang baik. Perkembangan persentase rumah tangga bersanitasi di Kota Langsa dari tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung meningkat dari 28.772 unit rumah yang bersanitasi pada tahun 2012 menjadi 32.550 unit pada tahun 2016.

Tabel 2.22  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Tinggal Bersanitasi	Unit	28.772	29.835	30.865	31.800	32.550
Jumlah Rumah Tinggal	RT	33.530	33.906	34.221	35.110	35.526
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	85,81	85,93	86,10	87,91	89,64

Sumber : Strategi Sanitasi Kota Langsa 2015-2019, Bappeda Kota Langsa, Tahun 2017

A.4. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di Kota Langsa, telah menyebabkan semakin berkembangnya rumah petak kecil yang diperjualbelikan dan disewakan kepada para pendatang. Rumah-rumah petak kecil tersebut kemudian berkembang menjadi kawasan padat dan kumuh yang disebut dengan kawasan kumuh (*slum area*). Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Di beberapa wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Tabel 2.23  
Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Pemukiman Kawasan Kumuh	Ha	179,24	169,24	169,24	169,24	155,74
Luas wilayah	Ha	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	0,75	0,71	0,71	0,71	0,65

Sumber: Laporan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Tahun 2016 dan Materi Teknis RTRW 2012-2032 Bappeda Kota Langsa, Tahun 2017 (diolah)

Perkembangan luas lingkungan pemukiman kumuh tahun 2012-2016 di Kota Langsa menunjukkan tren yang positif, dimana pada tahun 2012 persentase lingkungan pemukiman kumuh sebesar 0,75 persen, menurun pada tahun 2016 menjadi 0,65 persen. Hal ini berarti bahwa lingkungan pemukiman kumuh semakin berkurang, berganti dengan membaiknya kondisi pemukiman kumuh menjadi pemukiman layak huni.

B. Penataan Ruang

Tata ruang atau *spatial plan* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Tabel 2.24  
Pola Ruang Eksisting Kota Langsa Tahun 2016

Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
Hutan	5.346,80	22,34
Industri	57,27	0,24
Pelabuhan	30,26	0,13
Pemukiman	2.546,83	10,64
Perkebunan	9.017,64	37,67
Pusat Perdagangan	215,58	0,90
Rumah Sakit	4,97	0,02
Sawah	1.243,08	5,19
Sungai	2.162,24	9,03
Tambak	3.278,72	13,70
TPA	16,18	0,07
Pemukaman	15,90	0,07
Waduk	2,70	0,01
Pertahanan dan Keamanan	3,87	0,02
Fasilitas Olahraga	40,92	0,17
Total	23.982,94	100,00

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Penataan ruang di Kota Langsa sepenuhnya mengacu pada RTRW Kota Langsa yang tercantum dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang di wilayah Kota Langsa berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Langsa;
2. Memberikan arahan bagi indikasi program utama dalam RTRW Kota Langsa;
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa.

Berdasarkan pola ruang eksisting, diketahui bahwa pola ruang di Kota Langsa paling dominan peruntukkannya untuk kawasan perkebunan (37,67 persen), disusul kemudian untuk kawasan hutan (22,34 persen), tambak (13,70 persen), dan pemukiman (10,64 persen).

Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 30 persen. Dari luas tersebut, 20 persen diantaranya adalah RTH publik, dan sebesar 10 persen adalah untuk RTH privat.

Tabel 2.25  
Perkembangan Ruang Terbuka Hijau  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah ruang terbuka hijau	Ha	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
Jumlah ruang publik yang tersedia	Ha	95,58	95,58	95,58	98,20	98,20
Proporsi Ruang Terbuka Hijau	Persen	15,68	15,88	15,88	15,46	15,46

Sumber : Materi Teknis RTRW 2012-2032 Bappeda Kota Langsa, Tahun 2017

Pada tahun 2016, persentase ruang terbuka hijau di Kota Langsa adalah sebesar 15,46 persen atau 15,18 ha dari keseluruhan jumlah ruang publik yang tersedia.

C. Pengairan

C.1. Irigasi

Menurut pengelolaannya jaringan irigasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu jaringan irigasi utama (primer), jaringan irigasi (sekunder), dan jaringan irigasi tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnnya.

Perkembangan luas jaringan irigasi di Kota Langsa dari tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan meskipun relatif sedikit lambat, dimana pada tahun 2013 persentase luas irigasi dalam kondisi baik sebanyak 0,07 naik menjadi 0,65 di tahun 2016. Hal ini diakibatkan karena adanya penambahan panjang saluran irigasi pada tahun 2016.

Tabel 2.26  
Luas Jaringan Irigasi Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Panjang saluran irigasi	Ha	130	158	888	1.153
Luas lahan budidaya pertanian	Ha	1.774	1.774	1.774	1.774
Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	0,07	0,09	0,50	0,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa 2017

C.2. Sempadan Sungai

Garis sempadan sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda ditiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (*flood plain*), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi.

Garis ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor. Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kota Langsa dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.27  
Perkembangan Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai  
Bangunan Liar Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Km	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Panjang seluruh sempadan sungai	Km	38,13	38,13	38,13	38,13	38,13
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	21,51	21,51	21,51	21,51	21,51

Sumber : Sarpraswil Bappeda Kota Langsa, Tahun 2017

2.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah tinggal. Secara umum rumah layak huni adalah rumah yang memiliki kecukupan minimal unsur ruang dan luas ruang serta kualitas bangunannya yang memenuhi standar teknis. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, Pemerintah Kota Langsa juga berusaha untuk terus menambah jumlah rumah dengan cara membangun dan melakukan rehab bagi para penduduk yang dikategorikan tidak mampu. Upaya ini, sedikit banyaknya telah membuahkan hasil yang ditandai dengan meningkatnya persentase rumah layak huni pada tahun 2016 yaitu sebanyak 88,74 persen atau sebanyak 31.527 unit dari total keseluruhan.



Tabel 2.28  
Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Layak Huni	Unit	28.105	28.576	29.210	31.100	31.527
Jumlah Seluruh Rumah	Unit	33.530	33.906	34.221	35.110	35.526
Rumah Layak Huni	Persen	83,82	84,28	85,36	88,58	88,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa, Tahun 2017

B. Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.

Tabel 2.29  
Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Permukiman Layak Huni	Ha	2.226	2.346	2.357	2.370	2.398
Luas Wilayah Pemukiman	Ha	2.406	2.515	2.526	2.539	2.554
Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,925	0,933	0,933	0,933	0,939

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa, Tahun 2017

D. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2.30  
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS)	M <sup>3</sup>	35.716	36.210	38.232	51.255	51.255
Jumlah Penduduk	Jiwa	154.722	157.011	162.814	165.890	168.820
Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan penduduk	Rasio	231	231	235	309	304

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, Tahun 2017

E. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-

masing. Rasio ketersediaan rumah ibadah adalah jumlah tempat ibadah per jumlah penduduk. Di Kota Langsa, mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Saat ini mesjid/meunasah, tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata-mata, tetapi juga merupakan pusat segala kegiatan sosial kemasyarakatan dan lebih jauh lagi mesjid/meunasah merupakan sentral segala kegiatan umat Islam.

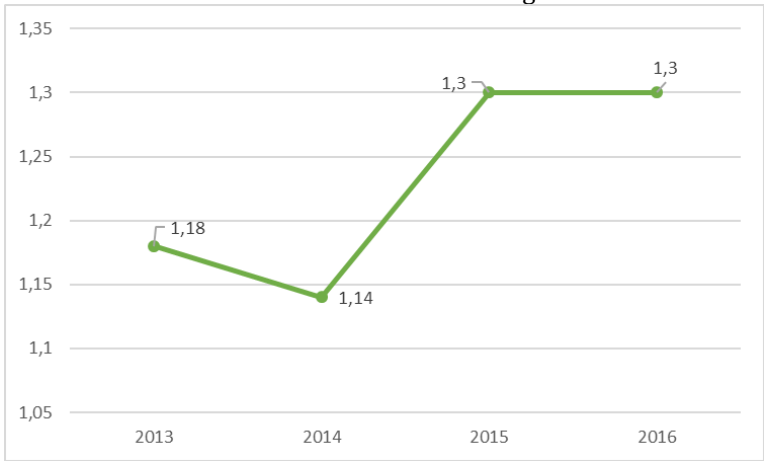
Tabel 2.31  
Perkembangan Tempat Ibadah  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Mesjid/Meunasah	Unit	184	184	213	217
Gereja	Unit	1	1	1	1
Vihara	Unit	1	1	1	1
Jumlah Tempat Ibadah Keseluruhan	Unit	186	186	215	219

Sumber : BPS dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa 2017

Jumlah Mesjid/Meunasah di Kota Langsa dari tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 berjumlah 184 unit bertambah menjadi 217 unit pada tahun 2016. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 adalah 1,18 dan pada tahun 2016 naik menjadi 1,30.

Grafik 2.15  
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa



Sumber : BPS dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa 2017

F. Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Rasio Tempat Pemakaman Umum di Kota Langsa dapat dihitung dengan jumlah daya tampung TPU per jumlah penduduk dikali 1.000. Berikut adalah tabel rasio

tempat pemakaman umum (TPU) per satuan penduduk di Kota Langsa dari tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2.32  
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum (TPU)	-	10.564	10.164	9.692	9.292	8.892
Jumlah Penduduk	Jiwa	154.722	157.011	162.814	165.890	168.820
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Rasio	68	65	60	56	53

Sumber : Bappeda Kota Langsa, Tahun 2017

Bila dilihat dari tabel di atas, menunjukkan adanya penurunan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah daya tampung pemakaman umum (TPU) yang berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya.

2.3.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  
Kapasitas pemerintah Kota Langsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diperlihatkan dengan jumlah polisi pamong praja dan personil Wilayatul Hisbah, serta jumlah Poskamling dalam memberdayakan masyarakat di setiap gampong untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Perkembangan rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk cenderung mengalami sedikit peningkatan selama periode 2012-2016, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 24 personil Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk Kota Langsa naik menjadi 26 personil Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk Kota Langsa. Sedangkan rasio Poskamling per jumlah desa adalah tetap tidak berubah yaitu tiga.

Tabel 2.33  
Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Petugas Linmas Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	366	366	428	433	437
Jumlah Personil Wilayahtul Hisbah	Orang	83	83	83	83	83
Jumlah Linmas	Orang	35	35	556	700	556
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	66	66	66	66	66
Jumlah Pos Siskamling	Unit	212	212	212	212	212
Jumlah Penduduk	Jiwa	154.722	157.011	162.814	165.890	168.820
Jumlah Desa/Gampong	Desa	66	66	66	66	66
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Rasio	24	23	26	26	26
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	2	2	34	42	33
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa	Rasio	3	3	3	3	3

Sumber : Satpol PP dan WH, Tahun 2017

Untuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) mengalami perubahan fluktuatif, dimana pada tahun 2013 yaitu sebanyak 100 persen, turun pada tahun 2014 yaitu 17 persen. Namun pada tahun 2015 kembali naik menjadi 97 persen.

Tabel 2.34  
Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
Jumlah Penyelesaian Penegakan Qanun (Pajak dan Retribusi Daerah)	Buah	100	105	164
Jumlah Pelanggaran Perkara Qanun (Pajak dan Retribusi Daerah)	Buah	45	162	169
Jumlah Penegakan Qanun (Pajak dan Retribusi Daerah)	Persen	65	65	97
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Buah	133	43	168
Jumlah Pelanggaran K3	Buah	133	260	181
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraan, Keindahan)	Persen	100	17	93
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	Persen	33	26	30

Sumber : Satpol PP dan WH, Tahun 2016

2.3.2.1.6. Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Beberapa penyebab maraknya jumlah PMKS di Kota Langsa antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, juga faktor mobilitas penduduk/PMKS yang berasal dari luar daerah yang ingin mencari peruntungan di Kota Langsa. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat diharapkan akan membuahkan hasil yang maksimal.

Tabel 2.35  
Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Dibiayai  
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015
Jumlah Panti Asuhan dan Panti Rehabilitasi Baik Swasta dan Pemerintah	Unit	5	5	5
Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Orang	270	6.796	3.851
Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	2.146	4.483	4.483
Jumlah PMKS yang Tertangani	Orang	270	6.796	3.851
Jumlah PMKS yang Ada	Orang	2.146	55.413	18.562
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	13	152	86
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	13	30	21

Sumber : Dinas Sosial Kota Langsa, Tahun 2017

Jumlah sarana sosial di Kota Langsa adalah sebanyak lima unit dengan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2015 adalah sebanyak 86 persen. Sedangkan persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2015 adalah sebanyak 21 persen.

2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.2.1. Ketenagakerjaan

Indikator keberhasilan kinerja bidang ketenagakerjaan dapat diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor yang mempengaruhi angka TPAK.

Tabel 2.36  
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan  
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	58,85	56,51	57,94	63,43
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,79	11,74	9,89	8,55

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

TPAK Kota Langsa pada tahun 2015 sebesar 63,43 persen, ini menunjukkan bahwa sebanyak 63,43 persen penduduk usia 15 tahun ke atas (usia kerja) di Kota Langsa aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja maupun masih mencari pekerjaan.

TPT mengindikasikan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Langsa dari tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 TPT sebesar 8,79 persen turun menjadi 8,55 persen pada tahun 2015.

2.3.2.2.2. Pangan

*World Health Organization* mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki

sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi.

Tabel 2.37  
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi  
Tanaman Pangan Tahun 2015 Kota Langsa

Uraian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Padi	2.993	2.946	15.114
Jagung	7	5	15
Ubi Kayu	20	20	400

Sumber : Langsa Dalam Angka, Tahun 2016

Ketahanan pangan di bidang tanaman pada tahun 2015 untuk komoditi padi mencapai nilai produksi sebesar 15.114 ton yang ditanam di area seluas 2.993 hektar. Selanjutnya komoditi jagung mencapai nilai produksi sebesar 15 ton yang ditanam di area seluas 7 hektar dan ubi kayu mencapai 400 ton yang ditanam di area seluas 20 hektar.

Terkait dengan ketahanan pangan yang berasal dari ternak, jumlah produksi daging ternak di Kota Langsa pada tahun 2015 adalah sebesar 1.191.439 kg atau setara dengan 1.191,43 ton. Jumlah produksi daging ternak masih didominasi oleh ayam ras pedaging yaitu sebesar 522.750 kg atau 522,75 ton, selanjutnya diikuti oleh produksi daging sapi yang mencapai 410.932 kg atau 410,93 ton. Sedangkan jumlah produksi daging yang paling rendah, dihasilkan oleh daging domba yang hanya sebesar 1.750 kg atau 1,75 ton. Namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah produksi daging ternak pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Tabel 2.38  
Jumlah Produksi Daging Ternak  
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015
Sapi	Kilogram	329.200	375.223	411.899	410.932
Kerbau	Kilogram	43.106	37.241	7.831	6.223
Kambing	Kilogram	63.875	42.156	63.721	37.963
Domba	Kilogram	8.466	4.043	1.393	1.750
Ayam Buras	Kilogram	38.720	146.496	92.568	130.200
Ayam Ras Pedaging	Kilogram	729.736	963.197	1.328.988	522.750
Itik	Kilogram	16.043	83.485	125.088	81.621
Jumlah		1.229.146	1.651.841	2.031.488	1.191.439

Sumber : Langsa Dalam Angka, Tahun 2016

2.3.2.2.3. Kebudayaan

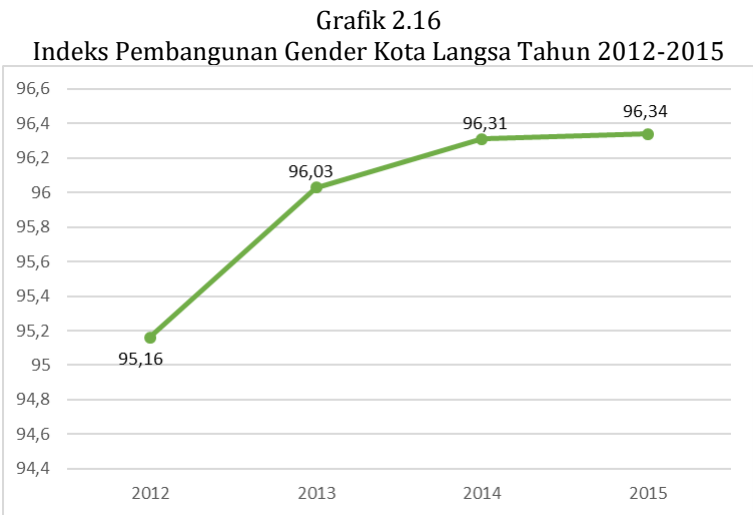
Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia,

sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Melestarikan dan mempertahankan suatu kebudayaan bisa dilakukan dengan cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang budaya itu sendiri. Mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengembangkan seni budaya tersebut. Pelestarian budaya di Kota Langsa selama ini dilakukan dengan mengadakan berbagai penyelenggaraan festival seni dan budaya, meskipun intensitasnya tidak begitu tinggi namun kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Langsa. Selain penyelenggaraan seni dan budaya, penyediaan sarana penyelenggaraan juga memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Di Kota Langsa, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2016 adalah sebanyak tiga unit.

2.3.2.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) mendeskripsikan kualitas pembangunan manusia yang ditinjau dari komponen yang sama dengan IPM yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Perkembangan IPG Kota Langsa dalam empat tahun terakhir 2012-2015 terus mengalami peningkatan yaitu dari 95,16 pada tahun 2012 naik menjadi 96,34 pada tahun 2015.



Sumber : BPS Aceh, Tahun 2016

B. Partisipasi Perempuan

Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Langsa mengalami penurunan dari tahun 2013-2016, yaitu dari 65 persen



pada tahun 2013 menjadi 54 persen pada tahun 2016. Berbanding terbalik, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta selama dua tahun terakhir 2014-2015 meningkat, yaitu dari 18 persen pada tahun 2013 naik menjadi 20 persen pada tahun 2015 dan 2016.

Tabel 2.39  
Perkembangan Partisipasi Perempuan  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

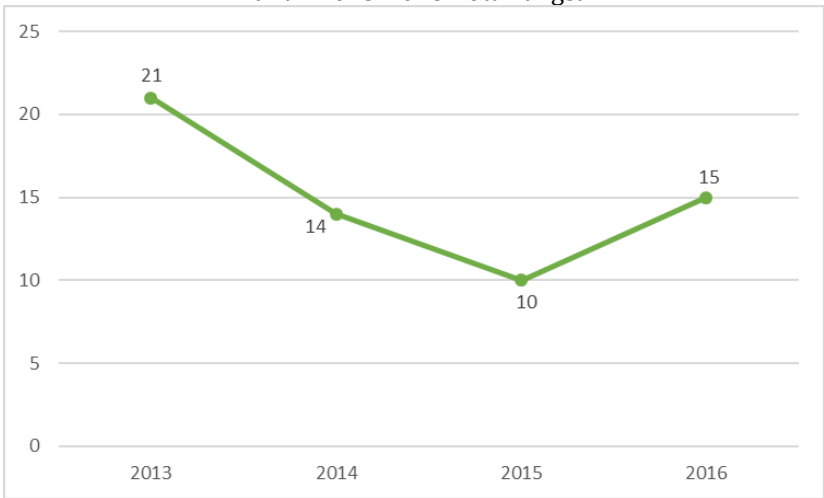
Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Orang	2.883	3.929	2.984	2.994
Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	Orang	647	711	725	740
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	65	63	53	54
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	18	15	20	20

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, Tahun 2017

C. Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Jumlah kejadian KDRT di Kota Langsa pada tahun 2013 sebanyak 21 kasus, turun di tahun 2014 menjadi 14 kasus, dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 10 kasus. Namun pada tahun 2016 kembali naik menjadi 15 kasus. Diharapkan di masa yang akan datang, selain adanya campur tangan pemerintah Kota Langsa, diperlukan juga peran aktif masyarakat dalam upaya menekan seminimal mungkin jumlah KDRT, mengingat dampak dari KDRT akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

Grafik 2.17  
Jumlah Kasus Kekerasan Rumah Tangga  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa



Sumber: Dinas P3AP2 dan KB Kota Langsa, Tahun 2017

2.3.2.2.5. Pertanahan

Lahan dapat diartikan sebagai *land settlement* yaitu suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidupnya.

Tabel 2.40  
Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan  
Tahun 2012-2016 di Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk yang memiliki lahan	Orang	74.101	75.362	85.312	93.942	109.960
Jumlah Penduduk	Orang	154.722	157.011	162.814	165.890	168.820
Persentase penduduk yang memiliki lahan	Persen	47,89	48,00	52,40	56,63	65,13

Sumber : *Langsa Dalam Angka, Tahun 2016*

Untuk setiap penduduk yang memiliki lahan disahkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, maka sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, untuk itu data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data tersebut diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Bukti kepemilikan atau tanda bukti hak tanah tersebut antara lain, sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Di Kota Langsa, pada tahun 2015 sertifikat hak atas tanah yang paling banyak diterbitkan adalah yang berasal dari pemberian hak, yakni sebanyak 1.613 sertifikat dari jumlah keseluruhan 3.483 sertifikat.

Tabel 2.41  
 Banyaknya Kegiatan Pelayanan Sertifikat Hak Atas Tanah yang  
 Diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Langsa Tahun 2015

Jenis Kegiatan Pelayanan	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan
Jual Beli	675
Hibah	51
Pemisahan Hak	205
Warisan	69
Hak Tanggungan	592
Pengakuan Hak	278
Pemberian Hak	1.613
Jumlah	3.483

Sumber : Langsa Dalam Angka Tahun 2016

2.3.2.2.6. Lingkungan Hidup

A. Penanganan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi : 1) Pembatasan timbunan sampah; 2) Pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi : 1) Pemilihan; 2) Pengumpulan; 3) Pengangkutan; 4) Pengolahan; dan 5) Pemrosesan akhir sampah.

Tabel 2.42  
 Persentase Penanganan Sampah Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Volume sampah yang ditangani	M3	27	29	56	57	57
Volume produksi sampah	M3	196	196	197	201	203
Persentase Penanganan Sampah	Persen	13,78	14,80	28,43	28,36	28,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, Tahun 2017

Persentase penanganan sampah di Kota Langsa periode 2012-2016 cenderung menurun, pada tahun 2014 persentase penanganan sampah sebesar 28,43 persen, menurun pada tahun 2015 menjadi 28,36 persen, dan hingga tahun 2016 persentase penanganan sampah di Kota Langsa kembali menurun menjadi 28,08 persen. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi sampah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit

penyakit, serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebarkan suatu penyakit.

B. Tersedianya Dokumen KLHS Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dengan tujuan utama dari pelaksanaan KLHS adalah memastikan bahwa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.3.2.2.7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Tabel 2.43  
Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP	Jiwa	119.436	93.919	82.968	93.547
Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	119.436	93.919	91.657	133.628
Kepemilikan KTP	Persen	100	100	90,52	70,00
Penerapan KTP Berbasis NIK	Sudah/Tidak	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Tahun 2017

Pada tahun 2013 dan 2014, persentase kepemilikan KTP di Kota Langsa mencapai 100 persen. Persentase ini turun pada tahun 2015 yaitu 90,52 persen, dan kembali turun pada tahun 2016 yaitu menjadi 70 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk wajib KTP. Penerapan KTP berbasis elektronik sudah diterapkan di Kota Langsa.

2.3.2.2.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Dalam Pasal dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK adalah keluarga di pedesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material. Jumlah PKK di Kota Langsa tahun 2013-2015 adalah sebanyak 71 PKK dengan status seluruhnya adalah aktif.

Tabel 2.44  
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1
Jumlah LSM Aktif	Lembaga	25	32	32	30
Jumlah Ormas Aktif	Organisasi	43	39	42	31

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Langsa, Tahun 2017

2.3.2.2.9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan dari program keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah untuk meningkatkan partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Rasio akseptor KB di Kota Langsa periode 2013-2015 cenderung mengalami sedikit penurunan ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan jumlah pengguna akseptor KB dan jumlah pasangan usia subur.

Tabel 2.45  
Perkembangan Rasio Akseptor KB  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pengguna Akseptor KB	Orang	16.543	17.278	17.280	20.588
Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasang	23.024	24.261	24.270	24.147
Rasio Akseptor KB	Rasio	0,71	0,71	0,71	0,85

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, Tahun 2017

2.3.2.2.10. Perhubungan

Perkembangan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur daerah, peningkatan jumlah kendaraan serta perkembangan jumlah penduduk. Sebagai kota yang terletak di jalan lintas Sumatera, jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang masuk dan keluar daerah terus meningkat dari 59.130 penumpang pada tahun 2013 menjadi 60.225 penumpang pada tahun 2014 dan kembali meningkat di tahun 2016 yaitu menjadi 70.080 penumpang. Peningkatan arus penumpang ini juga ikut meningkatkan jumlah izin trayek yang dikeluarkan, yakni dari 5 izin trayek pada tahun 2013 menjadi 11 izin trayek pada tahun 2016.

Tabel 2.46  
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	59.130	60.225	67.890	70.080
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	surat	5	8	8	11
Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	887	909	920	1.039
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	30	30	30	30
Jumlah terminal	Unit	1	1	1	1
Jumlah pelabuhan	Unit	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Langsa, Tahun 2017

2.3.2.2.11. Komunikasi dan Informatika

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sangatlah bermanfaat dalam kehidupan karena memberikan kemudahan bagi penggunanya. Bahkan dengan seiringnya perkembangan zaman sudah banyak produk yang dihasilkan dan bisa memberikan beberapa manfaat dalam satu alat.

Salah satu media penerapan teknologi informasi adalah *website*. Saat ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Saat ini, Pemerintah Kota Langsa telah menyediakan *website* resmi yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui <http://www.langsakota.go.id>. Berbagai informasi terkait Kota Langsa dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga. Selain *website*, di Kota Langsa juga terdapat 5 (lima) tower BTS (*base transceiver station*) yang berlokasi di lima kecamatan. Namun pemberian izin oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja terkait

terhadap pembangunan tower tersebut oleh pihak swasta perlu kembali dikaji dan harus mengikuti prosedur yang berlaku.

2.3.2.2.12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Jumlah koperasi aktif di Kota Langsa periode 2013-2016 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 persentase koperasi aktif sebanyak 28 persen naik menjadi 37 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.47  
Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	91	136	117	127
Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	323	339	333	339
Persentase Koperasi Aktif	Persen	28	40	35	37
Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM	Unit	510	490	2.944	1.335
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	552	464	668	2.041
Jumlah Seluruh UKM	Unit	1.062	954	3.612	3.376
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	52	49	18	60

Sumber : Disperindag UKM Kota Langsa, Tahun 2017

2.3.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Telah terjadi penurunan jumlah organisasi pemuda di Kota Langsa hingga akhir tahun 2016 menjadi 48 organisasi dari tahun 2015 yang hanya lima organisasi. Namun kenaikan jumlah organisasi ini tidak mempengaruhi kegiatan kepemudaan di Kota Langsa. Jumlah kegiatan kepemudaan dari tahun 2012 adalah dua kegiatan dan pada tahun 2016 hanya bertambah satu kegiatan menjadi tiga kegiatan.

Untuk tetap menjaga prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga, Pemerintah Kota Langsa melalui perangkat daerah terkait berupaya tetap melakukan program peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan

pembinaan organisasi kepemudaan di wilayah Kota Langsa. Kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk menjadikan pemuda-pemuda yang ada di Kota Langsa menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri.

Terkait dengan olahraga, organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerja sama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Di Kota Langsa, organisasi olahraga selama periode 2013-2016 tidak mengalami perubahan, yaitu berjumlah 32 organisasi atau klub olahraga dari berbagai cabang.

Tabel 2.48  
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Organisasi Pemuda	Kelompok	17	17	5	48
Jumlah Organisasi Olahraga	Kelompok	32	32	32	32
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	2	3	1	3
Jumlah Kegiatan Olahraga	Kegiatan	7	2	6	1
Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	303	300	285	307

Sumber : Disporapar Kota Langsa, Tahun 2017

2.3.2.2.14. Statistik

Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistik penting artinya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan. Hal tersebut mendasari perlu diselenggarakannya kegiatan statistik daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Data statistik yang selama ini tersedia di Kota Langsa adalah (1) Langsa Dalam Angka dengan jenis data ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan; (2) PDRB Kota Langsa yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Langsa; (3) IPM Kota Langsa yang memberikan informasi dengan derajat pendapatan per kapita masyarakat, usia harapan hidup penduduk, serta



angka melek huruf masyarakat Kota Langsa; dan (4) Statistik Daerah yang memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kota Langsa yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

2.3.2.2.15. Perpustakaan

Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang diatur dan disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertian perpustakaan berubah secara berangsur-angsur. Pada mulanya setiap ada kumpulan buku-buku koleksi yang dikelola secara rapi dan teratur disebut perpustakaan, tetapi karena adanya perkembangan teknologi modern dalam usaha pelestarian dan pengembangan informasi, maka koleksi perpustakaan tidak hanya terbatas buku-buku saja tetapi juga beraneka ragam jenisnya.

Di Kota Langsa hingga saat ini terdapat satu unit perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi judul buku mencapai 7.266 judul buku dan 43.849 jumlah koleksi buku pada tahun 2016, dengan jumlah pengunjung mencapai 14.090 orang. Selain itu juga terdapat tiga unit mobil perpustakaan keliling yang siap melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok kota.

Tabel 2.49  
Perkembangan Indikator Perpustakaan Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Kunjungan	5.327	9.638	13.011	14.090
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia	Judul	4.710	6.750	7.266	7.266
Jumlah koleksi buku yang tersedia	Buku	23.549	33.749	43.849	43.849

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Tahun 2017

2.3.2.2.16. Kearsipan

Pengertian Arsip diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang “Ketentuan Pokok Kearsipan” pada Bab I pasal 1 berbunyi sebagai berikut : (1) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan

tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah; (2) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kebangsaan.

Arsip mempunyai peranan sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi. Sebagai sumber informasi, arsip dapat membantu mengingatkan petugas yang lupa mengenai suatu masalah. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat dipergunakan oleh pemimpin organisasi untuk membuat ataupun mengambil keputusan secara tepat mengenai masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa peranan arsip adalah sebagai berikut : (1) alat utama ingatan organisasi; (2) bahan atau alat pembuktian; (3) bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan; dan (4) bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya.

### 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1. Pariwisata

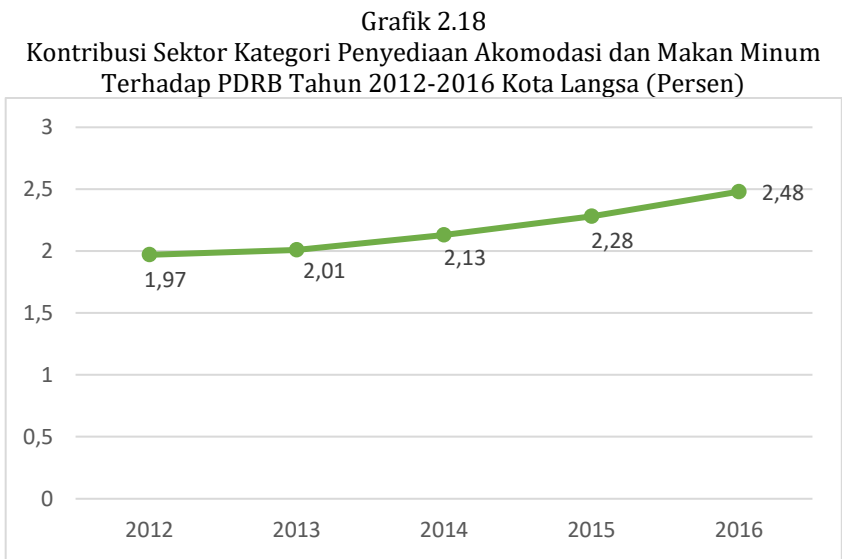
Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai salah satu upaya memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Dalam meningkatkan program pariwisata tidak terlepas dari penyediaan makan dan minum untuk dikonsumsi, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Sebagai salah satu kota yang terletak di wilayah pesisir timur, Kota Langsa menjadi tempat persinggahan pada jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Banda Aceh dengan Kota Medan. Kondisi ini memungkinkan untuk meningkatkan pelayanan sektor pariwisata. Pada musim liburan, jasa penyediaan akomodasi di Kota Langsa dipenuhi para

tamu yang berasal dari luar wilayah Kota Langsa yang singgah sejenak dalam melakukan perjalanan. Selain itu, berbagai macam event yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat juga menggunakan jasa akomodasi berupa hotel untuk mengadakan seminar, pelatihan, rapat, pertemuan dan lain sebagainya.

Perkembangan pariwisata di Kota Langsa dapat ditinjau dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor ini terus mengalami peningkatan selama periode 2012-2016, dimana kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB ADHB pada tahun 2012 adalah sebesar 1,97 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2,48 persen.



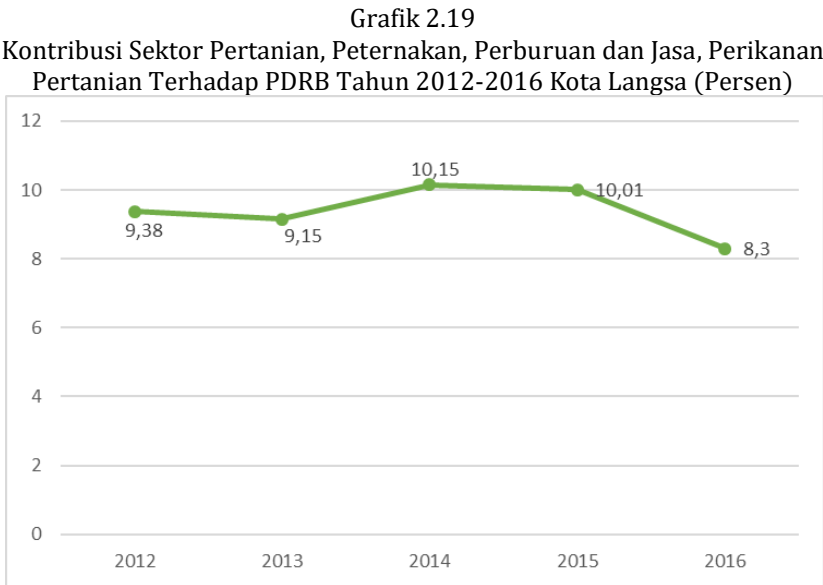
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2012-2016

Selama ini terdapat empat dimensi pokok yang menjadi sasaran dari kegiatan ekowisata di Kota Langsa, yaitu ekonomi, ekologi, sosial dan budaya dengan dua lokasi wisata utama yaitu Hutan Mangrove dan Ruang Terbuka Hijau atau lebih dikenal dengan Taman Hutan Kota Gampong Pondok Kelapa.

2.3.3.2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan ini mencakup subkategori yang terdiri atas : subkategori pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual; sub kategori kehutanan dan penebangan kayu; dan subkategori perikanan. Kondisi di Kota Langsa, sebagai akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, telah terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non

pertanian, sehingga kontribusi sektor pertanian Kota Langsa cenderung mengalami penurunan. Dari sektor perikanan wilayah Kota Langsa memiliki potensi perikanan khususnya perikanan laut dan tambak yang sangat melimpah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya berada tepat bersebelahan dengan Selat Malaka, namun kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya produktivitas lahan tambak dimana sebagian besar lahan pertambakan beralih fungsi menjadi lahan pemukiman penduduk.



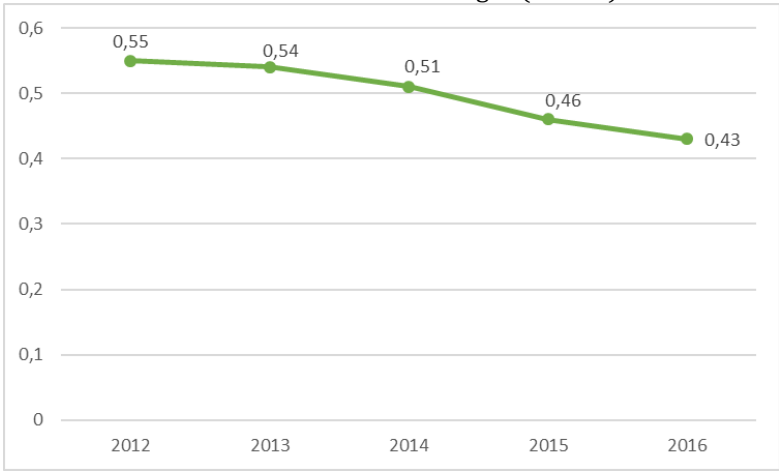
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2012-2016

Berdasarkan PDRB ADHB, kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menurun dari 9,38 persen pada tahun 2012 menjadi 8,3 persen pada tahun 2015.

2.3.3.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada kategori pertambangan dan penggalian, subkategori yang berkontribusi dalam perekonomian Kota Langsa hanya penggalian yang terdapat di Gampong Pondok Keumuning dan Gampong Sukajadi Makmur.

Grafik 2.20  
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen)



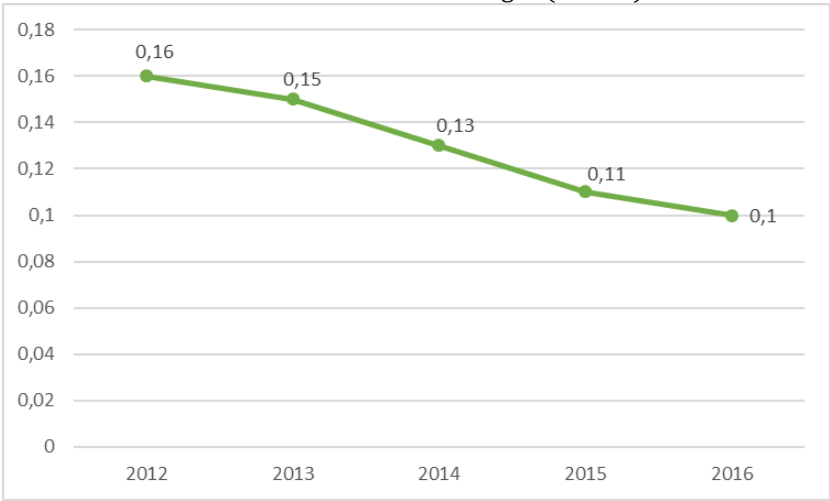
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2012-2016

Kontribusi yang dihasilkan dari kategori pertambangan dan penggalian dari tahun ke tahun bersifat stagnan dan cenderung mengalami tren yang menurun terutama pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena titik-titik lokasi penggalian pasir jumlahnya semakin berkurang. Beberapa diantaranya sudah berkurang kadar pasirnya sehingga tidak dapat dilakukan penggalian. Hal inilah yang menyebabkan produksi pasir menurun. Selain itu, penggalian pasir masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan proses penggalian cenderung kurang maksimal.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ADHB periode 2012-2016 cenderung mengalami penurunan dari 0,55 persen menjadi 0,43 persen.

Selain sektor pertambangan dan penggalian, sub sektor kelistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi meliputi pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT. PLN maupun perusahaan swasta, seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik pemerintah daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri. Kontribusi sektor pengadaan listrik di kota langsa cenderung mengalami penurunan yaitu sebesar 0,16 persen menjadi 0,13 persen pada periode 2012-2016.

Grafik 2.21  
Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik Terhadap PDRB  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen)



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2012-2016

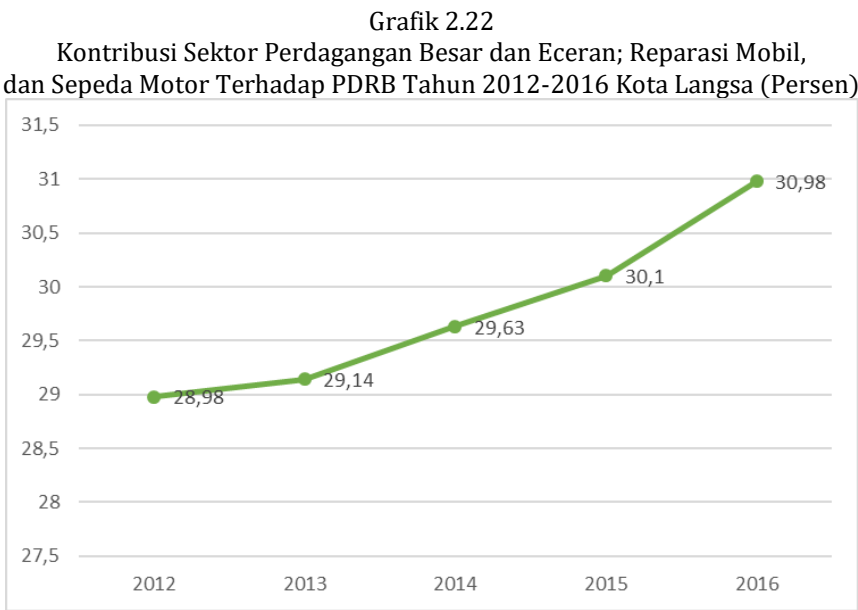
2.3.3.4. Perdagangan

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang

yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2012-2016

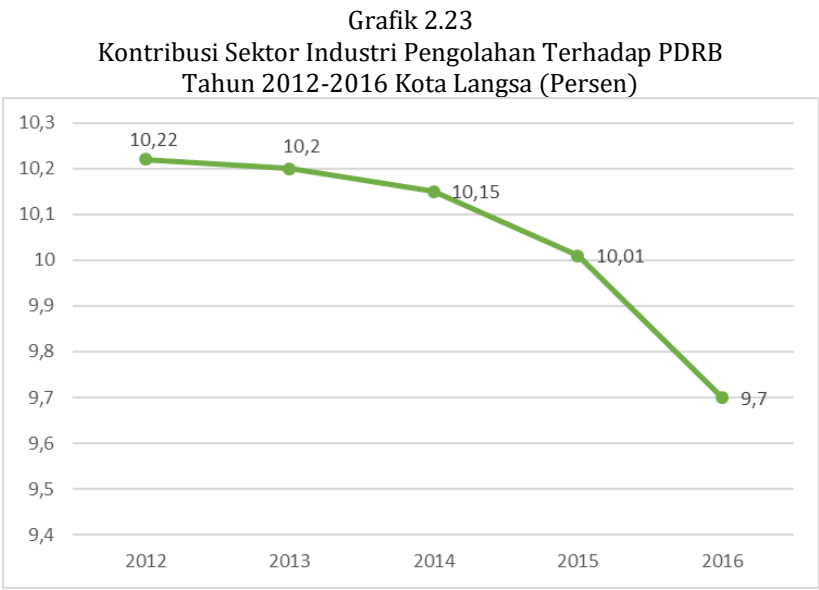
Besarnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor terhadap PDRB ADHB adalah sebesar 28,98 persen pada tahun 2012 naik menjadi 30,98 persen pada tahun 2016.

2.3.3.5. Perindustrian

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Industri pengolahan di Kota Langsa memiliki kontribusi yang menurun terutama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Mulai tahun 2012, kontribusi yang dihasilkan industri pengolahan terhadap PDRB Kota Langsa semakin menurun hingga tahun 2016 yang hanya sebesar 9,7 persen. Hal ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam

menanggapi fenomena tersebut. Industri Pengolahan di Kota Langsa perlu ditenahi agar dapat berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian yang mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat Kota Langsa.



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa 2012-2016

2.3.4. Urusan Penunjang

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin agar program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Langsa dapat berjalan sesuai seperti yang direncanakan. Dokumen perencanaan daerah yang ada di Kota Langsa antara lain sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2013-2032;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah kedua kali melalui Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017;



4. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2018.

#### 2.3.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Langsa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dikategorikan baik, hal ini ditandai dengan berhasilnya Pemerintah Kota Langsa dalam memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tiga tahun terakhir.

Dalam hal alokasi belanja daerah, Pemerintah Kota Langsa juga terus berkomitmen untuk memprioritaskan belanja publik dalam hal ini belanja langsung agar lebih besar dari belanja aparatur atau belanja pegawai di setiap tahun, hal ini dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir alokasi belanja aparatur berada pada kisaran 40 persen.

#### 2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peran aparatur pemerintah menggambarkan tugas yang diemban dalam proses perbaikan/perubahan suatu negara menuju keadaan yang lebih baik, khususnya di negara Indonesia. Tugas penting aparatur pemerintah salah satunya adalah mendorong setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat membangun. Selain itu, pemerintah harus mengupayakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, tidak hanya memberi kemakmuran pada beberapa pihak saja. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu pembangunan optimal.

Upaya peningkatan kinerja aparatur selama ini terus dilakukan. Misalnya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pemberian tugas dan izin belajar. Selain itu, pemberian penghargaan terhadap aparatur yang berprestasi masih terus dilakukan.

Tabel 2.50  
Perkembangan Indikator Kepegawaian Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Kepemilikan Karpeg	Persen	85	85	85	95
Kepemilikan Taspen	Persen	100	96	100	90
Kepemilikan Karis dan Karsu	Persen	90	80	100	85
Kepemilikan Sertifikat Sumpah	Persen	0	100	0	0
Penerbitan SK Tugas Belajar	SK	8	20	10	14
Penerbitan Surat Izin Belajar	IB	137	50	30	46
Pelaksanaan Diklat CPNS	Persen	0	100	100	0
Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur	Orang	45	53	15	1
Proses Perceraian Aparatur	Orang	20	26	20	1
Kepemilikan Karpeg Elektronik	Persen	0	100	95	91
Ketersediaan Daftar Urut Kepegawaian (DUK)	Persen	0	95	95	95
Pemberian Penghargaan Aparatur yang Berprestasi	Orang	268	137	100	99
Jumlah Aparatur yang Mencapai BUP	Orang	59	45	36	75
Jumlah Pensiun Janda/Duda/Yatim	Orang	18	17	15	21
Jumlah Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)	Orang	1	2	1	3
Jumlah SK Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober	Orang	959	1.098	1.100	1.120
Jumlah SK Impasing Jabatan	Orang	175	143	1.100	165
Jumlah Tenaga Honorer yang Diangkat Menjadi CPNS (Melalui Formasi K1 dan K2 atau yang sejenisnya)	Orang	213	58	0	0

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2016

2.3.4.4. Pengawasan

Layanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi jumlah temuan serta tindak lanjut dari hasil temuan tersebut, jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau lembaga perangkat daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi, keuangan, maupun fisik pekerjaan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau menabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan

komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Tabel 2.51  
Pengeluaran Rata-Rata Makanan dan Non Makanan Per Kapita  
Tahun 2013-2015 Kota Langsa

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015
Makanan	437.721,84	456.230,00	443.250,11
Non Makanan	408.274,69	427.003,00	497.412,48
Total	845.996,53	883.233,00	940.662,59

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Langsa Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nila rata-rata pengeluaran per kapita sebulan meningkat yaitu dari Rp.845.996,53 pada tahun 2013 menjadi Rp.883.233,00 pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi Rp.940.662,59. Berikut adalah rincian rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok barang selama 1 (satu) bulan dalam satuan rupiah.

Tabel 2.52  
Rincian Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Barang  
Selama 1 (satu) Bulan Tahun 2013-2015 Kota Langsa (Rupiah)

Kelompok Barang		2013	2014	2015
A	MAKANAN			
1	Padi-padian	59.216	56.897	56.896
2	Umbi-umbian	2.595	3.215	3.240
3	Ikan	60.865	63.434	51.276
4	Daging	9.994	9.006	11.173
5	Telur dan susu	25.434	28.188	29.737
6	Sayur-sayuran	41.806	33.562	27.900
7	Kacang-kacangan	6.819	7.505	8.144
8	Buah-buahan	21.277	20.219	18.475
9	Minyak dan lemak	15.958	16.603	14.802
10	Bahan minuman	15.839	14.656	15.469
11	Bumbu-bumbuan	8.598	8.544	7.943
12	Konsumsi Lainnya	6.615	6.422	5.817
13	Makanan dan minuman jadi	112.563	132.499	135.620
14	Tembakau dan sirih	50.144	55.480	56.758
Jumlah Makanan		7.722	456.230	443.250
B	BUKAN MAKANAN			
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	72.755	167.177	219.491
2	Barang dan jasa	59.629	168.829	154.301
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	33.189	45.190	46.643
4	Barang-barang yang tahan lama	16.455	20.954	36.698

Kelompok Barang		2013	2014	2015
5	Pajak dan asuransi	13.088	13.430	23.312
6	Keperluan pesta dan upacara	13.159	11.423	16.968
Jumlah Bukan Makanan		408.275	427.003	497.412
TOTAL		845.997	883.233	940.663

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

### 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan Indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di desa/gampong terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk barang konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Jika  $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.  $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2.53  
 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)  
 Tahun 2012-2016 Provinsi Aceh (Persen)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks yang diterima petani (IT)	137,16	141,46	108,24	113,65	118,33
Indeks yang dibayar petani (IB)	131,71	137,13	110,28	117,61	122,90
NTP	104,14	103,16	98,15	96,64	96,26

Sumber : BPS Aceh, Tahun 2017

Nilai tukar petani di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu sebesar 104,14 persen menjadi 96,26 persen pada tahun 2016.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah, telah ikut menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan selama periode 2012-2016 mengalami penurunan dari 0,0201 pada tahun 2012 menjadi 0,0162 pada tahun 2016, penurunan ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan peningkatan panjang jalan.

Tabel 2.54  
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa (Persen)

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang Jalan	Km	623,27	623,27	623,27	623,27	623,27
Jumlah Kendaraan	Unit	31.028	32.130	34.076	36.125	38.376
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0201	0,0194	0,0183	0,0173	0,0162

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Langsa, Tahun 2017

2.4.2.2. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Pengawasan Kualitas Air Bersih menyebutkan bahwa air bersih adalah air yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Pendapat lain mengatakan bahwa air bersih sendiri merupakan air sehat yang digunakan untuk kegiatan manusia yang bebas dari kuman penyakit, bebas dari bahan kimia yang dapat mencemari air tersebut. Air bersih adalah kebutuhan mutlak yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup sehingga kesehatan air tersebut harus terjamin.

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	RT	25.125	25.958	28.826	30.301	31.554
Jumlah seluruh rumah tangga	RT	34.130	35.027	36.102	36.825	37.475
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Persen	73,62	74,11	79,85	82,28	84,20

Sumber : Strategi Sanitasi Kota Langsa 2015-2019, Bappeda Kota Langsa, Tahun 2017

Perkembangan penduduk pengguna air bersih dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan. Dari tahun 2012 sebanyak 73,62 persen naik menjadi 84,20 persen pada tahun 2016.

#### 2.4.2.3. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan salah satu hal pokok bagi keberlangsungan aktivitas manusia dalam berbagai sekmen selain sandang, pangan dan papan. Arti dari ketersediaan listrik yang memadai merupakan faktor yang dapat mendorong pembangunan sebuah daerah di berbagai sektor termasuk pembangunan di sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kegiatan yang dilakukan hampir tidak pernah lepas dari penggunaan energi listrik.

Perkembangan jumlah pelanggan listrik dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan listrik sebanyak 34.100 pelanggan meningkat menjadi 37.425 pelanggan pada tahun 2016. Berikut adalah perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Langsa pada tahun 2012 hingga 2016.

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	34.100	34.982	34.751	36.782	37.425
Jumlah seluruh rumah tangga	RT	34.130	35.027	36.102	36.825	37.475
Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	99,91	99,87	96,26	99,88	99,87

Sumber : BPS Kota Langsa dan Bappeda Kota Langsa, Tahun 2017

#### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

##### 2.4.3.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik

apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Dilihat dari jumlah keseluruhan angka kriminalitas yang terjadi selama tahun 2015 sebanyak 699 kasus, dan hanya 289 kasus yang tertangani oleh aparat penegak hukum. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus pencurian, baik itu pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberantasan, maupun Curanmor. Ditinjau dari kasus yang tertangani, dibutuhkan kerja keras para aparaturnya penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Tabel 2.57  
Angka Kriminalitas Kota Langsa Tahun 2015

Kasus	Kejadian (Kasus)	Tertangani (Kasus)
Pencurian Biasa	60	15
Pencurian dengan Kekerasan	16	8
Pencurian dengan Pemberatan	187	19
Curanmor	157	70
Penganiayaan Berat	86	6
Penganiayaan Ringan	1	1
Persetubuhan/Cabul	1	1
Qanun Prov NAD (Judi, Miras, dll)	7	7
Penggelapan	75	60
Illegal Logging	3	3
Korupsi	1	1
KDRT	21	21
Kebakaran	3	3
Pengerusakan	9	5
Penyeludupan	3	3
Pengeroyokan	1	1
Penghinaan	6	6
Pemerasan	1	1
Membawa Lari Perempuan	1	1
UU Migas	1	1
Judi	45	45
Lain-lain	14	11
Jumlah	699	289

Sumber: Langsa Dalam Angka, Tahun 2016

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparaturnya penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tabel 2.58  
Angka Kriminalitas yang Tertangani di  
Kota Langsa Tahun 2012-2015

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015
Jumlah tindak kriminalitas yang tertangani selama 1 tahun	Kasus	525	465	479	289
Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk	Kasus	34	30	29	17

Sumber: Langsa Dalam Angka, Tahun 2016

2.4.3.2. Kemudahan Perizinan

Pengertian investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Dalam rangka mempermudah investasi, Pemerintah Kota Langsa terus berupaya untuk mempercepat proses perizinan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata lama proses perizinan di Kota Langsa selama periode 2012-2015 adalah selama tujuh hari.

Tabel 2.59  
Perkembangan Indikator Pelayanan Perizinan  
Tahun 2013-2016 Kota Langsa

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016
Rata-rata Lama Proses Perizinan	Hari	7	7	7	7
Ketersediaan SOP Pelayanan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Tahun 2017

2.4.3.3. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan setiap lembaga usaha yang bergerak di bidang penghimpunan dan juga penyaluran dana yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Keberadaan lembaga keuangan dapat membuat kondisi sebuah negara menjadi lebih baik, dapat menumbuhkan jumlah usaha, dan dapat membantu menyeimbangkan posisi moneter suatu negara.



Di Indonesia sendiri, ada beberapa lembaga keuangan yang telah diakui oleh pemerintah yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, *leasing*, koperasi, pegadaian, pasar modal, valas, dan lain-lain. Di Kota Langsa, jumlah bank umum ada 11 unit, terdiri dari 7 unit bank umum konvensional dengan 19 kantor bank dan 4 unit bank umum syariah dengan 7 unit kantor bank.

Tabel 2.60  
Jumlah Bank dan Kantor Bank Tahun 2016 Kota Langsa

Jenis Bank	Banyaknya	
	Bank	Kantor Bank
Bank Umum	11	26
Bank Konvensional	7	19
Bank Pemerintah	3	13
Bank Swasta Nasional	1	5
Bank Pemerintah Daerah	1	1
Bank Umum-Syariah	4	7
Kantor Cabang	2	5
Kantor Cabang Pembantu	2	2
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	2	2
Kantor Pusat	2	2
Jumlah	13	28

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2017

Selain bank umum, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jumlah BPR di Kota Langsa adalah sebanyak dua unit dan dua kantor bank, kesemuanya merupakan BPR Syariah. Semakin banyak jumlah BPR maka akan semakin mudah bagi masyarakat dan pengusaha kecil di Kota Langsa untuk mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomian.

2.4.3.4. Ketersediaan Penginapan/Hotel

Dengan berkembangnya investasi ekonomi daerah, maka akan berpengaruh pada peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah maka perlu didukung oleh ketersediaan akomodasi atau penginapan. Akomodasi atau yang biasa kita sebut dengan penginapan adalah sebuah tempat yang dijadikan atau difungsikan sebagai tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang berada dalam perjalanan, dimana orang tersebut diharuskan untuk berada atau tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari. Penginapan haruslah

menyediakan keperluan dan memenuhi standar minimal seperti tempat tidur, tempat istirahat, faktor keselamatan, berlindung dari suhu dingin atau hujan dan panas, fasilitas penyimpanan barang, hingga akses ke kebutuhan umum rumah tangga.

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Hingga tahun 2016, di Kota Langsa memiliki 15 hotel/penginapan yang dapat dilihat datanya pada tabel berikut :

Tabel 2.61  
Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Pada Akomodasi  
Tahun 2016 Kota Langsa

Nama Akomodasi	Jumlah Kamar	Tempat Tidur
Hotel Kartika	62	115
Hotel Harmoni	90	148
Losmen Pase	20	40
Ferla Inn	24	45
Losmen Diah	17	32
Losmen Haiva	11	20
Hotel Rahmat Thalita	14	28
Hotel Training Kartika	12	27
Wisma Anggrek	15	30
Losmen Pillar	21	46
Losmen Ramlle	15	30
Hotel Ridho	14	28
Wisma Nabila	10	12
Wisma Mutiara	15	30
Grace Hotel	20	46

Sumber : BPS Kota Langsa Tahun 2017

2.4.3.5. Penataan Ruang

Tata ruang adalah wujud dari struktur dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Tabel 2.62  
Ketaatan Terhadap RTRW, Wilayah Produktif, Wilayah Industri,  
Wilayah Kebanjiran, Wilayah Kekeringan dan Wilayah Perkotaan  
Tahun 2012-2016 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Realisasi RTRW	Ha	17.324	17.414	17.565	17.724	18.006
Rencana Peruntukan	Ha	24.088	24.088	24.088	24.088	24.088
Jumlah luas wilayah produktif	Ha	13.755	13.755	13.755	13.755	13.755
Jumlah luas wilayah industri	Ha	57	57	57	57	60
Luas wilayah kebanjiran	Ha	379	365	350	363	363
Luas wilayah kekeringan	Ha	42,8	41,2	39	39	39
Luas wilayah perkotaan	Ha	4.566,74	4.566,74	4.566,74	4.566,74	4.566,74
Jumlah seluruh wilayah budidaya	Ha	19.184	19.184	19.184	19.184	19.184
Ketaatan terhadap RTRW	Rasio	71,92	71,29	72,92	73,58	74,75
Luas wilayah Produktif	Rasio	71,70	71,70	71,70	71,70	71,70
Luas wilyah Industri	Rasio	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31
Luas wilayah Kebanjiran	Rasio	1,98	1,90	1,82	1,89	1,89
Luas wilayah Kekeringan	Rasio	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20
Luas wilayah Perkotaan	Rasio	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80

Sumber: RTRW 2012-2032 Bappeda Kota Langsa, Tahun 2017

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Penduduk, masyarakat atau istilahnya sumber daya manusia merupakan aset penting dalam pembangunan mengingat penduduk sebagai *agent of development*, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan berhasil tidaknya pembangunan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses pembangunan berlangsung.

Sumber daya manusia sebagai *agent of development*, pelaksana dan penentu berhasil tidaknya pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan, sehingga bentuk dan sistem yang ada merupakan produk dari sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang handal merupakan asset dalam pembangunan. Permasalahan muncul apabila sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas dengan kualitas yang sangat rendah.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, maka diperlukan suatu strategi pembangunan sumber daya manusia. Salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia baik itu perusahaan ataupun pemerintahan adalah pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang sesuai, pengembangan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem pemberian imbalan, mengefektifkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, perencanaan anggaran untuk sumber daya manusia serta membina hubungan dan komunikasi karyawan.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja dan Tingkat Ketergantungan

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun negeri. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diputuskan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Tenaga kerja di Kota Langsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk di Kota Langsa periode 2012-2015 mengalami peningkatan dari 657 pada tahun 2012 naik menjadi 718 pada tahun 2015.

Tabel 2.63  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan  
Tahun 2012-2015 Kota Langsa

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015
Lulusan S1/S2/S3	Orang	10.172	10.563	10.864	11.912
Penduduk Usia <15 thn - usia >84 thn	Orang	49.140	49.687	50.953	51.709
Penduduk Usia 15-84 thn	Orang	105.582	107.324	111.861	114.181
Rasio Lulusan S1/S2/S3	Rasio	657	673	667	718
Rasio Ketergantungan	Persen	46,54	46,29	45,55	45,28

Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah termasuk daerah maju atau daerah sedang berkembang. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tingkat ketergantungan Kota Langsa dari tahun 2012 hingga 2015 semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan angka rasio ketergantungan pada tahun 2012 adalah 46,54 menjadi 45,28 pada tahun 2015.

2.4.4.2. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Atau dengan kata lain kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja.

Secara umum kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam perekonomian. Kesempatan kerja juga dapat dikatakan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan, jika semakin banyak orang yang bekerja maka kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak.



Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah (1-angka pengangguran). Angka rasio penduduk yang bekerja di Kota Langsa dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan. Dari tahun 2012 sebesar 0,91 bergerak naik di tahun 2015 hingga mencapai 1,09.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di daerah. Undang-undang tersebut menuntut perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah untuk dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek penganggaran.

Serangkaian perubahan dimaksud mengarah kepada pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Konsep itu sendiri mengandung tiga elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, yaitu ;

1. Secara ekonomis dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan.
2. Efisiensi dalam mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
3. Efektivitas dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

##### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Pengelolaan keuangan daerah masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam regulasi yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dengan terbitnya regulasi tersebut tentu memberikan kontribusi dalam menentukan kerangka pendanaan pembangunan Daerah. Lebih lanjut, gambaran kinerja keuangan pemerintah Kota Langsa tahun 2013-2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

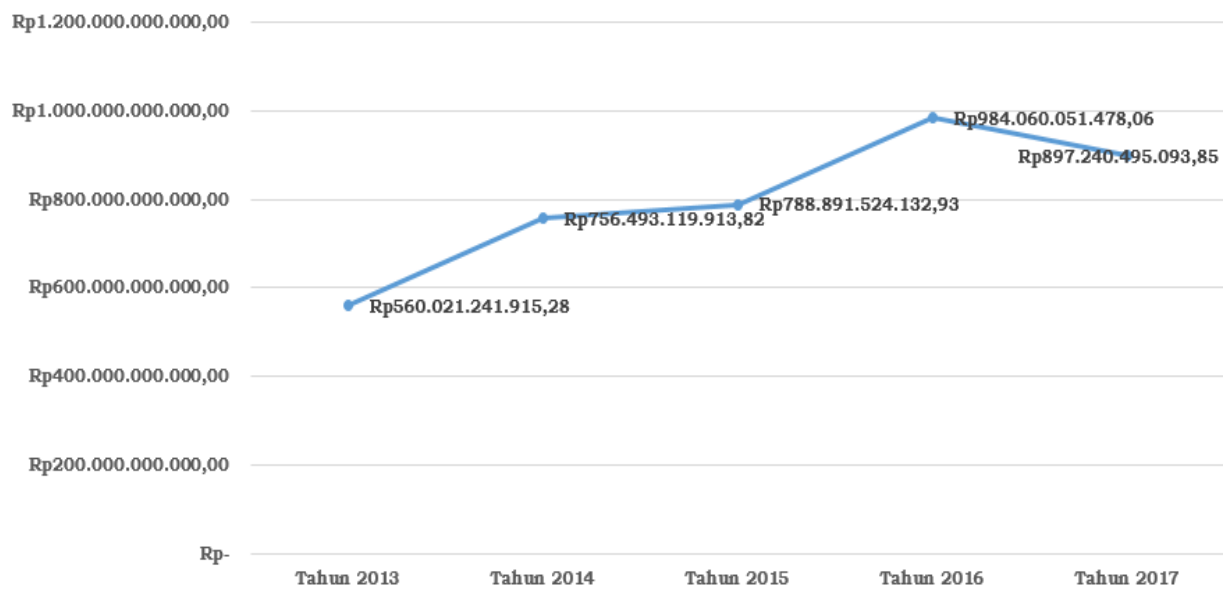
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan di masyarakat.

##### A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, adapun sumber pendapatan daerah secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Langsa dalam periode tahun 2013-2017 cukup baik dengan tingkat pertumbuhannya rata-rata sebesar 12,51 persen. Pada Tahun 2013 pendapatan Kota Langsa sebesar Rp.560.021.241.915,28 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.897.240.495.093,85,-.

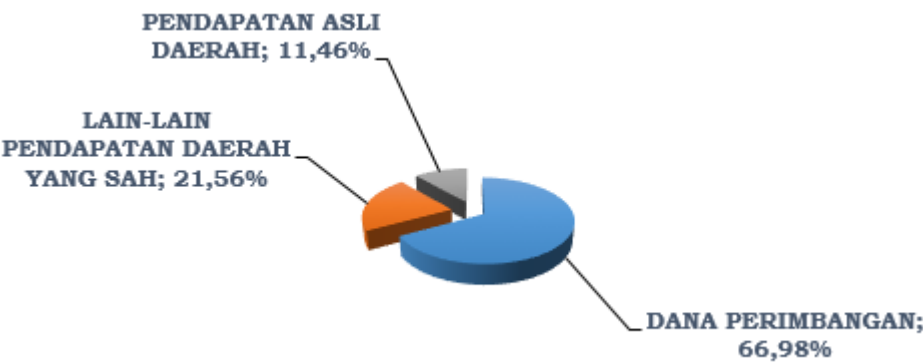
Grafik 3.1  
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber : SIMDA Diolah

Komponen pembentuk pendapatan daerah terbesar disumbangkan oleh kelompok dana perimbangan yaitu dengan kontribusinya rata-rata sebesar 66,98 persen kemudian diikuti oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 21,56 persen kemudian pendapatan asli daerah sebesar 11,46 persen.

Grafik 3.2  
Proporsi Realisasi Rata-Rata Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017

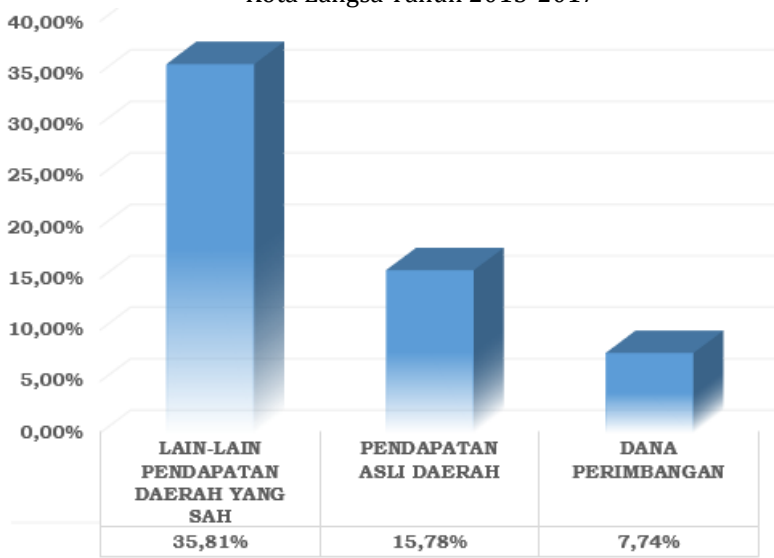


Sumber : SIMDA Diolah

Sementara itu, berdasarkan rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi dari komponen pendapatan daerah adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 35,81 persen, kemudian diikuti oleh pendapatan asli daerah sebesar 15,78 persen, dan dana perimbangan sebesar 7,74 persen.



Grafik 3.3  
Realisasi Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah  
Kota Langsa Tahun 2013-2017



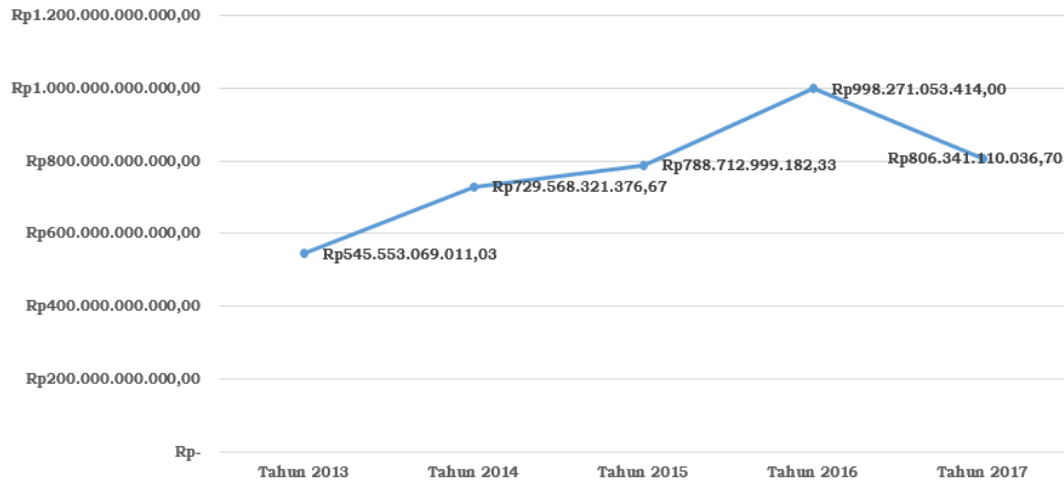
Sumber : SIMDA Diolah

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih untuk mewujudkan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, secara garis besar belanja daerah terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja daerah Kota Langsa pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp.545.553.069.011,03,- dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp.806.341.110.036,70,-.

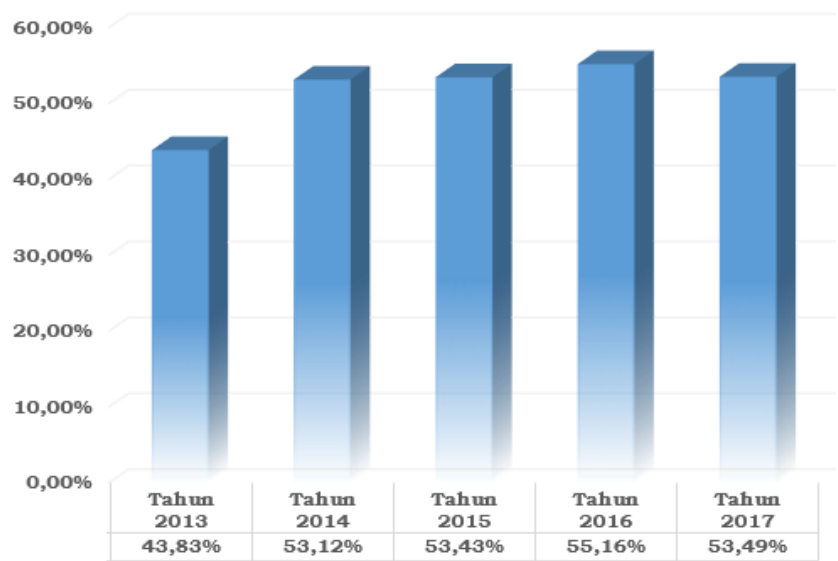
Grafik 3.4  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber : SIMDA Diolah

Proporsi belanja daerah selama kurun waktu tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin membaik, hal ini ditunjukkan oleh proporsi belanja langsung yang lebih mendominasi. Pada tahun 2013 proporsi belanja langsung hanya mencapai sebesar 43,83 persen dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2017 yaitu sebesar 55,16 persen.

Grafik 3.5  
Proporsi Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber : SIMDA Diolah

C. Pembiayaan Daerah

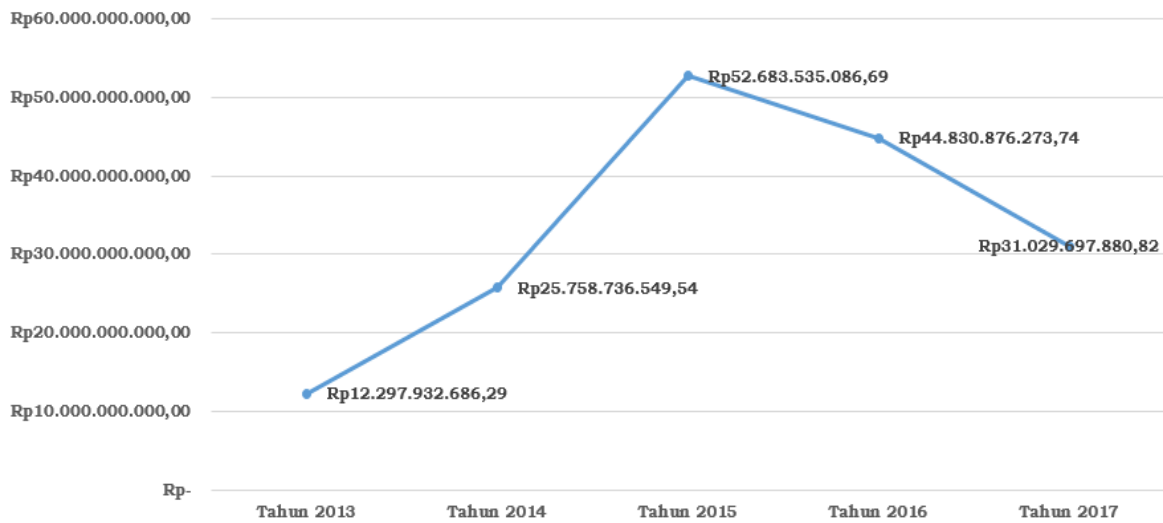
Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan maupun pengeluaran daerah yang perlu dibayar atau diterima kembali untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Langsa pada tahun 2013 sebesar Rp.12.297.932.686,29,- kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 109,46 persen atau sebesar Rp.13.460.803.863,25 terhadap tahun 2013 sehingga menjadi sebesar Rp.25.758.736.549,54,-. Tahun 2015 pembiayaan daerah Kota Langsa mengalami peningkatan kembali sebesar 104,53 persen atau sebesar Rp.26.924.798.537,15,- terhadap tahun 2014 sehingga menjadi sebesar Rp.52.683.535.086,69,-.

Pada tahun 2016 pembiayaan daerah Kota Langsa mengalami penurunan sebesar 14,91 persen atau sebesar Rp.7.852.658.812,95,- terhadap tahun 2015 sehingga menjadi sebesar Rp.44.830.876.273,74,-, demikian juga pada

tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 30,78 persen atau sebesar Rp.13.801.178.392,92,- terhadap tahun 2016 sehingga menjadi sebesar Rp.31.029.697.880,82,-.

Grafik 3.6  
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber : SIMDA Diolah

Tabel 3.1  
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Langsa  
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016	2017*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH			560.021.241.915,28	756.493.119.913,82	788.891.524.132,93	984.060.051.478,06	897.240.495.093,85	12,51
	1.1.	Pendapatan Asli Daerah		57.243.381.959,77	114.168.702.058,30	109.116.860.676,13	121.369.467.375,72	102.861.638.842,38	15,78
		1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	6.109.180.218,00	9.400.051.991,00	10.090.865.225,00	10.855.975.158,00	11.369.021.228,00	16,80
		1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.206.868.353,00	12.800.842.081,00	4.349.945.627,00	4.563.580.383,00	3.528.666.708,00	(9,27)
		1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	363.617.460,04	397.301.824,28	518.845.242,00	515.564.364,02	604.966.136,32	13,57
		1.1.4.	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	-	2.082.469.922,00	2.474.092.143,00	2.304.927.949,00	2.674.874.805,00	8,70
		1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.563.715.928,73	89.488.036.240,02	91.683.112.439,13	103.129.419.521,70	84.684.109.965,06	16,76

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016	2017*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2			3	4	5	6	7	8
	1.2.	Dana Perimbangan		445.928.780.151,00	479.418.226.550,00	505.098.308.709,00	656.804.723.246,00	600.964.536.961,00	7,74
		1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.766.968.151,00	27.295.891.550,00	19.300.064.709,00	17.668.460.044,00	16.515.757.919,00	(16,98)
		1.2.2.	Dana Alokasi Umum	381.240.982.000,00	419.767.005.000,00	425.446.753.000,00	451.951.928.000,00	408.996.367.000,00	1,77
		1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	29.920.830.000,00	32.355.330.000,00	60.351.491.000,00	187.184.335.202,00	175.452.412.042,00	55,61
	1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		56.849.079.805	162.906.191.305,52	174.676.354.747,80	205.885.860.856,34	193.414.319.290,47	35,81
		1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	18.031.183.763,55	-	-
		1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.288.601.804,51	10.269.593.945,52	17.306.696.400,80	22.137.093.033,79	18.546.837.616,47	18,87

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016	2017*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2			3	4	5	6	7	8
		1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.560.478.000,00	70.820.311.000,00	75.443.043.000,00	85.037.243.000,00	105.741.263.000,00	22,11
		1.3.4.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	81.816.286.360,00	81.926.615.347,00	80.680.341.059,00	69.126.218.674,00	(5,46)
2.	BELANJA DAERAH			545.553.069.011,03	729.568.321.376,67	788.712.999.182,33	998.271.053.414,00	806.341.110.036,70	10,26
	2.1.	Belanja Tidak Langsung		306.430.153.300,00	342.054.327.008,00	367.337.150.089,00	447.584.048.569,00	375.009.610.557,00	5,18
		2.1.1.	Belanja Pegawai	286.276.108.300,00	319.965.073.744,00	333.879.732.430,00	355.119.475.382,00	273.945.895.251,00	(1,09)
		2.1.2.	Belanja Hibah	1.016.767.000,00	3.825.892.264,00	1.825.000.000,00	20.495.734.000,00	15.333.680.500,00	97,06
		2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	7.929.064.000,00	6.740.133.000,00	2.645.329.000,00	2.404.007.000,00	3.060.288.500,00	(21,18)
		2.1.4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.118.444.000,00	11.062.828.000,00	28.714.674.659,00	69.461.069.687,00	82.669.746.306,00	65,13
		2.1.5.	Belanja Tidak Terduga	89.770.000,00	460.400.000,00	272.414.000,00	103.762.500,00	-	4,95

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016	2017*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7	8
	2.2.	Belanja Langsung		239.122.915.711,03	387.513.994.368,67	421.375.849.093,33	550.687.004.845,00	431.331.499.479,70	15,89
		2.2.1.	Belanja Pegawai	75.696.652.105,00	103.738.098.668,96	65.674.537.910,00	66.068.722.406,00	62.505.898.946,00	(4,67)
		2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.534.375.997,03	134.441.518.332,71	181.152.329.292,33	190.238.299.674,00	148.755.815.132,00	10,57
		2.2.3.	Belanja Modal	63.891.887.609,00	149.334.377.367,00	174.548.981.891,00	294.379.982.765,00	220.069.785.401,70	36,23
	SURPLUS/DEFISIT			14.468.172.904,25	26.924.798.537,15	178.524.950,60	(14.211.001.935,94)	90.899.385.057,15	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			12.297.932.686,29	25.758.736.549,54	52.683.535.086,69	44.830.876.273,74	31.029.697.880,82	26,03
	3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		12.324.727.062,13	27.000.676.549,54	52.683.535.086,69	52.862.060.037,29	31.029.697.880,82	25,97
		3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.032.084.052,13	26.766.105.590,54	52.683.535.086,69	52.862.060.037,29	31.029.697.880,82	26,72
		3.1.2.	Penerimaan Piutang Daerah	292.643.010,00	234.570.959,00	-	-	-	(19,84)
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		26.794.375,84	1.241.940.000,00	-	8.031.183.763,55	-	1.631,28
		3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	1.000.000.000,00	-	8.031.183.763,55	-	703,12
		3.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	26.794.375,84	241.940.000,00	-	-	-	802,95
	SILPA TAHUN BERKENAAN			26.766.105.590,54	52.683.535.086,69	52.862.060.037,29	30.619.874.337,80	121.929.082.937,97	

Sumber : SIMDA Diolah

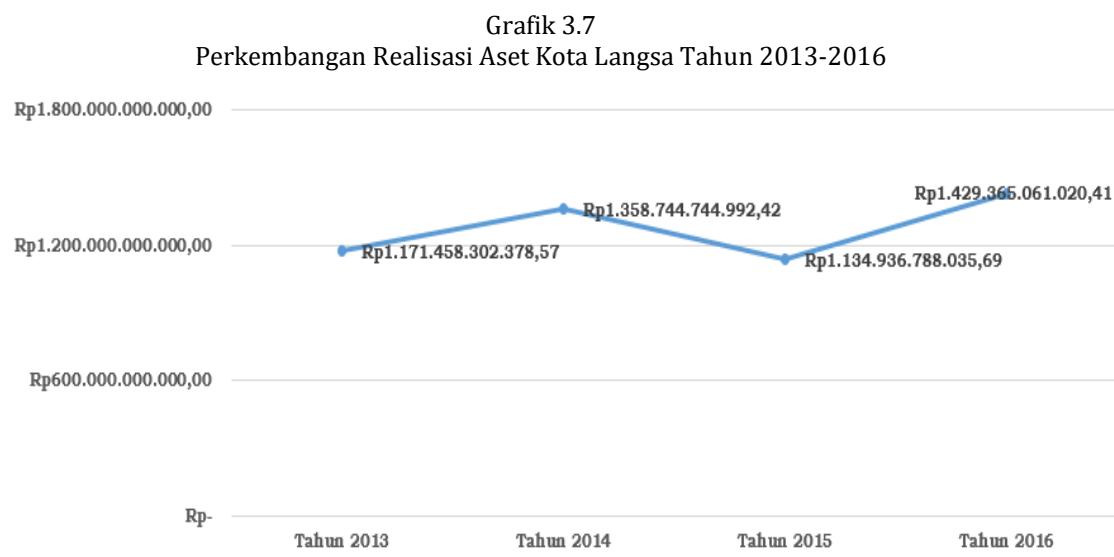
Keterangan :

\* : Data Sementara

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan laporan informasi posisi keuangan pemerintah daerah yang mencakup aset, kewajiban dan ekuitas. Posisi neraca Kota Langsa periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cukup baik seiring dengan perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Langsa pada periode tersebut.

Perkembangan neraca dimaksud terutama terkait dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Langsa pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2013 total aset kota langsa tercatat sebesar Rp.1.171.458.302.378,57,- dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1.429.365.061.020,41,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,86 persen.

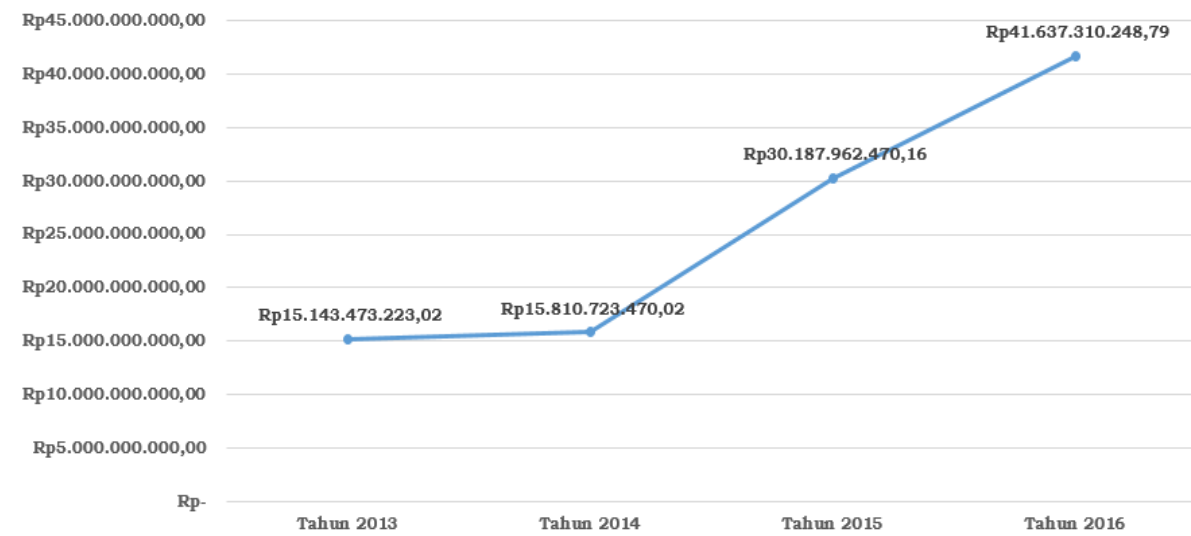


Sumber : SIMDA Diolah

Sementara itu, kewajiban yang diselesaikan pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp.15.143.473.223,02,- dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp.41.637.310.248,79,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,09 persen.



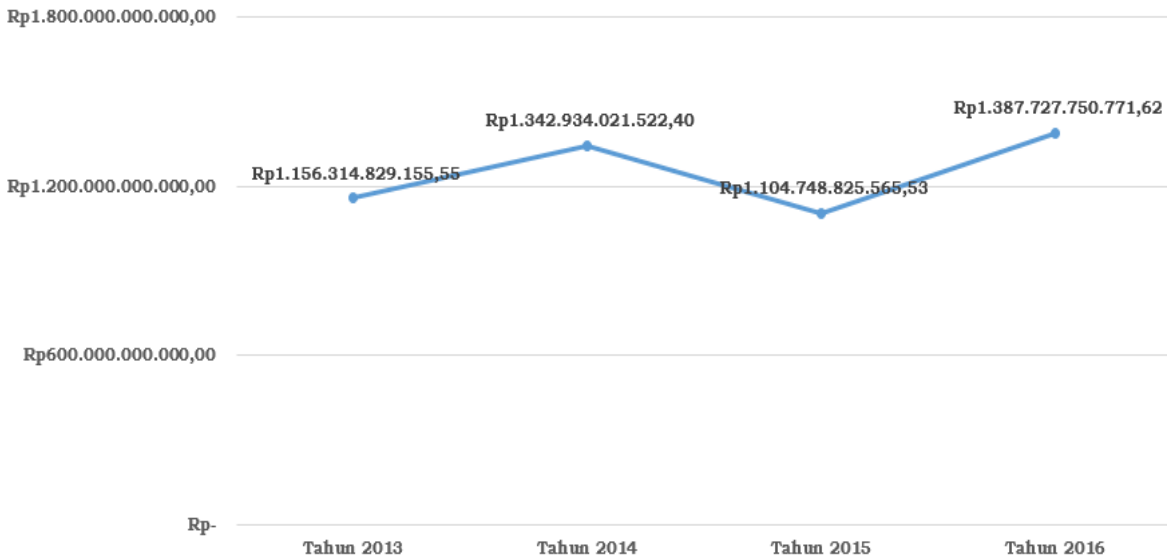
Grafik 3.8  
Perkembangan Realisasi Kewajiban Kota Langsa Tahun 2013-2016



Sumber : SIMDA Diolah

Dengan demikian ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah kota langsa pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.156.314.829.155,55,- dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1.387.727.750.771,62,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,27 persen.

Grafik 3.9  
Perkembangan Realisasi Ekuitas Kota Langsa Tahun 2013-2016



Sumber : SIMDA Diolah

Tabel 3.2  
Rata-Rata Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Kota Langsa  
Tahun 2013-2016

NO	URAIAN			TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7
1.	<b>ASET</b>			<b>1.171.458.302.378,57</b>	<b>1.358.744.744.992,42</b>	<b>1.134.936.788.035,69</b>	<b>1.429.365.061.020,41</b>	<b>6,86</b>
	1.1.	<b>Aset Lancar</b>		<b>43.736.517.427,52</b>	<b>87.213.357.410,87</b>	<b>93.206.147.006,01</b>	<b>67.192.570.626,90</b>	<b>15,39</b>
		1.1.1.	Kas	29.262.892.014,54	52.881.643.292,26	52.978.504.984,29	31.406.645.894,98	2,38
		1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
		1.1.3.	Piutang Lain-lain	9.374.122.929,00	29.328.556.657,00	21.455.925.432,66	24.338.224.584,66	37,44
		1.1.4.	Persediaan	-	746.270.000,00	15.377.117.243,00	16.300.237.700,00	179,53
		1.1.5.	Penyisihan Piutang	5.099.502.483,98	15.559.518.046,61	14.190.762.838,70	7.224.373.890,74	12,31
		1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	-	(11.302.630.585,00)	(12.054.997.800,64)	(13.015.420.729,57)	4,82
	1.2.	<b>Investasi Jangka Panjang</b>		<b>8.031.307.360,93</b>	<b>8.529.585.086,39</b>	<b>8.744.324.929,64</b>	<b>14.212.584.233,54</b>	<b>20,96</b>
		1.2.1.	Investasi Permanen	8.031.307.360,93	8.529.585.086,39	8.744.324.929,64	14.212.584.233,54	20,96
		1.2.2.	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-
	1.3.	<b>Aset Tetap</b>		<b>1.081.414.977.572,12</b>	<b>1.215.711.227.477,16</b>	<b>970.250.086.614,76</b>	<b>1.278.416.978.393,48</b>	<b>5,74</b>
		1.3.1.	Tanah	197.282.382.538,00	205.117.124.638,00	210.718.750.715,00	243.343.661.747,00	7,25
		1.3.2.	Peralatan dan mesin	231.143.061.178,28	247.380.130.884,28	274.973.224.610,69	327.243.903.375,29	12,29
		1.3.3.	Gedung dan bangunan	298.428.923.897,22	332.671.295.346,26	368.433.212.898,26	474.542.501.699,25	16,72

NO	URAIAN			TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7
		1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	337.992.904.961,62	408.494.962.058,62	485.177.477.795,62	657.602.813.129,85	24,84
		1.3.5.	Aset tetap lainnya	16.402.504.997,00	20.347.838.310,00	34.530.978.795,31	37.237.468.979,31	31,43
		1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	165.200.000,00	1.699.876.240,00	10.237.014.398,00	33.369.657.587,00	486,74
		1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-	(413.820.572.598,12)	(494.923.028.124,22)	19,60
	1.4.	Dana Cadangan		-	-	-	-	-
		1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	1.5.	Aset Lainnya		38.275.500.018,00	47.290.575.018,00	62.736.229.485,28	69.542.927.766,49	81,69
		1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-
		1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	1.420.128.187,00	38.057.225.018,00	38.055.425.018,00	38.055.125.018,00	2.579,70
		1.5.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	9.233.350.000,00	-
		1.5.4.	Aset tak berwujud	-	-	399.000.000,00	539.580.000,00	35,23
		1.5.5.	Aset Lain-lain	36.855.371.831,00	9.233.350.000,00	24.281.804.467,28	21.714.872.748,49	(16,17)

NO	URAIAN			TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7
2.	<b>KEWAJIBAN</b>			<b>15.143.473.223,02</b>	<b>15.810.723.470,02</b>	<b>30.187.962.470,16</b>	<b>41.637.310.248,79</b>	<b>40,09</b>
	2.1.	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>15.143.473.223,02</b>	<b>15.810.723.470,02</b>	<b>30.187.962.470,16</b>	<b>41.637.310.248,79</b>	<b>40,09</b>
		2.1.1.	Utang perhitungan fihak ketiga (PFK)	2.491.308.424,00	22.391.738,00	24.285.305,00	7.642.851,00	(85,47)
		2.1.2.	Utang Bunga	3.762.991.268,02	3.762.991.268,02	3.762.991.268,02	3.762.991.268,02	-
		2.1.3.	Utang Pajak	-	-	-	-	-
		2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
		2.1.5.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	184.713.474,14	127.239.487,48	(31,12)
		2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.889.173.531,00	12.025.340.464,00	26.215.972.423,00	37.739.436.642,29	61,92
	2.2.	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		-	-	-	-	-
		2.2.1.	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
		2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-
3.	<b>EKUITAS DANA</b>			<b>1.156.314.829.155,55</b>	<b>1.342.934.021.522,40</b>	<b>1.104.748.825.565,53</b>	<b>1.387.727.750.771,62</b>	<b>6,27</b>
	3.1.	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>28.593.044.204,50</b>	<b>71.402.633.940,85</b>	<b>62.468.176.405,86</b>	<b>35.419.394.851,89</b>	<b>7,40</b>
		3.1.1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	26.766.105.590,54	52.683.535.086,69	52.862.060.037,29	35.768.817.361,82	10,15
		3.1.2.	Cadangan Piutang	9.374.122.929,00	18.772.196.072,00	24.778.044.875,02	28.052.453.677,79	44,11
		3.1.3.	Cadangan Persediaan	5.099.502.483,98	15.559.518.046,61	14.190.762.838,70	6.827.567.221,74	10,22

NO	URAIAN			TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7
		3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(12.652.164.799,02)	(15.788.331.732,02)	(29.362.691.345,15)	(29.684.346.932,78)	32,88
		3.1.5.	Pendapatan yang Ditangguhkan	5.478.000,00	175.716.467,57	-	(5.545.096.476,68)	(1.104,07)
	3.2.	Ekuitas Dana Investasi		1.127.721.784.951,05	1.271.531.387.581,55	1.042.280.649.159,67	1.351.946.577.745,73	6,23
		3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	8.031.307.360,93	8.529.585.086,39	8.744.324.929,64	14.778.603.193,19	22,54
		3.2.2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.081.414.977.572,12	1.215.711.227.477,16	970.800.094.744,75	1.274.684.068.849,26	5,63
		3.2.3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	38.275.500.018,00	47.290.575.018,00	62.736.229.485,28	62.150.707.443,28	17,54
		3.2.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	-	-	-	333.198.260,00	-

NO	URAIAN			TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2013	2014	2015	2016*	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7
	3.3.	Ekuitas Dana Cadangan		-	-	-	361.778.174,00	-
		3.3.1.	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	361.778.174,00	-
	3.4.	Koreksi Ekuitas		-	-	-	-	-
		3.4.1.	Koreksi Ekuitas	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				1.171.458.302.378,57	1.358.744.744.992,42	1.134.936.788.035,69	1.429.365.061.020,41	6,86

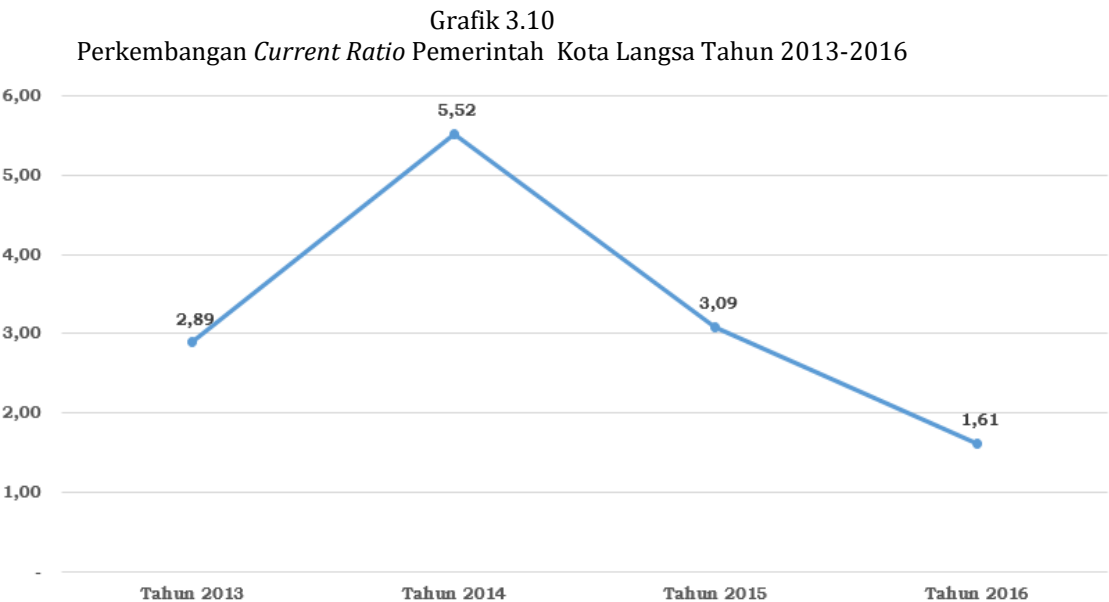
Sumber : SIMDA Diolah

Keterangan :  
\* Data Sementara

Lebih lanjut, rasio likuiditas dan solvabilitas kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam rangka memenuhi kewajiban relatif cukup baik walaupun cenderung mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut cukup mampu untuk memenuhi kewajiban dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya rasio likuiditas dan solvabilitas dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. *Current Ratio*

Kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam membiayai kewajiban melalui aset lancar pada tahun 2013 adalah sebesar 2,89 dengan kata lain, pada tahun 2013 kemampuan aset lancar pemerintah kota langsa yaitu sebesar Rp.43.736.517.427,52,- dapat memenuhi 2,89 kali atau 289 persen dari kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebesar Rp.15.143.473.223,02. Pada tahun 2014 *Current Ratio* tercatat sebesar 5,52 dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016 yaitu tercatat sebesar 1,61.



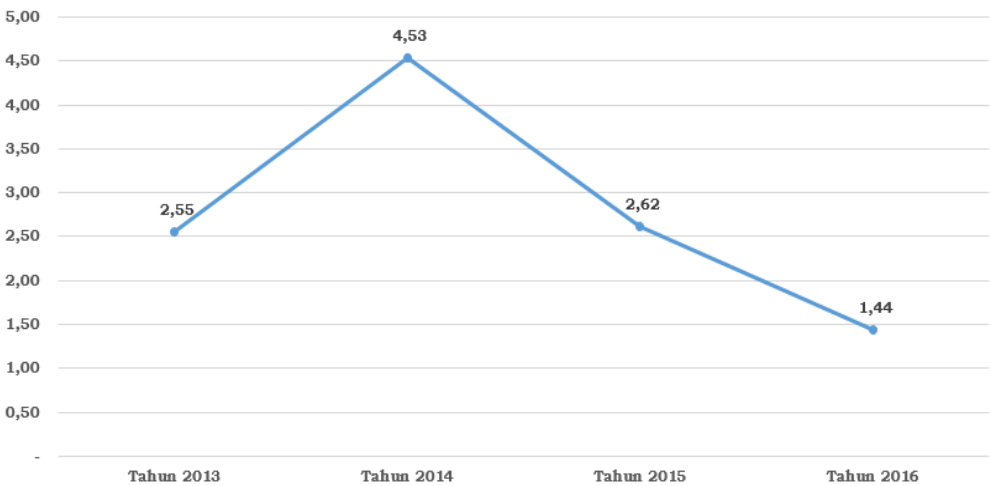
Sumber : SIMDA Diolah

b. *Quick Ratio*

Kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam membiayai kewajiban melalui aset lancar dikurangi persediaan pada tahun 2013 adalah sebesar 2,55 dengan kata lain, pada tahun 2013 kemampuan aset lancar dikurangi persediaan Pemerintah Kota Langsa yaitu sebesar Rp.38.637.014.943,54,- dapat memenuhi 2,55 kali atau 255 persen dari kewajiban yang harus

dipenuhi yaitu sebesar Rp.15.143.473.223,02. Pada tahun 2014 *Quick Ratio* tercatat sebesar 4,53 dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016 yaitu tercatat sebesar 1,44.

Grafik 3.11  
Perkembangan *Quick Ratio* Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013-2016

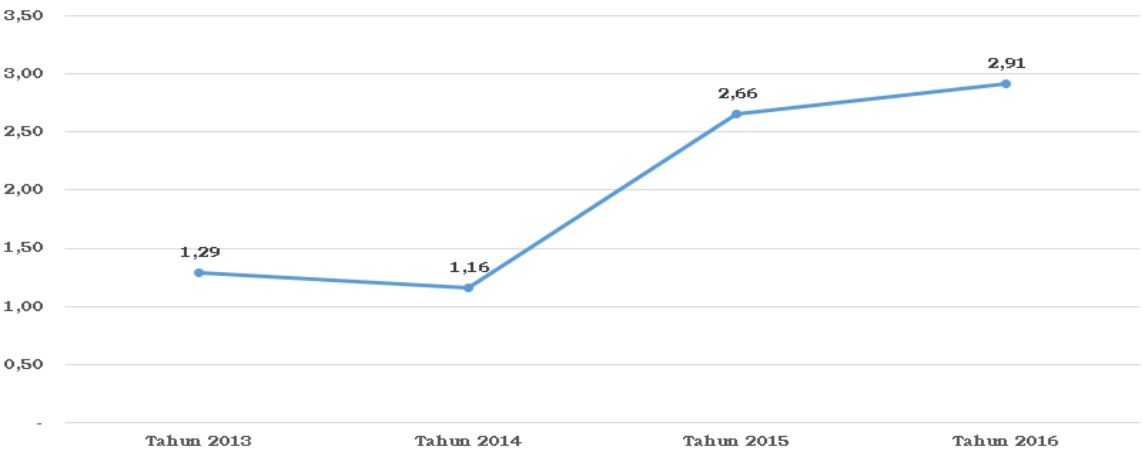


Sumber : SIMDA Diolah

c. *Debt to Asset Ratio*

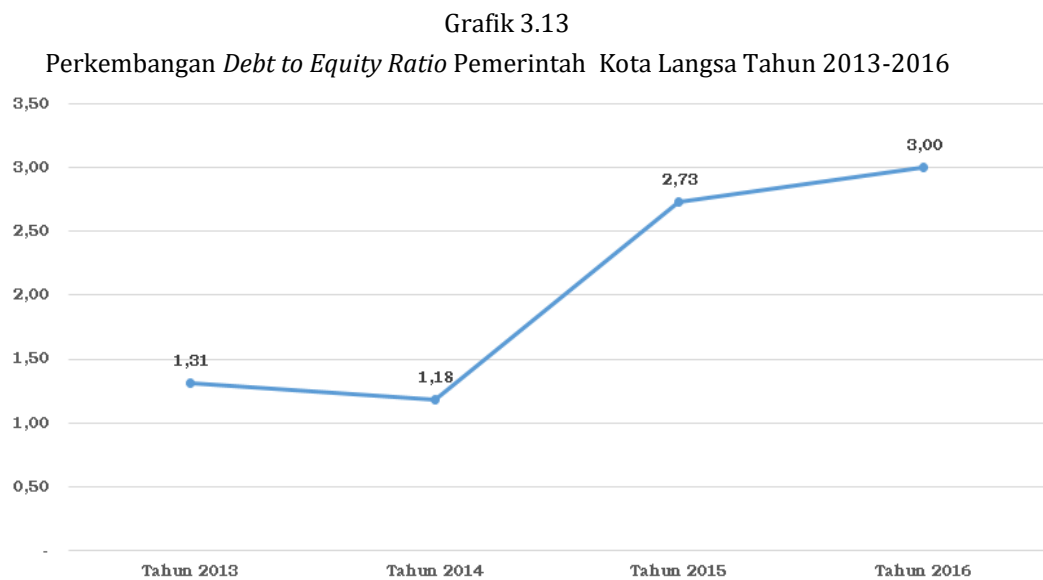
Rasio total kewajiban terhadap total aset Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2013 adalah sebesar 1,29 persen dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016 yang setidaknya tercatat sebesar 2,91 persen.

Grafik 3.12  
Perkembangan *Debt to Asset Ratio* Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013-2016



Sumber : SIMDA Diolah





Sumber : SIMDA Diolah

Tabel 3.3

Perkembangan *Balance Sheet Ratio* Daerah Kota Langsa  
Tahun 2013-2016

NO	BALANCE SHEET RATIO		TAHUN			
			2013	2014	2015	2016
1	2		3	4	5	6
1.	LIQUIDITY RATIO	Current Ratio	2,89	5,52	3,09	1,61
		Quick Ratio	2,55	4,53	2,62	1,44
2.	SOLVABILITY RATIO	Debt to Asset Ratio	1,29	1,16	2,66	2,91
		Debt to Equity Ratio	1,31	1,18	2,73	3,00

Sumber : SIMDA Diolah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

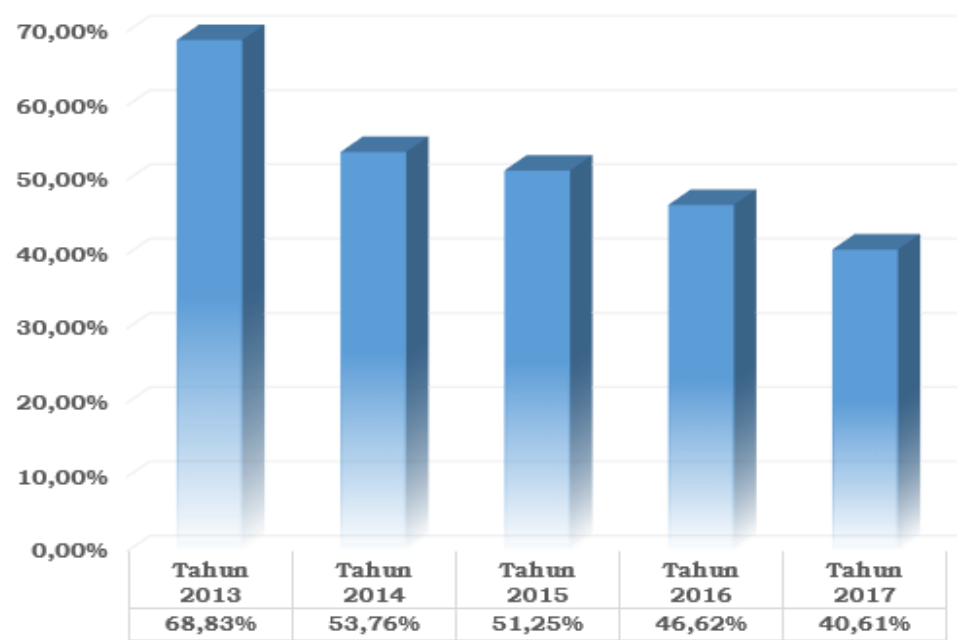
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan. Pengelolaan keuangan yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Efisiensi dan efektivitas belanja daerah salah satunya dapat dilihat dari proporsi penggunaan anggaran, sementara itu optimalisasi pendapatan serta ketepatan dalam pemanfaatan potensi pembiayaan dapat dilihat dari analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Perkembangan penggunaan anggaran pemerintah Kota Langsa dalam kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan hal positif, salah satunya dapat dilihat

melalui realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Setidaknya pada tahun 2013 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tercatat sebesar 68,83 persen dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 40,61 persen.

Grafik 3.14  
Perkembangan Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber : SIMDA Diolah

Tabel 3.4  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Langsa Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	PROSENTASE
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Tahun 2013	375.547.583.643,03	545.579.863.386,87	68,83
2.	Tahun 2014	392.875.176.997,00	730.810.261.376,67	53,76
3.	Tahun 2015	404.205.651.437,00	788.712.999.182,33	51,25
4.	Tahun 2016	428.934.114.789,00	1.006.302.237.177,55	42,62
5.	Tahun 2017*	327.494.856.876,00	806.341.110.036,70	40,61

Sumber : SIMDA Diolah

Keterangan :  
\* Data Sementara.

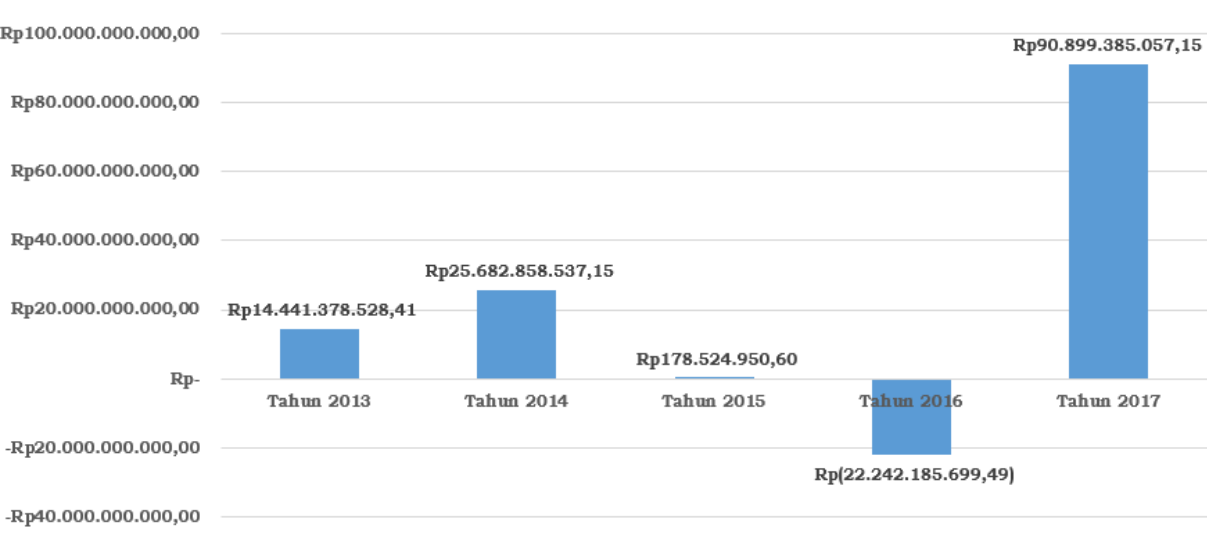
3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah yang digambarkan melalui perbandingan realisasi pendapatan daerah terhadap realisasi belanja ditambah pengeluaran pembiayaan yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi surplus/defisit sebagai akibat dari sisa lebih/kurang pendapatan terhadap belanja sehingga diperlukan pendanaan baik dari penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kondisi pembiayaan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami surplus rill dimana realisasi pendapatan melebihi realisasi belanja ditambah pengeluaran pembiayaan daerah. Setidaknya pada tahun 2013 surplus rill mencapai sebesar Rp.14.441.378.528,41,-, tahun 2014 sebesar Rp.25.682.858.537,15,- dan tahun 2015 sebesar Rp.178.524.950,60,-.

Sementara itu, pada tahun 2016 kondisi pembiayaan mengalami defisit rill sebesar Rp.22.242.185.699,49,- kemudian pada tahun 2017 kondisi pembiayaan mengalami surplus rill sebesar Rp.90.899.385.057,15,-.

Grafik 3.15  
Perkembangan Realisasi Surplus/Defisit Rill Anggaran Kota Langsa Tahun 2013-2017



Sumber : SIMDA Diolah

Tabel 3.5  
 Surplus/Defisit Rill Anggaran  
 Kota Langsa Tahun 2013-2017

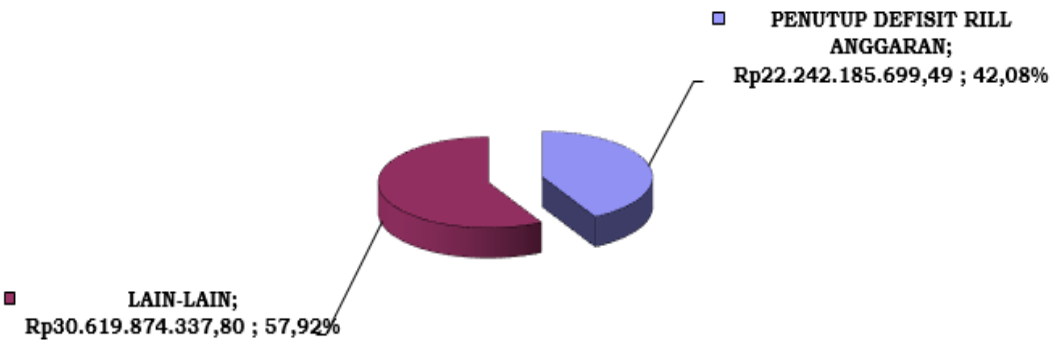
NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017*
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	560.021.241.915,28	756.493.119.913,82	788.891.524.132,93	984.060.051.478,06	897.240.495.093,85
	Dikurangi realisasi					
2.	Belanja Daerah	545.553.069.011,03	729.568.321.376,67	788.712.999.182,33	998.271.053.414,00	806.341.110.036,70
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.794.375,84	1.241.940.000,00	-	8.031.183.763,55	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) RIIL</b>		<b>14.441.378.528,41</b>	<b>25.682.858.537,15</b>	<b>178.524.950,60</b>	<b>(22.242.185.699,49)</b>	<b>90.899.385.057,15</b>

Sumber : SIMDA Diolah

Keterangan :  
 \* Data Sementara

Berdasarkan hal tersebut, kondisi surplus rill yang terjadi masing-masing pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 digunakan sebagai SILPA yang di akumulasikan terhadap penerimaan pembiayaan daerah. Sementara itu, untuk menutupi defisit rill pembiayaan yang terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.22.242.185.699,49,- digunakan sebesar 42,08 persen dari realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (tahun 2015).

Grafik 3.16  
Realisasi Penggunaan SiLPA Kota Langsa Tahun Anggaran 2015



Sumber : SIMDA Diolah

Tabel 3.6  
 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran  
 Kota Langsa Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL									
		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017*	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-	-	-	-	-	-	52.862.060.037,29	42,08	-	-
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	52.862.060.037,29	42,08	-	-

Sumber : SIMDA Diolah

Keterangan :  
 \* Data Sementara

Lebih lanjut, perkembangan realisasi Silpa dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 setidaknya tercatat sebesar Rp.2.964.778.140,00,- atau dengan kata lain realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar 31,68 persen sehingga menjadi Rp.12.324.727.062,13,- dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp.9.359.948.922,13,-. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.187.091.401,00,- atau dengan kata lain realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar 0,69 persen sehingga menjadi Rp.27.000.676.549,54,- dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp.27.187.767.950,54,-. Sementara itu pada tahun 2015 nihil atau dengan kata lain tidak mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp.52.683.535.086,69,-.

Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp.284.986.364,98,- atau dengan kata lain realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen sehingga menjadi Rp.52.862.060.037,29,- dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp.52.577.073.672,31,-. Lebih lanjut tahun 2017 tercatat sebesar Rp.410.869.392,00,- atau dengan kata lain realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar 1,37 persen sehingga menjadi Rp.31.029.697.880,82,- dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp.30.618.828.488,82,-.

Tabel 3.7  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Kota Langsa Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017*	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah SiLPA	26.766.105.590,54	100,00	52.683.535.086,69	100,00	52.862.060.037,29	100,00	30.619.874.337,80	100,00	121.929.082.937,97	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	6.992.889.052,10)	(26,13)	9.147.499.771,30	17,36	(5.413.133.664,87)	(10,24)	(12.050.707.889,28)	(39,36)	(24.463.865.762,62)	(20,06)
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	2.006.745.272,00	7,50	2.361.674.003,00	4,48	(10.020.084.800,00)	(18,96)	(70.933.588.744,00)	(231,66)	(78.221.052.957,00)	(64,15)
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(3.597.023.943,49)	(13,44)	6.865.967.980,48)	(13,03)	(13.833.215.524,20)	(26,17)	2.204.795.769,79	7,20	(24.942.989.124,53)	(20,46)
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	30.988.087.985,97	115,77	48.227.420.693,87	91,54	81.628.494.026,36	154,42	111.114.388.836,31	362,88	249.137.706.606,26	204,33
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.396.407.188,16	5,22	-	-	500.000.000,00	-	-	-	8.414.784	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2.964.778.140,00	11,08	(187.091.401,00)	(0,36)	-	-	284.986.364,98	0,93	410.869.392,00	0,34

Sumber : SIMDA Diolah

Keterangan :  
\* Data Sementara



3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan serangkaian kebijakan dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya atau kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

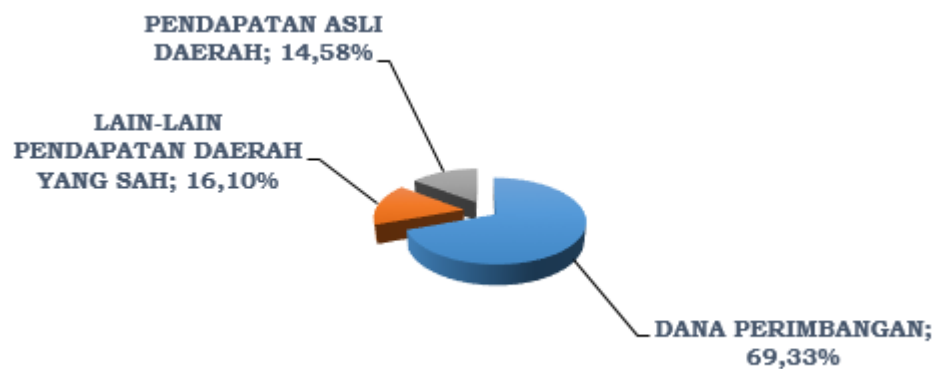
Pendapatan Daerah Kota Langsa pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.867.769.715.665,- dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp.927.061.303.562,- dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 1,67 persen.



Sumber : SIMDA Diolah

Dana perimbangan masih menjadi dukungan terbesar dalam kelompok pendapatan daerah dengan kontribusinya rata-rata sebesar 69,33 persen kemudian diikuti oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16,10 persen kemudian pendapatan asli daerah sebesar 14,58 persen.

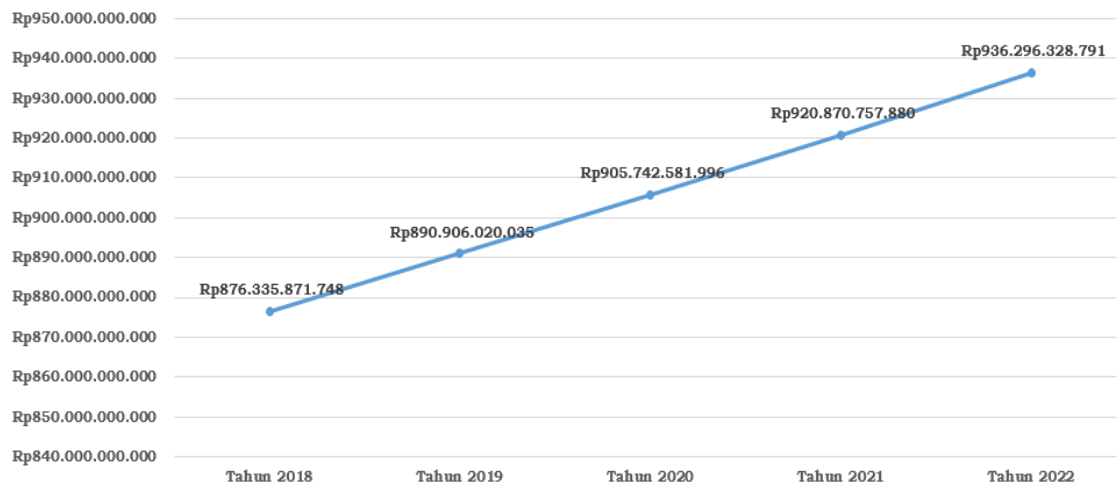
Grafik 3.18  
Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa  
Tahun 2018-2022



Sumber : SIMDA Diolah

Lebih lanjut, belanja daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.876.335.871.748,- dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp.936.296.328.791,- dengan tingkat pertumbuhannya seiring dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yaitu sebesar 1,67 persen.

Grafik 3.19  
Target Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022



Sumber : SIMDA Diolah

Proporsi belanja langsung sebagai pembentuk belanja daerah tersebut secara rata-rata sebesar 50,64 persen dan belanja tidak langsung sebesar 49,36 persen. Sementara itu, untuk menutupi defisit pendapatan terhadap belanja yaitu

dengan rata-rata sebesar 0,99 persen menggunakan komponen pembiayaan daerah.

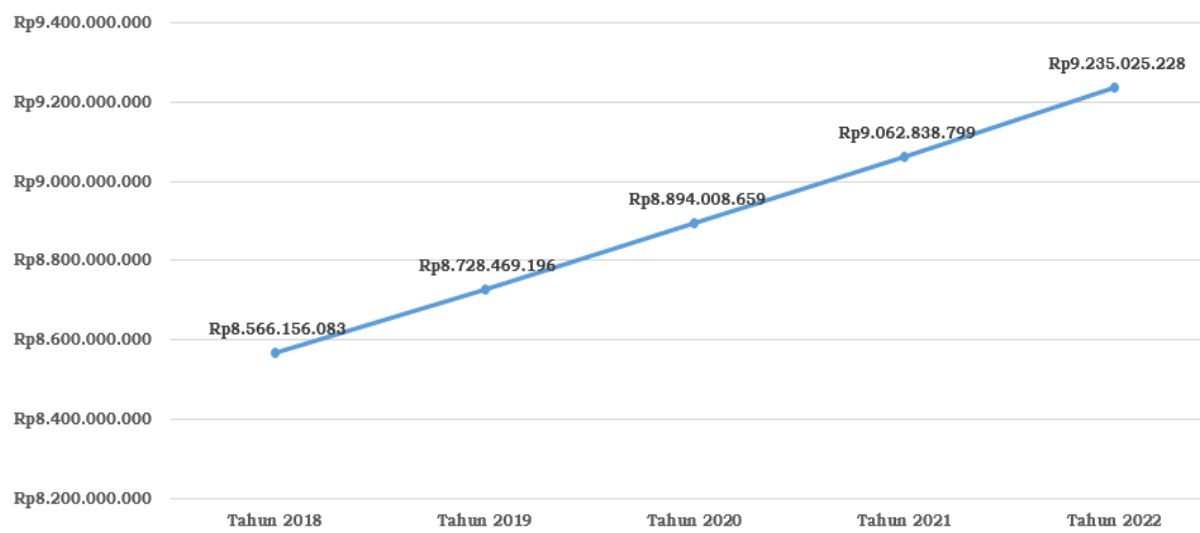
Grafik 3.20  
Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022



Sumber : SIMDA Diolah

Komponen pembiayaan daerah tersebut diperoleh melalui sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu secara priodik setelah dikurangi rencana pengalokasian dana investasi daerah yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- pada setiap tahun perencanaan anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran dimaksud merupakan upaya penghematan belanja daerah yang diupayakan rata-rata sebesar 1,11 persen pada setiap tahun perencanaan anggaran.

Grafik 3.21  
Perkembangan Target Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022



Sumber : SIMDA Diolah

Tabel 3.8  
 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
 Kota Langsa Tahun 2018-2022

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2018	2019	2020	2021	2022	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH			867.769.715.665	882.177.550.838	896.848.573.337	911.807.919.081	927.061.303.562	1,67
	1.1.	Pendapatan Asli Daerah		125.634.683.815	128.147.377.491	130.710.325.041	133.324.531.542	135.991.022.173	2,00
		1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	12.425.000.000	12.673.500.000	12.926.970.000	13.185.509.400	13.449.219.588	2,00
		1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.287.422.550	5.393.171.001	5.501.034.421	5.611.055.109	5.723.276.212	2,00
		1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	618.845.242	631.222.147	643.846.590	656.723.522	669.857.992	2,00
		1.1.4.	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	2.400.000.000	2.448.000.000	2.496.960.000	2.546.899.200	2.597.837.184	2,00
		1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	104.903.416.023	107.001.484.343	109.141.514.030	111.324.344.311	113.550.831.197	2,00

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2018	2019	2020	2021	2022	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2			3	4	5	6	7	8
	1.2.	Dana Perimbangan		598.565.798.000	610.032.440.180	621.723.368.466	633.643.018.112	645.795.912.574	1,92
		1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.196.834.000	20.600.770.680	21.012.786.094	21.433.041.815	21.861.702.652	2,00
		1.2.2.	Dana Alokasi Umum	444.012.586.000	452.892.837.720	461.950.694.474	471.189.708.364	480.613.502.531	2,00
		1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	134.356.378.000	136.538.831.780	138.759.887.898	141.020.267.933	143.320.707.391	1,63
	1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		143.569.233.850	143.997.733.167	144.414.879.830	144.840.369.427	145.274.368.815	0,30
		1.3.1.	Pendapatan Hibah	17.571.400.000	17.571.400.000	17.571.400.000	17.571.400.000	17.571.400.000	0,00
		1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.448.365.850	20.857.333.167	21.274.479.830	21.699.969.427	22.133.968.815	2,00

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2018	2019	2020	2021	2022	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2			3	4	5	6	7	8
		1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	105.549.468.000	105.569.000.000	105.569.000.000	105.569.000.000	105.569.000.000	-
		1.3.4.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>			<b>876.335.871.748</b>	<b>890.906.020.035</b>	<b>905.742.581.996</b>	<b>920.870.757.880</b>	<b>936.296.328.791</b>	<b>1,67</b>
	2.1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		<b>432.944.439.168</b>	<b>439.974.405.555</b>	<b>447.120.907.025</b>	<b>454.406.155.502</b>	<b>461.832.884.098</b>	<b>1,63</b>
		2.1.1.	Belanja Pegawai	323.037.562.105	329.084.152.807	335.247.533.718	341.529.999.225	347.933.889.191	1,87
		2.1.2.	Belanja Hibah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00
		2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00
		2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/dan Pemerintah Desa	1.771.242.255	1.806.667.100	1.842.800.442	1.879.656.451	1.917.249.580	2,00

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2018	2019	2020	2021	2022	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2			3	4	5	6	7	8
		2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan/ Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	101.135.634.808	102.083.585.648	103.030.572.865	103.996.499.826	104.981.745.326	0,94
		2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-
	2.2.	Belanja Langsung		443.391.432.580	450.931.614.479	458.621.674.971	466.464.602.378	474.463.444.693	1,71
		2.2.1.	Belanja Pegawai	68.376.990.499	69.498.905.609	70.643.259.020	71.810.499.500	73.001.084.789	1,65
		2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.616.809.749	113.390.195.653	115.198.144.142	117.041.337.418	118.920.471.234	1,60
		2.2.3.	Belanja Modal	263.397.632.331	268.042.513.218	272.780.271.809	277.612.765.460	282.541.888.671	1,77
	SURPLUS/(DEFISIT)			(8.566.156.083)	(8.728.469.196)	(8.894.008.659)	(9.062.838.799)	(9.235.025.228)	

NO	URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
				2018	2019	2020	2021	2022	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2			3	4	5	6	7	8
3.	Pembiayaan			8.566.156.083	8.728.469.196	8.894.008.659	9.062.838.799	9.235.025.228	1,90
	3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		9.566.156.083	9.728.469.196	9.894.008.659	10.062.838.799	10.235.025.228	1,70
		3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.566.156.083	9.728.469.196	9.894.008.659	10.062.838.799	10.235.025.228	1,70
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
SILPA TAHUN BERKENAAN				-	-	-	-	-	-

Sumber : SIMDA Diolah

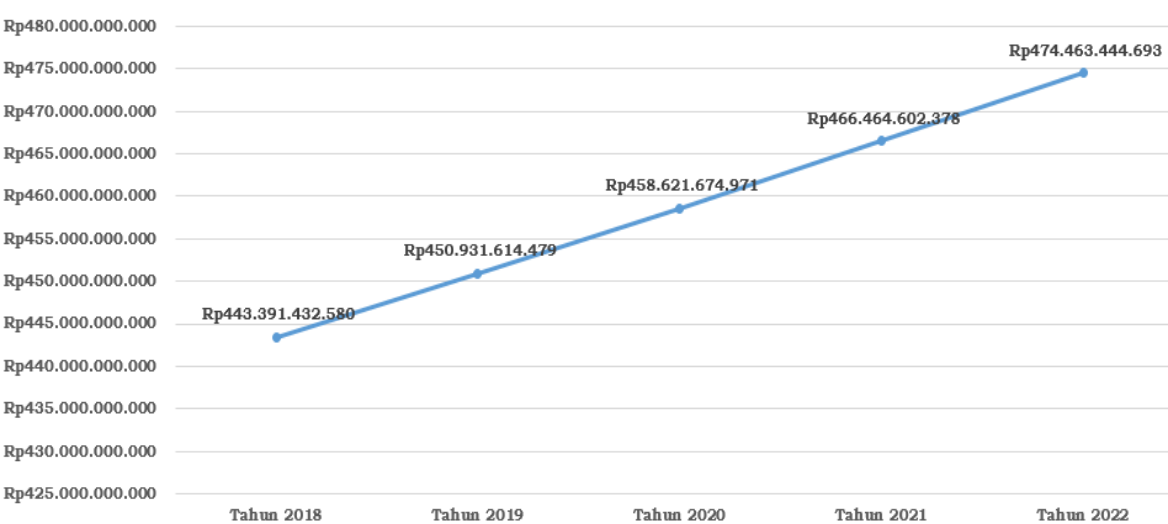


3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dijabarkan maka diperoleh gambaran kapasitas rill kemampuan keuangan daerah untuk membiayai rencana kebutuhan belanja langsung. Kapasitas rill kemampuan keuangan daerah tersebut diperoleh melalui total penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah. Adapun gambaran kapasitas rill kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut.

Kapasitas rill kemampuan keuangan daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.443.391.432.580,- dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp.474.463.444.693,- dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 1,71 persen.

Grafik 3.22  
Perkembangan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022



Sumber : SIMDA Diolah

Tabel 3.9  
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah  
 Kota Langsa Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	867.769.715.665	882.177.550.838	896.848.573.337	911.807.919.081	927.061.303.562
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	9.566.156.083	9.728.469.196	9.894.008.659	10.062.838.799	10.235.025.228
	<b>Total penerimaan</b>	<b>877.335.871.748</b>	<b>891.906.020.035</b>	<b>906.742.581.996</b>	<b>921.870.757.880</b>	<b>937.296.328.791</b>
4.	Belanja Tidak Langsung	432.944.439.168	439.974.405.555	447.120.907.025	454.406.155.502	461.832.884.098
5.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	<b>Total Belanja Tidak Langsung + Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>433.944.439.168</b>	<b>440.974.405.555</b>	<b>448.120.907.025</b>	<b>455.406.155.502</b>	<b>462.832.884.098</b>
<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN</b>		<b>443.391.432.580</b>	<b>450.931.614.479</b>	<b>458.621.674.971</b>	<b>466.464.602.378</b>	<b>474.463.444.693</b>

Sumber : SIMDA Diolah

Sebagaimana yang telah dijabarkan, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan pembiayaan terhadap rencana kebutuhan belanja langsung. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas perencanaan anggaran, maka belanja langsung dimaksud dituangkan kedalam 2 (dua) bentuk prioritas yang secara keseluruhan merupakan bentuk dukungan terhadap penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar yang dijabarkan melalui urusan wajib pelayanan dasar, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan penunjang.

Tabel 3.10  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kota Langsa Tahun 2018-2022

NO	URAIAN		PROYEKSI				
			TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2		3	4	5	6	7
1.	Kapasitas riil kemampuan keuangan		443.391.432.580	450.931.614.479	458.621.674.971	466.464.602.378	474.463.444.693
2.	Prioritas		443.391.432.580	450.931.614.479	458.621.674.971	466.464.602.378	474.463.444.693
	2.1.	Prioritas I	354.524.224.004	350.749.871.707	361.500.339.447	368.651.564.020	370.125.117.645
	2.2.	Prioritas II	88.867.208.576	100.181.742.773	97.121.335.525	97.813.038.357	104.338.327.049
SELISIH LEBIH/(KURANG)			-	-	-	-	-

Sumber : SIMDA Diolah

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Disamping hasil pembangunan yang telah dicapai dari berbagai urusan pembangunan, dijumpai pula beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi dan dituntaskan dalam jangka menengah ke depan (periode 2017-2022). Permasalahan tersebut akan diatasi secara terpadu, komprehensif, dan tepat, mengingat dampaknya berpotensi begitu besar menghambat kemajuan pembangunan kota. Inti permasalahan tersebut terjadi pada umumnya akibat terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

#### *Implementasi Syariat Islam*

Belum sempurnanya pemahaman, penghayatan, dan pengalaman nilai-nilai islami di kalangan masyarakat Kota Langsa merupakan permasalahan penting yang menyebabkan syariat Islam belum terlaksana secara baik. Kehidupan modernisasi yang didorong perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut pula mempengaruhi pelaksanaan syariat Islam. Lemahnya pengawasan dari instansi dan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab masih terjadinya pelanggaran syariat Islam di Kota Langsa. Meskipun jumlah pelanggaran qanun syariat Islam di Kota Langsa tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015 yaitu sebanyak 880 kasus namun jumlah ini lebih tinggi dari tahun 2014 yang hanya 596 kasus.

Selain permasalahan penegakan qanun syariat Islam, permasalahan lainnya adalah peran serta ulama dalam pembangunan di Kota Langsa. Pasal 16 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menegaskan bahwa ulama memiliki peran dalam penetapan kebijakan Aceh. Pasal 139 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa ulama berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi. Jumlah Ulama di Kota Langsa hingga tahun 2016 berjumlah 50 orang. Jumlah ini relatif masih sedikit

dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Langsa tahun 2016 yang sebesar 168.820 jiwa dengan jumlah rasio ulama per 10.000 penduduk sebanyak tiga orang ulama. Ke depan pengkaderan ulama harus tetap menjadi agenda penting mengingat Ulama memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan moral dan akidah masyarakat.

#### *Kualitas Sumber Daya Manusia*

Manusia sebagai salah satu modal dasar pembangunan tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2012-2015 dijadikan sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia di Kota Langsa. Pada tahun 2015, angka IPM Kota Langsa sebesar 74,74. Capaian kondisi ini merupakan cerminan perkembangan indikator pembangunan manusia di Kota Langsa dalam tiga aspek, bidang kesehatan yang dicerminkan oleh angka harapan hidup, bidang pendidikan yang dicerminkan oleh rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, serta bidang ekonomi yang dicerminkan oleh daya beli masyarakat. Angka IPM Kota Langsa yang sebesar 74,74 ini juga menandakan besarnya angka yang harus dicapai menuju titik ideal sebesar 25,26.

Angka harapan hidup saat lahir di Kota Langsa saat ini mencapai 69 tahun, walau secara tren terus meningkat, tetapi angka harapan hidup Kota Langsa masih harus ditingkatkan karena masih di bawah rata-rata angka harapan hidup Provinsi Aceh yang sebesar 69,5 tahun.

Rata-rata lama sekolah di Kota Langsa telah mencapai 10,49 tahun sedangkan angka harapan lama sekolah di Kota Langsa berada pada kisaran 13 hingga 14 tahun, hal ini menandakan bahwa dengan sistem pendidikan yang ada di Kota Langsa, diharapkan penduduk di Kota Langsa dapat memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam lima tahun ke depan.

Dalam hal daya beli masyarakat, tingkat pengeluaran per kapita penduduk di Kota Langsa mencapai 10,605 juta per tahun, angka ini terus meningkat selama empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 2,29 persen per tahun. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun seiring dengan

meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dituntut pula peningkatan dari sisi pendapatan penduduk.

Selain permasalahan capaian indikator IPM tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang masih harus diatasi dalam lima tahun ke depan, mencakup : a) masih ditemui anak didik yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah; b) masih kurangnya tenaga pendidik (guru) pada mata pelajaran tertentu; c) distribusi tenaga pendidik yang berkualitas belum merata; d) belum meratanya distribusi sumberdaya kesehatan yang berkualitas; e) optimalisasi layanan kesehatan; f) masih ditemuinya angka kematian bayi dan Balita penderita gizi buruk; dan g) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

#### *Pertumbuhan Ekonomi*

Perekonomian Kota Langsa pada tahun 2016 dengan menggunakan penghitungan metode baru tahun dasar 2010 mencapai 4,5 persen, angka ini lebih tinggi dari tahun 2014 yang mencapai 4,42 persen. Meskipun naik dibandingkan dengan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi dalam periode empat tahun terakhir sangat berfluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan pondasi ekonomi Kota Langsa masih rawan dari berbagai gejolak dan guncangan ekonomi yang dipicu oleh faktor internal maupun eksternal.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Langsa terkait erat dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, seperti masih terbatasnya investasi swasta, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor-sektor produktif, serta belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan Kuala Langsa. Diperlukan kebijakan yang lebih tepat dan terarah guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam jangka menengah ke depan. Seperti kebijakan yang dapat mendorong minat para calon investor untuk menanamkan modalnya, disamping pula upaya keras dalam meningkatkan kapasitas UMKM, optimalisasi pemanfaatan objek-objek wisata sebagai sumber-sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

### *Kemiskinan dan Pengangguran*

Meskipun persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Langsa menurun dalam beberapa tahun terakhir namun permasalahan kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Beberapa program penguatan kemandirian masyarakat seperti program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan kredit atau usaha pelaku UMKM, bantuan Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemberdayaan sosial-ekonomi lainnya masih harus tetap dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

### *Produktivitas Koperasi dan UMKM*

Secara umum permasalahan spesifik yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM antara lain mencakup terbatasnya UMKM terhadap sumberdaya produktif, iklim usaha yang kurang kondusif, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, serta terbatasnya jangkauan pemasaran produk UMKM. Kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang lemah akibat manajemen pengelolaan koperasi yang tidak profesional, koperasi terbentuk tanpa disadari kepentingan ekonomi bersama, dan masih adanya pertentangan kepentingan dalam koperasi. Dampak dari hal tersebut, jumlah koperasi aktif di Kota Langsa pada tahun 2016 hanya sebesar 37 persen.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM harus menjadi perhatian sungguh-sungguh mengingat Kota Langsa termasuk pusat perdagangan barang dan jasa di wilayah timur Aceh yang didukung dengan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan Kuala Langsa. Oleh sebab itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam periode 2017-2022 diharapkan memberikan kontribusi positif dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Langsa yang berkualitas dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

### *Tata Kelola Pemerintahan*

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Birokrasi dan struktur organisasi pemerintah daerah yang



dibentuk harus efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pelayanan publik berkualitas yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa upaya strategis yang harus dilakukan dalam jangka menengah ke depan antara lain penataan dan modernisasi birokrasi, penataan kembali struktur organisasi serta perbaikan sistem kerja. Selain hal tersebut, tata kelola pemerintahan daerah yang baik tercermin pula dari pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional serta penilaian terhadap akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### *Infrastruktur Daerah*

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Langsa pada tahun 2016 baru mencapai 47 persen. Kondisi ini tentu saja diperlukan upaya keras dari Pemerintah Kota Langsa untuk menjadikan seluruh ruas jalan di Kota Langsa dalam kondisi baik.

Selain infrastruktur jalan, rasio perkembangan luas jaringan irigasi di Kota Langsa dari tahun 2016 yang ditinjau dari luas irigasi dalam kondisi baik sebanyak 0,65 dari total 1.774 ha luas lahan budidaya pertanian.

#### *Perumahan dan Lingkungan Hidup*

Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, persentase rumah layak huni pada tahun 2016 yaitu sebanyak 88,74 persen atau sebanyak 31.527 unit dari total keseluruhan. Diperlukan kerja keras dari Pemerintah Kota Langsa untuk terus menambah jumlah rumah dengan cara membangun dan melakukan rehab bagi para penduduk yang dikategorikan tidak mampu.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2016 mencapai 84,20 persen atau sekitar 37.475 rumah tangga. Jumlah ini juga mengindikasikan bahwasannya belum semua rumah tangga di Kota Langsa menggunakan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Persentase penanganan sampah di Kota Langsa tahun 2016 sebanyak 28 persen dari 203 m<sup>3</sup> sampah yang dihasilkan. Beberapa hal yang dapat dilaksanakan dalam penanganan sampah antara lain 1) pemilihan; 2) pengumpulan; 3) pengangkutan; 4) pengolahan; dan 5) pemrosesan akhir sampah.

### *Sosial Kemasyarakatan*

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan pada tahun 2015 adalah sebanyak 86 persen. Sedangkan persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2015 adalah sebanyak 21 persen. Beberapa penyebab maraknya jumlah PMKS di Kota Langsa antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, juga faktor mobilitas penduduk/PMKS yang berasal dari luar daerah yang ingin mencari peruntungan di Kota Langsa.

Jumlah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Langsa pada tahun 2016 adalah sebanyak 15 kasus. Diperlukan upaya untuk menekan seminimal mungkin jumlah KDRT, mengingat dampak dari KDRT akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

Pelestarian budaya di Kota Langsa selama ini dilakukan dengan mengadakan berbagai penyelenggaraan festival seni dan budaya, intensitas penyelenggaraan seni dan budaya tidak begitu tinggi namun kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Langsa. Selain penyelenggaraan seni dan budaya, penyediaan sarana penyelenggaraan juga memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Di Kota Langsa, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2016 adalah sebanyak tiga unit.

Dalam bidang olahraga, terdapat berbagai permasalahan yang harus diatasi dalam upaya pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, pembinaan dan upaya pembibitan atlet olahraga yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, dan rendahnya penghargaan bagi olahragawan berprestasi.

### *Keamanan dan Perdamaian*

Dalam hal keamanan, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) pada tahun 2015 adalah sebesar 93 persen. Meskipun angka ini tergolong tinggi namun tingkat kerentanan keamanan di Kota Langsa sebagai salah satu daerah bekas konflik harus menjadi perhatian

serius Pemerintah Kota Langsa dalam menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi.

#### 4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena diyakini akan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah. Selain berdasarkan beberapa permasalahan pembangunan di atas, isu strategis pembangunan Kota Langsa disusun dengan memperhatikan isu strategis nasional, isu strategis Aceh dan isu strategis daerah.

Isu strategis nasional meliputi:

- 1) Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
- 2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
- 3) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera.

Selanjutnya isu strategis Aceh yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;
- 2) Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan;
- 3) Penguatan perdamaian secara keseluruhan;
- 4) Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan;
- 5) Pengembangan pertanian dan perikanan;
- 6) Pengembangan industri, koperasi dan UMKM;
- 7) Pengembangan pariwisata;
- 8) Ketenagakerjaan;
- 9) Ketersediaan dan ketahanan energi;
- 10) Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi;
- 11) Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah;
- 12) Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni;
- 13) Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;
- 14) Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga;

- 15)Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
- 16)Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 17)Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

Sedangkan isu strategis daerah Kota Langsa yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan pembangunan, maka ditetapkan isu strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Syari'at Islam di wilayah Kota Langsa  
Melalui isu strategis pelaksanaan Syari'at Islam di wilayah Kota Langsa ini akan berdampak kepada penurunan pelanggaran syariat Islam, disamping juga melalui isu strategis ini akan berpengaruh terhadap penguatan lembaga pendidikan islami dalam penyebaran syiar Islam di kehidupan masyarakat.
2. Birokrasi Pemerintahan Serta Pelayanan Publik  
Melalui isu strategis birokrasi pemerintahan serta pelayanan publik ini akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas. Disamping itu, melalui isu strategis ini diharapkan akan menjadikan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta juga akan mampu meningkatkan pengawasan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Penataan Kota dan Lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat  
Melalui isu strategis penataan kota dan lingkungan tempat tinggal masyarakat ini diharapkan akan berdampak kepada tertatanya kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, meningkatkan luasan ruang terbuka hijau, dan meningkatkan penanganan sampah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
4. Tingkat Pendidikan Masyarakat  
Melalui isu strategis tingkat pendidikan masyarakat diharapkan agar berpengaruh terhadap meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia

dini, dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Selain juga berpengaruh terhadap pemerataan pelayanan pendidikan.

5. **Layanan Kesehatan serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**  
Melalui isu strategis layanan kesehatan serta kualitas hidup perempuan dan anak akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan serta taraf kesehatan masyarakat. Disamping itu juga melalui isu strategis ini akan berpengaruh terhadap peningkatan peran perempuan dalam pembangunan serta penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
6. **Jangkauan Layanan Air Bersih**  
Melalui isu strategis ini diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang ditandai dengan meningkatnya rasio rumah tangga pengguna air bersih.
7. **Pembangunan Infrastruktur Daerah**  
Melalui isu strategis pembangunan infrastruktur daerah ini diharapkan agar berpengaruh terhadap percepatan penyediaan infrastruktur daerah termasuk didalamnya peningkatan jaringan jalan dalam kondisi baik, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan. Disamping itu juga penentuan isu strategis ini akan berpengaruh terhadap peningkatan penyediaan fasilitas pemukiman penduduk.
8. **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**  
Melalui isu strategis pertumbuhan ekonomi daerah ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepedulian, pemberdayaan sosial, dan pendapatan per kapita masyarakat. Disamping itu juga melalui isu strategis ini dapat meningkatkan jumlah investasi daerah, menurunkan tingkat kemiskinan, serta dapat meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor produktif masyarakat.
9. **Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah Raga**  
Melalui isu strategis peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap penguatan peran pemuda dalam pembangunan, disamping juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi olah raga daerah.

10. Pemeliharaan Seni Adat dan Budaya Daerah

Melalui isu strategis pemeliharaan seni adat dan budaya daerah ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap pelestarian seni adat budaya daerah sebagai perekat bangsa dan aset daerah serta berpengaruh terhadap peningkatan kesesuaian pelaksanaan adat dan istiadat Aceh.

11. Pemberdayaan Masyarakat

Melalui isu strategis pemberdayaan masyarakat ini diharapkan agar dapat berpengaruh terhadap peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan serta berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan Pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Gampong.

12. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum

Melalui isu strategis stabilitas keamanan dan ketertiban umum diharapkan agar dapat berpengaruh terhadap peningkatan kerja sama dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memelihara stabilitas politik, keamanan, perdamaianan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan KLHS RPJMD Kota Langsa, maka isu-isu strategis yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar dan Infrastruktur;
2. Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Konflik dan Kesenjangan Sosial;
4. Kerentanan Sosial Budaya;
5. Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintah;
6. Penurunan Kualitas Lingkungan; dan
7. Alih Fungsi Lahan.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

**“Langsa Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami”**

Visi ini mengandung tiga kalimat kunci sebagai berikut:

**1) Langsa Kota Jasa**

Bermakna sebagai sebuah kota yang bergerak dan memiliki keunggulan di sektor jasa, dan perdagangan, berbagai industri atau pabrik berskala menengah dan kecil, termasuk sentra-sentra UKM dapat berkembang dengan baik dengan tetap memperhatikan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) sebagai pusat interaksi warga.

**2) Langsa Kota Berperadaban**

Bermakna sebagai sebuah kota yang memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

**3) Langsa Kota Islami**

Memiliki arti sebagai kota yang masyarakatnya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antarumat beragama.

## 5.2. Misi

Visi di atas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) misi, yaitu sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dengan lebih mendorong inisiatif dan partisipasi warga.

Melalui misi 1 diharapkan akan Terciptanya masyarakat Kota Langsa yang islami, Memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelaksanaan dan memberikan dukungan penuh terhadap syariat Islam.

Misi 2 : Melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan, sinkronisasi dan harmonisasi kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang berbasiskan *smart city* dalam rangka mendukung pelaksanaan *e-government*.

Melalui misi 2 akan Terlaksananya pemerintahan yang bersih, amanah dan berwibawa di semua perangkat daerah serta Terjalinnnya kerjasama yang kuat antar lembaga dan antar wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, serta Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Misi 3 : Melanjutkan penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, sehat, indah dan nyaman.

Melalui misi 3 akan Tertatanya kota sesuai dengan rencana peruntukan lahan, Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau dan terkendalinya pencemaran serta Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan.

Melalui misi 4 akan Terciptanya pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Meningkatnya angka kelulusan yang memiliki SDM yang berdaya saing tinggi, Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, serta Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di semua tingkatan.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Melalui misi 5 akan Terwujudnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, Meningkatnya angka harapan hidup, Kemudahan akses layanan kesehatan serta Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan baik dasar maupun rujukan.



Misi 6 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui misi 6 akan Terwujudnya kota layak anak, Meningkatnya indeks pembangunan gender, Terlindunginya perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik dan jabatan publik serta Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan.

Misi 7 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah.

Melalui misi 7 akan tersedianya infrastruktur daerah antara lain Terbangunnya jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah, Terbangunnya jaringan air bersih, jaringan irigasi, Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, Menurunnya titik rawan banjir, Tersedianya saluran drainase yang berfungsi dengan baik, serta Tersedianya infrastruktur lingkungan pemukiman penduduk yang berkualitas.

Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui misi 8 diharapkan akan Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia, Meningkatnya jumlah kunjungan wisata, Terjaminnya kesejahteraan penduduk penyandang masalah sosial, serta Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Misi 9 : Mengembangkan olah raga, kesenian, dan kepemudaan.

Melalui misi 9 akan Meningkatnya jumlah pemuda-pemudi yang berprestasi, Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda, Meningkatnya jumlah atlet berprestasi dari berbagai cabang olah raga, serta Terpeliharanya adat dan seni budaya daerah.

Misi 10 : Memelihara serta meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik.

Melalui misi 10 akan Terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan daerah, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta Menurunnya jumlah pelanggaran keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tabel 5.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 Berdasarkan Misi

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
	VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"										
	Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah dengan Lebih Mendorong Inisiatif dan Partisipasi Warga										
1.1		Mewujudkan Masyarakat yang Islami	Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam	Kasus	880	800	700	600	500	400	400
1.1.1		Kesesuaian Pelaksanaan Syariat Islam bagi Umat Islam	Jumlah Qanun Syariat Islam yang Dilaksanakan	Qanun	6	6	6	6	6	6	6
1.1.2		Meningkatnya Persentase Rumah Ibadah yang Representatif	Persentase Rumah Ibadah yang Representatif	%	N/A	70	75	80	85	90	90
1.1.3		Peran Serta Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Persentase Keikutsertaan Lembaga Pendidikan Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	%	N/A	100	100	100	100	100	100

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
	Misi 2 : Melanjutkan Penataan Birokrasi Pemerintahan, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kerjasama Pembangunan yang Lebih Responsif, Efektif dan Efisien, Transparan Serta Akuntabel yang Berbasiskan <i>Smart City</i> Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan <i>e-government</i>										
2.1		Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang Berorientasi Kepada Penciptaan Pemerintahan yang Bersih, Amanah, dan Berwibawa Serta Optimalisasi Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	N/A	B	B	B	B	B	B
2.1.1		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LKIP; Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai; Kriteria	CC; Tinggi	B; Tinggi	B; Sangat Tinggi	B; Sangat Tinggi	BB; Sangat Tinggi	BB; Sangat Tinggi	BB; Sangat Tinggi

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.3		Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Pusat dan Provinsi	Tingkat Kesesuaian Prioritas dan Kebijakan Pembangunan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2.1.4		Tertibnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tingkat Penerapan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2.1.5		Terlaksananya Pemerintahan yang Bersih, Amanah dan Berwibawa di Semua Perangkat Daerah Serta Terjalinnya Kerjasama yang Kuat Antar Lembaga dan Antar Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah	Skala	N/A	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.6		Terselenggaranya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang Kuat, Efisien dan Efektif	Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP	Level/Tingkat	Level III; Level II	Level III; Level III	Level III; Level III	Level III; Level III	Level III; Level III	Level III; Level III	Level III; Level III
<b>Misi 3 : Melanjutkan Penataan Kota Untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Hijau, Sehat, Indah dan Nyaman</b>											
3.1		Melakukan Pengembangan, Penataan Kota, Serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	27	30	33	35	37	40	40
3.1.1		Terselenggaranya Penataan dan Pengembangan RTH	Persentase Ruang Terbuka Hijau(RTH)	%	15,46	15,46	16,00	16,40	16,80	17,20	17,20
3.1.2		Terselenggaranya Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Tingkat Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	75,00	75,40	75,70	76,10	76,10

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
3.1.3		Terselenggaranya Aksi Dukungan Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.1.4		Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks/Skala	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
<b>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Semua Tingkatan</b>											
4.1		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sejak Pendidikan Dasar, Menengah, Sampai Perguruan Tinggi Sebagai Modal Dasar Pembangunan Daerah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10	10	11	11	12	12	12
4.1.1		Meningkatnya Partisipasi PAUD	Persentase Anak Peserta PAUD	%	43	50	55	60	65	70	70
4.1.2		Meningkatnya Persentase APS, APK, APM, AL SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat	Persentase Rata-Rata Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	N/A	96	97	98	99	100	100

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
4.1.3		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	Angka Melek Huruf	%	99	99,39	99,58	99,78	99,89	99,99	99,99
4.1.4		Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Penilaian Angka Kredit Guru	Persentase Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi Standar Tingkat Pendidikan	%	76,73	77,73	76,9	77,2	77,5	78	78
4.1.5		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Kunjungan	14090	14100	14200	14300	14400	14500	14500
	<b>Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>										
5.1		Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Serta Taraf Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5
5.1.1		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	%	N/A	25	24	23	22	21	21
5.1.2		Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Meningkatnya Persentase Cakupan Kunjungan Bayi serta Pelayanan Anak Balita	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	8	7	7	6	6	5	5

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
5.1.3		Menurunnya Angka Kematian Ibu Hamil/Melahirkan dan Meningkatnya Persentase Cakupan Kebidanan yang Ditangani	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	7	6	6	5	5	5	5
	<b>Misi 6 : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
6.1		Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Fasilitasi Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	N/A	60	60	61	61	62	62
6.1.1		Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB	Rasio Akseptor KB	Rasio	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87
6.1.2		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	N/A	65	66	67	68	68	68



NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
6.1.3		Terwujudnya Kota Layak Anak	Langsa Kota Layak Anak	Sudah/Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah
6.1.4		Menurunnya Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
Misi 7 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Guna Mendukung Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah											
7.1		Mempercepat Penyediaan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Memfasilitasi Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,74	75	76	77	78	79	79
7.1.1		Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Pelayanan Daerah Irigasi	Proporsi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	84	85	86	87	88	89	89
7.1.2		Tersedianya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta Tertibnya Pelayanan Angkutan	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,0162	0,0161	0,016	0,0159	0,0158	0,0157	0,0157

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
7.1.3		Tersedianya Jaringan Jalan yang Terhubung dengan Baik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan yang Terhubung Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,47	0,48	0,5	0,53	0,55	0,58	0,58
7.1.4		Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Talud/Turap/Bronjong yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase	%	24.57	30	35	40	46	51	51
7.1.5		Meningkatnya Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	51	52	53	54	55	55
7.1.6		Menurunnya Titik Rawan Banjir	Persentase Luas Wilayah Kebanjiran	%	1,89	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
7.1.7		Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,18	0,18	0,19	0,19	0,2	0,2	0,2
7.1.8		Meningkatnya Realisasi Fisik Pembangunan Infrastruktur	Tingkat realisasi fisik pembangunan infrastruktur daerah	%	N/A	90	91	92	93	94	94

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
	Misi 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat										
8.1		Meningkatkan Kepedulian, Keberdayaan Sosial, dan Pendapatan Per Kapita Masyarakat	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)	Rasio	N/A	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	0,3
8.1.1		Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perkebunan	Peranan Kategori Pertanian, Perternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	8,62	8,71	8,76	8,83	8,88	8,94	8,94
8.1.2		Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	Peranan Kategori Perikanan terhadap PDRB	%	3,32	3,39	3,45	3,5	3,55	3,6	3,6
8.1.3		Meningkatnya Produksi Hewan Ternak	Peranan Kategori Pertanian, Perternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	8,62	8,71	8,76	8,83	8,88	8,94	8,94
8.1.4		Jumlah Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. (Milyar)	642	156	159	163	166	169	169
8.1.5		Meningkatnya IKM, UKM dan Koperasi yang Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	60	65	67	69	71	75	75
8.1.6		Berkembangnya Industri Kreatif dan Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Produk Unggulan UKM yang Kompetitif	Jenis	N/A	50	60	70	80	90	90
8.1.7		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Kontribusi Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	2,48	2,67	2,79	2,84	2,88	2,93	2,93

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
8.1.8		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB	%	30,98	31	31	32	32	33	33
8.1.9		Menurunkan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk di Bawah Garis Miskin	%	10,3	10,05	9,8	9,55	9,3	9,3	9,3
8.1.10		Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja Lokal yang Siap Pakai dan Berdaya Saing serta Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja	Daya Serap Tenaga Kerja	%	21	25	29	33	37	41	41
8.1.11		Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Gampong dalam Kegiatan Partisipatif Pembangunan Gampong	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong	Skala	N/A	N/A	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Misi 9 : Mengembangkan Olah Raga, Kesenian, dan Kepemudaan											

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
9.1		Memperkuat Peran Pemuda, Olahraga, Serta Melestarikan Adat Budaya Daerah Sebagai Perekat Bangsa dan Aset Daerah	Jumlah Pemuda/OKP Berprestasi; Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi; Jumlah Festival Seni dan Budaya	Orang/OKP; Cabor; Event	N/A	20; 28; 2	25; 28; 2	30; 28; 2	35; 28; 2	40; 28; 2	150; 28; 10
9.1.1		Terselenggaranya Pembinaan, Pelatihan Keterampilan, dan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan serta Menjadikan Langsa sebagai Kota Layak Pemuda	Persentase Pembinaan Kelompok Kepemudaan; Kota Layak Pemuda	%; Sudah/Belum	N/A	75; Belum	80; Belum	85; Belum	90; Sudah	95; Sudah	95; Sudah
9.1.2		Terselenggaranya Pembinaan Olah Raga Berprestasi di Daerah dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Persentase Pembinaan Olahraga Daerah	%	N/A	75	80	85	90	95	95

NO.	VISI & MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
9.1.3		Terselenggaranya Pengelolaan dan Kesesuaian Pelaksanaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Daerah	Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Daerah	Gampong	66	66	66	66	66	66	66
9.1.4		Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah	Peran Serta Masyarakat Dalam Berbangsa, Toleransi Antarumat Beragama dan Kepekaan Sosial	Gampong	66	66	66	66	66	66	66
	<b>Misi 10 : Memelihara Serta Meningkatkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik</b>										
10.1		Kerja Sama dan Partisipasi Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Memelihara Stabilitas Politik, Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban	Jumlah Unjuk Rasa/Demontrasi/Kerusuhan/Pemberontakan yang Berkaitan dengan Permasalahan Ideologi, Ekonomi, dan Sosial	Kegiatan	N/A	0	0	0	0	0	0
10.1.1		Terselenggaranya Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM	Jumlah Pemilih Pemilu/Pemilukada	Jiwa	108380	108380	110385	110385	110385	112371	112371
10.1.2		Menurunnya Jumlah Pelanggaran K3	Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	N/A	927	800	700	600	500	500

Selanjutnya untuk menjamin keselarasan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Langsa dengan Pemerintah Aceh, perlu dilakukan sinkronisasi antar visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Langsa dengan misi pembangunan Pemerintah Aceh. Adapun visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022, yaitu:

“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”

Adapun misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada tahapan pembangunan jangka panjang, sinkronisasi visi dan misi pembangunan jangka menengah dilakukan terhadap visi dan misi dokumen

RPJPD Kota Langsa Tahun 2007-2027 dan RPJPD Pemerintah Aceh Tahun 2012-2032.

Visi pembangunan jangka panjang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2027-2027 adalah :

“Terwujudnya Kota Langsa sebagai Pusat Perdagangan dan Industri, disertai Masyarakat yang Maju dan Islami”

Misi pembangunan jangka panjang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2027-2027, yaitu:

- 1) Mewujudkan Kota Langsa menjadi pusat perdagangan dan industri, misi-misi yang dilakukan antara lain adalah:
  - a) Mengembangkan sektor pertanian, khususnya perkebunan dan perikanan, dan industri berdasarkan kawasan yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
  - b) Memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja pada sektor pertanian dan industri;
  - c) Mengembangkan pelabuhan Kuala Langsa menjadi pelabuhan ekspor bertaraf internasional;
  - d) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana sektor pertanian (perkebunan dan perikanan), industri, dan perdagangan; dan
  - e) Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha tani.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang maju, ditetapkan misi-misi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
  - a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan umum dan agama;
  - b) Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan umum dan agama;
  - c) Mengembangkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan;
  - d) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan;
  - e) Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan baik di Rumah Sakit Umum maupun di Puskemas/Puskesmas Pembantu;



- f) Menyediakan prasarana dan sarana sosial yang memadai;
  - g) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga legislatif dalam mengawasi jalannya pembangunan sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat;
  - h) Meningkatkan peranan dan kualitas aparaturnya penegak hukum;
  - i) Mewujudkan aparaturnya pemerintah yang bersih dan berwibawa; dan
  - j) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang Islami, misi-misinya antara lain adalah:
- a) Meningkatkan fungsi sarana peribadatan dan lembaga-lembaga keagamaan sebagai pusat pengamalan pengembangan nilai-nilai islami;
  - b) Melaksanakan syariat Islam yang kaffah dalam aspek kehidupan;
  - c) Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d) Menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi; dan
  - e) Meningkatkan peran fungsi lembaga peradilan agama.

Selanjutnya visi pembangunan jangka panjang Pemerintah Aceh Tahun 2012-2032, yaitu :

“Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera”

Sedangkan misi pembangunan jangka panjang Pemerintah Aceh Tahun 2012-2032, adalah :

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata;
- 6) Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Dalam ruang lingkup nasional, upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

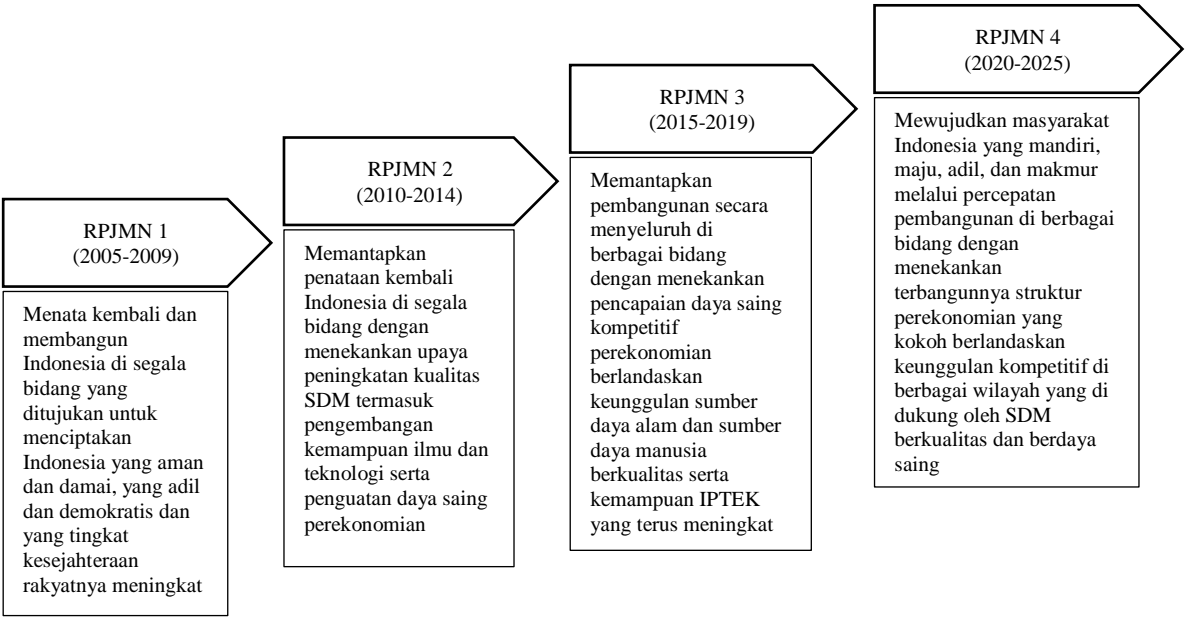
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah;

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1  
Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025



Adapun visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 juga ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Langsa Tahun 2017-2022

Visi : Langsa Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"				
Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah dengan Lebih Mendorong Inisiatif dan Partisipasi Warga				
1.1	Mewujudkan Masyarakat yang Islami	1.1.1	Kesesuaian Pelaksanaan Syariat Islam bagi Umat Islam	1.1.1.1 Meningkatkan Ijtihad, dan Pengkajian Hukum Islam, Mudzakah serta Pengkaderan Ulama
				1.1.1.2 Meningkatkan Penertiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam
				1.1.1.3 Memantapkan Peran Ulama dan Pemuka-Pemuka Agama Dalam Bidang Keagamaan
				1.1.1.4 Melanjutkan Safari Maghrib dan Subuh ke Gampong-Gampong
				1.1.1.5 Lomba Masjid/Mushalla Terbersih dan Termakmur
				1.1.1.6 Jambore Santri, TPA, Remaja Masjid, Pelajar, dan Mahasiswa
		1.1.2	Meningkatnya Persentase Rumah Ibadah yang Representatif	1.1.2.1 Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ibadah dan Rumah Ibadah

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"</b>				
			1.1.3 Peran Serta Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	1.1.3.1 Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kompetisi Pendidikan Islami Bagi Pelajar
<b>Misi 2 : Melanjutkan Penataan Birokrasi Pemerintahan, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kerjasama Pembangunan yang Lebih Responsif, Efektif dan Efisien, Transparan Serta Akuntabel yang Berbasis <i>Smart City</i> Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan <i>e-government</i></b>				
2.1	Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang Berorientasi Kepada Penciptaan Pemerintahan yang Bersih, Amanah, dan Berwibawa Serta Optimalisasi Pelayanan Publik	2.1.1	Terlaksananya Pemerintahan yang Bersih, Amanah dan Berwibawa di Semua Perangkat Daerah Serta Terjalannya Kerjasama yang Kuat Antar Lembaga dan Antar Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik	2.1.1.1 Pembinaan Mental ASN Agar Lebih Disiplin, Bertanggungjawab, Ikhlas, Jujur, Anti KKN serta Bebas Pungli dalam Menjalankan Tugasnya
				2.1.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir dan Pembinaan Aparatur
				2.1.1.3 Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Langsa Melalui Beragam Pelatihan, <i>Workshop</i> , Seminar, dan Kursus
				2.1.1.4 Memberikan Peluang Untuk Melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan Serta Bantuan Lainnya
				2.1.1.5 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
				2.1.1.6 Menjamin Kesejahteraan Aparatur
				2.1.1.7 Mengefektifkan Sistem <i>Reward and Punishment</i> untuk ASN
				2.1.1.8 Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah



NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"				
				2.1.1.9 Advokasi Kebijakan Pemerintah Pusat Terutama yang Menghambat Iklim Investasi, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Peraturan Menteri Pertanian Terkait Tindakan Karantina untuk Impor Produk Pertanian
				2.1.1.10 Advokasi Pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara eks HGB PT Kopalmas untuk Pembangunan Kawasan Industri di Kuala Langsa
				2.1.1.11 Meningkatkan Kerjasama dan Pengembangan Wilayah <i>Hinterland</i> Dalam Rangka Menjaga Kelestarian DAS Krueng Langsa
				2.1.1.12 Meningkatkan Kerjasama dengan Wilayah <i>Hinterland</i> untuk Fungsionalisasi dan Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa
				2.1.1.13 Meningkatkan Kerjasama Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
				2.1.1.14 Menjalinkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Gampong
				2.1.1.15 Menjalinkan Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
					2.1.1.16	Mempersiapkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kawasan Industri Langsa
					2.1.1.17	Penyelesaian Pembebasan Lahan untuk RSU dan Perluasan Hutan Kota Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan RI
					2.1.1.18	Mengefektifkan Mekanisme <i>Control</i> Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Melalui Berbagai Saluran, seperti <i>Drop Box</i> , Telepon, SMS, Sambung Rasa, dan Teknologi Komunikasi Informasi
					2.1.1.19	Meningkatkan peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
					2.1.1.20	Renegosiasi dengan PT KAI Terkait Pemanfaatan Aset Tanah Bekas Rel untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah
			2.1.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah	2.1.2.1	Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Aksi Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Korupsi
					2.1.2.2	Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah serta Penyusunan Rancangan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
					2.1.2.3	Melakukan Penataan Tata Kelola Keuangan dengan Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Publik dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
			2.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1.3.1	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			2.1.4	Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Pusat dan Provinsi	2.1.4.1	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
			2.1.5	Tertibnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.1.5.1	Meningkatkan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan serta Peningkatan Infrastruktur Daerah
					2.1.5.2	Meningkatkan Pelayanan dan Pelatihan Tenaga SIAK, Sosialisasi serta Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan
					2.1.5.3	Terselenggaranya Koordinasi Pelayanan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
					2.1.5.4	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
			2.1.6	Terselenggaranya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang Kuat, Efisien dan Efektif	2.1.6.1	Meningkatkan Pelatihan Pengembangan dan Teknis Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"</b>				
				2.1.6.2 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
<b>Misi 3 : Melanjutkan Penataan Kota Untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Hijau, Sehat, Indah dan Nyaman</b>				
3.1	Melakukan Pengembangan, Penataan Kota, Serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	3.1.1	Terselenggaranya Penataan dan Pengembangan RTH	3.1.1.1 Melanjutkan Penataan Taman Hutan Raya Kota, Ekowisata Mangrove, TPA Kebun Ireng, dan Waduk Alue Gampu
				3.1.1.2 Melakukan Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas untuk Taman-Taman Kota
				3.1.1.3 Membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang Lengkap dengan fasilitas Mushola, Pojok ASI, Perpustakaan, Fasilitas Permainan, Fasilitas Seni dan Olah Raga
				3.1.1.4 Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				3.1.1.5 Mendorong Agar Setiap Gampong yang Mempunyai Aset Tanah untuk Membangun Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Anak
		3.1.2	Terselenggaranya Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Pola Ruang	3.1.2.1 Meningkatkan Survey dan Pemetaan serta Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
				3.1.2.2 Meningkatkan Kesesuaian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
					3.1.2.3	Meningkatkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
					3.1.2.4	Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
			3.1.3	Terselenggaranya Aksi Dukungan Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup	3.1.3.1	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
					3.1.3.2	Pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah Komunal dengan prinsip 3 R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ) Minimal 1 Unit di Masing-Masing Kecamatan
					3.1.3.3	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
					3.1.3.4	Melaksanakan Penghijaun dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim
						Lomba Rumah Sehat, Sekolah Sehat, dan Gampong Sehat serta Gotong Royong Bulanan dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat
			3.1.4	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	3.1.4.1	Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
					3.1.4.2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Semua Tingkatan						
4.1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sejak Pendidikan Dasar, Menengah, Sampai Perguruan Tinggi Sebagai Modal Dasar Pembangunan Daerah		4.1.1	Meningkatnya Partisipasi PAUD	4.1.1.1	Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
					4.1.1.2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini Melalui Posyandu Terintegrasi, PAUD, TK/ RA, TPA
			4.1.2	Meningkatnya Persentase APS, APK, APM, AL SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat	4.1.2.1	Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat
					4.1.2.2	Melaksanakan Konsep Sekolah <i>Full Boarding</i> untuk SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA dengan Tambahan Muatan Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Karakter
			4.1.3	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	4.1.3.1	Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Daerah
					4.1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					4.1.3.3	Meningkatkan Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup
					4.1.3.4	Memberikan Apresiasi Terhadap Anak-Anak Berprestasi
					4.1.3.5	Memperbanyak Event Perlombaan untuk Mendorong Peningkatan Prestasi Anak

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"				
				4.1.3.6 Meningkatkan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
				4.1.3.7 Mendorong Kerjasama Antarsekolah yang Berprestasi dari Luar Daerah dengan Beberapa Sekolah di Kota Langsa
				4.1.3.8 Mendukung Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Akses ke Perguruan Tinggi Universitas Samudera (UNSAM) dan IAIN Zawiyah Cot Kala dan Perguruan Tinggi Lainnya
				4.1.3.9 Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
				4.1.3.10 Memperbanyak <i>Vocational Training</i> untuk Pemuda/i Terutama yang Putus Pendidikan Menengah Atas atau Pengangguran
				4.1.3.11 Meningkatkan Kualitas Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
			4.1.4 Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Penilaian Angka Kredit Guru	4.1.4.1 Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendidik Melalui Lokakarya, Seminar, Pelatihan, dan Diskusi
			4.1.5 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	4.1.5.1 Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembinaan Perpustakaan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat						
5.1	Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Serta Taraf Kesehatan Masyarakat		5.1.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	5.1.1.1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas
					5.1.1.2	Meningkatkan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
					5.1.1.3	Pemenuhan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan Lainnya
					5.1.1.4	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan
					5.1.1.5	Melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Regional
					5.1.1.6	Meningkatkan Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
					5.1.1.7	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Rangka Penciptaan Masyarakat Mandiri Sehat
					5.1.1.8	Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM) dengan Memaksimalkan Fungsi Desa Siaga, Posyandu, Polindes serta Bentuk UKBM Lainnya
					5.1.1.9	Penanganan dan Pencegahan Penularan Penyakit
					5.1.1.10	Peningkatan Kampanye Pencegahan Penyakit <i>Degenerative</i>
					5.1.1.11	Menurunkan Tingkat Prevelensi Penyakit Berbasis Lingkungan
					5.1.1.12	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Masyarakat



NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"</b>				
				5.1.1.13 Meningkatkan Kemitraan Pengobatan Dasar dan Lanjutan Bagi Masyarakat
				5.1.1.14 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
				5.1.1.15 Memperkuat Kerjasama dan Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Gizi Masyarakat
				5.1.1.16 Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
				5.1.1.17 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia
				5.1.1.18 Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Lansia
			5.1.2 Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Meningkatnya Persentase Cakupan Kunjungan Bayi serta Pelayanan Anak Balita	5.1.2.1 Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
				5.1.2.2 Meningkatkan Kemitraan dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak Balita
			5.1.3 Menurunnya Angka Kematian Ibu Hamil/Melahirkan dan Meningkatnya Persentase Cakupan Kebidanan yang Ditangani	5.1.3.1 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Jaminan Persalinan serta Pelatihan dan Pendidikan Asuhan Persalinan Normal
				5.1.3.2 Meningkatkan Pengetahuan Wanita dan Keluarga untuk Menjamin Kesehatan Ibu serta Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan yang Tersedia

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
Misi 6 : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
6.1	Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Fasilitas Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	6.1.1	Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB	6.1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembinaan Keluarga Berencana	
				6.1.1.2	Meningkatkan Penyuluhan dan Fasilitas Pembentukan Kelompok Peduli KB	
		6.1.2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	6.1.2.1	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan	
				6.1.2.2	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan	
				6.1.2.3	Merumuskan Kebijakan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik serta Upaya Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
		6.1.3	Terwujudnya Kota Layak Anak	6.1.3.1	Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Serta Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	
				6.1.3.2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bermain Anak	
		6.1.4	Menurunnya Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	6.1.4.1	Fasilitas Penanganan Secara Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	
				6.1.4.2	Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
Misi 7 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Guna Mendukung Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah						
7.1	Mempercepat Penyediaan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Memfasilitasi Kebutuhan Dasar Masyarakat		7.1.1	Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Pelayanan Daerah Irigasi	7.1.1.1	Meningkatkan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
					7.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
					7.1.1.3	Peningkatan Pasokan Air Baku PDAM Tirta Keumeneng Melalui Penambahan Kapasitas Waduk dan Bendungan Krueng Langsa
					7.1.1.4	Pembangunan dan Perbaikan <i>Water Treatment</i>
					7.1.1.5	Pemasangan Jaringan Baru untuk Masyarakat yang Belum Terlayani
					7.1.1.6	Menyusun Studi Kelayakan Waduk Langsa yang Berfungsi Mengatasi Banjir, Menyediakan Air Baku PDAM, Irigasi Persawahan, dan Tempat Wisata
			7.1.2	Tersedianya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta Tertibnya Pelayanan Angkutan	7.1.2.1	Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dan Rambu Lalu Lintas
					7.1.2.2	Meningkatkan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya dan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas serta Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan
					7.1.2.3	Meningkatkan Ketersediaan Rambu dan Pos Pengendalian Lalu Lintas

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
					7.1.2.4	Memantapkan Kualitas Prasarana dan Sarana Perhubungan
					7.1.2.5	Melanjutkan Penataan Kawasan Bekas Jalur Rel Kereta Api
					7.1.2.6	Menyusun Studi Kelayakan Serta Pembangunan Bandara Perintis Aceh Timur Raya
			7.1.3	Tersedianya Jaringan Jalan yang Terhubung dengan Baik	7.1.3.1	Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan
					7.1.3.2	Memelihara Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan
					7.1.3.3	Memelihara/Merehabilitasi Prasarana Jalan dan Jembatan dalam Kawasan-Kawasan Cepat Tumbuh/Sentra-Sentra Produksi
					7.1.3.4	Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan
					7.1.3.5	Pemeliharaan Jalan yang Rusak dan Peningkatan Jalan di Gampong-Gampong
			7.1.4	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Talud/Turap/Bronjong yang Berfungsi dengan Baik	7.1.4.1	Meningkatkan Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong/Talud/Turap/Bronjong
			7.1.5	Meningkatnya Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah	7.1.5.1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
					7.1.5.2	Melanjutkan Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Berbasis Komunitas untuk Perkampungan Warga Berpendapatan Rendah
			7.1.6	Menurunnya Titik Rawan Banjir	7.1.6.1	Meningkatkan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air, Badan Sungai dan Saluran Induk
					7.1.6.2	Melanjutkan Penataan Krueng Langsa dan Perbaikan Saluran Air
			7.1.7	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	7.1.7.1	Meningkatkan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
					7.1.7.2	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana
			7.1.8	Meningkatnya Realisasi Fisik Pembangunan Infrastruktur	7.1.8.1	Memperkuat Kedudukan dan Fungsi Instansi Perangkat Daerah Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Daerah
					7.1.8.2	Meningkatkan Kapasitas Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
					7.1.8.3	Memperkuat Kerjasama Antarsektor Terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
					7.1.8.4	Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah
Misi 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat						
8.1	Meningkatkan Kepedulian, Keberdayaan Sosial, dan Pendapatan Per Kapita Masyarakat	8.1.1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perkebunan		8.1.1.1	Meningkatkan Penyediaan Sarana Produksi serta Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
					8.1.1.2	Meningkatkan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
					8.1.1.3	Meningkatkan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
					8.1.1.4	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Modern di Bidang Pertanian
					8.1.1.5	Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
					8.1.1.6	Melanjutkan Pembangunan Saluran Irigasi untuk Pertanian Tanaman Pangan
			8.1.2	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	8.1.2.1	Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
					8.1.2.2	Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
					8.1.2.3	Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
					8.1.2.4	Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
					8.1.2.5	Melanjutkan Rehabilitasi dan Fungsionalisasi 5.000 Ha Tambak
			8.1.3	Meningkatnya Produksi Hewan Ternak	8.1.3.1	Meningkatkan Pendistribusian Bibit Ternak dan Bahan Logistik Petani Ternak
					8.1.3.2	Meningkatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak serta Pendataan Masalah Peternakan

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"</b>				
				8.1.3.3 Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
				8.1.3.4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
		8.1.4 Jumlah Investasi Daerah		8.1.4.1 Meningkatkan Pembinaan serta Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah
				8.1.4.2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
				8.1.4.3 Fasilitasi BUMD dan Koperasi dengan Menggerakkan Sektor Ekonomi Melalui Penciptaan Lapangan Kerja
				8.1.4.4 Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif
				8.1.4.5 Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pameran Investasi
				8.1.4.6 Meningkatkan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
				8.1.4.7 Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi yang Memadai dan Menunjang Peluang Investasi
				8.1.4.8 Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier
				8.1.4.9 Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Secara Produktif
				8.1.4.10 Mengembangkan Sektor Ekonomi di Kawasan Cepat Tumbuh
		8.1.5 Meningkatnya IKM, UKM dan Koperasi yang Berdaya Saing		8.1.5.1 Meningkatkan Sosialisasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"</b>				
			8.1.6 Berkembangnya Industri Kreatif dan Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan	8.1.6.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
				8.1.6.2 Pembinaan dan Pemberdayaan PKK serta Dekranasda
				8.1.6.3 Lomba Desain Batik dan Bordir khas Langsa
			8.1.7 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	8.1.7.1 Meningkatkan Pengembangan Jaringan Kerja Sama dan Promosi Wisata
				8.1.7.2 Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata MICE ( <i>Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition</i> )
				8.1.7.3 Meningkatkan Kemitraan Informasi dan Pengembangan <i>Data Base</i> Pariwisata
				8.1.7.4 Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
				8.1.7.5 Melakukan Penataan Ekowisata dan Pembangunan Masyarakat Sadar Wisata di Kuala Langsa, Telaga Tujuh, dan Gampong-Gampong Terdekat dengan Lokasi Ekowisata Hutan Mangrove
			8.1.8 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	8.1.8.1 Meningkatkan Aktivitas Perdagangan Antarpulau dan Antarnegara Melalui Pelabuhan Kuala Langsa
				8.1.8.2 Mendorong Percepatan Penyelesaian Pembangunan Langsa <i>Town Squire</i>
				8.1.8.3 Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa dan Pasar-Pasar Tradisional
				8.1.8.4 Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa



NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"</b>				
				8.1.8.5 Meningkatkan Sistem dan Pengembangan Pasar serta Promosi Perdagangan
				8.1.8.6 Meningkatkan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		8.1.9	Menurunkan Penduduk Miskin	8.1.9.1 Meningkatkan Koordinasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah
				8.1.9.2 Meningkatkan Koordinasi Penyaluran Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf
				8.1.9.3 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
				8.1.9.4 Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
				8.1.9.5 Meningkatkan Pelayanan Pengganti dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisik, Mental, dan Sosial pada Penghuni Panti Asuhan
				8.1.9.6 Meningkatkan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
				8.1.9.7 Meningkatkan Pelatihan bagi Penyuluh dan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial serta Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
		8.1.10	Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja Lokal yang Siap Pakai dan Berdaya Saing serta Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja	8.1.10.1 Mempersiapkan Tenaga Kerja Lokal yang Terampil dan Berkualitas

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"				
				8.1.10.2 Meningkatkan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
				8.1.10.3 Meningkatkan Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
				8.1.10.4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
			8.1.11 Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Gampong dalam Kegiatan Partisipatif Pembangunan Gampong	8.1.11.1 Meningkatkan Diseminasi Informasi serta Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Partisipatif Masyarakat Gampong
				8.1.11.2 Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Gampong
				8.1.11.3 Fasilitas Penguatan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Gampong
				8.1.11.4 Meningkatkan Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Gampong
				8.1.11.5 Meningkatkan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Gampong
				8.1.11.6 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gampong
				8.1.11.7 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"						
					8.1.11.8	Mendukung Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah Gampong
					8.1.11.9	Melanjutkan Komitmen untuk Pengalokasian Dana Desa/Gampong
Misi 9 : Mengembangkan Olah Raga, Kesenian, dan Kepemudaan						
9.1	Memperkuat Peran Pemuda, Olahraga, Serta Melestarikan Adat Budaya Daerah Sebagai Perekat Bangsa dan Aset Daerah		9.1.1	Terselenggaranya Pembinaan, Pelatihan Keterampilan, dan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan serta Menjadikan Langsa sebagai Kota Layak Pemuda	9.1.1.1	Meningkatkan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepemudaan
					9.1.1.2	Meningkatkan Pelatihan dan Keterampilan bagi Pemuda
					9.1.1.3	Meningkatkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
					9.1.1.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda
			9.1.2	Terselenggaranya Pembinaan Olah Raga Berprestasi di Daerah dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	9.1.2.1	Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
					9.1.2.2	Melakukan Pembinaan Olahraga dan Kesenian Melalui Sinergisitas dengan BUMN, BUMD, Sanggar-Sanggar Seni, Pemerintah Gampong, KONI dan Pengurus CABOR
					9.1.2.3	Menggelar Event Pekan Olahraga Kota Langsa dan Kompetisi Olahraga di Masing-Masing Kecamatan

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"</b>				
			9.1.3 Terselenggaranya Pengelolaan dan Kesesuaian Pelaksanaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Daerah	9.1.3.1 Meningkatkan Pengembangan Pelestarian Adat Aceh
				9.1.3.2 Menggelar Ajang <i>Langsa Art and Culture Festival</i> dan Menampung Kreativitas dan Ekspresi Warga Kota Langsa serta Pegiat Seni Budaya dari Luar
				9.1.3.3 Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah
				9.1.3.4 Meningkatkan Pengelolaan Peninggalan dan Pengembangan Nilai Sejarah
				9.1.3.5 Meningkatkan Fungsi Museum sebagai Sarana Peragaan Pendidikan, Informasi Seni Budaya, dan Peradaban Daerah/Bangsa
			9.1.4 Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah	9.1.4.1 Melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah Lainnya Sebagai Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
<b>Misi 10 : Memelihara Serta Meningkatkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik</b>				
10.1	Kerja Sama dan Partisipasi Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Memelihara Stabilitas Politik, Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban	10.1.1	Terselenggaranya Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM	10.1.1.1 Meningkatkan Partisipasi Anggota Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan
				10.1.1.2 Memantapkan Pengetahuan dan Pemahaman Politik Seluruh Lapisan Masyarakat

NO.	VISI & MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : "LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI"</b>				
				10.1.1.3 Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM
			10.1.2 Menurunnya Jumlah Pelanggaran K3	10.1.2.1 Memelihara Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban
				10.1.2.2 Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
				10.1.2.3 Memantapkan Kualitas Aparatur Penegak Hukum dan Meningkatkan Kerjasamanya
				10.1.2.4 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Toleransi Kerukunan Hidup Beragama serta Pengendalian Konflik Sosial
				10.1.2.5 Meningkatkan Pengarusutamaan Perdamaian dan Reintegrasi Pasca Konflik, serta Koordinasi Penyelenggaraan Pertahanan
				10.1.2.6 Meningkatkan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
				10.1.2.7 Meningkatkan Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat

Tabel 6.2  
Tema Pembangunan Kota Langsa Tahun 2018-2022

TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
2018	Melanjutkan Pembangunan Menuju Kota Langsa yang Unggul dan Berdaya Saing
2019	Mempercepat Proses Pembangunan Secara Inklusif Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan Daerah
2020	Meningkatkan Pembangunan Diberbagai Sektor Guna Mewujudkan Langsa Sebagai Pusat Pertumbuhan di Wilayah Timur Aceh
2021	Memacu Pembangunan Serta Penyiapan Infrastruktur Daerah Menuju Kota Langsa yang Maju dan Mandiri
2022	Menyempurnakan Pembangunan Secara Terintegrasi Dalam Rangka Mewujudkan Langsa Sebagai Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami

Tabel 6.3  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa  
Tahun 2018

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Syariat Islam	Meningkatkan Ijtihad, dan Pengkajian Hukum Islam, Mudzakah serta Pengkaderan Ulama
		Meningkatkan Penertiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam
		Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ibadah dan Rumah Ibadah
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kompetisi Pendidikan Islami Bagi Pelajar
		Memantapkan Peran Ulama dan Pemuka-Pemuka Agama Dalam Bidang Keagamaan
		Melanjutkan Safari Maghrib dan Subuh ke Gampong-Gampong
		Lomba Masjid/Mushalla Terbersih dan Termakmur
		Jambore Santri, TPA, Remaja Masjid, Pelajar, dan Mahasiswa
2	Melaksanakan pemerintahan yang bersih, amanah dan berwibawa serta penguatan kerjasama pembangunan	Pembinaan Mental ASN Agar Lebih Disiplin, Bertanggungjawab, Ikhlas, Jujur, Anti KKN serta Bebas Pungli dalam Menjalankan Tugasnya
		Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir dan Pembinaan Aparatur
		Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Langsa Melalui Beragam Pelatihan, <i>Workshop</i> , Seminar, dan Kursus
		Memberikan Peluang Untuk Melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan Serta Bantuan Lainnya
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Menjamin Kesejahteraan Aparatur
		Mengefektifkan Sistem <i>Reward and Punishment</i> untuk ASN
		Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Aksi Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Korupsi
		Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah serta Penyusunan Rancangan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
		Melakukan Penataan Tata Kelola Keuangan dengan Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Publik dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan serta Peningkatan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelayanan dan Pelatihan Tenaga SIAK, Sosialisasi serta Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan
		Terselenggaranya Koordinasi Pelayanan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Advokasi Kebijakan Pemerintah Pusat Terutama yang Menghambat Iklim Investasi, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Peraturan Menteri Pertanian Terkait Tindakan Karantina untuk Impor Produk Pertanian
		Advokasi Pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara eks HGB PT Kopalmas untuk Pembangunan Kawasan Industri di Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dan Pengembangan Wilayah <i>Hinterland</i> Dalam Rangka Menjaga Kelestarian DAS Krueng Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dengan Wilayah <i>Hinterland</i> untuk Fungsionalisasi dan Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
		Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Gampong
		Menjalin Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah
		Mempersiapkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kawasan Industri Langsa
		Penyelesaian Pembebasan Lahan untuk RSU dan Perluasan Hutan Kota Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan RI
		Mengefektifkan Mekanisme <i>Control</i> Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Melalui Berbagai Saluran, seperti <i>Drop Box</i> , Telepon, SMS, Sambung Rasa, dan Teknologi Komunikasi Informasi
		Meningkatkan peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
		Renegosiasi dengan PT KAI Terkait Pemanfaatan Aset Tanah Bekas Rel untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelatihan Pengembangan dan Teknis Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
3	Mengembangkan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan yang berwawasan mitigasi bencana	Melanjutkan Penataan Taman Hutan Raya Kota, Ekowisata Mangrove, TPA Kebun Ireng, dan Waduk Alue Gampu
		Melakukan Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas untuk Taman-Taman Kota
		Membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang Lengkap dengan fasilitas Mushola, Pojok ASI, Perpustakaan, Fasilitas Permainan, Fasilitas Seni dan Olah Raga
		Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Mendorong Agar Setiap Gampong yang Mempunyai Aset Tanah untuk Membangun Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Anak
		Meningkatkan Survey dan Pemetaan serta Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
		Meningkatkan Kesesuaian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
		Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
		Pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah Komunal dengan prinsip 3 R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ) Minimal 1 Unit di Masing-Masing Kecamatan
		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Melaksanakan Penghijaun dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim
		Lomba Rumah Sehat, Sekolah Sehat, dan Gampong Sehat serta Gotong Royong Bulanan dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat
		Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
4	Meningkatkan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta kapasitas lembaga pendidikan	Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini Melalui Posyandu Terintegrasi, PAUD, TK/ RA, TPA
		Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat
		Melaksanakan Konsep Sekolah <i>Full Boarding</i> untuk SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA dengan Tambahan Muatan Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Karakter
		Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup
		Memberikan Apresiasi Terhadap Anak-Anak Berprestasi
		Memperbanyak Event Perlombaan untuk Mendorong Peningkatan Prestasi Anak
		Meningkatkan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
		Mendorong Kerjasama Antarsekolah yang Berprestasi dari Luar Daerah dengan Beberapa Sekolah di Kota Langsa
		Mendukung Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Akses ke Perguruan Tinggi Universitas Samudera (UNSAM) dan IAIN Zawiyah Cot Kala dan Perguruan Tinggi Lainnya
		Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
		Memperbanyak <i>Vocational Training</i> untuk Pemuda/i Terutama yang Putus Pendidikan Menengah Atas atau Pengangguran
		Meningkatkan Kualitas Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
		Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendidik Melalui Lokakarya, Seminar, Pelatihan, dan Diskusi
		Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembinaan Perpustakaan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat
5	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas
		Meningkatkan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		Pemenuhan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan Lainnya

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		Melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Regional
		Meningkatkan Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Rangka Penciptaan Masyarakat Mandiri Sehat
		Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM) dengan Memaksimalkan Fungsi Desa Siaga, Posyandu, Polindes serta Bentuk UKBM Lainnya
		Penanganan dan Pencegahan Penularan Penyakit
		Peningkatan Kampanye Pencegahan Penyakit <i>Degenerative</i>
		Menurunkan Tingkat Prevelensi Penyakit Berbasis Lingkungan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Masyarakat
		Meningkatkan Kemitraan Pengobatan Dasar dan Lanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
		Menguatkan Kerjasama dan Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Gizi Masyarakat
		Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia
		Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Lansia
		Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
		Meningkatkan Kemitraan dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak Balita
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Jaminan Persalinan serta Pelatihan dan Pendidikan Asuhan Persalinan Normal
		Meningkatkan Pengetahuan Wanita dan Keluarga untuk Menjamin Kesehatan Ibu serta Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan yang Tersedia
6	Meningkatkan peran perempuan dalam proses pembangunan serta pemenuhan hak-hak anak	Meningkatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembinaan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Penyuluhan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Peduli KB
		Meningkatkan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
		Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan
		Merumuskan Kebijakan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik serta Upaya Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Serta Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bermain Anak
		Fasilitasi Penanganan Secara Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatkan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
		Peningkatan Pasokan Air Baku PDAM Tirta Keumeneng Melalui Penambahan Kapasitas Waduk dan Bendungan Krueng Langsa
		Pembangunan dan Perbaikan <i>Water Treatment</i>
		Pemasangan Jaringan Baru untuk Masyarakat yang Belum Terlayani
		Menyusun Studi Kelayakan Waduk Langsa yang Berfungsi Mengatasi Banjir, Menyediakan Air Baku PDAM, Irigasi Persawahan, dan Tempat Wisata
		Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dan Rambu Lalu Lintas
		Meningkatkan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya dan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas serta Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan
		Meningkatkan Ketersediaan Rambu dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
		Memantapkan Kualitas Prasarana dan Sarana Perhubungan
		Melanjutkan Penataan Kawasan Bekas Jalur Rel Kereta Api
		Menyusun Studi Kelayakan Serta Pembangunan Bandara Perintis Aceh Timur Raya
		Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Memelihara Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan
		Memelihara/Merehabilitasi Prasarana Jalan dan Jembatan dalam Kawasan-Kawasan Cepat Tumbuh/Sentra-Sentra Produksi
		Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan
		Pemeliharaan Jalan yang Rusak dan Peningkatan Jalan di Gampong-Gampong
		Meningkatkan Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong/Talud/Turap/Bronjong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah
		Melanjutkan Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Berbasis Komunitas untuk Perkampungan Warga Berpendapatan Rendah
		Meningkatkan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air, Badan Sungai dan Saluran Induk
		Melanjutkan Penataan Krueng Langsa dan Perbaikan Saluran Air
		Meningkatkan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana
		Memperkuat Kedudukan dan Fungsi Instansi Perangkat Daerah Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Kapasitas Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Memperkuat Kerjasama Antarsektor Terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Penyediaan Sarana Produksi serta Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
		Meningkatkan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
		Meningkatkan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
		Meningkatkan Penggunaan Teknologi Modern di Bidang Pertanian
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
		Melanjutkan Pembangunan Saluran Irigasi untuk Pertanian Tanaman Pangan
		Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
		Melanjutkan Rehabilitasi dan Fungsionalisasi 5.000 Ha Tambak
		Meningkatkan Pendistribusian Bibit Ternak dan Bahan Logistik Petani Ternak
		Meningkatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak serta Pendataan Masalah Peternakan
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
		Meningkatkan Pembinaan serta Fasilitas Industri Kecil dan Menengah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
		Fasilitasi BUMD dan Koperasi dengan Menggerakkan Sektor Ekonomi Melalui Penciptaan Lapangan Kerja
		Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif
		Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pameran Investasi
		Meningkatkan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
		Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi yang Memadai dan Menunjang Peluang Investasi
		Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier
		Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Secara Produktif
		Mengembangkan Sektor Ekonomi di Kawasan Cepat Tumbuh
		Meningkatkan Sosialisasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
		Pembinaan dan Pemberdayaan PKK serta Dekranasda
		Lomba Desain Batik dan Bordir khas Langsa
		Meningkatkan Pengembangan Jaringan Kerja Sama dan Promosi Wisata
		Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata MICE ( <i>Meeting, Insentive, Conference, dan Exhibition</i> )
		Meningkatkan Kemitraan Informasi dan Pengembangan <i>Data Base</i> Pariwisata
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
		Melakukan Penataan Ekowisata dan Pembangunan Masyarakat Sadar Wisata di Kuala Langsa, Telaga Tujuh, dan Gampong-Gampong Terdekat dengan Lokasi Ekowisata Hutan Mangrove
		Meningkatkan Aktivitas Perdagangan Antarpulau dan Antarnegara Melalui Pelabuhan Kuala Langsa
		Mendorong Percepatan Penyelesaian Pembangunan Langsa <i>Town Squire</i>
		Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa dan Pasar-Pasar Tradisional
		Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
		Meningkatkan Sistem dan Pengembangan Pasar serta Promosi Perdagangan
		Meningkatkan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Meningkatkan Koordinasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Penyaluran Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf
		Mempersiapkan Tenaga Kerja Lokal yang Terampil dan Berkualitas
		Meningkatkan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		Meningkatkan Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
9	Mengoptimalkan peran pemuda, seni dan budaya daerah, dan pengembangan prestasi olahraga	Meningkatkan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepemudaan
		Meningkatkan Pelatihan dan Keterampilan bagi Pemuda
		Meningkatkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
		Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda
		Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
		Melakukan Pembinaan Olahraga dan Kesenian Melalui Sinergisitas dengan BUMN, BUMD, Sanggar-Sanggar Seni, Pemerintah Gampong, KONI dan Pengurus CABOR
		Menggelar Event Pekan Olahraga Kota Langsa dan Kompetisi Olahraga di Masing-Masing Kecamatan
		Meningkatkan Pengembangan Pelestarian Adat Aceh
		Menggelar <i>Ajang Langsa Art and Culture Festival</i> dan Menampung Kreativitas dan Ekspresi Warga Kota Langsa serta Pegiat Seni Budaya dari Luar
		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Pengelolaan Peninggalan dan Pengembangan Nilai Sejarah
		Meningkatkan Fungsi Museum sebagai Sarana Peragaan Pendidikan, Informasi Seni Budaya, dan Peradaban Daerah/Bangsa
		Melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah Lainnya Sebagai Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
10	Pemberdayaan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
		Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		Meningkatkan Pelayanan Pengganti dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisik, Mental, dan Sosial pada Penghuni Panti Asuhan
		Meningkatkan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
		Meningkatkan Pelatihan bagi Penyuluh dan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial serta Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
		Meningkatkan Diseminasi Informasi serta Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Partisipatif Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Gampong
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Gampong
		Meningkatkan Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat
		Mendukung Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah Gampong
		Melanjutkan Komitmen untuk Pengalokasian Dana Desa/Gampong
11	Memelihara stabilitas politik dan keamanan	Meningkatkan Partisipasi Anggota Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan
		Memantapkan Pengetahuan dan Pemahaman Politik Seluruh Lapisan Masyarakat
		Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM
		Memelihara Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban
		Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
		Memantapkan Kualitas Aparatur Penegak Hukum dan Meningkatkan Kerjasamanya
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Toleransi Kerukunan Hidup Beragama serta Pengendalian Konflik Sosial
		Meningkatkan Pengarusutamaan Perdamaian dan Reintegrasi Pasca Konflik, serta Koordinasi Penyelenggaraan Pertahanan
		Meningkatkan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Meningkatkan Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat

Tabel 6.4  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa  
Tahun 2019

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Memelihara stabilitas politik dan keamanan	Meningkatkan Partisipasi Anggota Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan
		Memantapkan Pengetahuan dan Pemahaman Politik Seluruh Lapisan Masyarakat
		Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM
		Memelihara Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban
		Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
		Memantapkan Kualitas Aparatur Penegak Hukum dan Meningkatkan Kerjasamanya
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Toleransi Kerukunan Hidup Beragama serta Pengendalian Konflik Sosial
		Meningkatkan Pengarusutamaan Perdamaian dan Reintegrasi Pasca Konflik, serta Koordinasi Penyelenggaraan Pertahanan
		Meningkatkan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Meningkatkan Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat
2	Mempercepat proses pembangunan infrastruktur daerah bidang perhubungan jalan, jaringan air bersih, irigasi	Meningkatkan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
		Peningkatan Pasokan Air Baku PDAM Tirta Keumeneng Melalui Penambahan Kapasitas Waduk dan Bendungan Krueng Langsa
		Pembangunan dan Perbaikan <i>Water Treatment</i>
		Pemasangan Jaringan Baru untuk Masyarakat yang Belum Terlayani
		Menyusun Studi Kelayakan Waduk Langsa yang Berfungsi Mengatasi Banjir, Menyediakan Air Baku PDAM, Irigasi Persawahan, dan Tempat Wisata
		Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dan Rambu Lalu Lintas
		Meningkatkan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya dan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas serta Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan
		Meningkatkan Ketersediaan Rambu dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
		Memantapkan Kualitas Prasarana dan Sarana Perhubungan
		Melanjutkan Penataan Kawasan Bekas Jalur Rel Kereta Api
		Menyusun Studi Kelayakan Serta Pembangunan Bandara Perintis Aceh Timur Raya
		Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Memelihara Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan
		Memelihara/Merehabilitasi Prasarana Jalan dan Jembatan dalam Kawasan-Kawasan Cepat Tumbuh/Sentra-Sentra Produksi
		Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Pemeliharaan Jalan yang Rusak dan Peningkatan Jalan di Gampong-Gampong
		Meningkatkan Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong/Talud/Turap/Bronjong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah
		Melanjutkan Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Berbasis Komunitas untuk Perkampungan Warga Berpendapatan Rendah
		Meningkatkan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air, Badan Sungai dan Saluran Induk
		Melanjutkan Penataan Krueng Langsa dan Perbaikan Saluran Air
		Meningkatkan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana
		Memperkuat Kedudukan dan Fungsi Instansi Perangkat Daerah Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Kapasitas Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Memperkuat Kerjasama Antarsektor Terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam	Meningkatkan Ijtihad, dan Pengkajian Hukum Islam, Mudzakah serta Pengkaderan Ulama
		Meningkatkan Penertiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam
		Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ibadah dan Rumah Ibadah
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kompetisi Pendidikan Islami Bagi Pelajar
		Memantapkan Peran Ulama dan Pemuka-Pemuka Agama Dalam Bidang Keagamaan
		Melanjutkan Safari Maghrib dan Subuh ke Gampong-Gampong
		Lomba Masjid/Mushalla Terbersih dan Termakmur
4	Meningkatkan sarana dan prasarana serta disiplin aparatur pemerintahan daerah	Jambore Santri, TPA, Remaja Masjid, Pelajar, dan Mahasiswa
		Pembinaan Mental ASN Agar Lebih Disiplin, Bertanggungjawab, Ikhlas, Jujur, Anti KKN serta Bebas Pungli dalam Menjalankan Tugasnya
		Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir dan Pembinaan Aparatur
		Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Langsa Melalui Beragam Pelatihan, <i>Workshop</i> , Seminar, dan Kursus
		Memberikan Peluang Untuk Melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan Serta Bantuan Lainnya
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Menjamin Kesejahteraan Aparatur
		Mengefektifkan Sistem <i>Reward and Punishment</i> untuk ASN
		Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Aksi Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Korupsi



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah serta Penyusunan Rancangan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
		Melakukan Penataan Tata Kelola Keuangan dengan Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Publik dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan serta Peningkatan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelayanan dan Pelatihan Tenaga SIAK, Sosialisasi serta Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan
		Terselenggaranya Koordinasi Pelayanan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Advokasi Kebijakan Pemerintah Pusat Terutama yang Menghambat Iklim Investasi, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Peraturan Menteri Pertanian Terkait Tindakan Karantina untuk Impor Produk Pertanian
		Advokasi Pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara eks HGB PT Kopalmas untuk Pembangunan Kawasan Industri di Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dan Pengembangan Wilayah <i>Hinterland</i> Dalam Rangka Menjaga Kelestarian DAS Krueng Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dengan Wilayah <i>Hinterland</i> untuk Fungsionalisasi dan Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
		Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Gampong
		Menjalin Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah
		Mempersiapkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kawasan Industri Langsa
		Penyelesaian Pembebasan Lahan untuk RSU dan Perluasan Hutan Kota Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan RI
		Mengefektifkan Mekanisme <i>Control</i> Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Melalui Berbagai Saluran, seperti <i>Drop Box</i> , Telepon, SMS, Sambung Rasa, dan Teknologi Komunikasi Informasi
		Meningkatkan peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
		Renegosiasi dengan PT KAI Terkait Pemanfaatan Aset Tanah Bekas Rel untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelatihan Pengembangan dan Teknis

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan tata ruang serta pengendalian kualitas lingkungan hidup	Melanjutkan Penataan Taman Hutan Raya Kota, Ekowisata Mangrove, TPA Kebun Ireng, dan Waduk Alue Gampu
		Melakukan Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas untuk Taman-Taman Kota
		Membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang Lengkap dengan fasilitas Mushola, Pojok ASI, Perpustakaan, Fasilitas Permainan, Fasilitas Seni dan Olah Raga
		Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Mendorong Agar Setiap Gampong yang Mempunyai Aset Tanah untuk Membangun Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Anak
		Meningkatkan Survey dan Pemetaan serta Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
		Meningkatkan Kesesuaian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
		Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
		Pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah Komunal dengan prinsip 3 R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ) Minimal 1 Unit di Masing-Masing Kecamatan
		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Melaksanakan Penghijaun dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim
		Lomba Rumah Sehat, Sekolah Sehat, dan Gampong Sehat serta Gotong Royong Bulanan dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat
		Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
6	Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing,	Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini Melalui Posyandu Terintegrasi, PAUD, TK/ RA, TPA
		Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat
		Melaksanakan Konsep Sekolah <i>Full Boarding</i> untuk SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA dengan Tambahan Muatan Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Karakter
		Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup
		Memberikan Apresiasi Terhadap Anak-Anak Berprestasi
		Memperbanyak Event Perlombaan untuk Mendorong Peningkatan Prestasi Anak
		Meningkatkan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Mendorong Kerjasama Antarsekolah yang Berprestasi dari Luar Daerah dengan Beberapa Sekolah di Kota Langsa
		Mendukung Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Akses ke Perguruan Tinggi Universitas Samudera (UNSAM) dan IAIN Zawiyah Cot Kala dan Perguruan Tinggi Lainnya
		Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
		Memperbanyak <i>Vocational Training</i> untuk Pemuda/i Terutama yang Putus Pendidikan Menengah Atas atau Pengangguran
		Meningkatkan Kualitas Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
		Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendidik Melalui Lokakarya, Seminar, Pelatihan, dan Diskusi
		Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembinaan Perpustakaan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat
		Meningkatkan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepemudaan
		Meningkatkan Pelatihan dan Keterampilan bagi Pemuda
		Meningkatkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
		Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda
		Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
		Melakukan Pembinaan Olahraga dan Kesenian Melalui Sinergisitas dengan BUMN, BUMD, Sanggar-Sanggar Seni, Pemerintah Gampong, KONI dan Pengurus CABOR
		Menggelar Event Pekan Olahraga Kota Langsa dan Kompetisi Olahraga di Masing-Masing Kecamatan
		Meningkatkan Pengembangan Pelestarian Adat Aceh
		Menggelar <i>Ajang Langsa Art and Culture Festival</i> dan Menampung Kreativitas dan Ekspresi Warga Kota Langsa serta Pegiat Seni Budaya dari Luar
		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah
		Meningkatkan Pengelolaan Peninggalan dan Pengembangan Nilai Sejarah
		Meningkatkan Fungsi Museum sebagai Sarana Peragaan Pendidikan, Informasi Seni Budaya, dan Peradaban Daerah/Bangsa
		Melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah Lainnya Sebagai Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas
		Meningkatkan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		Pemenuhan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan Lainnya
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		Melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Regional
		Meningkatkan Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Rangka Penciptaan Masyarakat Mandiri Sehat
		Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM) dengan Memaksimalkan Fungsi Desa Siaga, Posyandu, Polindes

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		serta Bentuk UKBM Lainnya
		Penanganan dan Pencegahan Penularan Penyakit
		Peningkatan Kampanye Pencegahan Penyakit <i>Degenerative</i>
		Menurunkan Tingkat Prevelensi Penyakit Berbasis Lingkungan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Masyarakat
		Meningkatkan Kemitraan Pengobatan Dasar dan Lanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
		Menguatkan Kerjasama dan Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Gizi Masyarakat
		Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia
		Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Lansia
		Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
		Meningkatkan Kemitraan dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak Balita
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Jaminan Persalinan serta Pelatihan dan Pendidikan Asuhan Persalinan Normal
		Meningkatkan Pengetahuan Wanita dan Keluarga untuk Menjamin Kesehatan Ibu serta Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan yang Tersedia
8	Meningkatkan akses perempuan di semua bidang pembangunan dan fasilitasi layanan pendampingan terhadap anak	Meningkatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembinaan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Penyuluhan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Peduli KB
		Meningkatkan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
		Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan
		Merumuskan Kebijakan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik serta Upaya Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Serta Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bermain Anak
		Fasilitasi Penanganan Secara Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
9	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat	Meningkatkan Penyediaan Sarana Produksi serta Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
		Meningkatkan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
		Meningkatkan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
		Meningkatkan Penggunaan Teknologi Modern di Bidang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Pertanian
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
		Melanjutkan Pembangunan Saluran Irigasi untuk Pertanian Tanaman Pangan
		Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
		Melanjutkan Rehabilitasi dan Fungsionalisasi 5.000 Ha Tambak
		Meningkatkan Pendistribusian Bibit Ternak dan Bahan Logistik Petani Ternak
		Meningkatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak serta Pendataan Masalah Peternakan
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
		Meningkatkan Pembinaan serta Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
		Fasilitasi BUMD dan Koperasi dengan Menggerakkan Sektor Ekonomi Melalui Penciptaan Lapangan Kerja
		Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif
		Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pameran Investasi
		Meningkatkan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
		Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi yang Memadai dan Menunjang Peluang Investasi
		Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier
		Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Secara Produktif
		Mengembangkan Sektor Ekonomi di Kawasan Cepat Tumbuh
		Meningkatkan Sosialisasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
		Pembinaan dan Pemberdayaan PKK serta Dekranasda
		Lomba Desain Batik dan Bordir khas Langsa
		Meningkatkan Pengembangan Jaringan Kerja Sama dan Promosi Wisata
		Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata MICE ( <i>Meeting, Insentive, Conference, dan Exhibition</i> )
		Meningkatkan Kemitraan Informasi dan Pengembangan <i>Data Base</i> Pariwisata
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
		Melakukan Penataan Ekowisata dan Pembangunan Masyarakat Sadar Wisata di Kuala Langsa, Telaga Tujuh, dan Gampong-

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Gampong Terdekat dengan Lokasi Ekowisata Hutan Mangrove
		Meningkatkan Aktivitas Perdagangan Antarpulau dan Antarnegara Melalui Pelabuhan Kuala Langsa
		Mendorong Percepatan Penyelesaian Pembangunan Langsa <i>Town Squire</i>
		Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa dan Pasar-Pasar Tradisional
		Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
		Meningkatkan Sistem dan Pengembangan Pasar serta Promosi Perdagangan
		Meningkatkan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Meningkatkan Koordinasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Penyaluran Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf
		Mempersiapkan Tenaga Kerja Lokal yang Terampil dan Berkualitas
		Meningkatkan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		Meningkatkan Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
		Meningkatkan Akses Masyarakat Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
		Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		Meningkatkan Pelayanan Pengganti dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisik, Mental, dan Sosial pada Penghuni Panti Asuhan
		Meningkatkan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
		Meningkatkan Pelatihan bagi Penyuluh dan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial serta Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
		Meningkatkan Diseminasi Informasi serta Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Partisipatif Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Gampong
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Gampong
		Meningkatkan Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat
		Mendukung Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah Gampong
		Melanjutkan Komitmen untuk Pengalokasian Dana Desa/Gampong

Tabel 6.5  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa  
Tahun 2020

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam melalui penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam,	Meningkatkan Ijtihad, dan Pengkajian Hukum Islam, Mudzakah serta Pengkaderan Ulama
		Meningkatkan Penertiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam
		Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ibadah dan Rumah Ibadah
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kompetisi Pendidikan Islami Bagi Pelajar
		Memantapkan Peran Ulama dan Pemuka-Pemuka Agama Dalam Bidang Keagamaan
		Melanjutkan Safari Maghrib dan Subuh ke Gampong-Gampong
		Lomba Masjid/Mushalla Terbersih dan Termakmur
		Jambore Santri, TPA, Remaja Masjid, Pelajar, dan Mahasiswa
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pembinaan Mental ASN Agar Lebih Disiplin, Bertanggungjawab, Ikhlas, Jujur, Anti KKN serta Bebas Pungli dalam Menjalankan Tugasnya
		Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir dan Pembinaan Aparatur
		Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Langsa Melalui Beragam Pelatihan, <i>Workshop</i> , Seminar, dan Kursus
		Memberikan Peluang Untuk Melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan Serta Bantuan Lainnya
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Menjamin Kesejahteraan Aparatur
		Mengefektifkan Sistem <i>Reward and Punishment</i> untuk ASN
		Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Aksi Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Korupsi
		Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah serta Penyusunan Rancangan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
		Melakukan Penataan Tata Kelola Keuangan dengan Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Publik dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan serta Peningkatan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelayanan dan Pelatihan Tenaga SIAK, Sosialisasi serta Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan
		Terselenggaranya Koordinasi Pelayanan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Advokasi Kebijakan Pemerintah Pusat Terutama yang Menghambat Iklim Investasi, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Peraturan Menteri Pertanian Terkait Tindakan Karantina untuk Impor Produk Pertanian
		Advokasi Pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara eks HGB PT Kopalmas untuk Pembangunan Kawasan Industri di Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dan Pengembangan Wilayah <i>Hinterland</i> Dalam Rangka Menjaga Kelestarian DAS Krueng Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dengan Wilayah <i>Hinterland</i> untuk Fungsionalisasi dan Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
		Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Gampong
		Menjalin Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah
		Mempersiapkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kawasan Industri Langsa
		Penyelesaian Pembebasan Lahan untuk RSUD dan Perluasan Hutan Kota Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan RI
		Mengefektifkan Mekanisme <i>Control</i> Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Melalui Berbagai Saluran, seperti <i>Drop Box</i> , Telepon, SMS, Sambung Rasa, dan Teknologi Komunikasi Informasi
		Meningkatkan peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
		Renegosiasi dengan PT KAI Terkait Pemanfaatan Aset Tanah Bekas Rel untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelatihan Pengembangan dan Teknis Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan ruang	Melanjutkan Penataan Taman Hutan Raya Kota, Ekowisata Mangrove, TPA Kebun Ireng, dan Waduk Alue Gampu
		Melakukan Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas untuk Taman-Taman Kota
		Membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang Lengkap dengan fasilitas Mushola, Pojok ASI, Perpustakaan, Fasilitas Permainan, Fasilitas Seni dan Olah Raga
		Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Mendorong Agar Setiap Gampong yang Mempunyai Aset Tanah untuk Membangun Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Anak



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Survey dan Pemetaan serta Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
		Meningkatkan Kesesuaian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
		Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
		Pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah Komunal dengan prinsip 3 R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ) Minimal 1 Unit di Masing-Masing Kecamatan
		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Melaksanakan Penghijaun dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim
		Lomba Rumah Sehat, Sekolah Sehat, dan Gampong Sehat serta Gotong Royong Bulanan dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat
		Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
4	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini Melalui Posyandu Terintegrasi, PAUD, TK/ RA, TPA
		Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat
		Melaksanakan Konsep Sekolah <i>Full Boarding</i> untuk SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA dengan Tambahan Muatan Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Karakter
		Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup
		Memberikan Apresiasi Terhadap Anak-Anak Berprestasi
		Memperbanyak Event Perlombaan untuk Mendorong Peningkatan Prestasi Anak
		Meningkatkan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
		Mendorong Kerjasama Antarsekolah yang Berprestasi dari Luar Daerah dengan Beberapa Sekolah di Kota Langsa
		Mendukung Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Akses ke Perguruan Tinggi Universitas Samudera (UNSAM) dan IAIN Zawiyah Cot Kala dan Perguruan Tinggi Lainnya
		Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
		Memperbanyak <i>Vocational Training</i> untuk Pemuda/i Terutama yang Putus Pendidikan Menengah Atas atau Pengangguran
		Meningkatkan Kualitas Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
		Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendidik Melalui Lokakarya, Seminar, Pelatihan, dan Diskusi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembinaan Perpustakaan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat
5	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas
		Meningkatkan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		Pemenuhan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan Lainnya
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		Melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Regional
		Meningkatkan Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Rangka Penciptaan Masyarakat Mandiri Sehat
		Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM) dengan Memaksimalkan Fungsi Desa Siaga, Posyandu, Polindes serta Bentuk UKBM Lainnya
		Penanganan dan Pencegahan Penularan Penyakit
		Peningkatan Kampanye Pencegahan Penyakit <i>Degenerative</i>
		Menurunkan Tingkat Prevelensi Penyakit Berbasis Lingkungan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Masyarakat
		Meningkatkan Kemitraan Pengobatan Dasar dan Lanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
		Menguatkan Kerjasama dan Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Gizi Masyarakat
		Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia
		Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Lansia
		Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
		Meningkatkan Kemitraan dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak Balita
6	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembinaan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Penyuluhan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Peduli KB
		Meningkatkan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
		Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan
		Merumuskan Kebijakan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik serta Upaya Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Pengetahuan dan Teknologi
		Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Serta Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bermain Anak
		Fasilitasi Penanganan Secara Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatkan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
		Peningkatan Pasokan Air Baku PDAM Tirta Keumeneng Melalui Penambahan Kapasitas Waduk dan Bendungan Krueng Langsa
		Pembangunan dan Perbaikan <i>Water Treatment</i>
		Pemasangan Jaringan Baru untuk Masyarakat yang Belum Terlayani
		Menyusun Studi Kelayakan Waduk Langsa yang Berfungsi Mengatasi Banjir, Menyediakan Air Baku PDAM, Irigasi Persawahan, dan Tempat Wisata
		Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dan Rambu Lalu Lintas
		Meningkatkan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya dan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas serta Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan
		Meningkatkan Ketersediaan Rambu dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
		Memantapkan Kualitas Prasarana dan Sarana Perhubungan
		Melanjutkan Penataan Kawasan Bekas Jalur Rel Kereta Api
		Menyusun Studi Kelayakan Serta Pembangunan Bandara Perintis Aceh Timur Raya
		Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Memelihara Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan
		Memelihara/Merehabilitasi Prasarana Jalan dan Jembatan dalam Kawasan-Kawasan Cepat Tumbuh/Sentra-Sentra Produksi
		Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan
		Pemeliharaan Jalan yang Rusak dan Peningkatan Jalan di Gampong-Gampong
		Meningkatkan Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong/Talud/Turap/Bronjong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah
		Melanjutkan Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Berbasis Komunitas untuk Perkampungan Warga Berpendapatan Rendah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air, Badan Sungai dan Saluran Induk
		Melanjutkan Penataan Krueng Langsa dan Perbaikan Saluran Air
		Meningkatkan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana
		Memperkuat Kedudukan dan Fungsi Instansi Perangkat Daerah Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Kapasitas Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Memperkuat Kerjasama Antarsektor Terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah
8	Meningkatkan penyelenggaraan adat dan seni budaya daerah	Meningkatkan Pengembangan Pelestarian Adat Aceh
		Menggelar <i>Ajang Langsa Art and Culture Festival</i> dan Menampung Kreativitas dan Ekspresi Warga Kota Langsa serta Pegiat Seni Budaya dari Luar
		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah
		Meningkatkan Pengelolaan Peninggalan dan Pengembangan Nilai Sejarah
		Meningkatkan Fungsi Museum sebagai Sarana Peragaan Pendidikan, Informasi Seni Budaya, dan Peradaban Daerah/Bangsa
		Melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah Lainnya Sebagai Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
9	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepemudaan
		Meningkatkan Pelatihan dan Keterampilan bagi Pemuda
		Meningkatkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
		Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda
10	Meningkatkan prestasi olah raga	Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
		Melakukan Pembinaan Olahraga dan Kesenian Melalui Sinergisitas dengan BUMN, BUMD, Sanggar-Sanggar Seni, Pemerintah Gampong, KONI dan Pengurus CABOR
		Menggelar Event Pekan Olahraga Kota Langsa dan Kompetisi Olahraga di Masing-Masing Kecamatan
11	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat	Meningkatkan Penyediaan Sarana Produksi serta Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
		Meningkatkan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
		Meningkatkan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
		Meningkatkan Penggunaan Teknologi Modern di Bidang Pertanian
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Melanjutkan Pembangunan Saluran Irigasi untuk Pertanian Tanaman Pangan
		Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
		Melanjutkan Rehabilitasi dan Fungsionalisasi 5.000 Ha Tambak
		Meningkatkan Pendistribusian Bibit Ternak dan Bahan Logistik Petani Ternak
		Meningkatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak serta Pendataan Masalah Peternakan
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
		Meningkatkan Pembinaan serta Fasilitas Industri Kecil dan Menengah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
		Fasilitas BUMD dan Koperasi dengan Menggerakkan Sektor Ekonomi Melalui Penciptaan Lapangan Kerja
		Fasilitas Pengembangan Industri Kreatif
		Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pameran Investasi
		Meningkatkan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
		Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi yang Memadai dan Menunjang Peluang Investasi
		Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier
		Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Secara Produktif
		Mengembangkan Sektor Ekonomi di Kawasan Cepat Tumbuh
		Meningkatkan Sosialisasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
		Pembinaan dan Pemberdayaan PKK serta Dekranasda
		Lomba Desain Batik dan Bordir khas Langsa
		Meningkatkan Pengembangan Jaringan Kerja Sama dan Promosi Wisata
		Fasilitas Pengembangan Sektor Pariwisata MICE ( <i>Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition</i> )
		Meningkatkan Kemitraan Informasi dan Pengembangan <i>Data Base</i> Pariwisata
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Melakukan Penataan Ekowisata dan Pembangunan Masyarakat Sadar Wisata di Kuala Langsa, Telaga Tujuh, dan Gampong-Gampong Terdekat dengan Lokasi Ekowisata Hutan Mangrove
		Meningkatkan Aktivitas Perdagangan Antarpulau dan Antarnegara Melalui Pelabuhan Kuala Langsa
		Mendorong Percepatan Penyelesaian Pembangunan Langsa <i>Town Squire</i>
		Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa dan Pasar-Pasar Tradisional
		Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
		Meningkatkan Sistem dan Pengembangan Pasar serta Promosi Perdagangan
		Meningkatkan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Meningkatkan Koordinasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Penyaluran Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf
		Mempersiapkan Tenaga Kerja Lokal yang Terampil dan Berkualitas
		Meningkatkan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		Meningkatkan Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
		Meningkatkan Akses Masyarakat Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
		Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		Meningkatkan Pelayanan Pengganti dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisik, Mental, dan Sosial pada Penghuni Panti Asuhan
		Meningkatkan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
		Meningkatkan Pelatihan bagi Penyuluh dan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial serta Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
		Meningkatkan Diseminasi Informasi serta Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Partisipatif Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Gampong
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Gampong
		Meningkatkan Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat
		Mendukung Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah Gampong
		Melanjutkan Komitmen untuk Pengalokasian Dana

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Desa/Gampong
12	Meningkatkan kualitas, ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Partisipasi Anggota Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan
		Memantapkan Pengetahuan dan Pemahaman Politik Seluruh Lapisan Masyarakat
		Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM
		Memelihara Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban
		Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
		Memantapkan Kualitas Aparatur Penegak Hukum dan Meningkatkan Kerjasamanya
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Toleransi Kerukunan Hidup Beragama serta Pengendalian Konflik Sosial
		Meningkatkan Pengarusutamaan Perdamaian dan Reintegrasi Pasca Konflik, serta Koordinasi Penyelenggaraan Pertahanan
		Meningkatkan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Meningkatkan Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat

Tabel 6.6  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa  
Tahun 2021

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Memacu pembangunan serta penyiapan infrastruktur daerah bidang perhubungan jalan, jaringan air bersih, irigasi	Meningkatkan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
		Peningkatan Pasokan Air Baku PDAM Tirta Keumeneng Melalui Penambahan Kapasitas Waduk dan Bendungan Krueng Langsa
		Pembangunan dan Perbaikan <i>Water Treatment</i>
		Pemasangan Jaringan Baru untuk Masyarakat yang Belum Terlayani
		Menyusun Studi Kelayakan Waduk Langsa yang Berfungsi Mengatasi Banjir, Menyediakan Air Baku PDAM, Irigasi Persawahan, dan Tempat Wisata
		Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dan Rambu Lalu Lintas
		Meningkatkan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya dan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas serta Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan
		Meningkatkan Ketersediaan Rambu dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
		Memantapkan Kualitas Prasarana dan Sarana Perhubungan
		Melanjutkan Penataan Kawasan Bekas Jalur Rel Kereta Api
		Menyusun Studi Kelayakan Serta Pembangunan Bandara Perintis Aceh Timur Raya
		Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Memelihara Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan
		Memelihara/Merehabilitasi Prasarana Jalan dan Jembatan dalam Kawasan-Kawasan Cepat Tumbuh/Sentra-Sentra Produksi
		Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan
		Pemeliharaan Jalan yang Rusak dan Peningkatan Jalan di Gampong-Gampong
		Meningkatkan Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong/Talud/Turap/Bronjong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah
		Melanjutkan Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Berbasis Komunitas untuk Perkampungan Warga Berpendapatan Rendah
		Meningkatkan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air, Badan Sungai dan Saluran Induk
		Melanjutkan Penataan Krueng Langsa dan Perbaikan Saluran Air



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana
		Memperkuat Kedudukan dan Fungsi Instansi Perangkat Daerah Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Kapasitas Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Memperkuat Kerjasama Antarsektor Terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta kualitas lingkungan hidup	Melanjutkan Penataan Taman Hutan Raya Kota, Ekowisata Mangrove, TPA Kebun Ireng, dan Waduk Alue Gampu
		Melakukan Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas untuk Taman-Taman Kota
		Membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang Lengkap dengan fasilitas Mushola, Pojok ASI, Perpustakaan, Fasilitas Permainan, Fasilitas Seni dan Olah Raga
		Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Mendorong Agar Setiap Gampong yang Mempunyai Aset Tanah untuk Membangun Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Anak
		Meningkatkan Survey dan Pemetaan serta Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
		Meningkatkan Kesesuaian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
		Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
		Pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah Komunal dengan prinsip 3 R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ) Minimal 1 Unit di Masing-Masing Kecamatan
		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Melaksanakan Penghijaun dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim
		Lomba Rumah Sehat, Sekolah Sehat, dan Gampong Sehat serta Gotong Royong Bulanan dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat
		Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
3	Meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka penyediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini Melalui Posyandu Terintegrasi, PAUD, TK/ RA, TPA
		Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat
		Melaksanakan Konsep Sekolah <i>Full Boarding</i> untuk SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA dengan Tambahan Muatan Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Karakter
		Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup
		Memberikan Apresiasi Terhadap Anak-Anak Berprestasi
		Memperbanyak Event Perlombaan untuk Mendorong Peningkatan Prestasi Anak
		Meningkatkan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
		Mendorong Kerjasama Antarsekolah yang Berprestasi dari Luar Daerah dengan Beberapa Sekolah di Kota Langsa
		Mendukung Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Akses ke Perguruan Tinggi Universitas Samudera (UNSAM) dan IAIN Zawiyah Cot Kala dan Perguruan Tinggi Lainnya
		Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
		Memperbanyak <i>Vocational Training</i> untuk Pemuda/i Terutama yang Putus Pendidikan Menengah Atas atau Pengangguran
		Meningkatkan Kualitas Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
		Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendidik Melalui Lokakarya, Seminar, Pelatihan, dan Diskusi
		Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembinaan Perpustakaan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat
4	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan penduduk	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas
		Meningkatkan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		Pemenuhan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan Lainnya
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		Melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Regional
		Meningkatkan Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Rangka Penciptaan Masyarakat Mandiri Sehat
		Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM) dengan Memaksimalkan Fungsi Desa Siaga, Posyandu, Polindes serta Bentuk UKBM Lainnya
		Penanganan dan Pencegahan Penularan Penyakit
		Peningkatan Kampanye Pencegahan Penyakit <i>Degenerative</i>
		Menurunkan Tingkat Prevelensi Penyakit Berbasis Lingkungan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Masyarakat
		Meningkatkan Kemitraan Pengobatan Dasar dan Lanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
		Menguatkan Kerjasama dan Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Gizi Masyarakat
		Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia
		Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Lansia
		Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
		Meningkatkan Kemitraan dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak Balita
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Jaminan Persalinan serta Pelatihan dan Pendidikan Asuhan Persalinan Normal
		Meningkatkan Pengetahuan Wanita dan Keluarga untuk Menjamin Kesehatan Ibu serta Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan yang Tersedia
5	Pemberdayaan perempuan dan fasilitasi layanan pendampingan terhadap anak	Meningkatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembinaan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Penyuluhan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Peduli KB
		Meningkatkan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
		Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan
		Merumuskan Kebijakan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik serta Upaya Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Serta Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bermain Anak

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Fasilitasi Penanganan Secara Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
6	Meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatkan Penyediaan Sarana Produksi serta Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
		Meningkatkan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
		Meningkatkan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
		Meningkatkan Penggunaan Teknologi Modern di Bidang Pertanian
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
		Melanjutkan Pembangunan Saluran Irigasi untuk Pertanian Tanaman Pangan
		Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
		Melanjutkan Rehabilitasi dan Fungsionalisasi 5.000 Ha Tambak
		Meningkatkan Pendistribusian Bibit Ternak dan Bahan Logistik Petani Ternak
		Meningkatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak serta Pendataan Masalah Peternakan
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
		Meningkatkan Pembinaan serta Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
		Fasilitasi BUMD dan Koperasi dengan Menggerakkan Sektor Ekonomi Melalui Penciptaan Lapangan Kerja
		Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif
		Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pameran Investasi
		Meningkatkan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
		Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi yang Memadai dan Menunjang Peluang Investasi
		Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Secara Produktif
		Mengembangkan Sektor Ekonomi di Kawasan Cepat Tumbuh
		Meningkatkan Sosialisasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
		Pembinaan dan Pemberdayaan PKK serta Dekranasda
		Lomba Desain Batik dan Bordir khas Langsa
		Meningkatkan Pengembangan Jaringan Kerja Sama dan Promosi Wisata
		Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata MICE ( <i>Meeting, Insentive, Conference, dan Exhibition</i> )
		Meningkatkan Kemitraan Informasi dan Pengembangan <i>Data Base</i> Pariwisata
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
		Melakukan Penataan Ekowisata dan Pembangunan Masyarakat Sadar Wisata di Kuala Langsa, Telaga Tujuh, dan Gampong-Gampong Terdekat dengan Lokasi Ekowisata Hutan Mangrove
		Meningkatkan Aktivitas Perdagangan Antarpulau dan Antarnegara Melalui Pelabuhan Kuala Langsa
		Mendorong Percepatan Penyelesaian Pembangunan Langsa <i>Town Squire</i>
		Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa dan Pasar-Pasar Tradisional
		Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
		Meningkatkan Sistem dan Pengembangan Pasar serta Promosi Perdagangan
		Meningkatkan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Meningkatkan Koordinasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Penyaluran Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf
		Mempersiapkan Tenaga Kerja Lokal yang Terampil dan Berkualitas
		Meningkatkan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		Meningkatkan Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
		Meningkatkan Akses Masyarakat Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
		Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Pelayanan Pengganti dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisik, Mental, dan Sosial pada Penghuni Panti Asuhan
		Meningkatkan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
		Meningkatkan Pelatihan bagi Penyuluh dan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial serta Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
		Meningkatkan Diseminasi Informasi serta Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Partisipatif Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Gampong
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Gampong
		Meningkatkan Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat
		Mendukung Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah Gampong
		Melanjutkan Komitmen untuk Pengalokasian Dana Desa/Gampong
7	Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam melalui penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam	Meningkatkan Ijtihad, dan Pengkajian Hukum Islam, Mudzakarah serta Pengkaderan Ulama
		Meningkatkan Penertiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam
		Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ibadah dan Rumah Ibadah
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kompetisi Pendidikan Islami Bagi Pelajar
		Memantapkan Peran Ulama dan Pemuka-Pemuka Agama Dalam Bidang Keagamaan
		Melanjutkan Safari Maghrib dan Subuh ke Gampong-Gampong
		Lomba Masjid/Mushalla Terbersih dan Termakmur
		Jambore Santri, TPA, Remaja Masjid, Pelajar, dan Mahasiswa
8	Memelihara keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Anggota Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan
		Memantapkan Pengetahuan dan Pemahaman Politik Seluruh Lapisan Masyarakat
		Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM
		Memelihara Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
		Memantapkan Kualitas Aparatur Penegak Hukum dan Meningkatkan Kerjasamanya
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Toleransi Kerukunan Hidup Beragama serta Pengendalian Konflik Sosial
		Meningkatkan Pengarusutamaan Perdamaian dan Reintegrasi Pasca Konflik, serta Koordinasi Penyelenggaraan Pertahanan
		Meningkatkan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Meningkatkan Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat
9	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pembinaan Mental ASN Agar Lebih Disiplin, Bertanggungjawab, Ikhlas, Jujur, Anti KKN serta Bebas Pungli dalam Menjalankan Tugasnya
		Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir dan Pembinaan Aparatur
		Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Langsa Melalui Beragam Pelatihan, <i>Workshop</i> , Seminar, dan Kursus
		Memberikan Peluang Untuk Melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan Serta Bantuan Lainnya
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Menjamin Kesejahteraan Aparatur
		Mengefektifkan Sistem <i>Reward and Punishment</i> untuk ASN
		Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Aksi Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Korupsi
		Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah serta Penyusunan Rancangan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
		Melakukan Penataan Tata Kelola Keuangan dengan Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Publik dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan serta Peningkatan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelayanan dan Pelatihan Tenaga SIAK, Sosialisasi serta Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan
		Terselenggaranya Koordinasi Pelayanan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Advokasi Kebijakan Pemerintah Pusat Terutama yang Menghambat Iklim Investasi, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Peraturan Menteri Pertanian Terkait Tindakan Karantina untuk Impor Produk Pertanian
		Advokasi Pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara eks HGB PT Kopalmas untuk Pembangunan Kawasan Industri di Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dan Pengembangan Wilayah <i>Hinterland</i> Dalam Rangka Menjaga Kelestarian DAS Krueng Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dengan Wilayah <i>Hinterland</i> untuk Fungsionalisasi dan Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
		Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Gampong
		Menjalin Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah
		Mempersiapkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kawasan Industri Langsa
		Penyelesaian Pembebasan Lahan untuk RSU dan Perluasan Hutan Kota Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan RI
		Mengefektifkan Mekanisme <i>Control</i> Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Melalui Berbagai Saluran, seperti <i>Drop Box</i> , Telepon, SMS, Sambung Rasa, dan Teknologi Komunikasi Informasi
		Meningkatkan peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
		Renegosiasi dengan PT KAI Terkait Pemanfaatan Aset Tanah Bekas Rel untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelatihan Pengembangan dan Teknis Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
10	Meningkatkan peran pemuda, olahraga dan seni budaya daerah	Meningkatkan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepemudaan
		Meningkatkan Pelatihan dan Keterampilan bagi Pemuda
		Meningkatkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
		Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
		Melakukan Pembinaan Olahraga dan Kesenian Melalui Sinergisitas dengan BUMN, BUMD, Sanggar-Sanggar Seni, Pemerintah Gampong, KONI dan Pengurus CABOR
		Menggelar Event Pekan Olahraga Kota Langsa dan Kompetisi Olahraga di Masing-Masing Kecamatan
		Meningkatkan Pengembangan Pelestarian Adat Aceh
		Menggelar Ajang <i>Langsa Art and Culture Festival</i> dan Menampung Kreativitas dan Ekspresi Warga Kota Langsa serta Pegiat Seni Budaya dari Luar
		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah
		Meningkatkan Pengelolaan Peninggalan dan Pengembangan Nilai Sejarah
		Meningkatkan Fungsi Museum sebagai Sarana Peragaan Pendidikan, Informasi Seni Budaya, dan Peradaban Daerah/Bangsa
		Melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah Lainnya Sebagai Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Tabel 6.7  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Langsa  
Tahun 2022

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam melalui penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam	Meningkatkan Ijtihad, dan Pengkajian Hukum Islam, Mudzakah serta Pengkaderan Ulama
		Meningkatkan Penertiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam
		Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ibadah dan Rumah Ibadah
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kompetisi Pendidikan Islami Bagi Pelajar
		Memantapkan Peran Ulama dan Pemuka-Pemuka Agama Dalam Bidang Keagamaan
		Melanjutkan Safari Maghrib dan Subuh ke Gampong-Gampong
		Lomba Masjid/Mushalla Terbersih dan Termakmur
		Jambore Santri, TPA, Remaja Masjid, Pelajar, dan Mahasiswa
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pembinaan Mental ASN Agar Lebih Disiplin, Bertanggungjawab, Ikhlas, Jujur, Anti KKN serta Bebas Pungli dalam Menjalankan Tugasnya
		Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir dan Pembinaan Aparatur
		Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Langsa Melalui Beragam Pelatihan, <i>Workshop</i> , Seminar, dan Kursus
		Memberikan Peluang Untuk Melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan Serta Bantuan Lainnya
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Menjamin Kesejahteraan Aparatur
		Mengefektifkan Sistem <i>Reward and Punishment</i> untuk ASN
		Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Aksi Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Korupsi
		Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah serta Penyusunan Rancangan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
		Melakukan Penataan Tata Kelola Keuangan dengan Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Publik dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan serta Peningkatan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelayanan dan Pelatihan Tenaga SIAK, Sosialisasi serta Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan
		Terselenggaranya Koordinasi Pelayanan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Advokasi Kebijakan Pemerintah Pusat Terutama yang Menghambat Iklim Investasi, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Peraturan Menteri Pertanian Terkait Tindakan Karantina untuk Impor Produk Pertanian
		Advokasi Pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara eks HGB PT Kopalmas untuk Pembangunan Kawasan Industri di Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dan Pengembangan Wilayah <i>Hinterland</i> Dalam Rangka Menjaga Kelestarian DAS Krueng Langsa
		Meningkatkan Kerjasama dengan Wilayah <i>Hinterland</i> untuk Fungsionalisasi dan Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa
		Meningkatkan Kerjasama Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
		Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Gampong
		Menjalin Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah
		Mempersiapkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kawasan Industri Langsa
		Penyelesaian Pembebasan Lahan untuk RSU dan Perluasan Hutan Kota Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan RI
		Mengefektifkan Mekanisme <i>Control</i> Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Melalui Berbagai Saluran, seperti <i>Drop Box</i> , Telepon, SMS, Sambung Rasa, dan Teknologi Komunikasi Informasi
		Meningkatkan peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
		Renegosiasi dengan PT KAI Terkait Pemanfaatan Aset Tanah Bekas Rel untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pelatihan Pengembangan dan Teknis Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan ruang	Melanjutkan Penataan Taman Hutan Raya Kota, Ekowisata Mangrove, TPA Kebun Ireng, dan Waduk Alue Gampu
		Melakukan Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas untuk Taman-Taman Kota
		Membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang Lengkap dengan fasilitas Mushola, Pojok ASI, Perpustakaan, Fasilitas Permainan, Fasilitas Seni dan Olah Raga

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Mendorong Agar Setiap Gampong yang Mempunyai Aset Tanah untuk Membangun Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Anak
		Meningkatkan Survey dan Pemetaan serta Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
		Meningkatkan Kesesuaian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
		Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
		Pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah Komunal dengan prinsip 3 R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ) Minimal 1 Unit di Masing-Masing Kecamatan
		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Melaksanakan Penghijaun dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim
		Lomba Rumah Sehat, Sekolah Sehat, dan Gampong Sehat serta Gotong Royong Bulanan dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat
		Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
		Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini Melalui Posyandu Terintegrasi, PAUD, TK/ RA, TPA
		Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat
		Melaksanakan Konsep Sekolah <i>Full Boarding</i> untuk SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA dengan Tambahan Muatan Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Karakter
		Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup
		Memberikan Apresiasi Terhadap Anak-Anak Berprestasi
		Memperbanyak Event Perlombaan untuk Mendorong Peningkatan Prestasi Anak
		Meningkatkan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
		Mendorong Kerjasama Antarsekolah yang Berprestasi dari Luar Daerah dengan Beberapa Sekolah di Kota Langsa
		Mendukung Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Akses ke Perguruan Tinggi Universitas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Samudera (UNSAM) dan IAIN Zawiyah Cot Kala dan Perguruan Tinggi Lainnya
		Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
		Memperbanyak <i>Vocational Training</i> untuk Pemuda/i Terutama yang Putus Pendidikan Menengah Atas atau Pengangguran
		Meningkatkan Kualitas Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
		Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendidik Melalui Lokakarya, Seminar, Pelatihan, dan Diskusi
		Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembinaan Perpustakaan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat
5	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas
		Meningkatkan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		Pemenuhan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan Lainnya
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		Melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Regional
		Meningkatkan Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Rangka Penciptaan Masyarakat Mandiri Sehat
		Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM) dengan Memaksimalkan Fungsi Desa Siaga, Posyandu, Polindes serta Bentuk UKBM Lainnya
		Penanganan dan Pencegahan Penularan Penyakit
		Peningkatan Kampanye Pencegahan Penyakit <i>Degenerative</i>
		Menurunkan Tingkat Prevelensi Penyakit Berbasis Lingkungan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Masyarakat
		Meningkatkan Kemitraan Pengobatan Dasar dan Lanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
		Menguatkan Kerjasama dan Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Gizi Masyarakat
		Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia
		Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Lansia
		Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
		Meningkatkan Kemitraan dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak Balita
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Jaminan Persalinan serta Pelatihan dan Pendidikan Asuhan Persalinan Normal

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Pengetahuan Wanita dan Keluarga untuk Menjamin Kesehatan Ibu serta Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan yang Tersedia
6	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembinaan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Penyuluhan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Peduli KB
		Meningkatkan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
		Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan
		Merumuskan Kebijakan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik serta Upaya Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Serta Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bermain Anak
		Fasilitasi Penanganan Secara Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatkan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
		Peningkatan Pasokan Air Baku PDAM Tirta Keumeneng Melalui Penambahan Kapasitas Waduk dan Bendungan Krueng Langsa
		Pembangunan dan Perbaikan <i>Water Treatment</i>
		Pemasangan Jaringan Baru untuk Masyarakat yang Belum Terlayani
		Menyusun Studi Kelayakan Waduk Langsa yang Berfungsi Mengatasi Banjir, Menyediakan Air Baku PDAM, Irigasi Persawahan, dan Tempat Wisata
		Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dan Rambu Lalu Lintas
		Meningkatkan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya dan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas serta Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan
		Meningkatkan Ketersediaan Rambu dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
		Memantapkan Kualitas Prasarana dan Sarana Perhubungan
		Melanjutkan Penataan Kawasan Bekas Jalur Rel Kereta Api
		Menyusun Studi Kelayakan Serta Pembangunan Bandara Perintis Aceh Timur Raya
		Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Memelihara Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan
		Memelihara/Merehabilitasi Prasarana Jalan dan Jembatan dalam Kawasan-Kawasan Cepat

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Tumbuh/Sentra-Sentra Produksi
		Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan
		Pemeliharaan Jalan yang Rusak dan Peningkatan Jalan di Gampong-Gampong
		Meningkatkan Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong/Talud/Turap/Bronjong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah
		Melanjutkan Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Berbasis Komunitas untuk Perkampungan Warga Berpendapatan Rendah
		Meningkatkan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air, Badan Sungai dan Saluran Induk
		Melanjutkan Penataan Krueng Langsa dan Perbaikan Saluran Air
		Meningkatkan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana
		Memperkuat Kedudukan dan Fungsi Instansi Perangkat Daerah Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Kapasitas Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Memperkuat Kerjasama Antarsektor Terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah
8	Meningkatkan penyelenggaraan adat dan seni budaya daerah	Meningkatkan Pengembangan Pelestarian Adat Aceh
		Menggelar Ajang <i>Langsa Art and Culture Festival</i> dan Menampung Kreativitas dan Ekspresi Warga Kota Langsa serta Pegiat Seni Budaya dari Luar
		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah
		Meningkatkan Pengelolaan Peninggalan dan Pengembangan Nilai Sejarah
		Meningkatkan Fungsi Museum sebagai Sarana Peragaan Pendidikan, Informasi Seni Budaya, dan Peradaban Daerah/Bangsa
		Melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah Lainnya Sebagai Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
9	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepemudaan
		Meningkatkan Pelatihan dan Keterampilan bagi Pemuda
		Meningkatkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
		Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda
10	Meningkatkan prestasi olah raga	Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
		Melakukan Pembinaan Olahraga dan Kesenian Melalui Sinergisitas dengan BUMN, BUMD, Sanggar-Sanggar Seni, Pemerintah Gampong, KONI dan Pengurus

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		CABOR
		Menggelar Event Pekan Olahraga Kota Langsa dan Kompetisi Olahraga di Masing-Masing Kecamatan
11	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat	Meningkatkan Penyediaan Sarana Produksi serta Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
		Meningkatkan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
		Meningkatkan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
		Meningkatkan Penggunaan Teknologi Modern di Bidang Pertanian
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
		Melanjutkan Pembangunan Saluran Irigasi untuk Pertanian Tanaman Pangan
		Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
		Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
		Melanjutkan Rehabilitasi dan Fungsionalisasi 5.000 Ha Tambak
		Meningkatkan Pendistribusian Bibit Ternak dan Bahan Logistik Petani Ternak
		Meningkatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak serta Pendataan Masalah Peternakan
		Meningkatkan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
		Meningkatkan Pembinaan serta Fasilitas Industri Kecil dan Menengah
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
		Fasilitas BUMD dan Koperasi dengan Menggerakkan Sektor Ekonomi Melalui Penciptaan Lapangan Kerja
		Fasilitas Pengembangan Industri Kreatif
		Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pameran Investasi
		Meningkatkan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
		Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi yang Memadai dan Menunjang Peluang Investasi
		Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier
		Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Secara Produktif
		Mengembangkan Sektor Ekonomi di Kawasan Cepat Tumbuh



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatkan Sosialisasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
		Pembinaan dan Pemberdayaan PKK serta Dekranasda
		Lomba Desain Batik dan Bordir khas Langsa
		Meningkatkan Pengembangan Jaringan Kerja Sama dan Promosi Wisata
		Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata MICE ( <i>Meeting, Insentive, Conference, dan Exhibition</i> )
		Meningkatkan Kemitraan Informasi dan Pengembangan <i>Data Base</i> Pariwisata
		Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
		Melakukan Penataan Ekowisata dan Pembangunan Masyarakat Sadar Wisata di Kuala Langsa, Telaga Tujuh, dan Gampong-Gampong Terdekat dengan Lokasi Ekowisata Hutan Mangrove
		Meningkatkan Aktivitas Perdagangan Antarpulau dan Antarnegara Melalui Pelabuhan Kuala Langsa
		Mendorong Percepatan Penyelesaian Pembangunan <i>Langsa Town Squire</i>
		Optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa dan Pasar-Pasar Tradisional
		Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
		Meningkatkan Sistem dan Pengembangan Pasar serta Promosi Perdagangan
		Meningkatkan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		Meningkatkan Koordinasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Penyaluran Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf
		Mempersiapkan Tenaga Kerja Lokal yang Terampil dan Berkualitas
		Meningkatkan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		Meningkatkan Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
		Meningkatkan Akses Masyarakat Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
		Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		Meningkatkan Pelayanan Pengganti dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisik, Mental, dan Sosial pada Penghuni Panti Asuhan
		Meningkatkan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
		Meningkatkan Pelatihan bagi Penyuluh dan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial serta Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
		(PKH)
		Meningkatkan Diseminasi Informasi serta Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Partisipatif Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Gampong
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Gampong
		Meningkatkan Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Gampong
		Meningkatkan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gampong
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat
		Mendukung Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah Gampong
		Melanjutkan Komitmen untuk Pengalokasian Dana Desa/Gampong
12	Meningkatkan kualitas, ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Partisipasi Anggota Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan
		Memantapkan Pengetahuan dan Pemahaman Politik Seluruh Lapisan Masyarakat
		Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM
		Memelihara Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban
		Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
		Memantapkan Kualitas Aparatur Penegak Hukum dan Meningkatkan Kerjasamanya
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Toleransi Kerukunan Hidup Beragama serta Pengendalian Konflik Sosial
		Meningkatkan Pengarusutamaan Perdamaian dan Reintegrasi Pasca Konflik, serta Koordinasi Penyelenggaraan Pertahanan
		Meningkatkan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Meningkatkan Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat

Tabel 6.8

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2018-2022

No.	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemanfaatan Sumberdaya Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi;	Pembangunan Infrastruktur;	Penegakan Syariat Islam;	Pembangunan Infrastruktur;	Birokrasi Pemerintahan dan Keamanan;
2	Penegakan Syariat Islam;	Penegakan Syariat Islam;	Birokrasi Pemerintahan dan Keamanan;	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;	Pembangunan Infrastruktur;
3	Birokrasi Pemerintahan dan Keamanan;	Mutu Pendidikan;	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;	Mutu Pendidikan;	Pemanfaatan Sumberdaya Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi;
4	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;	Layanan Kesehatan;	Mutu Pendidikan;	Layanan Kesehatan;	Mutu Pendidikan;
5	Mutu Pendidikan;	Birokrasi Pemerintahan dan Keamanan;	Layanan Kesehatan;	Pemberdayaan Sosial Masyarakat;	Layanan Kesehatan;
6	Layanan Kesehatan;	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;	Pembangunan Infrastruktur;	Penegakan Syariat Islam;	Penegakan Syariat Islam;
7	Pemberdayaan Sosial Masyarakat;	Pemberdayaan Sosial Masyarakat;	Pemberdayaan Sosial Masyarakat;	Pemanfaatan Sumberdaya Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi;	Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
8	Pembangunan Infrastruktur	Pemanfaatan Sumberdaya Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	Pemanfaatan Sumberdaya Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	Birokrasi Pemerintahan dan Keamanan	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;

**Tabel 6.9**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif**  
**Tahun 2018-2022**

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dengan lebih mendorong inisiatif dan partisipasi warga					2.011.125.500		2.313.991.125		2.405.491.125		2.509.891.125		2.605.481.625		11.845.980.500	
01 01	Mewujudkan masyarakat yang Islami	Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam	Kasus	880	800	2.011.125.500	700	2.313.991.125	600	2.405.491.125	500	2.509.891.125	400	2.605.481.625	400	11.845.980.500	
01 01 01	Kesesuaian Pelaksanaan Syariat Islam bagi Umat Islam	Jumlah Qanun Syariat Islam yang dilaksanakan	Qanun	6	6	1.341.125.500	6	1.578.991.125	6	1.633.491.125	6	1.691.891.125	6	1.755.481.625	6	8.000.980.500	
04 01 42	Program Pembinaan dan Pengembangan Syiar Islam	Jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam	Kasus	880	800	820.000.000	700	1.071.000.000	600	1.094.500.000	500	1.121.000.000	400	1.158.000.000	400	5.264.500.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
		Persentase gampong yang melaksanakan pengajian ba'da maghrib	%	N/A	75		75		80		80		90		90		
04 01 45	Program Peningkatan Peran Serta Ulama	Jumlah pengkaderan ulama yang mendapatkan pelatihan	Orang	30	30	521.125.500	30	507.991.125	30	538.991.125	30	570.891.125	30	597.481.625	150	2.736.480.500	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
		Jumlah tausiah disampaikan	Kali	48	48		48		48		48		48		240		
01 01 02	Meningkatnya Persentase Rumah Ibadah yang Representatif	Persentase rumah ibadah yang representatif	%	N/A	70	500.000.000	75	550.000.000	80	575.000.000	85	600.000.000	90	625.000.000	90	2.850.000.000	
04 01 40	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	Unit	N/A	5	500.000.000	5	550.000.000	5	575.000.000	5	600.000.000	5	625.000.000	25	2.850.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
01 01 03	Peran Serta Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Persentase Keikutsertaan Lembaga Pendidikan Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	%	N/A	100	170.000.000	100	185.000.000	100	197.000.000	100	218.000.000	100	225.000.000	100	995.000.000	
04 01 43	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islami	Jumlah Dayah	Dayah	N/A	32	170.000.000	32	185.000.000	33	197.000.000	33	218.000.000	34	225.000.000	34	995.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
		Jumlah Balai Pengajian	Balai Pengajian	N/A	91		93		95		97		99		99		
		Jumlah Tempat Pengajian Alquran (TPA)	TPA	N/A	208		210		212		214		216		216		
02	Melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan, sinkronisasi dan harmonisasi kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang berbasis smart city dalam rangka mendukung pelaksanaan e-government					137.187.090.878		147.129.799.069		142.737.100.230		146.385.975.956		144.439.116.898		717.879.083.030	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 01	Menyelenggarakan reformasi birokrasi pemerintahan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada penciptaan pemerintahan yang bersih, amanah, dan berwibawa serta optimalisasi pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	N/A	B	137.187.090.878	B	147.129.799.069	B	142.737.100.230	B	146.385.975.956	B	144.439.116.898	B	717.879.083.030	
02 01 01	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WDP/WTP	WTP	WTP	7.897.202.383	WTP	8.048.059.116	WTP	8.233.008.076	WTP	8.419.994.884	WTP	8.615.617.122	WTP	41.213.881.581	
04 04 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	7.897.202.383	Tepat waktu	8.048.059.116	Tepat waktu	8.233.008.076	Tepat waktu	8.419.994.884	Tepat waktu	8.615.617.122	Tepat waktu	41.213.881.581	
02 01 02	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LKIP; Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai; Kriteria	CC;Tinggi	B;Tinggi	1.597.445.000	B;Sangat Tinggi	1.696.327.000	B;Sangat Tinggi	1.773.949.700	BB;Sangat Tinggi	1.864.514.670	BB;Sangat Tinggi	1.939.031.137	BB;Sangat Tinggi	8.871.267.507	
04 01 48	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Tata Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kriteria	Tinggi	Tinggi	1.197.445.000	Sangat Tinggi	1.274.727.000	Sangat Tinggi	1.336.549.700	Sangat Tinggi	1.405.314.670	Sangat Tinggi	1.468.431.137	Sangat Tinggi	6.682.467.507	
04 01 53	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Organisasi	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	CC	B	400.000.000	B	421.600.000	B	437.400.000	BB	459.200.000	BB	470.600.000	BB	2.188.800.000	
02 01 03	Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Pusat dan Provinsi	Tingkat kesesuaian prioritas dan kebijakan pembangunan	%	N/A	100	1.944.434.000	100	2.262.051.000	100	3.150.875.600	100	3.371.714.375	100	3.604.830.328	100	14.333.905.303	
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen rencana capaian kinerja	Dokumen	-	2	48.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.340.000	
04 03 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program pembangunan tahunan dan jangka menengah	%	100	100	990.624.000	100	1.182.968.000	100	1.978.020.000	100	2.096.477.200	100	2.217.780.120	100	8.465.869.320	
04 03 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Juta rupiah	2.326.765	2.408.201	292.680.000	2.492.488	307.314.000	2.579.725	322.679.700	2.670.016	338.813.685	2.763.466	355.754.369	2.763.466	1.617.241.754	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 23	Program perencanaan sosial dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,89	76,08	339.440.000	76,71	416.084.000	77,39	458.922.400	78,07	506.044.640	78,76	557.879.104	78,76	2.278.370.144	
04 07 15	Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah rekomendasi hasil penelitian	Rekomendasi	2	2	273.350.000	2	355.685.000	3	391.253.500	3	430.378.850	3	473.416.735	13	1.924.084.085	
02 01 04	Tertibnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Tingkat penerapan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	%	N/A	100	6.059.300.600	100	6.169.878.000	100	6.309.550.000	100	6.405.550.000	100	6.508.500.000	100	31.452.778.600	
19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Qanun yang ditetapkan dan Tersedianya Produk Hukum Daerah	Qanun dan Produk Hukum Daerah	10 ; 900	10 ; 900	1.361.162.100	10 ; 900	1.471.739.500	10 ; 900	1.536.100.000	10 ; 900	1.587.100.000	10 ; 900	1.636.750.000	10 ; 900	7.592.851.600	
04 01 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Qanun yang ditetapkan	Qanun	10	10	4.698.138.500	10	4.698.138.500	10	4.773.450.000	10	4.818.450.000	10	4.871.750.000	50	23.859.927.000	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 01 05	Terlaksananya pemerintahan yang bersih, amanah dan berwibawa di semua perangkat daerah serta terjalinnya kerjasama yang kuat antar lembaga dan antar wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Skala	N/A	Puas	118.731.828.895	Puas	127.950.383.953	Puas	122.184.066.853	Puas	125.165.252.027	Puas	122.543.708.311	Puas	616.575.240.039	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	69.919.734.127	4	71.144.611.510	3	72.910.894.107	2	74.652.886.039	1	76.462.594.238	1	365.090.720.020	Seluruh OPD
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	35.010.603.830	100	31.853.082.321	100	32.432.049.744	100	33.444.264.394	100	28.358.319.030	100	161.098.319.319	Seluruh OPD
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	1.104.620.000	99	2.284.920.000	99	2.307.920.000	99	2.331.020.000	99	2.354.830.000	99	10.383.310.000	Seluruh OPD
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	188	178.948.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	332	378.948.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
04 06	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	138	540.375.000	138	601.950.000	138	746.250.000	138	843.500.000	138	893.200.000	690	3.625.275.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang berkompetensi	%	N/A	70	1.118.466.400	75	1.172.210.000	80	1.262.290.000	85	1.360.000.000	90	1.465.950.000	90	6.378.916.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 06	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pengisian jabatan sesuai DIKLATPIM	%	N/A	40	69.265.000	40	83.700.000	50	98.250.000	50	112.350.000	50	126.050.000	50	489.615.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 03	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Dalam Perencanaan Pembangunan	%	N/A	5	200.000.000	30	5.113.000.000	50	522.000.000	50	550.000.000	50	590.000.000	50	6.975.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 01	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	1.120.375.000	100	1.140.100.000	100	1.153.600.000	100	1.171.550.000	100	1.187.455.000	100	5.773.080.000	Sekretariat Daerah
04 01	Program Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah	Jumlah anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang ditetapkan	Orang	5	5	221.872.500	5	115.912.000	-	-	-	-	5	221.872.500	5	559.657.000	Sekretariat DPR
04 01	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah	%	100	100	3.410.640.000	100	3.477.900.000	100	3.523.900.000	100	3.563.600.000	100	3.611.500.000	100	17.587.540.000	Sekretariat Daerah
04 01	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan Daerah	%	100	100	2.100.821.000	100	2.116.600.000	100	2.129.350.000	100	2.142.300.000	100	2.155.500.000	100	10.644.571.000	Sekretariat Daerah
02 18	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase pemeliharaan arsip dan dokumen perpustakaan	%	80	85	124.257.000	85	136.484.710	90	148.779.251	90	161.142.629	95	173.576.908	95	744.240.498	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pemeliharaan arsip dan dokumen perpustakaan	%	80	85	225.179.788	85	124.692.620	90	128.893.237	90	136.060.035	95	143.441.836	95	758.267.516	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 14	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Dokumen Statistik Daerah Yang Dapat Diakses	%	100	100	75.300.000	100	77.559.000	100	79.885.770	100	82.282.343	100	84.750.813	100	399.777.926	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 15	Program penyelenggaraan komunikasi persandian	Jumlah Kegiatan Persandian	Keg	1	1	84.300.000	1	86.829.000	1	89.433.870	1	92.116.886	1	94.880.393	5	447.560.149	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 06	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP	%	70	75	240.000.000	85	189.500.000	90	204.500.000	95	244.500.000	100	302.900.000	100	1.181.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Akses Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	%	N/A	100	674.649.600	100	5.565.084.352	100	1.750.906.382	100	1.562.567.274	100	1.584.167.792	100	11.137.375.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparatur bidang komunikasi informasi yang mendapatkan pelatihan	Orang	N/A	25	47.959.650	25	49.398.440	25	50.880.393	25	52.406.805	25	53.979.009	125	254.624.297	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 10 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah berita yang dipublikasikan di media massa	Jumlah	N/A	10	39.970.000	10	222.370.000	10	229.284.100	10	236.405.623	10	243.740.792	50	971.770.515	Dinas Komunikasi dan Informatika
04 01 50	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Perekonomian, Energi dan Sumber Daya Mineral	Tingkat Pengawasan Barang Bersubsidi	%	100	100	2.224.492.000	100	2.244.480.000	100	2.265.000.000	100	2.276.300.000	100	2.285.000.000	100	11.295.272.000	Sekretariat Daerah
04 03 16	Program Kerjasama Pembangunan	Rekomendasi Kegiatan yang difasilitasi dunia usaha	Kegiatan	N/A	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
02 01 06	Terselenggaranya pengawasan internal pemerintah daerah yang kuat, efisien dan efektif	Kapabilitas APIP;Maturitas SPIP	Level/Tingkat	Level III;Level II	Level III;Level III	956.880.000	Level III;Level III	1.003.100.000	Level III;Level III	1.085.650.000	Level III;Level III	1.158.950.000	Level III;Level III	1.227.430.000	Level III;Level III	5.432.010.000	
04 02 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah	%	100	100	881.880.000	100	914.100.000	100	981.500.000	100	1.041.800.000	100	1.100.680.000	100	4.919.960.000	Inspektorat
04 02 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sebagai tenaga auditor dan aparatur pengawasan	Orang	4	4	75.000.000	4	89.000.000	4	104.150.000	4	117.150.000	4	126.750.000	20	512.050.000	Inspektorat

03	Melanjutkan penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, sehat, indah dan nyaman					13.308.311.750		13.784.069.653		15.174.797.500		14.354.252.375		14.960.374.994		71.581.806.272	
03 01	Melakukan pengembangan, penataan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	27	30	13.308.311.750	33	13.784.069.653	35	15.174.797.500	37	14.354.252.375	40	14.960.374.994	40	71.581.806.272	
03 01 01	Terselenggaranya Penataan dan Pengembangan RTH	Persentase Ruang Terbuka Hijau(RTH)	%	15,46	15,46	9.300.000.000	16,00	8.444.600.000	16,40	9.464.600.000	16,80	8.464.600.000	17,20	8.514.600.000	17,20	44.188.400.000	
02 05 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau(RTH)	%	15,46	15,46	9.300.000.000	16,00	8.444.600.000	16,40	9.464.600.000	16,80	8.464.600.000	17,20	8.514.600.000	17,20	44.188.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
03 01 02	Terselenggaranya Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pola ruang	Tingkat Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	1.829.715.000	75,00	2.334.950.000	75,40	2.449.097.500	75,70	2.540.952.375	76,10	2.928.174.994	76,10	12.082.889.869	
01 03 34	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	1.272.215.000	75	800.000.000	75,4	840.000.000	75,7	850.000.000	76,1	1.130.000.000	76,1	4.892.215.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 35	Program Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	400.000.000	75,00	85.000.000	75,40	85.000.000	75,70	94.500.000	76,10	115.000.000	76,10	779.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW Ruang	%	74,75	74,75	157.500.000	75,00	170.000.000	75,40	180.000.000	75,70	185.000.000	76,10	201.000.000	76,10	893.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
02 04 15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	58,20	-	-	61	63.575.000	63	66.903.750	65	70.398.938	67	74.068.884	67	274.946.572	Dinas Pertanahan
02 04 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	58,20	-	-	61	1.161.750.000	63	1.219.837.500	65	1.280.829.375	67	1.344.870.844	67	5.007.287.719	Dinas Pertanahan
02 04 17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	N/A	-	-	100	54.625.000	100	57.356.250	100	60.224.063	100	63.235.266	100	235.440.578	Dinas Pertanahan
03 01 03	Terselenggaranya Aksi Dukungan Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	1.774.096.750	Ada	2.527.219.653	Ada	2.734.900.000	Ada	2.784.900.000	Ada	2.920.000.000	Ada	12.741.116.403	
02 05 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	28,08	28,08	1.620.000.000	29,1	1.854.900.000	29,5	1.884.900.000	29,85	1.924.900.000	30,2	2.000.000.000	30,2	9.284.700.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	/1000	304	304		270		250		220		200		200		
02 05 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	51	154.096.750	52	572.319.653	53	700.000.000	54	710.000.000	55	770.000.000	55	2.906.416.403	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	30	-	-	32	50.000.000	33	50.000.000	34	50.000.000	35	50.000.000	35	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	-	Ada	50.000.000	Ada	100.000.000	Ada	100.000.000	Ada	100.000.000	Ada	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
03 01 04	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks/Skala	Sedang	Sedang	404.500.000	Sedang	477.300.000	Sedang	526.200.000	Sedang	563.800.000	Sedang	597.600.000	Sedang	2.569.400.000	
01 04 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah bencana kebakaran	Jumlah	7	7	344.000.000	6	412.250.000	5	453.600.000	4	483.500.000	3	512.350.000	3	2.205.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 05 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Gampong	N/A	66	60.500.000	66	65.050.000	66	72.600.000	66	80.300.000	66	85.250.000	66	363.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
04	Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan					38.193.739.775		37.012.810.624		37.430.137.758		37.800.634.963		38.795.533.265		189.232.856.385	
04 01	Meningkatkan kualitas pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi sebagai modal dasar pembangunan daerah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10	10	38.193.739.775	11	37.012.810.624	11	37.430.137.758	12	37.800.634.963	12	38.795.533.265	12	189.232.856.385	
04 01 01	Meningkatnya Partisipasi PAUD	Persentase Anak Peserta PAUD	%	43	50	2.566.735.000	55	2.315.493.150	60	2.452.817.123	65	2.651.692.923	70	2.281.902.036	70	12.268.640.232	
01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Anak Peserta PAUD	%	43	50	2.566.735.000	55	2.315.493.150	60	2.452.817.123	65	2.651.692.923	70	2.281.902.036	70	12.268.640.232	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
04 01 02	Meningkatnya Persentase APS, APK, APM, AL SD, SMP, SMA, SMK dan Sederajat	Persentase Rata-Rata Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	N/A	96	32.599.205.961	97	31.845.564.466	98	31.781.818.386	99	31.786.870.144	100	32.295.881.348	100	160.309.340.305	
01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,51	100	32.545.605.961	100	31.783.924.466	100	31.710.932.386	100	31.705.351.244	100	32.202.134.613	100	159.947.948.670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	72,28	75		80		85		85		90		90		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	114,78	115		120		125		130		135		135		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	%	90,92	92		94		96		98		100		100		
01 01 17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	67,55	70	53.600.000	80	61.640.000	90	70.886.000	100	81.518.900	100	93.746.735	100	361.391.635	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	%	101,96	100		100		100		100		100		100		
04 01 03	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	Angka Melek Huruf	%	99	99,39	957.344.245	99,58	959.007.743	99,78	1.120.593.914	99,89	1.141.473.914	99,99	1.489.846.169	99,99	5.668.265.985	
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	%	100	100	743.235.100	100	735.207.743	100	874.373.914	100	874.373.914	100	1.202.546.169	100	4.429.736.840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 01 44	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Pendidikan Daerah	Peran serta anggota majelis dalam peningkatan mutu pendidikan daerah	%	N/A	85	214.109.145	85	223.800.000	90	246.220.000	90	267.100.000	95	287.300.000	95	1.238.529.145	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 04	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Penilaian Angka Kredit Guru	Persentase Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi Standar Tingkat Pendidikan	%	76,73	77,73	1.921.953.649	76,9	1.692.086.378	77,2	1.865.889.180	77,5	2.002.713.753	78	2.501.544.957	78	9.984.187.917	
01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,52	95	1.700.453.649	97	1.470.586.378	99	1.644.389.180	100	1.772.713.753	100	2.266.544.957	100	8.854.687.917	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Koordinasi Pelayanan Pendidikan	%	100	100	221.500.000	100	221.500.000	100	221.500.000	100	230.000.000	100	235.000.000	100	1.129.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
04 01 05	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Kunjungan	14.090	14.100	148.500.920	14.200	200.658.887	14.300	209.019.155	14.400	217.884.229	14.500	226.358.755	14.500	1.002.421.946	
02 17 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat capaian pelaksanaan pengembangan budaya baca dan pembinaan kepustakaan	%	N/A	100	148.500.920	100	200.658.887	100	209.019.155	100	217.884.229	100	226.358.755	100	1.002.421.946	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
05	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat					145.262.161.993		150.502.612.027		153.376.936.363		156.059.585.231		158.616.950.147		763.818.245.761	
05 01	Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan serta taraf kesehatan masyarakat;	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70	70,5	145.262.161.993	71	150.502.612.027	71,5	153.376.936.363	72	156.059.585.231	72,5	158.616.950.147	72,5	763.818.245.761	
05 01 01	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	%	N/A	25	144.931.260.993	24	149.656.624.169	23	152.437.399.719	22	155.017.144.923	21	157.463.179.876	21	759.505.609.680	
01 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Buffer Stock Obat	%	30	30	3.000.000.000	30	3.040.000.000	30	3.080.800.000	30	3.122.416.000	30	3.164.864.320	30	15.408.080.320	Dinas Kesehatan dan RSUD
01 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Wilayah Kesehatan Masyarakat	Kec	5	5	1.134.560.000	5	1.107.251.200	5	1.130.396.224	5	1.154.004.148	5	1.178.084.231	5	5.704.295.804	Dinas Kesehatan
01 02 17	Program Pengawasan obat dan makanan	Jumlah industri rumah tangga yang memiliki sertifikat pangan	Home Industri	N/A	20	22.000.000	20	122.000.000	20	124.200.000	20	126.620.000	20	129.282.000	100	524.102.000	Dinas Kesehatan
01 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah instrumen dan media promosi kesehatan	Instrumen/Media	N/A	2	1.367.280.000	2	912.677.000	2	963.944.700	3	1.020.339.170	3	1.082.373.087	3	5.346.613.957	Dinas Kesehatan
01 02 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,0002	0,0002	533.815.000	0,0002	260.812.200	0,0002	286.893.420	0,0002	315.582.762	0,0002	347.140.798	0,0002	1.744.244.180	Dinas Kesehatan
01 02 21	Pengembangan lingkungan sehat	Persentase Keluarga Yang Menggunakan Kualitas Air Bersih	%	N/A	-	-	70,68	319.186.176	71	351.104.794	71,3	406.439.653	71,6	447.083.619	71,6	1.523.814.242	Dinas Kesehatan
01 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	12,59	12,1	578.546.000	11,8	655.455.000	11,6	708.065.750	11,3	765.790.838	11	829.134.359	11	3.536.991.947	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Desa yang melaksanakan UCI	%	100	100		100		100		100		100		100		
01 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	Puskesmas	5	5	94.860.000	5	99.603.000	5	104.583.150	5	109.812.308	5	115.302.923	5	524.161.380	Dinas Kesehatan
01 02 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Iaringannya	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	%	0,03	0,03	8.014.800.000	0,03	8.433.176.000	0,03	8.680.476.000	0,03	8.782.506.000	0,03	8.696.534.000	0,03	42.607.492.000	Dinas Kesehatan

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Poliklinik per Satuan Penduduk	%	0,11	0,11		0,11		0,11		0,10		0,10		0,10		RSUD
		Rasio Pustu per Satuan Penduduk	%	0,04	0,04		0,04		0,04		0,03		0,03		0,03		
		Cakupan Puskesmas	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)	%	37,88	37,88		38,20		38,75		39,80		39,80		39,80		
		Jumlah Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan	Unit	N/A	11	25.839.000.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	59	138.555.400.000	
01 02 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Akses Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	%	N/A	100	14.221.399.993	100	14.509.163.593	100	14.803.016.025	100	15.103.112.421	100	15.409.614.353	100	74.046.306.385	Dinas Kesehatan
01 02 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia	%	N/A	98	125.000.000	98	218.200.000	98	388.819.657	98	422.701.623	98	465.771.785	98	1.620.493.065	Dinas Kesehatan
01 02 33	Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Akses Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSU	Orang	N/A	5000	90.000.000.000	6000	91.800.000.000	7000	93.636.000.000	8000	95.508.720.000	9000	97.418.894.400	9000	468.363.614.400	RSUD
05 01 02	Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Meningkatnya Persentase Cakupan Kunjungan Bayi serta Pelayanan Anak Balita	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	8	7	150.186.000	7	208.544.600	6	229.399.060	6	252.338.966	5	277.572.863	5	1.118.041.489	Dinas Kesehatan
01 02 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi	Bayi	8	7	150.186.000	7	208.544.600	6	229.399.060	6	252.338.966	5	277.572.863	5	1.118.041.489	
05 01 03	Menurunnya Angka Kematian Ibu Hamil/Melahirkan dan Meningkatnya Persentase Cakupan Kebidanan yang Ditangani	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	7	6	180.715.000	6	637.443.258	5	710.137.584	5	790.101.342	5	876.197.408	5	3.194.594.592	Dinas Kesehatan
01 02 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	83,74	83,74	180.715.000	84	637.443.258	84,3	710.137.584	84,6	790.101.342	84,9	876.197.408	85,2	3.194.594.592	
06	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					3.224.308.580		2.959.597.890		3.113.993.861		3.306.652.762		3.518.757.668		16.123.310.762	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
06 01	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta fasilitasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	N/A	60	3.224.308.580	60	2.959.597.890	61	3.113.993.861	61	3.306.652.762	62	3.518.757.668	62	16.123.310.762	
06 01 01	Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB	Rasio Akseptor KB	Rasio	0,85	0,85	2.302.138.580	0,85	1.264.205.700	0,86	1.309.637.671	0,86	1.355.494.717	0,87	1.406.785.833	0,87	7.638.262.501	
02 08 15	Program Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru	PUS	N/A	500	2.248.948.580	500	1.209.420.000	500	1.253.208.400	500	1.297.372.568	500	1.346.920.019	2500	7.355.869.567	
02 08 18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah peserta KB baru	PUS	N/A	500	53.190.000	500	54.785.700	500	56.429.271	500	58.122.149	500	59.865.814	2500	282.392.934	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06 01 02	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	N/A	65	579.434.500	66	843.829.735	67	911.762.785	68	994.564.640	68	1.080.378.431	68	4.409.970.091	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	80	80	276.610.000	80	513.160.500	80	550.613.550	80	599.987.405	80	649.130.396	80	2.589.501.851	
02 02 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	20	20		20		20		20		20		20		
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	80	80	302.824.500	80	330.669.235	80	361.149.235	80	394.577.235	80	431.248.035	80	1.820.468.240	
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	20	20		20		20		20		20		20		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
06 01 03	Terwujudnya Kota Layak Anak	Langsa Kota Layak Anak	Sudah/Belum	Belum	Belum	170.072.000	Belum	585.000.000	Belum	620.000.000	Sudah	680.000.000	Sudah	750.000.000	Sudah	2.805.072.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Wanita	Kasus	N/A	8	170.072.000	7	585.000.000	6	620.000.000	5	680.000.000	4	750.000.000	4	2.805.072.000	
		Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Kasus	N/A	7		6		5		4		3		3		
06 01 04	Menurunnya Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	Rasio	0,04	0,04	172.663.500	0,04	266.562.455	0,03	272.593.405	0,03	276.593.405	0,02	281.593.405	0,02	1.270.006.170	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Wanita	Kasus	N/A	8	172.663.500	7	266.562.455	6	272.593.405	5	276.593.405	4	281.593.405	4	1.270.006.170	
07	Melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah					56.389.172.893		53.528.646.482		57.928.737.790		58.277.202.033		60.082.748.146		286.206.507.344	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
07 01	Mempercepat penyediaan infrastruktur daerah dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,74	75	56.389.172.893	76	53.528.646.482	77	57.928.737.790	78	58.277.202.033	79	60.082.748.146	79	286.206.507.344	
07 01 01	Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Pelayanan Daerah Irigasi	Proporsi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	84	85	9.083.000.000	86	9.306.830.000	87	9.432.598.300	88	9.539.338.283	89	9.690.083.946	89	47.051.850.529	
01 03 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Rumah Tangga	31.554	31.708	9.083.000.000	32.862	9.306.830.000	34.124	9.432.598.300	35.486	9.539.338.283	36.948	9.690.083.946	36.948	47.051.850.529	
07 01 02	Tersedianya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta Tertibnya Pelayanan Angkutan	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,0162	0,0161	702.619.400	0,0160	2.548.606.482	0,0159	3.210.421.231	0,0158	3.394.003.353	0,0157	3.613.368.690	0,0157	13.469.019.156	
02 09 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pelayanan Pada Fasilitas Perhubungan	%	100	100	44.045.000	100	1.045.366.350	100	1.549.902.985	100	1.554.893.284	100	1.560.382.612	100	5.754.590.231	Dinas Perhubungan
02 09 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dalam Kondisi Baik	%	80	82	150.000.000	85	201.500.000	87	256.650.000	90	312.315.000	95	368.546.500	95	1.289.011.500	Dinas Perhubungan

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 09 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Kendaraan yang Telah Uji KIR	Unit	1039	1039	146.274.400	1100	162.962.632	1150	183.758.896	1150	215.134.784	1200	237.148.264	1200	945.278.976	Dinas Perhubungan
02 09 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Pelayanan Pada Fasilitas Perhubungan	%	N/A	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Perhubungan
02 09 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	LAKA	447	300	362.300.000	250	433.769.000	200	504.600.000	150	584.600.000	100	707.525.000	100	2.592.794.000	Dinas Perhubungan
02 09 20	Program Peningkatan Kelayakan pengoperasian kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Telah Uji KIR	Unit	1039	-	-	1100	605.008.500	1150	615.509.350	1150	627.060.285	1200	639.766.314	1200	2.487.344.449	Dinas Perhubungan
07 01 03	Tersedianya Jaringan Jalan yang Terhubung dengan Baik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,47	0,48	27.529.073.493	0,50	27.260.760.000	0,53	29.378.600.259	0,55	29.141.655.437	0,58	29.860.289.051	0,58	143.170.378.240	
01 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	km	290	298	22.936.073.493	307	23.960.760.000	316	25.522.800.259	326	25.519.529.437	336	25.993.964.731	336	123.933.127.920	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	km	290	298	2.500.000.000	307	2.540.000.000	316	2.580.800.000	326	2.422.416.000	336	2.664.864.320	336	12.708.080.320	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	Tahun	1	1	93.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	83.250.000	1	85.000.000	5	396.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	56	56	2.000.000.000	17	700.000.000	4	1.200.000.000	13	1.116.460.000	10	1.116.460.000	100	6.132.920.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
07 01 04	Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Talud/Turap/Bronjong yang Berfungsi dengan Baik	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase	%	24,57	30	5.000.000.000	35	3.020.000.000	40	3.080.400.000	46	3.142.008.000	51	3.204.848.160	51	17.447.256.160	
01 03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang seluruh drainase primer dalam kondisi baik	Meter	11408	2000	4.000.000.000	2200	2.000.000.000	2500	2.040.000.000	2750	2.080.800.000	3150	2.122.416.000	12600	12.243.216.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Pembangunan Turap Pada Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	1,99	1,99	1.000.000.000	1,99	1.020.000.000	2	1.040.400.000	2,2	1.061.208.000	2,2	1.082.432.160	2,2	5.204.040.160	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
07 01 05	Meningkatnya Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	51	500.000.000	52	500.000.000	53	500.000.000	54	500.000.000	55	600.000.000	55	2.600.000.000	
01 03 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rumah tangga bersanitasi	%	89,64	89,64	500.000.000	89,84	500.000.000	90,1	500.000.000	90,5	500.000.000	91	600.000.000	91	2.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
07 01 06	Menurunnya Titik Rawan Banjir	Persentase Luas Wilayah Kebanjiran	%	1,89	1,8	1.150.000.000	1,7	1.200.000.000	1,7	1.380.000.000	1,7	1.470.000.000	1,6	1.600.000.000	1,6	6.800.000.000	
01 03 28	Program Pengendalian Banjir	Luas Wilayah Kebanjiran	Ha	363	360	1.150.000.000	350	1.200.000.000	350	1.380.000.000	350	1.470.000.000	340	1.600.000.000	340	6.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
07 01 07	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,18	0,18	11.865.570.000	0,19	9.072.400.000	0,19	10.264.948.000	0,2	10.364.466.960	0,2	10.667.158.299	0,2	52.234.543.259	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 03 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,65	0,59	5.700.000.000	0,59	2.750.000.000	0,59	3.800.000.000	0,49	3.850.000.000	0,49	3.900.000.000	0,49	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 04 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,74	88,74	6.045.000.000	88,9	6.169.900.000	89,05	6.297.198.000	89,2	6.329.941.960	89,5	6.564.180.799	89,5	31.406.220.759	
04 03 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	89,64	89,64	120.570.000	89,84	152.500.000	90,1	167.750.000	90,5	184.525.000	91	202.977.500	91	828.322.500	
07 01 08	Meningkatnya Realisasi Fisik Pembangunan Infrastruktur	Tingkat realisasi fisik pembangunan infrastruktur daerah	%	N/A	90	558.910.000	91	620.050.000	92	681.770.000	93	725.730.000	94	847.000.000	94	3.433.460.000	
01 03 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perkotaan	%	100	100	185.075.000	100	230.000.000	100	280.000.000	100	310.000.000	100	415.000.000	100	1.420.075.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sekretariat Daerah
04 01 51	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	%	100	100	373.835.000	100	390.050.000	100	401.770.000	100	415.730.000	100	432.000.000	100	2.013.385.000	
08	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat					36.846.514.960		32.719.808.348		34.604.998.577		35.792.924.712		37.565.222.621		177.529.469.218	
08 01	Meningkatkan kepedulian, keberdayaan sosial, dan pendapatan per kapita masyarakat	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)	Rasio	N/A	0,34	36.846.514.960	0,33	32.719.808.348	0,32	34.604.998.577	0,31	35.792.924.712	0,30	37.565.222.621	0,30	177.529.469.218	
08 01 01	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perkebunan	Peranan Kategori Pertanian, Perternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	8,62	8,71	2.911.656.095	8,76	3.201.005.000	8,83	3.583.610.000	8,88	3.423.029.400	8,94	3.533.490.888	8,94	16.652.791.383	
02 03 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Sesuai Jenis tanaman	Padi/Ton	14710	14710	163.000.000	14810	317.890.000	15010	322.927.000	15300	378.115.000	15500	383.458.000	15500	1.565.390.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
			Jagung/Ton	4	4		6		8		10		12		12		
			Ubi kayu/ Ton	250	250		250		300		300		350		350		
03 03 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	%	96,26	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	104	115.000.000	104	120.000.000	104	550.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Nilai Tukar Petani	%	96,26	100	148.945.000	100	153.413.000	100	500.000.000	104	158.016.000	104	200.000.000	104	1.160.374.000	
03 03 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Padi	Ton	14710	14710	2.000.000.000	14810	2.106.000.000	15010	2.162.720.000	15300	2.220.174.400	15500	2.273.377.888	15500	10.762.272.288	
03 03 18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produktivitas Pertanian/Perkebunan	Ton/Ha	2,2	2,3	348.000.000	2,5	362.440.000	2,6	377.013.000	2,7	391.724.000	2,8	416.575.000	2,8	1.895.752.000	
03 03 19	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah Produksi Tanaman Padi	Ton	14710	14710	151.711.095	14810	156.262.000	15010	110.950.000	15300	160.000.000	15500	140.080.000	15500	719.003.095	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
08 01 02	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	Peranan Kategori Perikanan terhadap PDRB	%	3,32	3,39	4.475.293.625	3,45	4.635.399.498	3,5	4.998.471.487	3,55	5.369.940.917	3,6	5.537.039.736	3,6	25.016.145.263	
03 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5922	5922	200.000.000	5922	210.000.000	6000	220.000.000	6000	250.000.000	6200	259.000.000	6200	1.139.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5922	5922	1.010.293.625	5922	1.030.499.498	6000	1.051.109.487	6000	1.072.131.677	6200	1.093.574.311	6200	5.257.608.598	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5922	5922	2.905.000.000	5922	2.963.100.000	6000	3.022.362.000	6000	3.082.809.240	6200	3.144.465.425	6200	15.117.736.665	
03 01 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	N/A	90	360.000.000	90	431.800.000	91	705.000.000	91	965.000.000	92	1.040.000.000	92	3.501.800.000	
08 01 03	Meningkatnya Produksi Hewan Ternak	Peranan Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	8,62	8,71	2.076.654.850	8,76	1.513.105.000	8,83	1.523.123.000	8,88	1.568.990.000	8,94	1.614.694.000	8,94	8.296.566.850	
03 03 20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	Jumlah Ternak yang Telah Divaksinasi	Ekor	528	528	72.314.850	550	74.485.000	550	75.370.000	600	79.021.000	600	81.391.000	2828	382.581.850	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 21	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	7135	7135	1.684.000.000	7260	1.115.350.000	7500	1.149.495.000	8000	1.184.663.000	9000	1.220.888.000	38895	6.354.396.000	
		Jumlah Populasi Ternak Kecil	Ekor	8644	8644		8769		9000		10000		13000		49413		
		Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	798260	798260		800000		850000		900000		100000		3448260		Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging Ternak Besar	Kg	442437	442437	64.340.000	444437	66.270.000	444437	68.258.000	448500	70.306.000	448500	72.415.000	448500	341.589.000	
		Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil	Kg	58375	58375		60375		60375		64400		64400		64400		
		Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas	Kg	1444530	1444530		1644530		1644530		1850000		1850000		1850000		Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	7135	7135	256.000.000	7260	257.000.000	7500	230.000.000	8000	235.000.000	9000	240.000.000	38895	1.218.000.000	
		Jumlah Populasi Ternak Kecil	Ekor	8644	8644		8769		9000		10000		13000		49413		
		Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	798260	798260		800000		850000		900000		100000		3448260		
08 01 04	Jumlah Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (Milyar)	642	156	94.302.500	159	436.841.600	163	456.515.848	166	475.950.323	169	515.346.898	169	1.978.957.169	
02 12 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah SIUP Dan TDUP Yang Diterbitkan	SIUP dan TDUP	535	-	-	580	265.541.600	610	280.507.848	640	295.623.083	670	330.891.776	670	1.172.564.307	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah SIUP Dan TDUP Yang Diterbitkan	SIUP dan TDUP	535	-	-	580	42.200.000	610	43.745.000	640	45.336.350	670	46.975.441	670	178.256.791	
02 12 18	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan	Rata-Rata Lama Proses Perizinan	Hari	7	7	94.302.500	7	129.100.000	7	132.263.000	7	134.990.890	7	137.479.681	7	628.136.071	
08 01 05	Meningkatnya IKM, UKM dan Koperasi yang Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	60	65	3.582.050.000	67	2.489.050.000	69	2.553.050.000	71	2.599.050.000	75	2.648.050.000	75	13.871.250.000	
02 11 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	37	39	75.000.000	42	96.000.000	42	110.000.000	45	126.000.000	45	145.000.000	45	552.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
02 11 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	533.410.000	2.200	633.410.000	2.200	683.410.000	2.300	713.410.000	2.300	743.410.000	2.300	3.307.050.000	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	2.973.640.000	2.200	1.759.640.000	2.200	1.759.640.000	2.300	1.759.640.000	2.300	1.759.640.000	2.300	10.012.200.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
08 01 06	Berkembangnya Industri Kreatif dan Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Produk Unggulan UKM yang Kompetitif	Jenis	N/A	50	24.910.000	60	24.910.000	70	24.910.000	80	24.910.000	90	24.910.000	90	124.550.000	
02 11 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	24.910.000	2.200	24.910.000	2.200	24.910.000	2.300	24.910.000	2.300	24.910.000	2.300	124.550.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
08 01 07	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Kontribusi Katagori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	2,48	2,67	3.665.598.990	2,79	1.688.750.000	2,84	1.863.750.000	2,88	1.885.500.000	2,93	2.253.000.000	2,93	11.356.598.990	
03 02 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lamanya tamu menginap	Hari	2	2	665.598.990	3	688.750.000	3	713.750.000	3	735.500.000	3	753.000.000	3	3.556.598.990	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
03 02 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata lamanya tamu menginap	Hari	2	2	3.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.150.000.000	3	1.150.000.000	3	1.500.000.000	3	7.800.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
08 01 08	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Katagori Perdagangan terhadap PDRB	%	30,98	31	9.183.283.900	31	9.273.283.900	32	9.470.913.900	32	9.673.096.500	33	9.881.912.752	33	47.482.490.952	
03 04 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	%	100	100	101.500.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	126.000.000	100	135.000.000	100	597.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 04 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Kelancaran Aktivitas Perdagangan Dalam Daerah	%	100	100	4.581.783.900	100	4.568.283.900	100	4.669.113.900	100	4.771.660.500	100	4.875.968.032	100	23.466.810.232	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 04 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Tingkat Kelancaran Aktivitas Perdagangan Dalam Daerah	%	100	100	4.500.000.000	100	4.590.000.000	100	4.681.800.000	100	4.775.436.000	100	4.870.944.720	100	23.418.180.720	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
08 01 09	Menurunkan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk di Bawah Garis Miskin	%	10,3	10,5	8.929.850.000	9,8	7.445.700.000	9,55	7.919.560.000	9,3	8.392.197.200	9,3	8.934.397.144	9,3	41.621.704.344	
01 06 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	86	86	378.850.000	86	725.000.000	89	827.500.000	89	905.250.000	92	998.775.000	92	3.835.375.000	Dinas Sosial
01 06 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	21	21	150.000.000	23	175.000.000	27	180.000.000	30	210.000.000	34	250.000.000	34	965.000.000	Dinas Sosial
01 06 17	Progam Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar Yang Mendapatkan Pembinaan	%	N/A	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	315.000.000	Dinas Sosial
01 06 18	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma Yang Mendapat Bantuan	Orang	N/A	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	250	500.000.000	Dinas Sosial
01 06 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase Penghuni Panti yang terlayani	%	100	100	2.800.000.000	100	2.900.000.000	100	2.950.000.000	100	3.060.000.000	100	3.250.000.000	100	14.960.000.000	Dinas Sosial
01 06 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	500	500	300.550.000	500	353.605.000	500	520.000.000	500	545.000.000	500	642.500.000	500	2.361.655.000	Dinas Sosial

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 06 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peran Aktif Lembaga Sosial Masyarakat dalam Perlindungan Sosial	Kec	5	5	2.750.450.000	5	572.995.000	5	666.600.000	5	834.100.000	5	891.850.000	5	5.715.995.000	Dinas Sosial
04 01 46	Program Peningkatan Peran Serta Baitul Mal	Persentase Zakat, Infak dan Sadaqah yang disalurkan	%	N/A	90	2.400.000.000	90	2.564.100.000	90	2.615.460.000	95	2.667.847.200	95	2.721.272.144	95	12.968.679.344	Sekretariat Baitul Mal
08 01 10	Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja Lokal yang Siap Pakai dan Berdaya Saing serta Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja	Daya Serap Tenaga Kerja	%	21	25	85.235.000	29	513.362.050	33	542.762.912	37	562.445.799	41	582.419.173	41	2.286.224.934	
02 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	0,258175559	5	25.235.000	10	250.712.050	15	272.233.412	20	283.800.414	25	295.414.426	75	1.127.395.302	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,43	65	60.000.000	65,5	262.650.000	67	270.529.500	68	278.645.385	69	287.004.747	69	1.158.829.632	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
08 01 11	Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Gampong dalam Kegiatan Partisipatif Pembangunan Gampong	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gampong	Skala	N/A	N/A	1.817.680.000	Tinggi	1.498.401.300	Tinggi	1.668.331.430	Sangat Tinggi	1.817.814.573	Sangat Tinggi	2.039.962.030	Sangat Tinggi	8.842.189.333	
02 07 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	100	100	938.380.000	100	465.301.300	100	491.831.430	100	521.014.573	100	553.116.030	100	2.969.643.333	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMG Yang Aktif	Gampong	N/A	-	-	66	100.000.000	66	140.000.000	66	160.000.000	66	190.000.000	66	590.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Pertemuan Aparatur Gampong Dengan Masyarakat	Pertemuan	N/A	12	145.000.000	12	155.000.000	12	165.000.000	12	175.000.000	12	185.000.000	60	825.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Gampong Yang Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi	Gampong	N/A	66	165.000.000	66	180.000.000	66	195.000.000	66	210.000.000	66	230.000.000	66	980.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong Yang Baik	%	100	100	194.300.000	100	242.800.000	100	292.800.000	100	342.800.000	100	442.800.000	100	1.515.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	375.000.000	100	355.300.000	100	383.700.000	100	409.000.000	100	439.046.000	100	1.962.046.000	Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro
09	Mengembangkan olah raga, kesenian, dan kepemudaan.					8.810.679.400		8.331.456.975		9.001.569.013		8.962.016.282		10.695.236.566		45.800.958.236	
09 01	Memperkuat peran pemuda, olahraga, serta melestarikan adat budaya daerah sebagai perekat bangsa dan aset daerah	Jumlah Pemuda/OKP Berprestasi; Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi; Jumlah Festival Seni dan Budaya	Orang/OKP; Cabor; Event	N/A	20;28;2	8.810.679.400	25;28;2	8.331.456.975	30;28;2	9.001.569.013	35;28;2	8.962.016.282	40;28;2	10.695.236.566	150;28;10	45.800.958.236	
09 01 01	Terselenggaranya Pembinaan, Pelatihan Keterampilan, dan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan serta menjadikan Langsa sebagai Kota Layak Pemuda	Persentase Pembinaan Kelompok Kepemudaan;Kota Layak Pemuda	%;Sudah/ Belum	N/A	75;Belum	784.481.000	80;Belum	1.293.846.475	85;Belum	1.584.000.000	90;Sudah	1.480.000.000	95;Sudah	1.591.000.000	95;Sudah	6.733.327.475	



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 13 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	48	40	693.720.000	50	1.063.700.000	50	1.064.000.000	60	1.140.000.000	60	1.285.000.000	60	5.246.420.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah kelompok wirausaha pemuda yang aktif	Kelompok	N/A	6	67.132.500	7	170.146.475	8	455.000.000	9	270.000.000	10	231.000.000	10	1.193.278.975	
02 13 18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah pemuda yang terjerat kasus narkoba	Orang	N/A	6	23.628.500	5	60.000.000	5	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	293.628.500	
09 01 02	Terselenggaranya Pembinaan Olah Raga Berprestasi di Daerah dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Persentase Pembinaan Olahraga Daerah	%	N/A	75	2.721.500.000	80	3.041.000.000	85	3.321.000.000	90	3.262.000.000	95	3.299.000.000	95	15.644.500.000	
02 13 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	32	32	2.721.500.000	36	2.841.000.000	40	2.921.000.000	44	2.962.000.000	48	3.061.000.000	48	14.506.500.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah lapangan olahraga	Lapangan	307	-	-	317	200.000.000	327	400.000.000	337	300.000.000	347	238.000.000	347	1.138.000.000	
09 01 03	Terselenggaranya Pengelolaan dan Kesesuaian Pelaksanaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Daerah	Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Adat, Istiadat dan Budaya Daerah	Gampong	66	66	2.773.803.400	66	1.426.393.400	66	1.496.943.400	66	1.572.755.900	66	2.981.012.730	66	10.250.908.830	
04 01 47	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Adat Aceh	Peran serta anggota majelis dalam pengelolaan pemeliharaan dan pembinaan adat istiadat	%	N/A	85	120.010.000	85	157.600.000	90	176.400.000	90	192.700.000	95	211.000.000	95	857.710.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
02 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	100	100	1.173.793.400	100	673.793.400	100	673.793.400	100	673.793.400	100	803.965.743	100	3.999.139.343	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	2	2	1.480.000.000	1	595.000.000	1	646.750.000	1	706.262.500	2	1.966.046.987	7	5.394.059.487	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
09 01 04	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bersejarah	Peran serta masyarakat dalam Berbangsa, Toleransi Antarumat Beragama dan Kepekaan Sosial	Gampong	66	66	2.530.895.000	66	2.570.217.100	66	2.599.625.613	66	2.647.260.382	66	2.824.223.836	66	13.172.221.931	
04 01 49	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi PHBI/PHBN dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Lainnya	%	100	100	2.530.895.000	100	2.570.217.100	100	2.599.625.613	100	2.647.260.382	100	2.824.223.836	100	13.172.221.931	Sekretariat Daerah
10	Memelihara serta meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik					2.158.326.851		2.648.822.287		2.847.912.754		3.015.466.938		3.184.022.764		13.854.551.594	
10 01	Kerja sama dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memelihara stabilitas politik, keamanan, perdamaian dan ketertiban	Jumlah Unjuk Rasa/Demontrasi/Kerus uhan/Pemberontakan yang Berkaitan dengan Permasalahan Ideologi, Ekonomi, dan Sosial	Kegiatan	N/A	0	2.158.326.851	0	2.648.822.287	0	2.847.912.754	0	3.015.466.938	0	3.184.022.764	0	13.854.551.594	
10 01 01	Terselenggaranya Pembinaan dan Penyuluhan Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM	Jumlah Pemilih Pemilu/Pemilukada	Jiwa	108.380	108.380	258.511.321	110.385	266.266.661	110.385	306.206.660	110.385	352.137.660	112.371	404.958.308	112.371	1.588.080.610	
01 05 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA	%	73	73	258.511.321	75	266.266.661	80	306.206.660	85	352.137.660	90	404.958.308	90	1.588.080.610	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10 01 02	Menurunnya Jumlah Pelanggaran K3	Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	N/A	927	1.899.815.530	800	2.382.555.626	700	2.541.706.094	600	2.663.329.278	500	2.779.064.456	500	12.266.470.984	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
01 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	93	100	845.055.400	100	1.008.121.542	100	1.033.375.188	100	1.060.387.444	100	1.089.311.167	100	5.036.250.741	
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	%	30	31		32		33		34		35		35		
01 05 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat Penegakan Qanun Daerah	%	97	98	421.215.130	99	496.584.084	99	518.630.906	99	550.981.834	99	583.553.289	99	2.570.965.243	
01 05 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik sosial	Kasus	N/A	15	161.000.000	15	186.600.000	15	207.250.000	10	230.610.000	10	256.700.000	10	1.042.160.000	
01 05 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang tertangani	%	99	99	463.170.000	99	481.250.000	99	502.450.000	99	530.350.000	99	549.500.000	99	2.526.720.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	93	100	9.375.000	100	210.000.000	100	280.000.000	100	291.000.000	100	300.000.000	100	1.090.375.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
TOTAL						443.391.432.580		450.931.614.479		458.621.674.971		466.464.602.378		474.463.444.693		2.293.872.769.101	

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Arah kebijakan belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menitik beratkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Langsa.
2. Menjalankan program yang bersifat pelayanan publik untuk isu-isu dominan antara lain infrastruktur transportasi, pendidikan dan kesehatan.
3. Melakukan efisiensi belanja, melalui penghematan belanja yang tidak langsung dirasakan masyarakat.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja program pembangunan daerah dan organisasi perangkat daerah yang harus dicapai setiap tahun.
5. Memberikan bantuan keuangan untuk penguatan Pemerintahan Desa atau Gampong.

Peruntukan belanja daerah tahun 2018 sampai dengan 2022 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Proyeksi belanja pembangunan baik itu urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2018 sampai dengan 2022 diperkirakan kebutuhannya terus mengalami peningkatan.

Tabel 7.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2018-2022 Kota Langsa

NO	URAIAN					PROYEKSI				
						TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2					3	4	5	6	7
1.	Kapasitas Rill Keuangan Daerah					443.391.432.580	450.931.614.479	458.621.674.971	466.464.602.378	474.463.444.693
2.	Belanja Daerah					443.391.432.580	450.931.614.479	458.621.674.971	466.464.602.378	474.463.444.693
2.	1. Belanja Langsung					443.391.432.580	450.931.614.479	458.621.674.971	466.464.602.378	474.463.444.693
2.	1. 1. Belanja Pegawai					68.376.990.499	69.498.905.609	70.643.259.020	71.810.499.500	73.001.084.789
2.	1. 2. Belanja Barang dan Jasa					111.616.809.749	113.390.195.653	115.198.144.142	117.041.337.418	118.920.471.234
2.	1. 3. Belanja Modal					263.397.632.331	268.042.513.218	272.780.271.809	277.612.765.460	282.541.888.671
SURPLUS/(DEFISIT)						-	-	-	-	-

**TABEL 7.2.**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**KOTA LANGSA TAHUN 2018-2022**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					291.342.420.147		287.855.409.298		297.378.724.831		302.082.333.466		302.843.755.679		1.481.502.643.421	
01 01	BIDANG PENDIDIKAN					41.854.144.510		41.038.680.688		41.753.274.753		42.539.543.388		43.969.780.056		211.155.423.395	
01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.629.924.000	4	2.834.884.880	3	3.059.181.218	2	3.304.723.346	1	3.573.612.167	1	15.402.325.611	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	1.323.892.800	100	1.238.044.071	100	1.341.794.932	100	1.541.769.308	100	1.736.893.379	100	7.182.394.490	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	377.400.000	99	377.400.000	99	377.400.000	99	377.400.000	99	1.509.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	62	69.198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	62	69.198.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Anak Peserta PAUD	%	43	50	2.566.735.000	55	2.315.493.150	60	2.452.817.123	65	2.651.692.923	70	2.281.902.036	70	12.268.640.232	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,51	100	32.545.605.961	100	31.783.924.466	100	31.710.932.386	100	31.705.351.244	100	32.202.134.613	100	159.947.948.670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	67,55	70	53.600.000	80	61.640.000	90	70.886.000	100	81.518.900	100	93.746.735	100	361.391.635	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	%	100	100	743.235.100	100	735.207.743	100	874.373.914	100	874.373.914	100	1.202.546.169	100	4.429.736.840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	%	92,52	95	1.700.453.649	97	1.470.586.378	99	1.644.389.180	100	1.772.713.753	100	2.266.544.957	100	8.854.687.917	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Koordinasi Pelayanan Pendidikan	%	100	100	221.500.000	100	221.500.000	100	221.500.000	100	230.000.000	100	235.000.000	100	1.129.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 02	BIDANG KESEHATAN					153.314.641.993		156.950.145.627		159.921.782.675		162.703.434.010		165.361.522.377		798.251.526.682	
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.769.330.000	4	2.824.716.600	3	2.881.210.932	2	2.938.835.151	1	2.997.611.854	1	14.411.704.536	Dinas Kesehatan
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.539.600.000	4	2.564.996.000	3	2.590.645.960	2	2.616.552.420	1	2.642.717.944	1	12.954.512.323	RSUD
01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	743.550.000	100	758.421.000	100	773.589.420	100	789.061.208	100	804.842.433	100	3.869.464.061	Dinas Kesehatan
01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.000.000.000	RSUD
01 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	100	-	-	99	139.500.000	99	139.500.000	99	139.500.000	99	139.500.000	99	558.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	159.900.000	99	159.900.000	99	159.900.000	99	159.900.000	99	639.600.000	RSUD
01 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Buffer Stock Obat	%	30	30	2.000.000.000	30	2.040.000.000	30	2.080.800.000	30	2.122.416.000	30	2.164.864.320	30	10.408.080.320	Dinas Kesehatan
01 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Buffer Stock Obat	%	30	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	5.000.000.000	RSUD
01 02 16	Program Upaya Kesehatan Masvarakat	Cakupan Wilayah Kesehatan Masyarakat	Kec	5	5	1.134.560.000	5	1.107.251.200	5	1.130.396.224	5	1.154.004.148	5	1.178.084.231	5	5.704.295.804	Dinas Kesehatan
01 02 17	Program Pengawasan obat dan makanan	Jumlah industri rumah tangga yang memiliki sertifikat pangan	Home Industri	N/A	20	22.000.000	20	122.000.000	20	124.200.000	20	126.620.000	20	129.282.000	100	524.102.000	Dinas Kesehatan
01 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah instrumen dan media promosi kesehatan	Instrumen/Media	N/A	2	1.367.280.000	2	912.677.000	2	963.944.700	3	1.020.339.170	3	1.082.373.087	3	5.346.613.957	Dinas Kesehatan
01 02 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,0002	0,0002	533.815.000	0,0002	260.812.200	0,0002	286.893.420	0,0002	315.582.762	0,0002	347.140.798	0,0002	1.744.244.180	Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 02 21	Pengembangan lingkungan sehat	Persentase Keluarga Yang Menggunakan Kualitas Air Bersih	%	N/A	-	-	70,68	319.186.176	71	351.104.794	71,3	406.439.653	71,6	447.083.619	71,6	1.523.814.242	Dinas Kesehatan
01 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	12,59	12,1	578.546.000	11,8	655.455.000	11,6	708.065.750	11,3	765.790.838	11	829.134.359	11	3.536.991.947	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan	
Cakupan Desa yang melaksanakan UCI		%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan	
Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi		Puskesmas	5	5	94.860.000	5	99.603.000	5	104.583.150	5	109.812.308	5	115.302.923	5	524.161.380	Dinas Kesehatan	
01 02 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	%	0,03	0,03	8.014.800.000	0,03	8.433.176.000	0,03	8.680.476.000	0,03	8.782.506.000	0,03	8.696.534.000	0,03	42.607.492.000	Dinas Kesehatan
01 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan	Unit	N/A	11	25.839.000.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	59	138.555.400.000	RSUD
01 02 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Akses Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	%	N/A	100	14.221.399.993	100	14.509.163.593	100	14.803.016.025	100	15.103.112.421	100	15.409.614.353	100	74.046.306.385	Dinas Kesehatan
01 02 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi	Bayi	8	7	150.186.000	7	208.544.600	6	229.399.060	6	252.338.966	5	277.572.863	5	1.118.041.489	Dinas Kesehatan
01 02 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia	%	98	98	125.000.000	98	218.200.000	98	388.819.657	98	422.701.623	98	465.771.785	98	1.620.493.065	Dinas Kesehatan
01 02 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	83,74	83,74	180.715.000	84	637.443.258	84,3	710.137.584	84,6	790.101.342	84,9	876.197.408	85,2	3.194.594.592	Dinas Kesehatan
01 02 33	Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Akses Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSU	Orang	N/A	5000	90.000.000.000	6000	91.800.000.000	7000	93.636.000.000	8000	95.508.720.000	9000	97.418.894.400	9000	468.363.614.400	RSUD
01 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					67.169.743.493		61.427.913.570		65.995.588.417		65.985.994.012		61.235.088.857		321.814.328.350	
01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.504.345.000	4	1.534.431.900	3	1.565.120.538	2	1.596.422.949	1	1.628.351.408	1	7.828.671.794	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	14.663.535.000	100	14.547.491.670	100	15.450.469.320	100	15.283.669.344	100	8.867.116.293	100	68.812.281.627	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	23.400.000	99	23.400.000	99	23.400.000	99	23.400.000	99	93.600.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen rencana capaian kinerja	Dokumen	-	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	km	290	298	22.936.073.493	307	23.960.760.000	316	25.522.800.259	326	25.519.529.437	336	25.993.964.731	336	123.933.127.920	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang seluruh drainase primer dalam kondisi baik	Meter	11408	2000	4.000.000.000	2200	2.000.000.000	2500	2.040.000.000	2750	2.080.800.000	3150	2.122.416.000	12600	12.243.216.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Pembangunan Turap Pada Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	1,99	1,99	1.000.000.000	1,99	1.020.000.000	2	1.040.400.000	2,2	1.061.208.000	2,2	1.082.432.160	2,2	5.204.040.160	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	km	290	298	2.500.000.000	307	2.540.000.000	316	2.580.800.000	326	2.422.416.000	336	2.664.864.320	336	12.708.080.320	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 03 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	Tahun	1	1	93.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	83.250.000	1	85.000.000	5	396.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	56	56	2.000.000.000	17	700.000.000	4	1.200.000.000	13	1.116.460.000	10	1.116.460.000	100	6.132.920.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	31.554	31.708	9.083.000.000	32.862	9.306.830.000	34.124	9.432.598.300	35.486	9.539.338.283	36.948	9.690.083.946	36.948	47.051.850.529	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rumah tangga bersanitasi	%	89,64	89,64	500.000.000	89,84	500.000.000	90,1	500.000.000	90,5	500.000.000	91	600.000.000	91	2.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 28	Program Pengendalian Banjir	Luas Wilayah Kebanjiran	Ha	363	360	1.150.000.000	350	1.200.000.000	350	1.380.000.000	350	1.470.000.000	340	1.600.000.000	340	6.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perkotaan	%	100	100	185.075.000	100	230.000.000	100	280.000.000	100	310.000.000	100	415.000.000	100	1.420.075.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,65	0,59	5.700.000.000	0,59	2.750.000.000	0,59	3.800.000.000	0,49	3.850.000.000	0,49	3.900.000.000	0,49	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 34	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	1.272.215.000	75	800.000.000	75,4	840.000.000	75,7	850.000.000	76,1	1.130.000.000	76,1	4.892.215.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 35	Program Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	400.000.000	75	85.000.000	75,4	85.000.000	75,7	94.500.000	76,1	115.000.000	76,1	779.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	157.500.000	75	170.000.000	75,4	180.000.000	75,7	185.000.000	76,1	201.000.000	76,1	893.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 04	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.960.217.300		11.307.391.646		11.625.664.479		11.843.073.768		12.270.160.044		58.006.507.237	
01 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	3.751.217.300	4	3.826.241.646	3	3.902.766.479	2	3.980.821.808	1	4.060.438.245	1	19.521.485.478	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	675.000.000	100	736.000.000	100	797.100.000	100	862.810.000	100	936.691.000	100	4.007.601.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	145.000.000	99	163.000.000	99	175.000.000	99	186.000.000	99	196.500.000	99	865.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,74	88,74	6.045.000.000	88,9	6.169.900.000	89,05	6.297.198.000	89,2	6.329.941.960	89,5	6.564.180.799	89,5	31.406.220.759	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 04 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah bencana kebakaran	Jumlah	7	7	344.000.000	6	412.250.000	5	453.600.000	4	483.500.000	3	512.350.000	3	2.205.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.061.232.851		10.700.349.967		11.119.663.352		11.514.822.828		11.921.078.369		55.317.147.367	
01 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	6.524.930.000	4	6.655.428.600	3	6.788.537.172	2	6.924.307.915	1	7.062.794.074	1	33.955.997.761	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	550.660.000	4	561.673.200	3	572.906.664	2	584.364.797	1	596.052.093	1	2.865.656.755	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	302.770.000	100	320.080.000	100	353.388.000	100	387.636.800	100	433.750.480	100	1.797.625.280	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	304.296.000	100	320.095.880	100	344.118.762	100	370.446.377	100	393.598.958	100	1.732.555.977	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	100.000.000	99	121.400.000	99	132.400.000	99	144.500.000	99	157.810.000	99	656.110.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	7.800.000	99	7.800.000	99	7.800.000	99	7.800.000	99	31.200.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	90	59.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90	59.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
01 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	93	100	845.055.400	100	1.008.121.542	100	1.033.375.188	100	1.060.387.444	100	1.089.311.167	100	5.036.250.741	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
01 05 16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat Penegakan Qanun Daerah	%	97	98	421.215.130	99	496.584.084	99	518.630.906	99	550.981.834	99	583.553.289	80	2.570.965.243	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
01 05 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik sosial	Kasus	N/A	15	161.000.000	15	186.600.000	15	207.250.000	10	230.610.000	10	256.700.000	10	1.042.160.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang tertangani	%	99	99	463.170.000	99	481.250.000	99	502.450.000	99	530.350.000	99	549.500.000	99	2.526.720.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	93	100	9.375.000	100	210.000.000	100	280.000.000	100	291.000.000	100	300.000.000	100	1.090.375.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
01 05 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA	%	73	73	258.511.321	75	266.266.661	80	306.206.660	85	352.137.660	90	404.958.308	90	1.588.080.610	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Gampong	N/A	66	60.500.000	66	65.050.000	66	72.600.000	66	80.300.000	66	85.250.000	66	363.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 06	BIDANG SOSIAL					7.982.440.000		6.430.927.800		6.962.751.156		7.495.465.459		8.086.125.976		36.957.710.391	
01 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.036.390.000	4	1.057.117.800	3	1.078.260.156	2	1.099.825.359	1	1.121.821.866	1	5.393.415.181	Dinas Sosial
01 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	416.200.000	100	483.810.000	100	571.991.000	100	662.890.100	100	742.779.110	100	2.877.670.210	Dinas Sosial
01 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	8.400.000	99	8.400.000	99	8.400.000	99	8.400.000	99	33.600.000	Dinas Sosial
01 06 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	86	86	378.850.000	86	725.000.000	89	827.500.000	89	905.250.000	92	998.775.000	92	3.835.375.000	Dinas Sosial
01 06 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	21	21	150.000.000	23	175.000.000	27	180.000.000	30	210.000.000	34	250.000.000	34	965.000.000	Dinas Sosial
01 06 17	Progam Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar Yang Mendapatkan Pembinaan	%	N/A	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	315.000.000	Dinas Sosial
01 06 18	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma Yang Mendapat Bantuan	Orang	N/A	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	250	500.000.000	Dinas Sosial
01 06 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase Penghuni Panti yang terlayani	%	100	100	2.800.000.000	100	2.900.000.000	100	2.950.000.000	100	3.060.000.000	100	3.250.000.000	100	14.960.000.000	Dinas Sosial
01 06 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	500	500	300.550.000	500	353.605.000	500	520.000.000	500	545.000.000	500	642.500.000	500	2.361.655.000	Dinas Sosial
01 06 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peran Aktif Lembaga Sosial Masyarakat dalam Perlindungan Sosial	Kec	5	5	2.750.450.000	5	572.995.000	5	666.600.000	5	834.100.000	5	891.850.000	5	5.715.995.000	Dinas Sosial
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					47.764.233.067		56.882.850.858		55.992.725.825		56.345.217.035		59.864.069.143		276.849.095.927	
02 01	BIDANG TENAGA KERJA					85.235.000		513.362.050		542.762.912		562.445.799		582.419.173		2.286.224.934	
02 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	0,258175559	5	25.235.000	10	250.712.050	15	272.233.412	20	283.800.414	25	295.414.426	75	1.127.395.302	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,43	65	60.000.000	65,5	262.650.000	67	270.529.500	68	278.645.385	69	287.004.747	69	1.158.829.632	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 02	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.849.760.000		2.668.901.990		2.819.040.986		3.010.026.817		3.218.312.291		13.566.042.084	
02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	679.240.000	4	692.824.800	3	706.681.296	2	720.814.922	1	735.231.220	1	3.534.792.238	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	248.350.000	100	273.185.000	100	300.503.500	100	330.553.850	100	363.609.235	100	1.516.201.585	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	7.500.000	99	7.500.000	99	7.500.000	99	7.500.000	99	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	80	80	276.610.000	80	513.160.500	80	550.613.550	80	599.987.405	80	649.130.396	80	2.589.501.851	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Wanita	Kasus	N/A	8	170.072.000	7	585.000.000	6	620.000.000	5	680.000.000	4	750.000.000	4	2.805.072.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Wanita	Kasus	N/A	8	172.663.500	7	266.562.455	6	272.593.405	5	276.593.405	4	281.593.405	4	1.270.006.170	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	80	80	302.824.500	80	330.669.235	80	361.149.235	80	394.577.235	80	431.248.035	80	1.820.468.240	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 03	BIDANG PANGAN					163.000.000		317.890.000		322.927.000		378.115.000		383.458.000		1.565.390.000	
02 03 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Sesuai jenis tanaman	Padi/Ton	14.710	14.710	163.000.000	14.810	317.890.000	15.010	322.927.000	15.300	378.115.000	15.500	383.458.000	15.500	1.565.390.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
02 04	BIDANG PERTANAHAN					-		1.755.920.000		1.843.716.000		1.935.901.800		2.032.696.890		7.568.234.690	
02 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	-	-	4	302.570.000	3	317.698.500	2	333.583.425	1	350.262.596	1	1.304.114.521	Dinas Pertanahan
02 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	N/A	-	-	100	170.400.000	100	178.920.000	100	187.866.000	100	197.259.300	100	734.445.300	Dinas Pertanahan
02 04 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	3.000.000	99	3.000.000	99	3.000.000	99	3.000.000	99	12.000.000	Dinas Pertanahan
02 04 15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	58,20	-	-	61	63.575.000	63	66.903.750	65	70.398.938	67	74.068.884	67	274.946.572	Dinas Pertanahan
02 04 16	Program penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	58,20	-	-	61	1.161.750.000	63	1.219.837.500	65	1.280.829.375	67	1.344.870.844	67	5.007.287.719	Dinas Pertanahan
02 04 17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	N/A	-	-	100	54.625.000	100	57.356.250	100	60.224.063	100	63.235.266	100	235.440.578	Dinas Pertanahan
02 05	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					24.179.562.729		24.377.140.552		25.875.332.917		25.202.121.975		25.681.522.294		125.315.680.466	
02 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	12.055.245.979	4	12.296.350.899	3	12.542.277.917	2	12.793.123.475	1	13.048.985.944	1	62.735.984.213	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	1.050.220.000	100	1.073.570.000	100	1.098.155.000	100	1.124.098.500	100	1.162.536.350	100	5.508.579.850	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	35.400.000	99	35.400.000	99	35.400.000	99	35.400.000	99	141.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	%	28,08	28,08	1.620.000.000	29,1	1.854.900.000	29,5	1.884.900.000	29,85	1.924.900.000	30,2	2.000.000.000	30,2	9.284.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	154.096.750	Ada	572.319.653	Ada	700.000.000	Ada	710.000.000	Ada	770.000.000	Ada	2.906.416.403	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 05 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas wilayah budidaya	Ha	19.184	-	-	19.184	50.000.000	19.184	50.000.000	19.184	50.000.000	19.184	50.000.000	19.184	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	-	Ada	50.000.000	Ada	100.000.000	Ada	100.000.000	Ada	100.000.000	Ada	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau(RTH)	%	15,46	15,46	9.300.000.000	16	8.444.600.000	16,4	9.464.600.000	16,8	8.464.600.000	17,2	8.514.600.000	17,2	44.188.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 06	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL					1.664.731.500		922.889.000		979.793.980		1.037.083.780		1.116.178.767		5.720.677.027	
02 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.069.055.000	4	569.128.000	3	581.393.980	2	594.683.780	1	608.378.767	1	3.422.639.527	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	355.676.500	100	153.761.000	100	183.400.000	100	187.400.000	100	194.400.000	100	1.074.637.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 06 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	10.500.000	99	10.500.000	99	10.500.000	99	10.500.000	99	42.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 06 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP	%	70	75	240.000.000	85	189.500.000	90	204.500.000	95	244.500.000	100	302.900.000	100	1.181.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					2.780.151.000		2.283.810.720		2.462.224.488		2.624.419.615		2.852.708.502		13.003.314.325	
02 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	761.171.000	4	776.394.420	3	791.922.308	2	807.760.755	1	823.915.970	1	3.961.164.453	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	576.300.000	100	357.115.000	100	378.470.750	100	400.644.288	100	420.676.502	100	2.133.206.539	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	7.200.000	99	7.200.000	99	7.200.000	99	7.200.000	99	28.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	100	100	938.380.000	100	465.301.300	100	491.831.430	100	521.014.573	100	553.116.030	100	2.969.643.333	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMG Yang Aktif	Gampong	N/A	-	-	66	100.000.000	66	140.000.000	66	160.000.000	66	190.000.000	66	590.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Pertemuan Aparatur Gampong Dengan Masvarakat	Pertemuan	N/A	12	145.000.000	12	155.000.000	12	165.000.000	12	175.000.000	12	185.000.000	60	825.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Gampong Yang Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi	Gampong	N/A	66	165.000.000	66	180.000.000	66	195.000.000	66	210.000.000	66	230.000.000	66	980.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong Yang Baik	%	100	100	194.300.000	100	242.800.000	100	292.800.000	100	342.800.000	100	442.800.000	100	1.515.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 08	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.302.138.580		1.264.205.700		1.309.637.671		1.355.494.717		1.406.785.833		7.638.262.501	
02 08 15	Program Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru	PUS	N/A	500	2.248.948.580	500	1.209.420.000	500	1.253.208.400	500	1.297.372.568	500	1.346.920.019	2500	7.355.869.567	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 08 18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah peserta KB baru	PUS	N/A	500	53.190.000	500	54.785.700	500	56.429.271	500	58.122.149	500	59.865.814	2500	282.392.934	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 09	BIDANG PERHUBUNGAN					2.775.759.400		4.672.756.282		5.546.274.651		5.961.577.328		6.435.731.779		25.392.099.440	
02 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.571.140.000	4	1.602.562.800	3	1.762.647.720	2	1.938.737.705	1	2.132.433.192	1	9.007.521.417	Dinas Perhubungan
02 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	502.000.000	100	516.187.000	100	567.805.700	100	623.436.270	100	684.529.897	100	2.893.958.867	Dinas Perhubungan
02 09 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	5.400.000	99	5.400.000	99	5.400.000	99	5.400.000	99	21.600.000	Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 09 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pelayanan Pada Fasilitas Perhubungan	%	100	100	44.045.000	100	1.045.366.350	100	1.549.902.985	100	1.554.893.284	100	1.560.382.612	100	5.754.590.231	Dinas Perhubungan
02 09 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dalam Kondisi Baik	%	80	82	150.000.000	85	201.500.000	87	256.650.000	90	312.315.000	95	368.546.500	95	1.289.011.500	Dinas Perhubungan
02 09 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Kendaraan yang Telah Uji KIR	Unit	1.039	1.039	146.274.400	1.100	162.962.632	1.150	183.758.896	1.150	215.134.784	1.200	237.148.264	1.200	945.278.976	Dinas Perhubungan
02 09 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Pelayanan Pada Fasilitas Perhubungan	%	N/A	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Perhubungan
02 09 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	LAKA	447	300	362.300.000	250	433.769.000	200	504.600.000	150	584.600.000	100	707.525.000	100	2.592.794.000	Dinas Perhubungan
02 09 20	Program Peningkatan Kelayakan pengoperasian kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Telah Uji KIR	Unit	1.039	-	-	1.100	605.008.500	1.150	615.509.350	1.150	627.060.285	1.200	639.766.314	1.200	2.487.344.449	Dinas Perhubungan
02 10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.902.999.250		7.022.133.192		3.268.882.083		3.142.541.054		3.217.271.684		18.553.827.263	
02 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	878.520.000	4	896.090.400	3	914.012.208	2	932.292.452	1	950.938.301	1	4.571.853.361	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	261.900.000	100	281.090.000	100	315.699.000	100	350.768.900	100	376.345.790	100	1.585.803.690	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	8.100.000	99	8.100.000	99	8.100.000	99	8.100.000	99	32.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Akses Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	%	N/A	100	674.649.600	100	5.565.084.352	100	1.750.906.382	100	1.562.567.274	100	1.584.167.792	100	11.137.375.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparatur bidang komunikasi informasi yang mendapatkan pelatihan	Orang	N/A	25	47.959.650	25	49.398.440	25	50.880.393	25	52.406.805	25	53.979.009	125	254.624.297	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah berita yang dipublikasikan di media massa	Jumlah	N/A	10	39.970.000	10	222.370.000	10	229.284.100	10	236.405.623	10	243.740.792	50	971.770.515	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 11	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					633.320.000		754.320.000		818.320.000		864.320.000		913.320.000		3.983.600.000	
02 11 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	533.410.000	2.200	633.410.000	2.200	683.410.000	2.300	713.410.000	2.300	743.410.000	2.300	3.307.050.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
02 11 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	24.910.000	2.200	24.910.000	2.200	24.910.000	2.300	24.910.000	2.300	24.910.000	2.300	124.550.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
02 11 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	37	39	75.000.000	42	96.000.000	42	110.000.000	45	126.000.000	45	145.000.000	45	552.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
02 12	BIDANG PENANAMAN MODAL					846.965.500		2.263.275.400		1.427.632.324		1.500.493.129		1.612.564.560		7.650.930.912	
02 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	597.190.000	4	609.133.800	3	621.316.476	2	633.742.806	1	646.417.662	1	3.107.800.743	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	155.473.000	100	1.158.000.000	100	290.500.000	100	331.500.000	100	391.500.000	100	2.326.973.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	59.300.000	99	59.300.000	99	59.300.000	99	59.300.000	99	237.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah SIUP Dan TDUP Yang Diterbitkan	SIUP dan TDUP	535	-	-	580	265.541.600	610	280.507.848	640	295.623.083	670	330.891.776	670	1.172.564.307	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah SIUP Dan TDUP Yang Diterbitkan	SIUP dan TDUP	535	-	-	580	42.200.000	610	43.745.000	640	45.336.350	670	46.975.441	670	178.256.791	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 18	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan	Rata-Rata Lama Proses Perizinan	Hari	7	7	94.302.500	7	129.100.000	7	132.263.000	7	134.990.890	7	137.479.681	7	628.136.071	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 13	BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA					4.426.245.000		5.286.831.755		5.882.548.986		5.746.394.365		5.922.624.093		27.264.644.199	
02 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	781.064.000	4	796.685.280	3	812.618.986	2	828.871.365	1	845.448.793	1	4.064.688.424	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	139.200.000	100	146.300.000	100	155.930.000	100	166.523.000	100	178.175.300	100	786.128.300	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	36.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	48	40	693.720.000	50	1.063.700.000	50	1.064.000.000	60	1.140.000.000	60	1.285.000.000	60	5.246.420.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah kelompok wirausaha pemuda yang aktif	Kelompok	N/A	6	67.132.500	7	170.146.475	8	455.000.000	9	270.000.000	10	231.000.000	10	1.193.278.975	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah pemuda yang terjerat kasus narkoba	Orang	N/A	6	23.628.500	5	60.000.000	5	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	293.628.500	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 20	Program Pembinaan dan Pemasvarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	32	32	2.721.500.000	36	2.841.000.000	40	2.921.000.000	44	2.962.000.000	48	3.061.000.000	48	14.506.500.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah lapangan olahraga	Lapangan	307	-	-	317	200.000.000	327	400.000.000	337	300.000.000	347	238.000.000	347	1.138.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 14	BIDANG STATISTIK					75.300.000		77.559.000		79.885.770		82.282.343		84.750.813		399.777.926	
02 14 15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Dokumen Statistik Daerah Yang Dapat Diakses	%	100	100	75.300.000	100	77.559.000	100	79.885.770	100	82.282.343	100	84.750.813	100	399.777.926	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 15	BIDANG PERSANDIAN					84.300.000		86.829.000		89.433.870		92.116.886		94.880.393		447.560.149	
02 15 15	Program penyelenggaraan komunikasi persandian	Jumlah Kegiatan Persandian	Keg	1	1	84.300.000	1	86.829.000	1	89.433.870	1	92.116.886	1	94.880.393	5	447.560.149	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 16	BIDANG KEBUDAYAAN					2.653.793.400		1.268.793.400		1.320.543.400		1.380.055.900		2.770.012.730		9.393.198.830	
02 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	100	100	1.173.793.400	100	673.793.400	100	673.793.400	100	673.793.400	100	803.965.743	100	3.999.139.343	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	2	2	1.480.000.000	1	595.000.000	1	646.750.000	1	706.262.500	2	1.966.046.987	7	5.394.059.487	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 17	BIDANG PERPUSTAKAAN					991.534.920		1.085.055.487		1.126.096.299		1.172.623.864		1.221.812.597		5.597.123.167	
02 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	622.385.000	4	634.832.700	3	647.529.354	2	660.479.941	1	673.689.540	1	3.238.916.535	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	170.649.000	100	192.963.900	100	212.947.790	100	237.659.694	100	265.164.302	100	1.079.384.686	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 17 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	6.600.000	99	6.600.000	99	6.600.000	99	6.600.000	99	26.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	180	250.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 17 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat capaian pelaksanaan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	%	N/A	100	148.500.920	100	200.658.887	100	209.019.155	100	217.884.229	100	226.358.755	100	1.002.421.946	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 18	BIDANG KEARSIPAN					349.436.788		261.177.330		277.672.488		297.202.664		317.018.744		1.502.508.014	
02 18 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase pemeliharaan arsip dan dokumen perpustakaan	%	80	85	124.257.000	85	136.484.710	90	148.779.251	90	161.142.629	95	173.576.908	95	744.240.498	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 18 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pemeliharaan arsip dan dokumen perpustakaan	%	80	85	225.179.788	85	124.692.620	90	128.893.237	90	136.060.035	95	143.441.836	95	758.267.516	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
03	URUSAN PILIHAN					27.701.322.460		24.480.355.898		25.722.589.097		26.274.334.837		27.312.176.228		131.490.778.520	
03 01	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.475.293.625		4.635.399.498		4.998.471.487		5.369.940.917		5.537.039.736		25.016.145.263	
03 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5922	5922	200.000.000	5922	210.000.000	6000	220.000.000	6000	250.000.000	6200	259.000.000	6200	1.139.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5922	5922	1.010.293.625	5922	1.030.499.498	6000	1.051.109.487	6000	1.072.131.677	6200	1.093.574.311	6200	5.257.608.598	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5922	5922	2.905.000.000	5922	2.963.100.000	6000	3.022.362.000	6000	3.082.809.240	6200	3.144.465.425	6200	15.117.736.665	
03 01 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	N/A	90	360.000.000	90	431.800.000	91	705.000.000	91	965.000.000	92	1.040.000.000	92	3.501.800.000	
03 02	BIDANG PARIWISATA					3.665.598.990		1.688.750.000		1.863.750.000		1.885.500.000		2.253.000.000		11.356.598.990	
03 02 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lamanya tamu menginap	Hari	2	2	665.598.990	3	688.750.000	3	713.750.000	3	735.500.000	3	753.000.000	3	3.556.598.990	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
03 02 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata lamanya tamu menginap	Hari	2	2	3.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.150.000.000	3	1.150.000.000	3	1.500.000.000	3	7.800.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
03 03	BIDANG PERTANIAN					6.593.505.945		6.266.872.500		6.740.244.510		6.646.522.736		6.893.804.853		33.140.950.544	
03 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.329.525.000	4	1.356.115.500	3	1.383.237.810	2	1.410.902.566	1	1.439.120.618	1	6.918.901.494	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	438.670.000	100	491.737.000	100	550.400.700	100	598.915.770	100	667.157.347	100	2.746.880.817	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	22.800.000	99	22.800.000	99	22.800.000	99	22.800.000	99	91.200.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	%	96,26	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	104	115.000.000	104	120.000.000	104	550.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Nilai Tukar Petani	%	96,26	100	148.945.000	100	153.413.000	100	500.000.000	104	158.016.000	104	200.000.000	104	1.160.374.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Padi	Ton	14.710	14.710	2.000.000.000	14.810	2.106.000.000	15.010	2.162.720.000	15.300	2.220.174.400	15.500	2.273.377.888	15.500	10.762.272.288	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produktivitas Pertanian/Perkebunan	Ton/Ha	2,2	2,3	348.000.000	2,5	362.440.000	2,6	377.013.000	2,7	391.724.000	2,8	416.575.000	2,8	1.895.752.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 19	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah Produksi Tanaman Padi	Ton	14.710	14.710	151.711.095	14.810	156.262.000	15.010	110.950.000	15.300	160.000.000	15.500	140.080.000	15.500	719.003.095	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	Jumlah Ternak yang Telah Divaksinasi	Ekor	528	528	72.314.850	550	74.485.000	550	75.370.000	600	79.021.000	600	81.391.000	2828	382.581.850	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 21	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	7.135	7.135	1.684.000.000	7.260	1.115.350.000	7.500	1.149.495.000	8.000	1.184.663.000	9.000	1.220.888.000	38.895	6.354.396.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging Ternak Besar	Kg	442.437	442.437	64.340.000	444.437	66.270.000	444.437	68.258.000	448.500	70.306.000	448.500	72.415.000	448.500	341.589.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	7.135	7.135	256.000.000	7.260	257.000.000	7.500	230.000.000	8.000	235.000.000	9.000	240.000.000	38.895	1.218.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 04	BIDANG PERDAGANGAN					9.183.283.900		9.273.283.900		9.470.913.900		9.673.096.500		9.881.912.752		47.482.490.952	
03 04 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	%	100	100	101.500.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	126.000.000	100	135.000.000	100	597.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 04 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Kelancaran Aktivitas Perdagangan Dalam Daerah	%	100	100	4.581.783.900	100	4.568.283.900	100	4.669.113.900	100	4.771.660.500	100	4.875.968.032	100	23.466.810.232	
03 04 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Tingkat Kelancaran Aktivitas Perdagangan Dalam Daerah	%	100	100	4.500.000.000	100	4.590.000.000	100	4.681.800.000	100	4.775.436.000	100	4.870.944.720	100	23.418.180.720	
03 07	BIDANG PERINDUSTRIAN					3.783.640.000		2.616.050.000		2.649.209.200		2.699.274.684		2.746.418.888		14.494.592.772	
03 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	557.375.000	4	568.522.500	3	579.892.950	2	591.490.809	1	603.320.625	1	2.900.601.884	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	252.625.000	100	277.987.500	100	299.776.250	100	338.243.875	100	373.558.263	100	1.542.190.888	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 07 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.900.000	99	9.900.000	99	9.900.000	99	9.900.000	99	39.600.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	2.973.640.000	2.200	1.759.640.000	2.200	1.759.640.000	2.300	1.759.640.000	2.300	1.759.640.000	2.300	10.012.200.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					76.583.456.906		81.712.998.426		79.527.635.218		81.762.717.039		84.443.443.644		404.030.251.233	
04 01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					53.823.664.245		54.565.002.505		55.825.265.508		57.146.453.755		58.815.689.455		280.176.075.467	
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	6.536.130.000	4	6.585.107.000	3	6.789.310.740	2	6.925.096.955	1	7.063.598.894	1	33.899.243.589	Sekretariat DPR
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	8.776.563.000	4	8.952.094.260	3	9.131.136.145	2	9.313.758.868	1	9.500.034.045	1	45.673.586.319	Sekretariat Daerah
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	695.163.000	4	709.066.260	3	723.247.585	2	737.712.537	1	752.466.788	1	3.617.656.170	Kecamatan Langsa Kota
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	586.261.000	4	597.986.220	3	609.945.944	2	622.144.863	1	634.587.761	1	3.050.925.788	Kecamatan Langsa Barat
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	599.542.000	4	611.532.840	3	623.763.497	2	636.238.767	1	648.963.542	1	3.120.040.646	Kecamatan Langsa Timur
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	540.207.000	4	551.011.140	3	562.031.363	2	573.271.990	1	584.737.430	1	2.811.258.923	Kecamatan Langsa Lama
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	556.792.000	4	567.927.840	3	579.286.397	2	590.872.125	1	602.689.567	1	2.897.567.929	Kecamatan Langsa Baro
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	528.175.000	4	538.738.500	3	549.513.270	2	560.503.535	1	571.713.606	1	2.748.643.912	Sekretariat Baitul Mal
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	264.986.000	4	270.285.720	3	275.691.434	2	281.205.263	1	286.829.368	1	1.378.997.786	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.295.480.000	4	2.341.389.600	3	2.388.217.392	2	2.435.981.740	1	2.484.701.375	1	11.945.770.106	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	368.510.000	4	375.880.200	3	383.397.804	2	391.065.760	1	398.887.075	1	1.917.740.839	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	387.320.000	4	395.066.400	3	402.967.728	2	411.027.083	1	419.247.624	1	2.015.628.835	Sekretariat Majelis Adat Aceh
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	2.039.819.500	100	1.257.810.300	100	1.369.491.330	100	1.479.040.463	100	1.592.144.509	100	7.738.306.102	Sekretariat DPR
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	3.034.280.000	100	3.194.650.000	100	3.275.250.000	100	3.345.900.000	100	3.417.670.000	100	16.267.750.000	Sekretariat Daerah
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	94.200.000	100	100.620.000	100	108.232.000	100	118.057.000	100	129.742.700	100	550.851.700	Kecamatan Langsa Kota
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	95.100.000	100	101.583.000	100	110.182.150	100	118.247.000	100	127.821.250	100	552.933.400	Kecamatan Langsa Barat
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	92.800.000	100	102.980.000	100	113.328.000	100	123.163.000	100	134.728.000	100	566.999.000	Kecamatan Langsa Timur
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	95.200.000	100	104.620.000	100	116.632.000	100	128.485.000	100	143.980.000	100	588.917.000	Kecamatan Langsa Lama
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	84.900.000	100	88.423.000	100	91.914.290	100	96.018.929	100	100.471.428	100	461.727.647	Kecamatan Langsa Baro
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	105.750.000	100	112.325.000	100	119.557.000	100	157.389.000	100	169.128.000	100	664.149.000	Sekretariat Baitul Mal

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	87.200.000	100	100.370.000	100	113.607.000	100	128.649.000	100	143.987.500	100	573.813.500	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	195.745.000	100	210.310.000	100	226.341.000	100	243.964.000	100	263.340.500	100	1.139.700.500	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	70.000.000	100	78.150.000	100	87.375.000	100	93.142.500	100	100.826.250	100	429.493.750	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	74.000.000	100	83.100.000	100	93.110.000	100	104.455.000	100	116.490.000	100	471.155.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	786.000.000	99	786.000.000	99	786.000.000	99	786.000.000	99	786.000.000	99	3.930.000.000	Sekretariat DPR
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	73.620.000	99	73.620.000	99	73.620.000	99	73.620.000	99	73.620.000	99	368.100.000	Sekretariat Daerah
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.900.000	99	9.900.000	99	9.900.000	99	9.900.000	99	39.600.000	Kecamatan Langsa Kota
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	36.000.000	Kecamatan Langsa Barat
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.300.000	99	9.300.000	99	9.300.000	99	9.300.000	99	37.200.000	Kecamatan Langsa Timur
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.300.000	99	9.300.000	99	9.300.000	99	9.300.000	99	37.200.000	Kecamatan Langsa Lama
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	8.700.000	99	8.700.000	99	8.700.000	99	8.700.000	99	34.800.000	Kecamatan Langsa Baro
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	200.000.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	3.900.000	99	3.900.000	99	3.900.000	99	3.900.000	99	15.600.000	Sekretariat Baitul Mal
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	36.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	11.000.000	99	11.000.000	99	11.000.000	99	11.000.000	99	44.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	18.000.000	99	18.000.000	99	18.000.000	99	18.000.000	99	72.000.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
04 01 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Qanun yang ditetapkan	Qanun	10	10	4.698.138.500	10	4.698.138.500	10	4.773.450.000	10	4.818.450.000	10	4.871.750.000	50	23.859.927.000	Sekretariat DPR
04 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah	%	100	100	3.410.640.000	100	3.477.900.000	100	3.523.900.000	100	3.563.600.000	100	3.611.500.000	100	17.587.540.000	Sekretariat Daerah
04 01 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Qanun yang ditetapkan	Qanun	10	10	392.539.500	10	467.539.500	10	495.700.000	10	513.600.000	10	529.800.000	50	2.399.179.000	Sekretariat DPR
04 01 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya produk hukum daerah	Produk Hukum	900	900	968.622.600	900	1.004.200.000	900	1.040.400.000	900	1.073.500.000	900	1.106.950.000	900	5.193.672.600	Sekretariat Daerah
04 01 21	Program Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah	Jumlah anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang ditetapkan	Orang	5	5	221.872.500	5	115.912.000	0	-	0	-	5	221.872.500	5	559.657.000	Sekretariat DPR
04 01 40	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	Unit	N/A	5	500.000.000	5	550.000.000	5	575.000.000	5	600.000.000	5	625.000.000	25	2.850.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 42	Program Pembinaan dan Pengembangan Syiar Islam	Jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam	Kasus	880	800	820.000.000	700	1.071.000.000	600	1.094.500.000	500	1.121.000.000	400	1.158.000.000	400	5.264.500.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 43	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islami	Jumlah Dayah	Dayah	N/A	32	170.000.000	32	185.000.000	33	197.000.000	33	218.000.000	34	225.000.000	34	995.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 44	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Pendidikan Daerah	Peran serta anggota majelis dalam peningkatan mutu pendidikan daerah	%	N/A	85	214.109.145	85	223.800.000	90	246.220.000	90	267.100.000	95	287.300.000	95	1.238.529.145	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 45	Program Peningkatan Peran Serta Ulama	Jumlah pengkaderan ulama yang mendapatkan pelatihan	Orang	30	30	521.125.500	30	507.991.125	30	538.991.125	30	570.891.125	30	597.481.625	150	2.736.480.500	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 01 46	Program Peningkatan Peran Serta Baitul Mal	Persentase Zakat, Infak dan Sadaqah yang disalurkan	%	N/A	90	2.400.000.000	90	2.564.100.000	90	2.615.460.000	95	2.667.847.200	95	2.721.272.144	95	12.968.679.344	Sekretariat Baitul Mal
04 01 47	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Adat Aceh	Peran serta anggota majelis dalam pengelolaan pemeliharaan dan pembinaan adat istiadat	%	N/A	85	120.010.000	85	157.600.000	90	176.400.000	90	192.700.000	95	211.000.000	95	857.710.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
04 01 48	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Tata Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kriteria	Tinggi	Tinggi	1.197.445.000	Sangat Tinggi	1.274.727.000	Sangat Tinggi	1.336.549.700	Sangat Tinggi	1.405.314.670	Sangat Tinggi	1.468.431.137	Sangat Tinggi	6.682.467.507	Sekretariat Daerah
04 01 49	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi PHBI/PHBN dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Lainnya	%	100	100	2.530.895.000	100	2.570.217.100	100	2.599.625.613	100	2.647.260.382	100	2.824.223.836	100	13.172.221.931	Sekretariat Daerah
04 01 50	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Pererkenomian, Energi dan Sumber Daya Mineral	Tingkat Pengawasan Barang Bersubsidi	%	100	100	2.224.492.000	100	2.244.480.000	100	2.265.000.000	100	2.276.300.000	100	2.285.000.000	100	11.295.272.000	Sekretariat Daerah
04 01 51	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	%	100	100	373.835.000	100	390.050.000	100	401.770.000	100	415.730.000	100	432.000.000	100	2.013.385.000	Sekretariat Daerah
04 01 52	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	1.120.375.000	100	1.140.100.000	100	1.153.600.000	100	1.171.550.000	100	1.187.455.000	100	5.773.080.000	Sekretariat Daerah
04 01 53	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Organisasi	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	CC	B	400.000.000	B	421.600.000	B	437.400.000	BB	459.200.000	BB	470.600.000	BB	2.188.800.000	Sekretariat Daerah
04 01 54	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Informasi	%	100	100	2.100.821.000	100	2.116.600.000	100	2.129.350.000	100	2.142.300.000	100	2.155.500.000	100	10.644.571.000	Sekretariat Daerah
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	81.000.000	100	76.100.000	100	81.100.000	100	86.100.000	100	91.100.000	100	415.400.000	Kecamatan Langsa Kota
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	73.500.000	100	70.000.000	100	75.500.000	100	81.000.000	100	86.746.000	100	386.746.000	Kecamatan Langsa Barat
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	73.500.000	100	69.700.000	100	75.200.000	100	79.700.000	100	86.200.000	100	384.300.000	Kecamatan Langsa Timur
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	73.500.000	100	69.200.000	100	76.100.000	100	81.900.000	100	88.700.000	100	389.400.000	Kecamatan Langsa Lama
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	73.500.000	100	70.300.000	100	75.800.000	100	80.300.000	100	86.300.000	100	386.200.000	Kecamatan Langsa Baro
04 02	BIDANG PENGAWASAN					2.263.120.000		2.345.001.448		2.471.300.637		2.595.163.918		2.716.540.560		12.391.126.563	
04 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.002.602.400	4	1.022.654.448	3	1.043.107.537	2	1.063.969.688	1	1.085.249.081	1	5.217.583.154	Inspektorat
04 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	280.297.600	100	302.747.000	100	326.043.100	100	355.744.230	100	387.361.479	100	1.652.193.409	Inspektorat
04 02 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	16.500.000	99	16.500.000	99	16.500.000	25	16.500.000	99	66.000.000	Inspektorat
04 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen rencana capaian kinerja	Dokumen	-	1	23.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.340.000	Inspektorat
04 02 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah	%	100	100	881.880.000	100	914.100.000	100	981.500.000	100	1.041.800.000	100	1.100.680.000	100	4.919.960.000	Inspektorat



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 02 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sebagai tenaga auditor dan aparatur pengawasan	Orang	4	4	75.000.000	4	89.000.000	4	104.150.000	4	117.150.000	4	126.750.000	20	512.050.000	Inspektorat
04 03	BIDANG PERENCANAAN					3.614.056.500		9.119.438.350		5.438.444.550		5.691.208.212		5.969.150.905		29.832.298.517	
04 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.295.242.500	4	1.321.147.350	3	1.338.516.200	2	1.338.578.624	1	1.338.642.296	1	6.632.126.970	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	375.500.000	100	514.125.000	100	538.256.250	100	564.469.063	100	593.817.516	100	2.586.167.828	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	12.300.000	99	12.300.000	99	12.300.000	99	12.300.000	99	49.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Dalam Perencanaan Pembangunan	%	N/A	5	200.000.000	30	5.113.000.000	50	522.000.000	50	550.000.000	50	590.000.000	50	6.975.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 16	Program Kerjasama Pembangunan	Rekomendasi Kegiatan yang difasilitasi dunia usaha	Kegiatan	N/A	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	89,64	89,64	120.570.000	89,84	152.500.000	90,1	167.750.000	90,5	184.525.000	91	202.977.500	91	828.322.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program pembangunan tahunan dan jangka menengah	%	100	100	990.624.000	100	1.182.968.000	100	1.978.020.000	100	2.096.477.200	100	2.217.780.120	100	8.465.869.320	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Juta rupiah	2.326.765	2.408.201	292.680.000	2.492.488	307.314.000	2.579.725	322.679.700	2.670.016	338.813.685	2.763.466	355.754.369	2.763.466	1.617.241.754	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 23	Program perencanaan sosial dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,89	76,08	339.440.000	76,71	416.084.000	77,39	458.922.400	78,07	506.044.640	78,76	557.879.104	78,76	2.278.370.144	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 04	BIDANG KEUANGAN					13.821.630.183		12.334.732.172		12.125.733.693		12.426.273.148		12.739.393.881		63.447.763.078	
04 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.369.512.800	4	2.416.903.056	3	2.465.241.117	2	2.514.545.939	1	2.564.836.858	1	12.331.039.771	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	3.554.915.000	100	1.839.770.000	100	1.397.484.500	100	1.461.732.325	100	1.528.939.901	100	9.782.841.726	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04 04 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	30.000.000	99	30.000.000	99	30.000.000	99	30.000.000	99	120.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04 04 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	7.897.202.383	Tepat waktu	8.048.059.116	Tepat waktu	8.233.008.076	Tepat waktu	8.419.994.884	Tepat waktu	8.615.617.122	Tepat waktu	41.213.881.581	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04 05	BIDANG KEPEGAWAIAN					2.177.995.978		2.307.488.951		2.431.137.330		2.517.389.157		2.710.002.108		12.144.013.523	
04 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	908.940.148	4	927.118.951	3	945.661.330	2	964.574.557	1	983.866.048	1	4.730.161.033	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	150.589.430	100	165.260.000	100	180.286.000	100	149.914.600	100	217.286.060	100	863.336.090	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	42.900.000	99	42.900.000	99	42.900.000	99	42.900.000	99	171.600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 05 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang berkompotensi	%	N/A	70	1.118.466.400	75	1.172.210.000	80	1.262.290.000	85	1.360.000.000	90	1.465.950.000	90	6.378.916.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 06	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					609.640.000		685.650.000		844.500.000		955.850.000		1.019.250.000		4.114.890.000	
04 06 15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pengisian jabatan sesuai DIKLATPIM	%	N/A	40	69.265.000	40	83.700.000	50	98.250.000	50	112.350.000	50	126.050.000	50	489.615.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 06 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	138	540.375.000	138	601.950.000	138	746.250.000	138	843.500.000	138	893.200.000	690	3.625.275.000	
04 07	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					273.350.000		355.685.000		391.253.500		430.378.850		473.416.735		1.924.084.085	
04 07 15	Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah rekomendasi hasil penelitian	Rekomendasi	2	2	273.350.000	2	355.685.000	3	391.253.500	3	430.378.850	3	473.416.735	13	1.924.084.085	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL						443.391.432.580		450.931.614.479		458.621.674.971		466.464.602.378		474.463.444.693		2.293.872.769.101	

Tabel 7.3  
Rencana Program Prioritas Daerah  
Kota Langsa Tahun 2018-2022

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 01	PRIORITAS I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN					355.396.738.004 291.342.420.147		351.873.789.882 287.855.409.298		361.934.708.130 297.378.724.831		368.519.467.015 302.082.333.466		371.349.717.645 302.843.755.679		1.809.074.420.675 1.481.502.643.421	
		01 01				41.854.144.510		41.038.680.688		41.753.274.753		42.539.543.388		43.969.780.056		211.155.423.395	
		01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.629.924.000	4	2.834.884.880	3	3.059.181.218	2	3.304.723.346	1	3.573.612.167	1
01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	1.323.892.800	100	1.238.044.071	100	1.341.794.932	100	1.541.769.308	100	1.736.893.379	100	7.182.394.490	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	377.400.000	99	377.400.000	99	377.400.000	99	377.400.000	99	1.509.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan	Orang	N/A	62	69.198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	62	69.198.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Anak Peserta PAUD	%	43	50	2.566.735.000	55	2.315.493.150	60	2.452.817.123	65	2.651.692.923	70	2.281.902.036	70	12.268.640.232	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun	%	99,51	100	32.545.605.961	100	31.783.924.466	100	31.710.932.386	100	31.705.351.244	100	32.202.134.613	100	159.947.948.670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	67,55	70	53.600.000	80	61.640.000	90	70.886.000	100	81.518.900	100	93.746.735	100	361.391.635	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	%	100	100	743.235.100	100	735.207.743	100	874.373.914	100	874.373.914	100	1.202.546.169	100	4.429.736.840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,52	95	1.700.453.649	97	1.470.586.378	99	1.644.389.180	100	1.772.713.753	100	2.266.544.957	100	8.854.687.917	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Koordinasi Pelayanan Pendidikan	%	100	100	221.500.000	100	221.500.000	100	221.500.000	100	230.000.000	100	235.000.000	100	1.129.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 02	BIDANG KESEHATAN					153.314.641.993		156.950.145.627		159.921.782.675		162.703.434.010		165.361.522.377		798.251.526.682	
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.769.330.000	4	2.824.716.600	3	2.881.210.932	2	2.938.835.151	1	2.997.611.854	1	14.411.704.536	Dinas Kesehatan
01 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.539.600.000	4	2.564.996.000	3	2.590.645.960	2	2.616.552.420	1	2.642.717.944	1	12.954.512.323	RSUD
01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	743.550.000	100	758.421.000	100	773.589.420	100	789.061.208	100	804.842.433	100	3.869.464.061	Dinas Kesehatan
01 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.000.000.000	RSUD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	139.500.000	99	139.500.000	99	139.500.000	99	139.500.000	99	558.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	159.900.000	99	159.900.000	99	159.900.000	99	159.900.000	99	639.600.000	RSUD
01 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Buffer Stock Obat	%	30	30	2.000.000.000	30	2.040.000.000	30	2.080.800.000	30	2.122.416.000	30	2.164.864.320	30	10.408.080.320	Dinas Kesehatan
01 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Buffer Stock Obat	%	30	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	5.000.000.000	RSUD
01 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Wilayah Kesehatan Masyarakat	Kec	5	5	1.134.560.000	5	1.107.251.200	5	1.130.396.224	5	1.154.004.148	5	1.178.084.231	5	5.704.295.804	Dinas Kesehatan
01 02 17	Program Pengawasan obat dan makanan	Jumlah industri rumah tangga yang memiliki sertifikat pangan	Home Industri	N/A	20	22.000.000	20	122.000.000	20	124.200.000	20	126.620.000	20	129.282.000	100	524.102.000	Dinas Kesehatan
01 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah instrumen dan media promosi kesehatan	Instrumen/M edia	N/A	2	1.367.280.000	2	912.677.000	2	963.944.700	3	1.020.339.170	3	1.082.373.087	3	5.346.613.957	Dinas Kesehatan
01 02 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,0002	0,0002	533.815.000	0,0002	260.812.200	0,0002	286.893.420	0,0002	315.582.762	2E-04	347.140.798	0,0002	1.744.244.180	Dinas Kesehatan
01 02 21	Pengembangan lingkungan sehat	Persentase Keluarga Yang Menggunakan Kualitas Air Bersih	%	N/A	-	-	70,68	319.186.176	71	351.104.794	71,3	406.439.653	71,6	447.083.619	71,6	1.523.814.242	Dinas Kesehatan
01 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	12,59	12,1	578.546.000	11,8	655.455.000	11,6	708.065.750	11,3	765.790.838	11	829.134.359	11	3.536.991.947	Dinas Kesehatan
01 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	Puskesmas	5	5	94.860.000	5	99.603.000	5	104.583.150	5	109.812.308	5	115.302.923	5	524.161.380	Dinas Kesehatan
01 02 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	%	0,03	0,03	8.014.800.000	0,03	8.433.176.000	0,03	8.680.476.000	0,03	8.782.506.000	0,03	8.696.534.000	0,03	42.607.492.000	Dinas Kesehatan
01 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Jumlah Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan	Unit	N/A	11	25.839.000.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	13	28.179.100.000	59	138.555.400.000	RSUD
01 02 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Akses Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	%	N/A	100	14.221.399.993	100	14.509.163.593	100	14.803.016.025	100	15.103.112.421	100	15.409.614.353	100	74.046.306.385	Dinas Kesehatan
01 02 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi	Bayi	8	7	150.186.000	7	208.544.600	6	229.399.060	6	252.338.966	5	277.572.863	5	1.118.041.489	Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 02 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia	%	98	98	125.000.000	98	218.200.000	98	388.819.657	98	422.701.623	98	465.771.785	98	1.620.493.065	Dinas Kesehatan
01 02 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	83,74	83,74	180.715.000	84	637.443.258	84,3	710.137.584	84,6	790.101.342	84,9	876.197.408	85,2	3.194.594.592	Dinas Kesehatan
01 02 33	Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Akses Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSU	Orang	N/A	5000	90.000.000.000	6000	91.800.000.000	7000	93.636.000.000	8000	95.508.720.000	9000	97.418.894.400	9000	468.363.614.400	RSUD
01 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					67.169.743.493		61.427.913.570		65.995.588.417		65.985.994.012		61.235.088.857		321.814.328.350	
01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.504.345.000	4	1.534.431.900	3	1.565.120.538	2	1.596.422.949	1	1.628.351.408	1	7.828.671.794	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	14.663.535.000	100	14.547.491.670	100	15.450.469.320	100	15.283.669.344	100	8.867.116.293	100	68.812.281.627	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	23.400.000	99	23.400.000	99	23.400.000	99	23.400.000	99	93.600.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen rencana capaian kinerja	Dokumen	-	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	km	290	298	22.936.073.493	307	23.960.760.000	316	25.522.800.259	326	25.519.529.437	336	25.993.964.731	336	123.933.127.920	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang seluruh drainase primer dalam kondisi baik	Meter	11408	2000	4.000.000.000	2200	2.000.000.000	2500	2.040.000.000	2750	2.080.800.000	3150	2.122.416.000	12600	12.243.216.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Pembangunan Turap Pada Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai	%	1,99	1,99	1.000.000.000	1,99	1.020.000.000	2	1.040.400.000	2,2	1.061.208.000	2,2	1.082.432.160	2,2	5.204.040.160	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	km	290	298	2.500.000.000	307	2.540.000.000	316	2.580.800.000	326	2.422.416.000	336	2.664.864.320	336	12.708.080.320	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	Tahun	1	1	93.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	83.250.000	1	85.000.000	5	396.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 03 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	56	56	2.000.000.000	17	700.000.000	4	1.200.000.000	13	1.116.460.000	10	1.116.460.000	100	6.132.920.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	31.554	31.708	9.083.000.000	32.862	9.306.830.000	34.124	9.432.598.300	35.486	9.539.338.283	36.948	9.690.083.946	36.948	47.051.850.529	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rumah tangga bersanitasi	%	89,64	89,64	500.000.000	89,84	500.000.000	90,1	500.000.000	90,5	500.000.000	91	600.000.000	91	2.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 28	Program Pengendalian Banjir	Luas Wilayah Kebanjiran	Ha	363	360	1.150.000.000	350	1.200.000.000	350	1.380.000.000	350	1.470.000.000	340	1.600.000.000	340	6.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan diwilayah perkotaan	%	100	100	185.075.000	100	230.000.000	100	280.000.000	100	310.000.000	100	415.000.000	100	1.420.075.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,65	0,59	5.700.000.000	0,59	2.750.000.000	0,59	3.800.000.000	0,49	3.850.000.000	0,49	3.900.000.000	0,49	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 34	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	1.272.215.000	75	800.000.000	75,4	840.000.000	75,7	850.000.000	76,1	1.130.000.000	76,1	4.892.215.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 35	Program Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	400.000.000	75	85.000.000	75,4	85.000.000	75,7	94.500.000	76,1	115.000.000	76,1	779.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 03 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	74,75	157.500.000	75	170.000.000	75,4	180.000.000	75,7	185.000.000	76,1	201.000.000	76,1	893.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 04	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.960.217.300		11.307.391.646		11.625.664.479		11.843.073.768		12.270.160.044		58.006.507.237	
01 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	3.751.217.300	4	3.826.241.646	3	3.902.766.479	2	3.980.821.808	1	4.060.438.245	1	19.521.485.478	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	675.000.000	100	736.000.000	100	797.100.000	100	862.810.000	100	936.691.000	100	4.007.601.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	145.000.000	99	163.000.000	99	175.000.000	99	186.000.000	99	196.500.000	99	865.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 04 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,74	88,74	6.045.000.000	88,9	6.169.900.000	89,05	6.297.198.000	89,2	6.329.941.960	89,5	6.564.180.799	89,5	31.406.220.759	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 04 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah bencana kebakaran	Jumlah	7	7	344.000.000	6	412.250.000	5	453.600.000	4	483.500.000	3	512.350.000	3	2.205.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.061.232.851		10.700.349.967		11.119.663.352		11.514.822.828		11.921.078.369		55.317.147.367	
01 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	6.524.930.000	4	6.655.428.600	3	6.788.537.172	2	6.924.307.915	1	7.062.794.074	1	33.955.997.761	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	550.660.000	4	561.673.200	3	572.906.664	2	584.364.797	1	596.052.093	1	2.865.656.755	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	302.770.000	100	320.080.000	100	353.388.000	100	387.636.800	100	433.750.480	100	1.797.625.280	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	304.296.000	100	320.095.880	100	344.118.762	100	370.446.377	100	393.598.958	100	1.732.555.977	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	7.800.000	99	7.800.000	99	7.800.000	99	7.800.000	99	31.200.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	100.000.000	99	121.400.000	99	132.400.000	99	144.500.000	99	157.810.000	99	656.110.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	90	59.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90	59.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	93	100	845.055.400	100	1.008.121.542	100	1.033.375.188	100	1.060.387.444	100	1.089.311.167	100	5.036.250.741	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat Penegakan Qanun Daerah	%	97	98	421.215.130	99	496.584.084	99	518.630.906	99	550.981.834	99	583.553.289	80	2.570.965.243	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
01 05 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik sosial	Kasus	N/A	15	161.000.000	15	186.600.000	15	207.250.000	10	230.610.000	10	256.700.000	10	1.042.160.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang tertangani	%	99	99	463.170.000	99	481.250.000	99	502.450.000	99	530.350.000	99	549.500.000	99	2.526.720.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 05 19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	93	100	9.375.000	100	210.000.000	100	280.000.000	100	291.000.000	100	300.000.000	100	1.090.375.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
01 05 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKA DA	%	73	73	258.511.321	75	266.266.661	80	306.206.660	85	352.137.660	90	404.958.308	90	1.588.080.610	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01 05 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Gampong	N/A	66	60.500.000	66	65.050.000	66	72.600.000	66	80.300.000	66	85.250.000	66	363.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 06	BIDANG SOSIAL					7.982.440.000		6.430.927.800		6.962.751.156		7.495.465.459		8.086.125.976		36.957.710.391	
01 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.036.390.000	4	1.057.117.800	3	1.078.260.156	2	1.099.825.359	1	1.121.821.866	1	5.393.415.181	Dinas Sosial
01 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	416.200.000	100	483.810.000	100	571.991.000	100	662.890.100	100	742.779.110	100	2.877.670.210	Dinas Sosial
01 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	8.400.000	99	8.400.000	99	8.400.000	99	8.400.000	99	33.600.000	Dinas Sosial
01 06 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	86	86	378.850.000	86	725.000.000	89	827.500.000	89	905.250.000	92	998.775.000	92	3.835.375.000	Dinas Sosial
01 06 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	21	21	150.000.000	23	175.000.000	27	180.000.000	30	210.000.000	34	250.000.000	34	965.000.000	Dinas Sosial
01 06 17	Progam Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar Yang Mendapatkan Pembinaan	%	N/A	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	315.000.000	Dinas Sosial
01 06 18	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma Yang Mendapat Bantuan	Orang	N/A	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	250	500.000.000	Dinas Sosial
01 06 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase Penghuni Panti yang terlayani	%	100	100	2.800.000.000	100	2.900.000.000	100	2.950.000.000	100	3.060.000.000	100	3.250.000.000	100	14.960.000.000	Dinas Sosial
01 06 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	500	500	300.550.000	500	353.605.000	500	520.000.000	500	545.000.000	500	642.500.000	500	2.361.655.000	Dinas Sosial
01 06 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peran Aktif Lembaga Sosial Masyarakat dalam Perlindungan Sosial	Kec	5	5	2.750.450.000	5	572.995.000	5	666.600.000	5	834.100.000	5	891.850.000	5	5.715.995.000	Dinas Sosial



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					22.474.779.479		23.651.144.999		23.532.430.485		24.336.541.126		25.201.898.661		119.196.794.750	
02 02	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					927.590.000		973.509.800		1.014.684.796		1.058.868.772		1.106.340.455		5.080.993.823	
02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	679.240.000	4	692.824.800	3	706.681.296	2	720.814.922	1	735.231.220	1	3.534.792.238	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	248.350.000	100	273.185.000	100	300.503.500	100	330.553.850	100	363.609.235	100	1.516.201.585	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	7.500.000	99	7.500.000	99	7.500.000	99	7.500.000	99	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 04	BIDANG PERTANAHAN					-		475.970.000		499.618.500		524.449.425		550.521.896		2.050.559.821	
02 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	-	-	4	302.570.000	3	317.698.500	2	333.583.425	1	350.262.596	1	1.304.114.521	Dinas Pertanahan
02 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	N/A	-	-	100	170.400.000	100	178.920.000	100	187.866.000	100	197.259.300	100	734.445.300	Dinas Pertanahan
02 04 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	3.000.000	99	3.000.000	99	3.000.000	99	3.000.000	99	12.000.000	Dinas Pertanahan
02 05	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					13.105.465.979		13.405.320.899		13.675.832.917		13.952.621.975		14.246.922.294		68.386.164.063	
02 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	12.055.245.979	4	12.296.350.899	3	12.542.277.917	2	12.793.123.475	1	13.048.985.944	1	62.735.984.213	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	1.050.220.000	100	1.073.570.000	100	1.098.155.000	100	1.124.098.500	100	1.162.536.350	100	5.508.579.850	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	35.400.000	99	35.400.000	99	35.400.000	99	35.400.000	99	141.600.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 06	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL					1.424.731.500		733.389.000		775.293.980		792.583.780		813.278.767		4.539.277.027	
02 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.069.055.000	4	569.128.000	3	581.393.980	2	594.683.780	1	608.378.767	1	3.422.639.527	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	355.676.500	100	153.761.000	100	183.400.000	100	187.400.000	100	194.400.000	100	1.074.637.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 06 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	10.500.000	99	10.500.000	99	10.500.000	99	10.500.000	99	42.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					1.337.471.000		1.140.709.420		1.177.593.058		1.215.605.042		1.251.792.472		6.123.170.992	
02 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	761.171.000	4	776.394.420	3	791.922.308	2	807.760.755	1	823.915.970	1	3.961.164.453	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	576.300.000	100	357.115.000	100	378.470.750	100	400.644.288	100	420.676.502	100	2.133.206.539	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	7.200.000	99	7.200.000	99	7.200.000	99	7.200.000	99	28.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 09	BIDANG PERHUBUNGAN					2.073.140.000		2.124.149.800		2.335.853.420		2.567.573.975		2.822.363.089		11.923.080.284	
02 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.571.140.000	4	1.602.562.800	3	1.762.647.720	2	1.938.737.705	1	2.132.433.192	1	9.007.521.417	Dinas Perhubungan
02 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	502.000.000	100	516.187.000	100	567.805.700	100	623.436.270	100	684.529.897	100	2.893.958.867	Dinas Perhubungan
02 09 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	5.400.000	99	5.400.000	99	5.400.000	99	5.400.000	99	21.600.000	Dinas Perhubungan
02 10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.140.420.000		1.185.280.400		1.237.811.208		1.291.161.352		1.335.384.091		6.190.057.051	
02 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	878.520.000	4	896.090.400	3	914.012.208	2	932.292.452	1	950.938.301	1	4.571.853.361	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	261.900.000	100	281.090.000	100	315.699.000	100	350.768.900	100	376.345.790	100	1.585.803.690	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	8.100.000	99	8.100.000	99	8.100.000	99	8.100.000	99	32.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 12	BIDANG PENANAMAN MODAL					752.663.000		1.826.433.800		971.116.476		1.024.542.806		1.097.217.662		5.671.973.743	
02 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	597.190.000	4	609.133.800	3	621.316.476	2	633.742.806	1	646.417.662	1	3.107.800.743	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	155.473.000	100	1.158.000.000	100	290.500.000	100	331.500.000	100	391.500.000	100	2.326.973.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	0	-	99	59.300.000	99	59.300.000	99	59.300.000	99	59.300.000	99	237.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 13	BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA					920.264.000		951.985.280		977.548.986		1.004.394.365		1.032.624.093		4.886.816.724	
02 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	781.064.000	4	796.685.280	3	812.618.986	2	828.871.365	1	845.448.793	1	4.064.688.424	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	139.200.000	100	146.300.000	100	155.930.000	100	166.523.000	100	178.175.300	100	786.128.300	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	36.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 17	BIDANG PERPUSTAKAAN					793.034.000		834.396.600		867.077.144		904.739.635		945.453.842		4.344.701.221	
02 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	622.385.000	4	634.832.700	3	647.529.354	2	660.479.941	1	673.689.540	1	3.238.916.535	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	170.649.000	100	192.963.900	100	212.947.790	100	237.659.694	100	265.164.302	100	1.079.384.686	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 17 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	6.600.000	99	6.600.000	99	6.600.000	99	6.600.000	99	26.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
03	URUSAN PILIHAN					2.578.195.000		2.727.062.500		2.846.007.710		2.972.253.020		3.115.856.852		14.239.375.082	
03 03	BIDANG PERTANIAN					1.768.195.000		1.870.652.500		1.956.438.510		2.032.618.336		2.129.077.965		9.756.982.311	
03 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.329.525.000	4	1.356.115.500	3	1.383.237.810	2	1.410.902.566	1	1.439.120.618	1	6.918.901.494	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	438.670.000	100	491.737.000	100	550.400.700	100	598.915.770	100	667.157.347	100	2.746.880.817	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	22.800.000	99	22.800.000	99	22.800.000	99	22.800.000	99	91.200.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03 07	BIDANG PERINDUSTRIAN					810.000.000		856.410.000		889.569.200		939.634.684		986.778.888		4.482.392.772	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	557.375.000	4	568.522.500	3	579.892.950	2	591.490.809	1	603.320.625	1	2.900.601.884	
03 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	252.625.000	100	277.987.500	100	299.776.250	100	338.243.875	100	373.558.263	100	1.542.190.888	
03 07 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.900.000	99	9.900.000	99	9.900.000	99	9.900.000	99	39.600.000	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					39.001.343.378		37.640.173.085		38.177.545.104		39.128.339.403		40.188.206.452		194.135.607.422	
04 01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					29.063.743.500		29.028.747.280		29.841.249.070		30.613.110.378		31.386.507.213		149.933.357.440	
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	6.536.130.000	4	6.585.107.000	3	6.789.310.740	2	6.925.096.955	1	7.063.598.894	1	33.899.243.589	Sekretariat DPR
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	8.776.563.000	4	8.952.094.260	3	9.131.136.145	2	9.313.758.868	1	9.500.034.045	1	45.673.586.319	Sekretariat Daerah
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	695.163.000	4	709.066.260	3	723.247.585	2	737.712.537	1	752.466.788	1	3.617.656.170	Kecamatan Langsa Kota
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	586.261.000	4	597.986.220	3	609.945.944	2	622.144.863	1	634.587.761	1	3.050.925.788	Kecamatan Langsa Barat
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	599.542.000	4	611.532.840	3	623.763.497	2	636.238.767	1	648.963.542	1	3.120.040.646	Kecamatan Langsa Timur
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	540.207.000	4	551.011.140	3	562.031.363	2	573.271.990	1	584.737.430	1	2.811.258.923	Kecamatan Langsa Lama
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	556.792.000	4	567.927.840	3	579.286.397	2	590.872.125	1	602.689.567	1	2.897.567.929	Kecamatan Langsa Baro
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	528.175.000	4	538.738.500	3	549.513.270	2	560.503.535	1	571.713.606	1	2.748.643.912	Sekretariat Baitul Mal
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	264.986.000	4	270.285.720	3	275.691.434	2	281.205.263	1	286.829.368	1	1.378.997.786	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.295.480.000	4	2.341.389.600	3	2.388.217.392	2	2.435.981.740	1	2.484.701.375	1	11.945.770.106	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	368.510.000	4	375.880.200	3	383.397.804	2	391.065.760	1	398.887.075	1	1.917.740.839	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	387.320.000	4	395.066.400	3	402.967.728	2	411.027.083	1	419.247.624	1	2.015.628.835	Sekretariat Majelis Adat Aceh
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	2.039.819.500	100	1.257.810.300	100	1.369.491.330	100	1.479.040.463	100	1.592.144.509	100	7.738.306.102	Sekretariat DPR
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	3.034.280.000	100	3.194.650.000	100	3.275.250.000	100	3.345.900.000	100	3.417.670.000	100	16.267.750.000	Sekretariat Daerah
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	94.200.000	100	100.620.000	100	108.232.000	100	118.057.000	100	129.742.700	100	550.851.700	Kecamatan Langsa Kota
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	95.100.000	100	101.583.000	100	110.182.150	100	118.247.000	100	127.821.250	100	552.933.400	Kecamatan Langsa Barat
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	92.800.000	100	102.980.000	100	113.328.000	100	123.163.000	100	134.728.000	100	566.999.000	Kecamatan Langsa Timur
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	95.200.000	100	104.620.000	100	116.632.000	100	128.485.000	100	143.980.000	100	588.917.000	Kecamatan Langsa Lama
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	84.900.000	100	88.423.000	100	91.914.290	100	96.018.929	100	100.471.428	100	461.727.647	Kecamatan Langsa Baro
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	105.750.000	100	112.325.000	100	119.557.000	100	157.389.000	100	169.128.000	100	664.149.000	Sekretariat Baitul Mal
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	87.200.000	100	100.370.000	100	113.607.000	100	128.649.000	100	143.987.500	100	573.813.500	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	195.745.000	100	210.310.000	100	226.341.000	100	243.964.000	100	263.340.500	100	1.139.700.500	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	70.000.000	100	78.150.000	100	87.375.000	100	93.142.500	100	100.826.250	100	429.493.750	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	74.000.000	100	83.100.000	100	93.110.000	100	104.455.000	100	116.490.000	100	471.155.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	200.000.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	11.000.000	99	11.000.000	99	11.000.000	99	11.000.000	99	44.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	18.000.000	99	18.000.000	99	18.000.000	99	18.000.000	99	72.000.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	786.000.000	99	786.000.000	99	786.000.000	99	786.000.000	99	786.000.000	99	3.930.000.000	Sekretariat DPR
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	98	99	73.620.000	99	73.620.000	99	73.620.000	99	73.620.000	99	73.620.000	99	368.100.000	Sekretariat Daerah
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.900.000	99	9.900.000	99	9.900.000	99	9.900.000	99	39.600.000	Kecamatan Langsa Kota
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	36.000.000	Kecamatan Langsa Barat
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.300.000	99	9.300.000	99	9.300.000	99	9.300.000	99	37.200.000	Kecamatan Langsa Timur
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.300.000	99	9.300.000	99	9.300.000	99	9.300.000	99	37.200.000	Kecamatan Langsa Lama
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	8.700.000	99	8.700.000	99	8.700.000	99	8.700.000	99	34.800.000	Kecamatan Langsa Baro
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	3.900.000	99	3.900.000	99	3.900.000	99	3.900.000	99	15.600.000	Sekretariat Baitul Mal
04 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	9.000.000	99	36.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 02	BIDANG PENGAWASAN					1.282.900.000		1.341.901.448		1.385.650.637		1.436.213.918		1.489.110.560		6.935.776.563	
04 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.002.602.400	4	1.022.654.448	3	1.043.107.537	2	1.063.969.688	1	1.085.249.081	1	5.217.583.154	Inspektorat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	280.297.600	100	302.747.000	100	326.043.100	100	355.744.230	100	387.361.479	100	1.652.193.409	Inspektorat
04 02 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	16.500.000	99	16.500.000	99	16.500.000	25	16.500.000	99	66.000.000	Inspektorat
04 03	BIDANG PERENCANAAN					1.670.742.500		1.847.572.350		1.889.072.450		1.915.347.687		1.944.759.812		9.267.494.799	
04 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	1.295.242.500	4	1.321.147.350	3	1.338.516.200	2	1.338.578.624	1	1.338.642.296	1	6.632.126.970	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	375.500.000	100	514.125.000	100	538.256.250	100	564.469.063	100	593.817.516	100	2.586.167.828	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	12.300.000	99	12.300.000	99	12.300.000	99	12.300.000	99	49.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 04	BIDANG KEUANGAN					5.924.427.800		4.286.673.056		3.892.725.617		4.006.278.264		4.123.776.760		22.233.881.497	
04 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	2.369.512.800	4	2.416.903.056	3	2.465.241.117	2	2.514.545.939	1	2.564.836.858	1	12.331.039.771	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	3.554.915.000	100	1.839.770.000	100	1.397.484.500	100	1.461.732.325	100	1.528.939.901	100	9.782.841.726	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04 04 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	30.000.000	99	30.000.000	99	30.000.000	99	30.000.000	99	120.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04 05	BIDANG KEPEGAWAIAN					1.059.529.578		1.135.278.951		1.168.847.330		1.157.389.157		1.244.052.108		5.765.097.123	
04 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan	Surat	N/A	5	908.940.148	4	927.118.951	3	945.661.330	2	964.574.557	1	983.866.048	1	4.730.161.033	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang representatif	%	100	100	150.589.430	100	165.260.000	100	180.286.000	100	149.914.600	100	217.286.060	100	863.336.090	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam 1 tahun	%	N/A	-	-	99	42.900.000	99	42.900.000	99	42.900.000	99	42.900.000	99	171.600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
02 02	PRIORITAS II URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					87.994.694.576 25.289.453.588		99.057.824.598 33.231.705.859		96.686.966.842 32.460.295.340		97.945.135.362 32.008.675.909		103.113.727.049 34.662.170.481		484.798.348.426 157.652.301.177	
02 01	BIDANG TENAGA KERJA					85.235.000		513.362.050		542.762.912		562.445.799		582.419.173		2.286.224.934	
02 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	0,25817556	5	25.235.000	10	250.712.050	15	272.233.412	20	283.800.414	25	295.414.426	75	1.127.395.302	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,43	65	60.000.000	65,5	262.650.000	67	270.529.500	68	278.645.385	69	287.004.747	69	1.158.829.632	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 02	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					922.170.000		1.695.392.190		1.804.356.190		1.951.158.045		2.111.971.836		8.485.048.261	
02 02 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	80	80	276.610.000	80	513.160.500	80	550.613.550	80	599.987.405	80	649.130.396	80	2.589.501.851	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Wanita	Kasus	N/A	8	170.072.000	7	585.000.000	6	620.000.000	5	680.000.000	4	750.000.000	4	2.805.072.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Wanita	Kasus	N/A	8	172.663.500	7	266.562.455	6	272.593.405	5	276.593.405	4	281.593.405	4	1.270.006.170	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 02 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	80	80	302.824.500	80	330.669.235	80	361.149.235	80	394.577.235	80	431.248.035	80	1.820.468.240	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 03	BIDANG PANGAN					163.000.000		317.890.000		322.927.000		378.115.000		383.458.000		1.565.390.000	
02 03 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Sesuai Jenis tanaman	Padi/Ton	14.710	14.710	163.000.000	14.810	317.890.000	15.010	322.927.000	15.300	378.115.000	#####	383.458.000	15.500	1.565.390.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
02 04	BIDANG PERTANAHAN					-		1.279.950.000		1.344.097.500		1.411.452.375		1.482.174.994		5.517.674.869	
02 04 15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	58,2	-	-	61	63.575.000	63	66.903.750	65	70.398.938	67	74.068.884	67	274.946.572	Dinas Pertanahan
02 04 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	58,2	-	-	61	1.161.750.000	63	1.219.837.500	65	1.280.829.375	67	1.344.870.844	67	5.007.287.719	Dinas Pertanahan
02 04 17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	N/A	-	-	100	54.625.000	100	57.356.250	100	60.224.063	100	63.235.266	100	235.440.578	Dinas Pertanahan
02 05	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					11.074.096.750		10.971.819.653		12.199.500.000		11.249.500.000		11.434.600.000		56.929.516.403	
02 05 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	28,08	28,08	1.620.000.000	29,1	1.854.900.000	29,5	1.884.900.000	29,85	1.924.900.000	30,2	2.000.000.000	30,2	9.284.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	154.096.750	Ada	572.319.653	Ada	700.000.000	Ada	710.000.000	Ada	770.000.000	Ada	2.906.416.403	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas wilayah budidaya	Ha	19.184	-	-	19.184	50.000.000	19.184	50.000.000	19.184	50.000.000	#####	50.000.000	19.184	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 05 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	-	Ada	50.000.000	Ada	100.000.000	Ada	100.000.000	Ada	100.000.000	Ada	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau(RTH)	%	15,46	15,46	9.300.000.000	16	8.444.600.000	16,4	9.464.600.000	16,8	8.464.600.000	17,2	8.514.600.000	17,2	44.188.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 06	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL					240.000.000		189.500.000		204.500.000		244.500.000		302.900.000		1.181.400.000	
02 06 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP	%	70	75	240.000.000	85	189.500.000	90	204.500.000	95	244.500.000	100	302.900.000	100	1.181.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02 07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					1.442.680.000		1.143.101.300		1.284.631.430		1.408.814.573		1.600.916.030		6.880.143.333	
02 07 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	100	100	938.380.000	100	465.301.300	100	491.831.430	100	521.014.573	100	553.116.030	100	2.969.643.333	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMG Yang Aktif	Gampong	N/A	-	-	66	100.000.000	66	140.000.000	66	160.000.000	66	190.000.000	66	590.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Pertemuan Aparatur Gampong Dengan Masyarakat	Pertemuan	N/A	12	145.000.000	12	155.000.000	12	165.000.000	12	175.000.000	12	185.000.000	60	825.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Gampong Yang Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi	Gampong	N/A	66	165.000.000	66	180.000.000	66	195.000.000	66	210.000.000	66	230.000.000	66	980.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 07 19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong Yang Baik	%	100	100	194.300.000	100	242.800.000	100	292.800.000	100	342.800.000	100	442.800.000	100	1.515.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
02 08	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.302.138.580		1.264.205.700		1.309.637.671		1.355.494.717		1.406.785.833		7.638.262.501	
02 08 15	Program Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru	PUS	N/A	500	2.248.948.580	500	1.209.420.000	500	1.253.208.400	500	1.297.372.568	500	1.346.920.019	2500	7.355.869.567	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 08 18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah peserta KB baru	PUS	N/A	500	53.190.000	500	54.785.700	500	56.429.271	500	58.122.149	500	59.865.814	2500	282.392.934	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02 09	BIDANG PERHUBUNGAN					702.619.400		2.548.606.482		3.210.421.231		3.394.003.353		3.613.368.690		13.469.019.156	
02 09 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pelayanan Pada Fasilitas Perhubungan	%	100	100	44.045.000	100	1.045.366.350	100	1.549.902.985	100	1.554.893.284	100	1.560.382.612	100	5.754.590.231	Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 09 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dalam Kondisi Baik	%	80	82	150.000.000	85	201.500.000	87	256.650.000	90	312.315.000	95	368.546.500	95	1.289.011.500	Dinas Perhubungan
02 09 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Kendaraan yang Telah Uji KIR	Unit	1.039	1.039	146.274.400	1.100	162.962.632	1.150	183.758.896	1.150	215.134.784	1.200	237.148.264	1.200	945.278.976	Dinas Perhubungan
02 09 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Pelayanan Pada Fasilitas Perhubungan	%	N/A	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Perhubungan
02 09 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	LAKA	447	300	362.300.000	250	433.769.000	200	504.600.000	150	584.600.000	100	707.525.000	100	2.592.794.000	Dinas Perhubungan
02 09 20	Program Peningkatan Kelayakan pengoperasian kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Telah Uji KIR	Unit	1.039	0	-	1.100	605.008.500	1.150	615.509.350	1.150	627.060.285	1.200	639.766.314	1.200	2.487.344.449	Dinas Perhubungan
02 10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					762.579.250		5.836.852.792		2.031.070.875		1.851.379.702		1.881.887.593		12.363.770.212	
02 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Akses Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	%	N/A	100	674.649.600	100	5.565.084.352	100	1.750.906.382	100	1.562.567.274	100	1.584.167.792	100	11.137.375.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparatur bidang komunikasi informasi yang mendapatkan pelatihan	Orang	N/A	25	47.959.650	25	49.398.440	25	50.880.393	25	52.406.805	25	53.979.009	125	254.624.297	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 10 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah berita yang dipublikasikan di media massa	Jumlah	N/A	10	39.970.000	10	222.370.000	10	229.284.100	10	236.405.623	10	243.740.792	50	971.770.515	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 11	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					633.320.000		754.320.000		818.320.000		864.320.000		913.320.000		3.983.600.000	
02 11 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	533.410.000	2.200	633.410.000	2.200	683.410.000	2.300	713.410.000	2.300	743.410.000	2.300	3.307.050.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
02 11 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	24.910.000	2.200	24.910.000	2.200	24.910.000	2.300	24.910.000	2.300	24.910.000	2.300	124.550.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
02 11 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	37	39	75.000.000	42	96.000.000	42	110.000.000	45	126.000.000	45	145.000.000	45	552.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
02 12	BIDANG PENANAMAN MODAL					94.302.500		436.841.600		456.515.848		475.950.323		515.346.898		1.978.957.169	
02 12 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah SIUP Dan TDUP Yang Diterbitkan	SIUP dan TDUP	535	-	-	580	265.541.600	610	280.507.848	640	295.623.083	670	330.891.776	670	1.172.564.307	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah SIUP Dan TDUP Yang Diterbitkan	SIUP dan TDUP	535	-	-	580	42.200.000	610	43.745.000	640	45.336.350	670	46.975.441	670	178.256.791	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02 12 18	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan	Rata-Rata Lama Proses Perizinan	Hari	7	7	94.302.500	7	129.100.000	7	132.263.000	7	134.990.890	7	137.479.681	7	628.136.071	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 13	BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA					3.505.981.000		4.334.846.475		4.905.000.000		4.742.000.000		4.890.000.000		22.377.827.475	
02 13 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	48	40	693.720.000	50	1.063.700.000	50	1.064.000.000	60	1.140.000.000	60	1.285.000.000	60	5.246.420.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah kelompok wirausaha pemuda yang aktif	Kelompok	N/A	6	67.132.500	7	170.146.475	8	455.000.000	9	270.000.000	10	231.000.000	10	1.193.278.975	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah pemuda yang terjerat kasus narkoba	Orang	N/A	6	23.628.500	5	60.000.000	5	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	293.628.500	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	32	32	2.721.500.000	36	2.841.000.000	40	2.921.000.000	44	2.962.000.000	48	3.061.000.000	48	14.506.500.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 13 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah lapangan olahraga	Lapangan	307	-	-	317	200.000.000	327	400.000.000	337	300.000.000	347	238.000.000	347	1.138.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
02 14	BIDANG STATISTIK					75.300.000		77.559.000		79.885.770		82.282.343		84.750.813		399.777.926	
02 14 15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Dokumen Statistik Daerah Yang Dapat Diakses	%	100	100	75.300.000	100	77.559.000	100	79.885.770	100	82.282.343	100	84.750.813	100	399.777.926	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 15	BIDANG PERSANDIAN					84.300.000		86.829.000		89.433.870		92.116.886		94.880.393		447.560.149	
02 15 15	Program penyelenggaraan komunikasi persandian	Jumlah Kegiatan Persandian	Keg	1	1	84.300.000	1	86.829.000	1	89.433.870	1	92.116.886	1	94.880.393	5	447.560.149	Dinas Komunikasi dan Informatika
02 16	BIDANG KEBUDAYAAN					2.653.793.400		1.268.793.400		1.320.543.400		1.380.055.900		2.770.012.730		9.393.198.830	
02 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	100	100	1.173.793.400	100	673.793.400	100	673.793.400	100	673.793.400	100	803.965.743	100	3.999.139.343	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	2	2	1.480.000.000	1	595.000.000	1	646.750.000	1	706.262.500	2	1.966.046.987	7	5.394.059.487	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 17	BIDANG PERPUSTAKAAN					198.500.920		250.658.887		259.019.155		267.884.229		276.358.755		1.252.421.946	
02 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	180	250.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 17 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat capaian pelaksanaan pengembangan budaya baca dan pembinaan kepastakaan	%	N/A	100	148.500.920	100	200.658.887	100	209.019.155	100	217.884.229	100	226.358.755	100	1.002.421.946	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 18	BIDANG KEARSIPAN					349.436.788		261.177.330		277.672.488		297.202.664		317.018.744		1.502.508.014	
02 18 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase pemeliharaan arsip dan dokumen perpustakaan	%	80	85	124.257.000	85	136.484.710	90	148.779.251	90	161.142.629	95	173.576.908	95	744.240.498	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02 18 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pemeliharaan arsip dan dokumen perpustakaan	%	80	85	225.179.788	85	124.692.620	90	128.893.237	90	136.060.035	95	143.441.836	95	758.267.516	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	(Rp.)	
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	URUSAN PILIHAN					25.123.127.460		21.753.293.398		22.876.581.387		23.302.081.817		24.196.319.376		117.251.403.438	
03 01	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.475.293.625		4.635.399.498		4.998.471.487		5.369.940.917		5.537.039.736		25.016.145.263	
03 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5.922	5.922	200.000.000	5.922	210.000.000	6.000	220.000.000	6.000	250.000.000	6.200	259.000.000	6.200	1.139.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5.922	5.922	1.010.293.625	5.922	1.030.499.498	6.000	1.051.109.487	6.000	1.072.131.677	6.200	1.093.574.311	6.200	5.257.608.598	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan laut	Ton	5.922	5.922	2.905.000.000	5.922	2.963.100.000	6.000	3.022.362.000	6.000	3.082.809.240	6.200	3.144.465.425	6.200	15.117.736.665	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 01 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	N/A	90	360.000.000	90	431.800.000	91	705.000.000	91	965.000.000	92	1.040.000.000	92	3.501.800.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 02	BIDANG PARIWISATA					3.665.598.990		1.688.750.000		1.863.750.000		1.885.500.000		2.253.000.000		11.356.598.990	
03 02 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lamanya tamu menginap	Hari	2	2	665.598.990	3	688.750.000	3	713.750.000	3	735.500.000	3	753.000.000	3	3.556.598.990	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
03 02 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata lamanya tamu menginap	Hari	2	2	3.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.150.000.000	3	1.150.000.000	3	1.500.000.000	3	7.800.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
03 03	BIDANG PERTANIAN					4.825.310.945		4.396.220.000		4.783.806.000		4.613.904.400		4.764.726.888		23.383.968.233	
03 03 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	%	96,26	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	104	115.000.000	104	120.000.000	104	550.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Nilai Tukar Petani	%	96,26	100	148.945.000	100	153.413.000	100	500.000.000	104	158.016.000	104	200.000.000	104	1.160.374.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Padi	Ton	14.710	14.710	2.000.000.000	14.810	2.106.000.000	15.010	2.162.720.000	15.300	2.220.174.400	#####	2.273.377.888	15.500	10.762.272.288	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produktivitas Pertanian/Perkebunan	Ton/Ha	2,2	2,3	348.000.000	2,5	362.440.000	2,6	377.013.000	2,7	391.724.000	2,8	416.575.000	2,8	1.895.752.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 19	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah Produksi Tanaman Padi	Ton	14.710	14.710	151.711.095	14.810	156.262.000	15.010	110.950.000	15.300	160.000.000	#####	140.080.000	15.500	719.003.095	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	Jumlah Ternak yang Telah Divaksinasi ternak	Ekor	528	528	72.314.850	550	74.485.000	550	75.370.000	600	79.021.000	600	81.391.000	2828	382.581.850	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 21	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	7.135	7.135	1.684.000.000	7.260	1.115.350.000	7.500	1.149.495.000	8.000	1.184.663.000	9.000	1.220.888.000	38.895	6.354.396.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging Ternak Besar	Kg	442.437	442.437	64.340.000	444.437	66.270.000	444.437	68.258.000	448.500	70.306.000	#####	72.415.000	448.500	341.589.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 03 23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	7.135	7.135	256.000.000	7.260	257.000.000	7.500	230.000.000	8.000	235.000.000	9.000	240.000.000	38.895	1.218.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
03 04	BIDANG PERDAGANGAN					9.183.283.900		9.273.283.900		9.470.913.900		9.673.096.500		9.881.912.752		47.482.490.952	
03 04 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	%	100	100	101.500.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	126.000.000	100	135.000.000	100	597.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03 04 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Kelancaran Aktivitas Perdagangan Dalam Daerah	%	100	100	4.581.783.900	100	4.568.283.900	100	4.669.113.900	100	4.771.660.500	100	4.875.968.032	100	23.466.810.232	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 04 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Tingkat Kelancaran Aktivitas Perdagangan Dalam Daerah	%	100	100	4.500.000.000	100	4.590.000.000	100	4.681.800.000	100	4.775.436.000	100	4.870.944.720	100	23.418.180.720	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
03 07	BIDANG PERINDUSTRIAN					2.973.640.000		1.759.640.000		1.759.640.000		1.759.640.000		1.759.640.000		10.012.200.000	
03 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UMK	2.041	2.100	2.973.640.000	2.200	1.759.640.000	2.200	1.759.640.000	2.300	1.759.640.000	2.300	1.759.640.000	2.300	10.012.200.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					37.582.113.528		44.072.825.341		41.350.090.114		42.634.377.636		44.255.237.192		209.894.643.811	
04 01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					24.759.920.745		25.536.255.225		25.984.016.438		26.533.343.377		27.429.182.242		130.242.718.027	
04 01 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Qanun yang ditetapkan	Qanun	10	10	4.698.138.500	10	4.698.138.500	10	4.773.450.000	10	4.818.450.000	10	4.871.750.000	50	23.859.927.000	Sekretariat DPR
04 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah	%	100	100	3.410.640.000	100	3.477.900.000	100	3.523.900.000	100	3.563.600.000	100	3.611.500.000	100	17.587.540.000	Sekretariat Daerah
04 01 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Qanun yang ditetapkan	Qanun	10	10	392.539.500	10	467.539.500	10	495.700.000	10	513.600.000	10	529.800.000	50	2.399.179.000	Sekretariat DPR
04 01 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya produk hukum daerah	Produk Hukum	900	900	968.622.600	900	1.004.200.000	900	1.040.400.000	900	1.073.500.000	900	1.106.950.000	900	5.193.672.600	Sekretariat Daerah
04 01 21	Program Sosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah	Jumlah anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang ditetapkan	Orang	5	5	221.872.500	5	115.912.000	-	-	-	-	5	221.872.500	5	559.657.000	Sekretariat DPR
04 01 40	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	Unit	N/A	5	500.000.000	5	550.000.000	5	575.000.000	5	600.000.000	5	625.000.000	25	2.850.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 42	Program Pembinaan dan Pengembangan Syiar Islam	Jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam	Kasus	880	800	820.000.000	700	1.071.000.000	600	1.094.500.000	500	1.121.000.000	400	1.158.000.000	400	5.264.500.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 43	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islami	Jumlah Dayah	Dayah	N/A	32	170.000.000	32	185.000.000	33	197.000.000	33	218.000.000	34	225.000.000	34	995.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
04 01 44	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Pendidikan Daerah	Peran serta anggota majelis dalam peningkatan mutu pendidikan daerah	%	N/A	85	214.109.145	85	223.800.000	90	246.220.000	90	267.100.000	95	287.300.000	95	1.238.529.145	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
04 01 45	Program Peningkatan Peran Serta Ulama	Jumlah pengkaderan ulama yang mendapatkan pelatihan	Orang	30	30	521.125.500	30	507.991.125	30	538.991.125	30	570.891.125	30	597.481.625	150	2.736.480.500	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
04 01 46	Program Peningkatan Peran Serta Baitul Mal	Persentase Zakat, Infak dan Sadaqah yang disalurkan	%	N/A	90	2.400.000.000	90	2.564.100.000	90	2.615.460.000	95	2.667.847.200	95	2.721.272.144	95	12.968.679.344	Sekretariat Baitul Mal

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 01 47	Program Peningkatan Peran Serta Majelis Adat Aceh	Peran serta anggota majelis dalam pengelolaan pemeliharaan dan pembinaan adat istiadat	%	N/A	85	120.010.000	85	157.600.000	90	176.400.000	90	192.700.000	95	211.000.000	95	857.710.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
04 01 48	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Tata Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kriteria	Tinggi	Tinggi	1.197.445.000	Sangat Tinggi	1.274.727.000	Sangat Tinggi	1.336.549.700	Sangat Tinggi	1.405.314.670	Sangat Tinggi	1.468.431.137	Sangat Tinggi	6.682.467.507	Sekretariat Daerah
04 01 49	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi PHBI/PHBN dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Lainnya	%	100	100	2.530.895.000	100	2.570.217.100	100	2.599.625.613	100	2.647.260.382	100	2.824.223.836	100	13.172.221.931	Sekretariat Daerah
04 01 50	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Pererkenomian, Energi dan Sumber Daya Mineral	Tingkat Pengawasan Barang Bersubsidi	%	100	100	2.224.492.000	100	2.244.480.000	100	2.265.000.000	100	2.276.300.000	100	2.285.000.000	100	11.295.272.000	Sekretariat Daerah
04 01 51	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	%	100	100	373.835.000	100	390.050.000	100	401.770.000	100	415.730.000	100	432.000.000	100	2.013.385.000	Sekretariat Daerah
04 01 52	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	1.120.375.000	100	1.140.100.000	100	1.153.600.000	100	1.171.550.000	100	1.187.455.000	100	5.773.080.000	Sekretariat Daerah
04 01 53	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Organisasi	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	CC	B	400.000.000	B	421.600.000	B	437.400.000	BB	459.200.000	BB	470.600.000	BB	2.188.800.000	Sekretariat Daerah
04 01 54	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kedinasan Unsur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan Daerah	%	100	100	2.100.821.000	100	2.116.600.000	100	2.129.350.000	100	2.142.300.000	100	2.155.500.000	100	10.644.571.000	Sekretariat Daerah
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	81.000.000	100	76.100.000	100	81.100.000	100	86.100.000	100	91.100.000	100	415.400.000	Kecamatan Langsa Kota
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	73.500.000	100	70.000.000	100	75.500.000	100	81.000.000	100	86.746.000	100	386.746.000	Kecamatan Langsa Barat
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	73.500.000	100	69.700.000	100	75.200.000	100	79.700.000	100	86.200.000	100	384.300.000	Kecamatan Langsa Timur
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	73.500.000	100	69.200.000	100	76.100.000	100	81.900.000	100	88.700.000	100	389.400.000	Kecamatan Langsa Lama
04 01 60	Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Kecamatan	Cakupan Layanan terhadap masyarakat gampong	%	100	100	73.500.000	100	70.300.000	100	75.800.000	100	80.300.000	100	86.300.000	100	386.200.000	Kecamatan Langsa Baro

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 02	BIDANG PENGAWASAN					980.220.000		1.003.100.000		1.085.650.000		1.158.950.000		1.227.430.000		5.455.350.000	
04 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen rencana capaian kinerja	Dokumen	-	1	23.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.340.000	Inspektorat
04 02 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah	%	100	100	881.880.000	100	914.100.000	100	981.500.000	100	1.041.800.000	100	1.100.680.000	100	4.919.960.000	Inspektorat
04 02 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sebagai tenaga auditor dan aparatur pengawasan	Orang	4	4	75.000.000	4	89.000.000	4	104.150.000	4	117.150.000	4	126.750.000	20	512.050.000	Inspektorat
04 03	BIDANG PERENCANAAN					1.943.314.000		7.271.866.000		3.549.372.100		3.775.860.525		4.024.391.093		20.564.803.718	
04 03 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Perencanaan Pembangunan	%	N/A	5	200.000.000	30	5.113.000.000	50	522.000.000	50	550.000.000	50	590.000.000	50	6.975.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 16	Program Kerjasama Pembangunan	Rekomendasi Kegiatan yang difasilitasi dunia usaha	Kegiatan	N/A	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	89,64	89,64	120.570.000	89,84	152.500.000	90,1	167.750.000	90,5	184.525.000	91	202.977.500	91	828.322.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program pembangunan tahunan dan jangka menengah	%	100	100	990.624.000	100	1.182.968.000	100	1.978.020.000	100	2.096.477.200	100	2.217.780.120	100	8.465.869.320	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Juta rupiah	2.326.765	2.408.201	292.680.000	2.492.488	307.314.000	2.579.725	322.679.700	2.670.016	338.813.685	#####	355.754.369	2.763.466	1.617.241.754	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 03 23	Program perencanaan sosial dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,89	76,08	339.440.000	76,71	416.084.000	77,39	458.922.400	78,07	506.044.640	78,76	557.879.104	78,76	2.278.370.144	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04 04	BIDANG KEUANGAN					7.897.202.383		8.048.059.116		8.233.008.076		8.419.994.884		8.615.617.122		41.213.881.581	
04 04 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	7.897.202.383	Tepat waktu	8.048.059.116	Tepat waktu	8.233.008.076	Tepat waktu	8.419.994.884	Tepat waktu	8.615.617.122	Tepat waktu	41.213.881.581	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04 05	BIDANG KEPEGAWAIAN					1.118.466.400		1.172.210.000		1.262.290.000		1.360.000.000		1.465.950.000		6.378.916.400	
04 05 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang berkompetensi	%	N/A	70	1.118.466.400	75	1.172.210.000	80	1.262.290.000	85	1.360.000.000	90	1.465.950.000	90	6.378.916.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 06	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					609.640.000		685.650.000		844.500.000		955.850.000		1.019.250.000		4.114.890.000	
04 06 15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pengisian jabatan sesuai DIKLATPIM	%	N/A	40	69.265.000	40	83.700.000	50	98.250.000	50	112.350.000	50	126.050.000	50	489.615.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04 06 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	138	540.375.000	138	601.950.000	138	746.250.000	138	843.500.000	138	893.200.000	690	3.625.275.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04 07	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					273.350.000		355.685.000		391.253.500		430.378.850		473.416.735		1.924.084.085	
04 07 15	Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah rekomendasi hasil penelitian	Rekomendasi	2	2	273.350.000	2	355.685.000	3	391.253.500	3	430.378.850	3	473.416.735	13	1.924.084.085	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL						443.391.432.580		450.931.614.479		458.621.674.971		466.464.602.378		474.463.444.693		2.293.872.769.101	



**TABEL 7.4**  
**Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kota Langsa yang dibiayai Melalui Sumber Pendanaan OTSUS/APBA/APBN**

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	170.969.221.977	393.703.678.337	755.852.158.736	475.740.857.536	405.296.838.093	2.206.724.083.679	
01 01	BIDANG PENDIDIKAN	-	3.969.466.340	-	20.000.000.000	15.450.000.000	39.419.466.340	
01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	3.969.466.340	-	20.000.000.000	15.450.000.000	39.419.466.340	
01 01 16 01	Pembangunan gedung sekolah	-	3.969.466.340	-	20.000.000.000	15.450.000.000	39.419.466.340	
	- Pembangunan Boarding School	-	3.969.466.340	-	20.000.000.000	-	23.969.466.340	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan SMP Unggul Kota Langsa	-	-	-	-	15.450.000.000	15.450.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 02	BIDANG KESEHATAN	44.000.000.000	155.000.000.000	95.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000	604.000.000.000	
01 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	44.000.000.000	155.000.000.000	95.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000	604.000.000.000	
01 02 26 01	Pembangunan Rumah Sakit	40.000.000.000	100.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	380.000.000.000	
	- Pembangunan Rumah Sakit Regional	40.000.000.000	100.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	380.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 02 26 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	4.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	224.000.000.000	
	- Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit Regional	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	200.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pengadaan Alat - alat Laboratorium Dinas Kesehatan Kota	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	24.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	91.336.221.977	185.007.751.997	604.272.769.536	248.668.880.552	177.022.421.569	1.311.469.374.632	
01 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10.000.000.000	125.000.000.000	417.881.000.000	100.000.000.000	70.000.000.000	722.881.000.000	
01 03 15 03	Pembangunan Jalan	10.000.000.000	125.000.000.000	343.162.000.000	100.000.000.000	70.000.000.000	648.162.000.000	
	- Pembangunan Jalan Lingkar Utara	10.000.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000	-	-	260.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Jalan Lingkar Selatan	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Jalan Nelayan Lhok Banie	-	-	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pelebaran Jalan Kuala Langsa	-	-	35.000.000.000	-	-	35.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pelebaran Jalan Sp Wie - Unsam	-	-	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pelebaran Jalan menuju Rumah Sakit Regional	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-	30.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pelebaran Jalan Simpang SMP 3 menuju Hutan Kota	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-	30.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Jalan Rahmat Gp. PB. Seulemak	-	-	1.974.000.000	-	-	1.974.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Jalan Utama Gp. Sukarejo	-	-	1.123.000.000	-	-	1.123.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Jalan Nelayan Sp. Lhee	-	-	2.335.000.000	-	-	2.335.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Jalan Antara Gp. Timbang Langsa	-	-	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Jalan Meurandeh	-	-	16.000.000.000	-	-	16.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Jalan Wilayah Kota Langsa	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	60.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 03 15 05	<b>Pembangunan Jembatan</b>	-	-	<b>74.719.000.000</b>	-	-	<b>74.719.000.000</b>	
	- Pembangunan Jembatan di Jalan Lingkar Utara (Jembatan Alur Hitam I)	-	-	27.629.000.000	-	-	27.629.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Jembatan di Jalan Lingkar Utara (Jembatan Alur Simpang Lhee)	-	-	21.835.000.000	-	-	21.835.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Jembatan di Jalan Lingkar Utara (Jembatan Alur Drein)	-	-	24.255.000.000	-	-	24.255.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Jembatan Nelayan Lhok Banie	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 16	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</b>	<b>7.499.892.977</b>	<b>7.649.890.837</b>	<b>33.946.888.653</b>	<b>7.958.946.426</b>	<b>8.118.125.355</b>	<b>65.173.744.248</b>	
01 03 16 03	<b>Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>	<b>7.499.892.977</b>	<b>7.649.890.837</b>	<b>33.946.888.653</b>	<b>7.958.946.426</b>	<b>8.118.125.355</b>	<b>65.173.744.248</b>	
	- Rehabilitasi Saluran Induk TM Bahrum	-	-	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Saluran Drainase Conveyor Lengkong-Karang Anyer-PB Seulemak-Perumnas-Birem Puntong Kec. Langsa Baro (D.I.T)	-	-	18.144.000.000	-	-	18.144.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	7.499.892.977	7.649.890.837	7.802.888.653	7.958.946.426	8.118.125.355	39.029.744.248	OTSUS/APBA/APBN
01 03 17	<b>Program pembangunan turap/talud/bronjong</b>	-	-	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	
01 03 17 03	<b>Pembangunan turap/talud/bronjong</b>	-	-	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	
	- Pembangunan Turap, Talud dan Bronjong dalam Wilayah Kota Langsa	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	60.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 23	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	-	-	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	
01 03 23 04	<b>Pengadaan alat-alat berat</b>	-	-	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	
	- Pengadaan Alat - alat Berat Kebinamargaan	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 24	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>8.161.329.000</b>	<b>26.029.111.160</b>	<b>26.639.693.383</b>	<b>26.854.487.251</b>	<b>32.073.576.996</b>	<b>124.919.526.790</b>	
01 03 24 06	<b>Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum</b>	<b>5.161.329.000</b>	<b>17.764.555.580</b>	<b>18.269.846.692</b>	<b>18.377.243.625</b>	<b>23.486.788.498</b>	<b>83.059.763.395</b>	
	- Pengembangan Jaringan, dan SR Serta SPAM MBR	5.161.329.000	5.264.555.580	5.369.846.692	5.477.243.625	5.586.788.498	26.859.763.395	OTSUS/APBA/APBN
	- Penggantian Water Meter Pelanggan	-	-	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Jaringan Distribusi Utama Dalam Wilayah Kota Langsa	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	40.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Optimalisasi SPAM (IPA 40 lt/dt WTP 2)	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	8.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Optimalisasi SPAM ( Istalasi Kabel/ Pompa Submersible)	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Jaringan Distribusi Kualas Langsa - Telaga Tujuh Kawasan Kumuh Langsa 3 (Lintas Perairan)	-	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 24 09	<b>Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	
	- Normalisasi Sungai Krueng Langsa sepanjang 11 km	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	15.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 24 10	<b>Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi</b>	<b>5.161.329.000</b>	<b>5.264.555.580</b>	<b>5.369.846.692</b>	<b>5.477.243.625</b>	<b>5.586.788.498</b>	<b>26.859.763.395</b>	
	- Peningkatan Saluran Irigasi Primer	5.161.329.000	5.264.555.580	5.369.846.692	5.477.243.625	5.586.788.498	26.859.763.395	OTSUS/APBA/APBN

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 03 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	-	-	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	33.000.000.000	
01 03 26 01	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-	-	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	33.000.000.000	
	- Pembangunan Situ Simpang Lhee	-	-	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	21.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Waduk Sukajadi Kebun Ireng	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Waduk Pondok Kemuning	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	18.475.000.000	12.028.750.000	10.505.187.500	13.455.446.875	14.030.719.219	68.495.103.594	
01 03 27 02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	18.475.000.000	12.028.750.000	10.505.187.500	13.455.446.875	14.030.719.219	68.495.103.594	
	- Pembangunan Baru IPAL Komunal dengan MCK Kota Langsa	6.500.000.000	-	-	-	-	6.500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Penyusunan DED IPLT Kota Langsa	400.000.000	-	-	450.000.000	-	850.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Perencanaan Teknis/DED IPAL Skala Kawasan	500.000.000	-	-	-	500.000.000	1.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan IPAL Skala Kawasan	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	4.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan IPAL Berbasis Masyarakat	9.075.000.000	9.528.750.000	10.005.187.500	10.505.446.875	11.030.719.219	50.145.103.594	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan IPLT	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	4.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pengadaan Truk Tinja	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 28	Program Pengendalian Banjir	32.200.000.000	10.500.000.000	11.700.000.000	56.800.000.000	10.000.000.000	121.200.000.000	
01 03 28 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	30.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	60.000.000.000	
	- Pembangunan Tanggul dan Penguatan Tebing Sungai Krueng Langsa	30.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	60.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 28 06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	-	-	-	16.300.000.000	-	16.300.000.000	
	- Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	-	-	-	16.300.000.000	-	16.300.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 28 08	Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir	2.200.000.000	10.500.000.000	1.700.000.000	10.500.000.000	-	24.900.000.000	
	- Pembangunan Pos Pemantauan Kualitas Air di Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Baro	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Pos Pemantauan Kualitas Air di Gampong Sidodadi (Belakang RSUD) Kecamatan Langsa Kota	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Sumur Observasi Air Tanah di Alue Merebo Kecamatan Langsa Timur	-	-	500.000.000	-	-	500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Sumur Observasi Air Tanah di Gampong PB. Teungoh Kecamatan Langsa Barat	-	-	-	500.000.000	-	500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Sumur Observasi Air Tanah di Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Perencanaan Teknis/DED Kolam Retensi (Polder) dan Kelengkapannya	-	-	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	OTSUS/APBA/APBN

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 03 28 10	- Perencanaan Teknis/DED Saluran Drainase Primer	1.200.000.000	-	-	-	-	1.200.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Saluran Drainase Primer	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	20.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	<b>Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak</b>	-	-	-	<b>20.000.000.000</b>	-	<b>20.000.000.000</b>	
	- Pembangunan Break water Pulau Telaga Tujuh (Pulau yang berbatasan dengan Selat Malaka dan sebagai kawasan kumuh)	-	-	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 29	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>36.000.000.000</b>	
01 03 29 02	<b>Pembangunan/peningkatan infrastruktur</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>36.000.000.000</b>	
	- PSD Kawasan kota Langsa Jln Rel Blang Pase - SP. Tm. Bachroum - Birem Puntong)	15.000.000.000	-	-	-	-	15.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Penataan Bangunan (Kawasan Strategis Nasional) KSN Kws. (Central Busines District)CBD	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	9.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Prasarana Sarana Dasar (PSD) Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Kota Langsa	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	8.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Penataan Kawasan Jalan Kota Langsa	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 03 30	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	-	<b>800.000.000</b>	<b>61.600.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>64.800.000.000</b>	
01 03 30 01	<b>Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan</b>	-	<b>800.000.000</b>	<b>61.600.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>64.800.000.000</b>	
	- Relokasi Bantaran Sungai Krueng Langsa di Timbang Langsa	-	-	60.000.000.000	-	-	60.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- RTBL Kawasan Bantaran Sungai Krueng Langsa	-	800.000.000	-	-	-	800.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- RTBL Kawasan Kecamatan	-	-	1.600.000.000	1.600.000.000	800.000.000	4.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 04	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN</b>	<b>35.633.000.000</b>	<b>49.726.460.000</b>	<b>46.579.389.200</b>	<b>47.071.976.984</b>	<b>47.824.416.524</b>	<b>226.835.242.708</b>	
01 04 15	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>35.633.000.000</b>	<b>43.796.460.000</b>	<b>44.579.389.200</b>	<b>45.071.976.984</b>	<b>45.824.416.524</b>	<b>214.905.242.708</b>	
01 04 15 03	<b>Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan</b>	<b>31.673.000.000</b>	<b>39.046.460.000</b>	<b>39.829.389.200</b>	<b>40.321.976.984</b>	<b>40.824.416.524</b>	<b>191.695.242.708</b>	
	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS-PK) Kota Langsa	2.625.000.000	2.677.500.000	2.731.050.000	2.785.671.000	2.841.384.420	13.660.605.420	OTSUS/APBA/APBN
	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS-PB) Kota Langsa	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Kota Langsa	6.500.000.000	6.630.000.000	6.762.600.000	6.897.852.000	7.035.809.040	33.826.261.040	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Rumah Khusus Kota Langsa	-	6.250.000.000	6.250.000.000	6.250.000.000	6.250.000.000	25.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Kota Langsa	3.548.000.000	3.618.960.000	3.691.339.200	3.765.165.984	3.840.469.304	18.463.934.488	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya Kota Langsa	-	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	900.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Langsa	1.000.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	6.400.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Rusunawa Kota Langsa	11.000.000.000	11.220.000.000	11.444.400.000	11.673.288.000	11.906.753.760	57.244.441.760	OTSUS/APBA/APBN

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 04 15 07	- Penanganan Lingkungan Kawasan Kumuh Skala Kota (Kotaku) Kota Langsa	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	35.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat</b>	<b>3.960.000.000</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>23.210.000.000</b>	
	- Pembangunan Rumah Sehat Sederhana	3.960.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	5.000.000.000	23.210.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 04 19	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya</b>	-	<b>5.930.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>11.930.000.000</b>	
01 04 19 08	<b>Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</b>	-	<b>5.930.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>11.930.000.000</b>	
	- Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	5.930.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	11.930.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 05	<b>BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA</b>	-	-	<b>10.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
01 05 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	-	<b>10.000.000.000</b>	-	-	<b>10.000.000.000</b>	
01 05 02 03	<b>Pembangunan Gedung Kantor</b>	-	-	<b>10.000.000.000</b>	-	-	<b>10.000.000.000</b>	
	- Pembangunan Gedung Satpol Kota Langsa	-	-	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 05 22	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	-	-	-	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
01 05 22 03	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam</b>	-	-	-	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
	- Pembangunan Pusat Evakuasi Tanggap Bencana Kota Langsa	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
01 06	<b>BIDANG SOSIAL</b>	-	-	-	-	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
01 06 19	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	-	-	-	-	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
01 06 19 01	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	-	-	-	-	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
	- Pembangunan Panti Asuhan	-	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>43.800.000.000</b>	<b>66.800.000.000</b>	<b>138.100.000.000</b>	<b>424.500.000.000</b>	<b>140.700.000.000</b>	<b>813.900.000.000</b>	
02 01	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>	-	-	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	
02 01 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	-	-	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	
02 01 15 02	<b>Pembangunan Balai Latihan Kerja</b>	-	-	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	
	- Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	7.500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 03	<b>BIDANG PANGAN</b>	-	-	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	
02 03 15	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	-	-	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	
02 03 15 15	<b>Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija</b>	-	-	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	
	- Budidaya padi inbrida jajar legowo	-	-	700.000.000	700.000.000	700.000.000	2.100.000.000	OTSUS/APBA/APBN

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 04	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	
02 04 16	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	
02 04 16 01	<b>Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	
	- Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Kota Langsa	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	125.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 05	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>10.600.000.000</b>	<b>29.100.000.000</b>	<b>30.200.000.000</b>	<b>36.600.000.000</b>	<b>29.600.000.000</b>	<b>136.100.000.000</b>	
02 05 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>600.000.000</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>15.200.000.000</b>	<b>21.600.000.000</b>	<b>19.600.000.000</b>	<b>61.100.000.000</b>	
02 05 15 02	<b>Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</b>	<b>600.000.000</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>15.200.000.000</b>	<b>21.600.000.000</b>	<b>19.600.000.000</b>	<b>61.100.000.000</b>	
	- Pembuatan Bank Sampah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Peningkatan Sarana Pengelolaan Akhir Sampah	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Alat Pengumpul Sampah dan Pengangkut Sampah	-	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	14.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Perahu Sampah	-	-	600.000.000	-	-	600.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan SPA (Stasiun Peralihan Antara) Persampahan	-	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan TPS 3R	-	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Revitalisasi TPA	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 05 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000.000</b>	
02 05 16 06	<b>Pengelolaan B3 dan limbah B3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000.000</b>	
	- Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	10.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 05 24	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	
02 05 24 05	<b>Penataan RTH</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	
	- Penataan RTH dibelakang Islamic Centre, Kec. Langsa Baro	-	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Dalam Wilayah Kota Langsa	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	50.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan RTH Mangrove & Minapolitan Kuala Langsa)	-	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 08	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
02 08 15	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
02 08 15 02	<b>Pelayanan KIE</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
	- Pengadaan Genre Kit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 09	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>58.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>449.000.000.000</b>	
02 09 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	175.000.000.000	
02 09 16 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	175.000.000.000	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Kuala Langsa	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	175.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 09 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	250.000.000.000	-	274.000.000.000	
02 09 18 01	Pembangunan Gedung Terminal	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	250.000.000.000	-	274.000.000.000	
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Perintis (Lahan Eks Kopalmas)	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	250.000.000.000	-	274.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 10	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	3.200.000.000	13.200.000.000	
02 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	3.200.000.000	13.200.000.000	
02 10 15 04	Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	3.200.000.000	13.200.000.000	
	- Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	3.200.000.000	13.200.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 11	<b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	12.000.000.000	
02 11 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	12.000.000.000	
02 11 15 08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	12.000.000.000	
	- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	12.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 13	<b>BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	-	-	12.000.000.000	50.000.000.000	-	62.000.000.000	
02 13 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-	12.000.000.000	-	-	12.000.000.000	
02 13 16 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	-	-	12.000.000.000	-	-	12.000.000.000	
	- Pembangunan Gedung CADIKA Pramuka Kota Langsa	-	-	12.000.000.000	-	-	12.000.000.000	
02 13 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	-	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000	
02 13 21 02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	-	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000	
	- Pembangunan GOR Langsa	-	-	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
02 16	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	6.000.000.000	
02 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	6.000.000.000	
02 16 16 05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	6.000.000.000	
	- Pembangunan Cagar Budaya	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	6.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	URUSAN PILIHAN	31.250.269.000	28.411.500.000	43.999.730.000	38.589.724.600	38.681.519.092	180.932.742.692	
03 01	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.000.000.000	5.000.000.000	18.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	58.000.000.000	
03 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	25.000.000.000	
03 01 20 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	25.000.000.000	
	- Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Revitalisasi Pertambakan di Kota Langsa	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	15.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
03 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	-	-	13.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	33.000.000.000	
03 01 21 06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	-	-	13.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	33.000.000.000	
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana PPI	-	-	13.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	33.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
03 02	BIDANG PARIWISATA	14.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	54.000.000.000	
03 02 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	14.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	54.000.000.000	
03 02 16 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana	14.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	54.000.000.000	
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Langsa	14.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	54.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
03 03	BIDANG PERTANIAN	7.925.000.000	9.000.000.000	11.500.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	46.425.000.000	
03 03 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	7.925.000.000	9.000.000.000	11.500.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	46.425.000.000	
03 03 18 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	7.925.000.000	9.000.000.000	11.500.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	46.425.000.000	
	- Pembangunan Laboratorium Pengujian Produk Pangan Segar Kota Langsa	-	-	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	15.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pengembangan Sumber Air Tanah Dangkal di Kota Langsa	700.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.700.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pengelolaan air irigasi pertanian	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kota Langsa	3.225.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	19.225.000.000	OTSUS/APBA/APBN
03 04	BIDANG PERDAGANGAN	4.325.269.000	4.411.500.000	4.499.730.000	4.589.724.600	4.681.519.092	22.507.742.692	
03 04 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	4.325.269.000	4.411.500.000	4.499.730.000	4.589.724.600	4.681.519.092	22.507.742.692	
03 04 19 10	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	4.325.269.000	4.411.500.000	4.499.730.000	4.589.724.600	4.681.519.092	22.507.742.692	
	- Pengembangan Pasar	4.325.269.000	4.411.500.000	4.499.730.000	4.589.724.600	4.681.519.092	22.507.742.692	OTSUS/APBA/APBN
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	-	800.000.000	25.571.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	42.371.000.000	
04 01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	24.000.000.000	
04 01 40	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	12.000.000.000	
04 01 40 1	Penyediaan Sarana Ibadah	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 01 40 2	Pembangunan Prasarana Ibadah	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 01 40 3	Rehab Sedang/Berat Prasarana Ibadah	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 01 40 4	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Rumah Ibadah	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN



KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH	SUMBER PENDANAAN
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 01 43	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islami	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	12.000.000.000	
04 01 43 1	Penyediaan Sarana Pendidikan Islam	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 01 43 2	Pembangunan Prasarana Pendidikan Islam	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 01 43 3	Rehab Sedang/Berat Prasarana Pendidikan Islam	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 01 43 4	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pendidikan Islam	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 02	BIDANG PENGAWASAN	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	
04 02 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	
	- Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Langsa	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 03	BIDANG PERENCANAAN	-	800.000.000	16.571.000.000	-	-	17.371.000.000	
04 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	15.371.000.000	-	-	15.371.000.000	
04 03 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	15.371.000.000	-	-	15.371.000.000	
	- Pembangunan Gedung Bappeda Kota Langsa	-	-	15.371.000.000	-	-	15.371.000.000	OTSUS/APBA/APBN
04 03 15	Program Pengembangan Data/Informasi	-	800.000.000	1.200.000.000	-	-	2.000.000.000	
04 03 15 08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Aplikasi	-	800.000.000	1.200.000.000	-	-	2.000.000.000	
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung E-Planning	-	800.000.000	1.200.000.000	-	-	2.000.000.000	OTSUS/APBA/APBN
TOTAL		246.019.490.977	489.715.178.337	963.522.888.736	946.830.582.136	592.678.357.185	3.243.927.826.371	

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Kota Langsa**

NO.	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	TARGET TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam</b>	<b>Kasus</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
2	Jumlah Qanun Syariat Islam yang Dilaksanakan	Qanun	6	6	6	6	6
3	Persentase Rumah Ibadah yang Representatif	%	70	75	80	85	90
4	Persentase Keikutsertaan Lembaga Pendidikan Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	%	100	100	100	100	100
<b>5</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>Kategori</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
6	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Nilai LKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB
8	Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)	Kriteria	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Tingkat Kesesuaian Prioritas dan Kebijakan Pembangunan	%	100	100	100	100	100
10	Tingkat Penerapan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100
11	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah	Skala	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas
12	Kapabilitas APIP	Level/Tingkat	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
13	Maturitas SPIP	Level/Tingkat	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
<b>14</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Indeks</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>40</b>
15	Persentase Ruang Terbuka Hijau(RTH)	%	15,46	16,00	16,40	16,80	17,20
16	Tingkat Ketaatan Terhadap RTRW	%	74,75	75,00	75,40	75,70	76,10
17	Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	TARGET TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
18	Indeks Risiko Bencana	Indeks/Skala	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
<b>19</b>	<b>Angka Rata-Rata Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
20	Persentase Anak Peserta PAUD	%	50	55	60	65	70
21	Persentase Rata-Rata Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	96	97	98	99	100
22	Angka Melek Huruf	%	99,39	99,58	99,78	99,89	99,99
23	Persentase Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi Standar Tingkat Pendidikan	%	77,73	76,9	77,2	77,5	78
24	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Kunjungan	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
<b>25</b>	<b>Angka Usia Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>70,5</b>	<b>71</b>	<b>71,5</b>	<b>72</b>	<b>72,5</b>
26	Angka Kesakitan	%	25	24	23	22	21
27	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	7	7	6	6	5
28	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	6	6	5	5	5
<b>29</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>Indeks</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
30	Rasio Akseptor KB	Rasio	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	65	66	67	68	68
32	Kota Layak Anak	Sudah/Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah
33	Rasio KDRT	Rasio	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
<b>34</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Indeks</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
35	Proporsi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	85	86	87	88	89
36	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,0161	0,016	0,0159	0,0158	0,0157
37	Proporsi Panjang Jaringan Jalan yang Terhubung Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,48	0,5	0,53	0,55	0,58
38	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase	%	30	35	40	46	51

NO.	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	TARGET TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
39	Indeks Kualitas Air	Indeks	51	52	53	54	55
40	Persentase Luas Wilayah Kebanjiran	%	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6
41	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,18	0,19	0,19	0,2	0,2
42	Tingkat realisasi fisik pembangunan infrastruktur daerah	%	90	91	92	93	94
43	<b>Tingkat Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)</b>	<b>Rasio</b>	<b>0,34</b>	<b>0,33</b>	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>	<b>0,3</b>
44	Peranan Kategori Pertanian, Perternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	8,71	8,76	8,83	8,88	8,94
45	Peranan Kategori Perikanan terhadap PDRB	%	3,39	3,45	3,5	3,55	3,6
46	Peranan Kategori Pertanian, Perternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	8,71	8,76	8,83	8,88	8,94
47	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. (Milyar)	156	159	163	166	169
48	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	65	67	69	71	75
49	Jumlah Produk Unggulan UKM yang Kompetitif	Jenis	50	60	70	80	90
50	Kontribusi Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	2,67	2,79	2,84	2,88	2,93
51	Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB	%	31	31	32	32	33
52	Persentase Penduduk di Bawah Garis Miskin	%	10,05	9,8	9,55	9,3	9,3
53	Daya Serap Tenaga Kerja	%	25	29	33	37	41
54	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong	Skala	N/A	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
55	<b>Jumlah Pemuda/OKP Berprestasi</b>	<b>Orang/OKP</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
56	<b>Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi</b>	<b>Cabor</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
57	<b>Jumlah Festival Seni dan Budaya</b>	<b>Event</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
58	Persentase Pembinaan Kelompok Kepemudaan	%	75	80	85	90	95
59	Kota Layak Pemuda	Sudah/Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah

NO.	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	TARGET TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
60	Persentase Pembinaan Olahraga Daerah	%	75	80	85	90	95
61	Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Daerah	Gampong	66	66	66	66	66
62	Peran Serta Masyarakat Dalam Berbangsa, Toleransi Antarumat Beragama dan Kepekaan Sosial	Gampong	66	66	66	66	66
63	<b>Jumlah Unjuk Rasa/Demonstrasi/Kerusuhan/Pemberontakan yang Berkaitan dengan Permasalahan Ideologi, Ekonomi, dan Sosial</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Jumlah Pemilih Pemilu/Pemilukada	Jiwa	108.380	110.385	110.385	110.385	112.371
65	Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	927	800	700	600	500

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kota Langsa Tahun 2018-2022**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,68	4,68	4,78	4,87	4,97	5,07	5,07
2	Laju Indeks Implisit PDRB	Persen	4,57	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,1
3	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	23	23	24	25	26	27	27
4	Persentase Penduduk di Bawah Garis Miskin	Persen	11,09	10,3	10,05	9,8	9,55	9,3	9,3
5	Angka Melek Huruf	Persen	99,29	99,39	99,58	99,78	99,89	99,99	99,99
6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,5	10	11	11	12	12	12
7	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5
8	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,43	65	65,5	67	68	69	69
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,5	8,3	8,2	8	7,8	7,7	7,7
11	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	26,11	25,59	25,08	24,57	24,08	23,6	23,6

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	12,33	14,48	14,53	14,57	14,62	14,67	14,67
13	Opini BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15	Peranan Kategori Pertanian, Perternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	Persen	8,62	8,71	8,76	8,83	8,88	8,94	8,94
16	Produksi Padi	Ton	14.710	14.710	14.810	15.010	15.300	15.500	15.500
17	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Terhadap PDRB	Persen	30,98	31,06	32,23	32,88	33,53	33,75	33,75
18	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	9	9	10	10	11	11	11
19	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	2,48	2,67	2,79	2,84	2,88	2,93	2,93
	Aspek Pelayanan Umum								
	Pelayanan Urusan Wajib								
	Terkait Pelayanan Dasar								
	Pendidikan								



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Anak Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	N/A	50	55	60	65	70	70
	Pendidikan Dasar:								
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	110	115	120	125	130	135	135
3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	Persen	N/A	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99
4	Angka Partisipasi Murni	Persen	106	100	100	100	100	100	100
5	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	N/A	98,22	98,27	98,34	100	100	100
6	Angka Putus Sekolah	Persen	N/A	0	0	0	0	0	0
7	Angka Kelulusan	Persen	N/A	95,42	95,61	95,8	95,99	96,19	96,19
8	Angka Melanjutkan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
	Fasilitas Pendidikan								
9	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	/10.000 murid	N/A	33	33	33	34	34	34
10	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar	/10.000 murid	N/A	796,56	812,5	828,75	845,32	862,23	862,23
11	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Pendidikan Dasar	Persen	N/A	98,36	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Pendidikan menengah :								
12	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100,75	92	94	96	98	100	100
13	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	Persen	N/A	5,51	5,62	5,73	5,85	5,96	5,96
14	Angka Partisipasi Murni	Persen	72,28	75	80	85	85	90	90
15	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
16	Angka Putus Sekolah	Persen	N/A	0	0	0	0	0	0
17	Angka Kelulusan	Persen	N/A	94,01	95,89	97,81	99,77	100	100
18	Angka Melanjutkan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
19	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	/10.000 murid	N/A	33	33	33	34	34	34
20	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	/10.000 murid	N/A	947	947	947	947	947	947
21	Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah	Rasio	N/A	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
22	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Pendidikan Menengah	Persen	N/A	89,68	89,86	90,04	90,22	90,4	90,4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
23	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	N/A	94,84	95,03	95,22	95,41	95,6	95,6
24	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	Persen	N/A	78,74	78,89	79,05	79,21	79,37	79,37
25	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	N/A	99,42	99,82	99,82	100	100	100
	Kesehatan								
26	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	AKB	11	7	7	6	6	5	5
27	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	AKN	8,2	7	7	6	6	5	5
28	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	AKI	N/A	6	6	5	5	5	5
29	Rasio Posyandu per Satuan Balita	/1.000 Balita	7,31	7,31	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
30	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	/1.000 Penduduk	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
31	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	/1.000 Penduduk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
32	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	/1.000 Penduduk	0,1	0,2	1	2	3	4	4
33	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
34	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	83,74	83	84	84	84	85	85
35	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	93	95	97	99	99	99	99
36	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
37	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	94,53	95	97	99	99	99	99
38	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	N/A	0	0	0	0	0	0
39	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
40	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	12,59	13	20	30	40	50	50
41	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
42	Angka kejadian Malaria (per 100.000 Penduduk)	/100.000	0,00001	0	0	0	0	0	0
43	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0	0	0	0	0	0	0
44	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100
45	Cakupan kunjungan bayi	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
46	Cakupan Puskesmas	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
47	Cakupan pembantu Puskesmas	Persen	N/A	12,12	13,04	14,49	14,49	14,49	14,49
48	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
49	Cakupan pelayanan nifas	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
50	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
51	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
52	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Pekerjaan Umum								
53	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Rasio	0,47	0,48	0,5	0,53	0,55	0,58	0,58
54	Rasio panjang jalan per satuan penduduk	Km/1.000 Penduduk	N/A	3.194	3.160	3.127	3.094	3.062	3.062
55	Persentase jalan dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	Persen	47	48	50	53	55	58	58
56	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	N/A	30	35	40	46	51	51
57	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima dan bangunan rumah liar	Persen	N/A	3,65	3,62	3,58	3,54	3,51	3,51
58	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	89,64	89,64	89,84	90,1	90,5	91	91

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
59	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	21,51	22,76	15,93	11,15	7,81	5,47	5,47
60	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Persen	N/A	30,94	34,04	37,44	41,19	45,3	45,3
61	Rasio Jaringan Irigasi per luas lahan budidaya pertanian	Rasio	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9
62	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Persen	84,2	85	87	91	95	97	97
	Penataan Ruang								
63	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	15,46	15,46	16	16,4	16,8	17,2	17,2
64	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	N/A	70	77	81	84	86	86
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
65	Rumah layak huni	Persen	88,74	88,74	88,9	89,05	89,2	89,5	89,5
66	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,939	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,98
67	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,65	0,59	0,59	0,59	0,49	0,49	0,49

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
68	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	N/A	5,16	3,06	0	0	0	0
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
69	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	93	100	100	100	100	100	100
70	Indeks Resiko Bencana	Skala	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
71	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	N/A	86	86	86	86	86	86
72	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
73	Persentase Penegakan PERDA	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
	Sosial								
74	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	86	86	86	89	89	92	92
75	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	21	37,57	45,92	56,13	68,59	83,83	83,83



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
76	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	N/A	4,2	5,13	6,27	7,67	9,37	9,37
77	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	N/A	40	60	80	100	100	100
78	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
79	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
80	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	N/A	50	50	50	50	50	50

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Tenaga Kerja								
81	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	N/A	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
82	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	54	55	55	55	55	55	55
83	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	12	14,4	17,28	20,74	24,88	29,86	29,86
84	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	20	25	30	35	40	45	45
85	Rasio KDRT per rumah tangga	Rasio	N/A	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
86	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
87	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
88	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
89	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	N/A	93	95	97	99	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
90	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
91	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	N/A	3,26	4,88	7,32	10,99	16,48	16,48
92	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
93	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	N/A	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01
	<b>Pertanahan</b>								
94	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	58	61	63	65	67	69	69
	<b>Lingkungan Hidup</b>								
95	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
96	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
97	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
98	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	50	51	52	53	54	55	55
99	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Pelatihan	N/A	6	7	8	9	10	10
100	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
101	Timbunan sampah yang ditangani	Persen	28,08	28,08	29,1	29,5	29,85	30,2	30,2
102	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	N/A	5,01	5,46	5,89	6,32	6,71	6,71
103	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	N/A	37	39	41	43	45	45
104	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	N/A	76	77	78	79	80	80
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
105	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	N/A	1	1	1	1	1	1

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
106	Ketersediaan database kependudukan skala daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
107	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
108	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	70,78	75	85	90	95	100	100
109	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	N/A	88	96	100	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
110	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	N/A	96,97	98,48	100	100	100	100
111	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	N/A	18,06	22,22	25	27,78	30,56	30,56
112	Persentase PKK aktif	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
113	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
114	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	N/A	80	83,33	85,71	87,5	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
115	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	N/A	33,33	50	50	57,14	62,5	62,5
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
116	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	N/A	1,77	1,78	1,78	1,78	1,79	1,79
117	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	N/A	5,08	5,09	5,1	5,11	5,12	5,12
118	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	N/A	28,57	31,58	37,5	40,48	42,22	42,22
119	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	N/A	17,14	21,05	25	27,27	30,43	30,43
120	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Lembaga	N/A	5	7	15	20	23	23

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
121	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	N/A	2	2	2	2	2	2
122	Ratio Akseptor KB	Rasio	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
123	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	AKR	N/A	2,4	2,37	2,35	2,32	2,3	2,3
124	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	N/A	12,47	12,48	12,5	12,51	12,52	12,52
125	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	N/A	6,1	4,88	4,06	4,67	4,47	4,47
126	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	N/A	19,33	19,37	19,41	19,44	19,48	19,48
127	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	N/A	7,05	6,98	6,91	6,84	6,77	6,77
128	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	N/A	5,8	5,92	6,04	6,16	6,28	6,28



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
129	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	N/A	44,75	45,64	46,56	47,49	48,44	48,44
130	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	N/A	77,78	75,78	74,26	72,77	71,32	71,32
131	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
132	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	N/A	4,6	5	5	5	5	5
133	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
134	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	N/A	18,52	18,81	19,1	18,23	20	20
135	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	N/A	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01
136	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	N/A	3,29	3,29	3,28	3,28	3,31	3,31
137	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
138	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	N/A	38,36	39,13	39,91	40,71	41,52	41,52
139	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	N/A	2,24	2,47	2,72	2,99	3,29	3,29
	Perhubungan								
140	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	1039	1039	1100	1150	1150	1200	1200
141	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	3	3	3
142	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	N/A	34	35	36	37	38	38
143	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Barang per Kendaraan Umum	N/A	12	17	18	19	20	20
	Komunikasi dan Informatika								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
144	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	N/A	5	5	9	11	13	13
145	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	N/A	94,7	96,59	98,52	100	100	100
146	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	N/A	71	73	75	76	78	78
147	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	N/A	61	63	65	66	68	68
148	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	N/A	20	25	30	35	40	40
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
149	Persentase koperasi aktif	Persen	37	39	42	42	45	45	45
150	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	60	65	70	75	80	85	85
	Kepemudaan dan Olah Raga								
151	Organisasi Pemuda yang Aktif	Organisasi	48	40	50	50	60	60	60
152	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	N/A	75	80	85	90	95	95

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
153	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	N/A	22	23	23	23	24	24
	Statistik								
154	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
155	Buku "kota dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
156	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persandian								
157	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	N/A	15	30	45	60	65	65
	Kebudayaan								
158	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	N/A	2	2	2	2	2	10
	Perpustakaan								
159	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	14.090	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500	71.500
160	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	43,849	48,233	53,056	58,361	61,197	70,616	70,616

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
161	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 penduduk	0,005	0,006	0,007	0,009	0,01	0,012	0,012
162	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	7,266	7,992	8,791	9,67	10,637	11,7	11,7
163	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai besertifikat	Persen	N/A	50	60	70	80	90	90
	Kearsipan								
164	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	N/A	18,42	36,84	55,26	78,95	97,37	97,37
	Pelayanan Urusan Pilihan								
	Pariwisata								
165	Lama kunjungan Wisata	Hari	N/A	3	3	3	3	3	3
	Pertanian								
166	Cakupan bina kelompok petani	Persen	N/A	70	75	80	85	90	90
	Perdagangan								
167	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	N/A	60	65	70	75	80	80
	Perindustrian								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
168	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	N/A	66	68	69	70	72	72
	Kelautan dan Perikanan								
169	Produksi perikanan	Ton	N/A	6000	6100	6200	6300	6400	6500
170	Nilai tukar nelayan	Indeks	N/A	90	90	91	91	92	92,3
	Penunjang Urusan								
	Perencanaan Pembangunan								
171	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
172	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
173	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
174	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
175	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
176	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	80	85	100	100	100	100	100
	<b>Keuangan</b>								
177	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
178	Persentase SILPA terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
179	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah	Persen	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
180	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	16,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
181	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	21,55	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	<b>Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung</b>								
182	Belanja Tidak Langsung	Persen	43,21	43,12	43,04	42,95	42,87	42,78	42,78
183	Belanja Langsung	Persen	56,79	56,88	56,96	57,05	57,13	57,22	57,22



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
184	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
185	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
186	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	N/A	28	28	28	28	28	28
187	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	N/A	2,43	1,91	1,77	1,87	1,96	9,94
188	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	N/A	50,38	55,11	68,37	82,58	100	100
189	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	N/A	32	32	32	32	32	32
190	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	N/A	1,729	1,764	1,894	1,809	1,829	1,829

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
191	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	N/A	2,362	2,382	2,417	2,442	2,467	2,467
	Penelitian dan Pengembangan								
192	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	N/A	50	60	70	80	90	90
193	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	N/A	50	60	70	80	90	90
194	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
195	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
	Pengawasan								
196	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	N/A	72,15	75,01	78,03	80,38	83,14	83,14
197	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	N/A	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09
198	Jumlah temuan BPK	Temuan	N/A	30	28	25	25	25	25
	Sekretariat Dewan								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
199	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
200	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
201	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Aspek Daya Saing Daerah								
	Kemampuan Ekonomi								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
202	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Juta	N/A	3,38	3,44	3,51	3,58	3,65	3,65
203	Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita	Persen	N/A	0,57	0,58	0,59	0,61	0,62	0,62
204	Nilai Tukar Petani	Indeks	94,98	100	100	100	104	104	104
205	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	Persen	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
206	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Rasio per 10.000	17	16	15	14	13	14	14
207	Rasio Ketergantungan	Rasio	45	45	44	43	42	41	41

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan Kota Langsa untuk periode 5 (lima) tahun, disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sesuai dengan rentang waktu dan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil pada tahun 2022, maka dokumen ini masih dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman pada masa transisi, sambil menunggu penetapan secara definitif Walikota dan Wakil Walikota periode berikutnya.

Seluruh program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022 menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Program dan kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran dalam Renstra Perangkat Daerah bersifat indikatif yang merupakan pejabaran dari RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022

RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022 ini juga merupakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Langsa dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Langsa.

 **WALIKOTA LANGSA** 



 **USMAN ABDULLAH**